



# LAPORAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE & PETA RENCANA KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BOGOR

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I ARSITEKTUR LAYANAN</b>	<b>4</b>
A. 7	
B. Kondisi yang Diharapkan	406
C. Detail Kondisi yang Diinginkan	423
D. Peta Jalan Arsitektur Layanan SPBE	429
<b>BAB II ARSITEKTUR PROSES BISNIS</b>	<b>432</b>
A. 432	
B. 437	
C. Analisis Gap dan Rekomendasi	463
D. Roadmap Arsitektur Proses Bisnis Target	468
<b>BAB III ARSITEKTUR APLIKASI</b>	<b>470</b>
A. 470	
A.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi	471
A.2 Posisi Arsitektur Aplikasi dan Keterkaitan Antar Domain	473
A.3. Metadata Aplikasi SPBE	476
B. Arsitektur Aplikasi Saat Ini	477
B.1. Pemetaan aplikasi terhadap proses bisnis	478
B.2 Pemetaan aplikasi disesuaikan dengan taksonomi aplikasi	483
B.3 Pemetaan aplikasi berdasarkan unit kerja	485
B.4 Pemetaan aplikasi berdasarkan layanan	488
C. Arsitektur Aplikasi Target	493
C.1 Rekomendasi	493
D. Arsitektur Aplikasi Usulan	494
E. Analisis Gap	496
F. Metadata Aplikasi	497
G. Integrasi Aplikasi	514
H. Roadmap	515
<b>BAB IV ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI</b>	<b>518</b>
A. 518	
A1. Arsitektur Data dan Informasi As-Is	518
A2. Arsitektur Data dan Informasi To-Be	550
B. 572	
C. 578	

**BAB V ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR**

**590**

- A. 590
- B. 595
- C. 611
- D. 617
- E. 622
- F. 627

**BAB VI ARSITEKTUR KEAMANAN**

**630**

- A. 630
- B. 639
  - B.1 Domain Keamanan (Tingkat 1) 639
  - B.2 Area Keamanan (Tingkat 2) 642
- C. 643
- D. 654

## **BAB I**

### **ARSITEKTUR LAYANAN**

Salah satu kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor saat ini, selain terdapat beberapa layanan aplikasi dan dukungan infrastruktur teknologi, Pemerintah Kota Bogor juga telah memiliki standar layanan yang diatur berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Di dalam KepWali tersebut terdapat deskripsi terkait layanan yang ada di Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Standar pelayanan merupakan implementasi dari strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi instansi daerah.

Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kategori pelayanan dalam standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor meliputi:

- a. Data dan informasi;
- b. Konsultasi;
- c. Audiensi;
- d. Sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- e. Penataan organisasi;
- f. Penetapan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara;
- g. Pengaduan pelayanan publik;
- h. Layanan perpustakaan;
- i. Penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah;
- j. Penetapan kelas jabatan;
- k. Penetapan jabatan fungsional;

- l. Penetapan hari dan jam kerja instansi Pemerintah;
- m. Penetapan pakaian dinas instansi Pemerintah;
- n. Pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. Penetapan tunjangan jabatan fungsional; dan
- p. Penetapan hak keuangan pimpinan/ anggota lembaga non struktural.

Sementara, penerapan dari setiap kategori pelayanan tersebut melibatkan dan menjadi tanggung jawab dari setiap unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yaitu:

1. A: Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas);
2. B: Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah ;
3. C: Sekretariat Daerah;
4. D: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
5. E: Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pemetaan dari setiap kategori pelayanan di lingkungan Kota Bogor dan penanggung jawabnya, seperti dapat dilihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pemetaan Kategori Layanan Pemerintah Kota Bogor terhadap Penanggung Jawab

Penanggung Jawab	A	B	C	D	E
Kategori Layanan					
Data dan Informasi					✓
Konsultasi	✓				
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bogor	✓				
Penataan Organisasi	✓				

Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara			✓		
Pengaduan Pelayanan Publik				✓	
Layanan Perpustakaan					✓
Penetapan Tunjangan Kinerja Instansi Pemerintah	✓				✓
Penetapan Kelas Jabatan		✓			
Penetapan Jabatan Fungsional				✓	
Penetapan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah				✓	
Penetapan Pakaian Dinas Instansi Pemerintah			✓		
Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah			✓		
Penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional			✓		
Penetapan Hak Keuangan Pimpinan/Anggota Lembaga Non Struktural				✓	

\* Keterangan: ✓ adalah penanggung jawab layanan

Di dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, standar pelayanan dari setiap kategori layanan yang ada telah didefinisikan secara rinci untuk diterapkan di Pemerintah Kota Bogor, terdiri dari:

1. Komponen Penyampaian Layanan, terdiri dari (a) Persyaratan; (b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (c) Jangka Waktu Pelayanan; (d) Biaya/Tarif; (e) Produk Layanan; (f) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi;

2. Komponen Pengelolaan Layanan, terdiri dari (a) Dasar Hukum; (b) Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas; (c) Kompetensi Pelaksana; (d) Pengawasan Internal; (e) Jumlah Pelaksana; (f) Jaminan Pelayanan; (g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; (h) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

### A. Inisiatif Strategis Layanan SPBE

Inisiatif Strategis SPBE adalah pedoman umum terhadap pelaksanaan SPBE dan merupakan uraian lebih rinci dari Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan Kota Bogor untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Nasional. Dalam konteks layanan SPBE, inisiatif strategis dikembangkan untuk mewujudkan sasaran layanan SPBE sebagai turunan dari sasaran SPBE secara menyeluruh, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1.Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

Inisiatif sasaran strategis layanan SPBE terdiri dari daftar pekerjaan solusi berupa layanan aplikasi pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Daftar pekerjaan solusi adalah kumpulan kapabilitas yang akan datang, yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE dan dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE. Daftar pekerjaan solusi juga merupakan bagian dari elemen Inisiatif Strategis SPBE, yang mengindikasikan inisiatif strategis bagian dari Layanan

Aplikasi Pemerintah. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan layanan yang akan datang, perlu diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE.

## 1. Pemetaan Layanan

Berdasarkan arahan Keputusan Walikota Bogor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemkot Bogor telah melakukan pemodelan Visi dan Misi seperti tampak pada Gambar 1. Dan penjelasan Peta Proses Bisnis pada Gambar 2, Pemkot Bogor memetakan 5 (lima) Proses Utama, 5 (lima) Proses Pendukung dan 6 (satu) Sistem Manajerial pada gambar 2, 3 dan 4. Dan gambaran Peta proses bisnis utama Kota Bogor pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

BKT-01	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-02	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter
BKT-03	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani
BKT-04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
BKT-05	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Gambar 1.3. Proses Utama

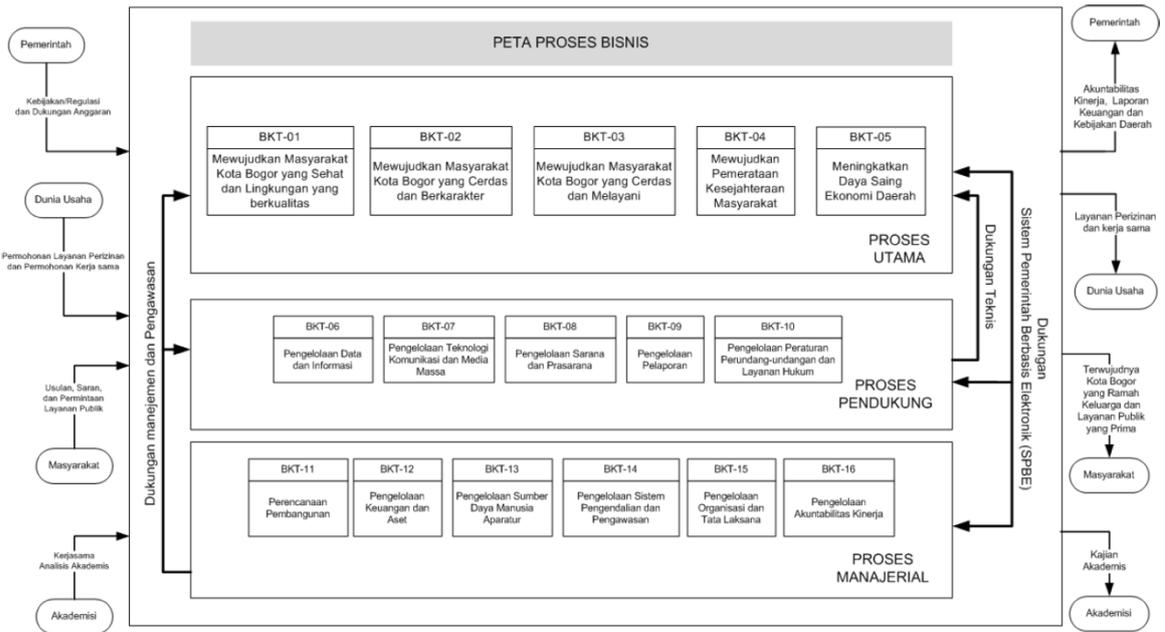
BKT-06	Pengelolaan Data dan Informasi
BKT-07	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
BKT-08	Pengelolaan Saran dan Prasarana
BKT-09	Pengelolaan Pelaporan
BKT-10	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

Gambar 1.4. Proses Pendukung

BKT-11	Perencanaan Pembangunan
BKT-12	Pengelolaan Keuangan dan Aset
BKT-13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
BKT-14	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
BKT-15	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
BKT-16	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Gambar 1.5 Proses Manajerial

Peta Proses Bisnis Utama



Gambar 1.6. Peta Proses Bisnis Utama

Tabel 1.2 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintahan Kota Bogor

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
BKT-01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyusunan Perbup Kependudukan	Bagian Hukum Setda	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyusunan Grand Design Kependudukan	Bappeda	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Parameter Kependudukan	DPPKB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Parameter Kependudukan	DPPKB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Parameter Kependudukan	DPPKB	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Parameter Kependudukan	DPPKB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyaluran Obat	DPPKB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyuluhan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Sarana Kb	BKKBN	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Publik

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyaluran Obat	Fasilitas Kesehatan Pratama	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pelayanan Akseptor	Satuan Pelayanan KB dan Faskes	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pratama	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Konseling	Kelompok Remaja	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan Kampung	Desa	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelayanan Pasif (Pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					dimana pemilik hewan membawa hewan ke Puskesmas)		
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyediaan Statistik Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDCK pupuk bersubsidi	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	ijin edar Produk Segar Asal Tumbuhan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Masyarakat				(PSAT)		
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Toko Tani Indonesia (TTI)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekom Ijin Perumahan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan( SK P)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) 2021	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Layanan aktif kesehatan masyarakat veteriner	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekomendasi Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekomendasi Produk Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Rekomendasi NKV	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Layanan Inseminasi Buatan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Pemotongan Hewan (sapi, kerbau)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Pemotongan Unggas	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila, gurame, lele, mas, tawes)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelayanan Aktif (pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan di tempat pemilik ternak)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila, gurame, lele, mas, tawes)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pengawasan, pencatataan sarana, prasarana dan alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan pelaporan data KIA	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	layanan Pelaporan gizi	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Informasi Kesehatan Daerah	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Penanggulangan AKI-AKB	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pemantauan Kesehatan di	Dinas Kesehatan (Bidang Sumber Daya Kesehatan)	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Sehat				Tempat-tempat Umum		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pencatatan Pengelolaan Tempat Pengolahan Makanan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Verifikasi Kabupaten Kota sehat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Kegawat daruratan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Sehat				Kesehatan Masyarakat		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pengawasan izin pangan rumah tangga	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pengawasan apotik	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Pencatatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19,	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					update kesembuhan dan kematian kasus Covid-19		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Sistem Informasi Imunisasi Kota Bogor	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Sistem Informasi Pencatatan & Pelaporan Kasus Potensial KLB / Wabah	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Informasi penyakit Diare	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Informasi Penyakit HIV/AIDS	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Informasi penyakit	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Sehat				Demam Berdarah Dengue		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan informasi Pencatatan pelaksanaan promosi kesehatan	Dikes (Bidang Kesehatan Masyarakat)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Farmasi	Bidang Penunjang Medik	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Penunjang	Bidang Penunjang Medik	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Administrasi	Bidang Pelayanan	PUBLIK

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Sehat						
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Kamar Operasi	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Kamar Bersalin	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Perinatologi	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan	Bidang Keperawatan	PUBLIK

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik		Intensif		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Keperawatan Rawat Inap Isolasi	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Rekam Medis	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Rawat Inap	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Rawat Inap Intensif	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Rawat Jalan	Bidang Pelayanan	PUBLIK

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik		Spesialis		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Rawat Inap Isolasi	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Gawat Darurat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan Kamar Operasi	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pelayanan PONEK	Bidang Pelayanan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Laboratorium	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Radiologi	Bidang Penunjang	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik				
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Farmasi Rawat Inap	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Farmasi Rawat Jalan	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Gizi Konsultasi Gizi (Rawat Jalan & Rawat Inap)	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan CSSI	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Anestesi	Bidang Penunjang	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.25 Kesehatan	Layanan Rehab Medik	Bidang Penunjang	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik				
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Billing System (Pembayaran pasien)	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pendaftaran khusus pasien lama online	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Skrining pengunjung rsud	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pendaftaran vaksin di rsud	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	ERM khusus pasien radiologi khusus dokter radiologi	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.25 Kesehatan	Sistem informasi manajemen	Bidang Keuangan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik		rumah sakit (internal petugas rs)		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	mutu, kinerja, skp khusus perawat	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Pendaftaran pasien baru	Bidang Keuangan	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Informasi Penyelenggaraa n Kompetisi Olahraga yang diikuti oleh Satuan Pendidikan Dasar	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Lembaga Olahraga		
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Informasi Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-01.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Informasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perilaku Bersih dan Sehat		Publik		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan	Adpem
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Bidang permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tidak mempunyai daftar pemetaan layanan	Bidang Pemukiman	Publik
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Verifikasi Perhitungan Konstruksi	Bidang Tata Bangunan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Perumahan dan Permukiman						
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Bogor	Bidang Tata Bangunan	Adpem
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Penyelenggaraa n SLF	DISRUMKIM Bidang Tata Bangunan	Publik
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Layanan Pengadaan Lahan	DISRUMKIM Bidang Pertanahan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Layanan Retribusi Rusunawa	UPT Rusunawa	Publik
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Layanan Token Listrik Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Publik
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Publik
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Layanan penyediaan lahan makam	UPT Pemakaman	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	Pelayanan Mobil jenazah	UPT Pemakaman	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Dokumen KLHS RDTR	Bidang Tata Lingkungan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH RPJMD	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Indeks Kualitas Air	Bidang PPKH	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Indeks Kualitas Udara	Bidang PPKH	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Bidang PPKH	Publik

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Penghentian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kehati	Bidang PPKH	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang PPL	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pengawasan Kegiatan pada Pelaku Usaha	Bidang PPL	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Kegiatan Kampanye Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Bidang PPL	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Penyelesaian Sengketa	Bidang PPL	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Verifikasi Lapangan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengurangan Sampah	Bidang Kebersihan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Penanganan Sampah	Bidang Kebersihan	Publik

<b>Proses Utama</b>	<b>Sub Proses</b>	<b>Metode Layanan</b>	<b>Domain Layanan</b>	<b>Area Layanan</b>	<b>Kategori Layanan</b>	<b>Unit Pelaksana Layanan</b>	<b>Target Layanan</b>
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Publik
	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Publik
	BKT-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bidang PPKH	Publik
	BKT-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Informasi Sarana dan Prasarana Kehati	Bidang PPKH	Publik
BKT-02 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi BOS SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
Berkarakter	Formal ( <i>Smart People</i> )						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		Program Indonesia Pintar jenjang SD		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart</i>	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	<i>People)</i>						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi BOS SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi PPDB	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		Online jenjang SMP		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart</i>	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	<i>People)</i>						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		jenjang SMP		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi BOP PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart</i>	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	<i>People)</i>						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi	Bidang PAUD DIKMAS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		Perbaikan Data Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart</i>	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	<i>People)</i>						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Rekomendasi	Bidang PAUD DIKMAS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		Mutasi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart</i>	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Nomor Unik Pendidik tenaga kependidikan (NUPTK)	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	<i>People)</i>						
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Pembuatan SK Dinas untuk GTK Non PNS	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )		Publik		Nomor Pokok Sekolah Nasional jenjang Pendidikan Dasar		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Formal ( <i>Smart People</i> )				Pendidikan Kesetaraan		
	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Wirausaha Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pemenuhan Hak Anak	Bidang Kepemudaan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Muda						
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Layanan Peminjaman Sumber Belajar	Bidang Perpustakaan	Publik
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	System Information Management	Bidang Perpustakaan	Adpem
	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	Portal Pernaskahan Nusantara	Bidang Perpustakaan	Publik
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan tentang penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka	Bidang PPEPD	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					menengah, serta untuk melakukan analisis data dan informasi pemerintahan		
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi tentang Pemerintahan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah	Bidang PPEPD	Adpem
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan/realisasi	Bidang PPEPD	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					program/kegiatan/subkegiatan sesuai perencanaan yang ada dalam satu tahun anggaran		
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka mendukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang PPEPD	Adpem
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan	Bidang PPEPD	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	Bidang PPEPD	Adpem
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka menengah sektoral, serta untuk melakukan analisis data dan informasi pemerintahan	Bidang PPEPD	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					sektor Infrastruktur dan Kewilayahan, sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam, serta Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka dokumen kebijakan dan rencana pada sektor Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan	Bidang PPEPD	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					dan pengkajian peraturan, Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan, Pengembangan Inovasi dan teknologi		
	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka memberikan dukungan untuk Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)	Bidang PPEPD	Adpem
	BKT-02.4 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.27 Pemberdayaa	Layanan Penyajian data	Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat		Publik	n Perempuan	Gender dan Anak		
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaa n Perempuan	Layanan Pencegahan Kekerasan Perempuan	Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaa n Perempuan	Layanan Penanganan Perlindungan Perempuan	Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Adpem
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaa n Perempuan	Layanan Data Gender dan Anak	Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Masyarakat						
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Pelaporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan penanganan aksi unras	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.29 Keamanan	Layanan pendataan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat		Publik		linmas inti		
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Diklat PPPNS dan TRC	Bidang Sumber Daya Aparatur	Adpem
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Masyarakat						
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan rehabilitasi 5 lokasi TMP/ 2 monumen	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemeliharaan 5 lokasi TMP/2 monumen	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan	Elektronik	RAL.02 Layanan	RAL.02.06 Dukungan	Layanan Hibah Bantuan kepada	Bidang Kesatuan Bangsa	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat		Administrasi Pemerintahan	Operasional Organisasi	Lembaga Mandatori dan Ormas		
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pendataan Ormas Kota Bogor, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Pengaduan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Publik
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Layanan Bantuan Keuangan Parpol	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat						
	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	Pendaftaran Rekomendasi Penelitian, Magang dan PKL	Sekretariat	Publik
BKT-03 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kearsipan Dinamis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kearsipan Statis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Informasi Arsip Dinamis (JIKN)	Bidang Kearsipan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Pemerintahan		dan Statis Secara Nasional (SIKN)		
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Usul Musnah	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Restorasi Arsip	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Akuisisi Arsip	Bidang Kearsipan	Publik
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Digitalisasi Arsip	Bidang Kearsipan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Efektif, Efisien dan Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Subanglarang	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Subanglarang	Bidang Kearsipan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan	Data SIAK Terpusat	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Anak		
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan, Perekaman, Pengolahan, Dan Pemutakhiran Data	Data SIAK Terpusat	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penyediaan Jaringan, Peralatan, dan Sistem Informasi serta Hak Akses Aplikasi	Data SIAK Terpusat	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, SKPWNI, SKDWNI, Surat Datang dari Luar Negeri, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan	Data SIAK Terpusat	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Tempat Tinggal		
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Manajemen Data Mandiri	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Publik
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Pelayanan Sistem informasi Manageman ASN (SIM ASN)	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Publik
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Rekonsiliasi Data PNS	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Publik
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Peremajaan Data	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Pelayanan Pemberhentian dan Pensiun (BUP/APS/UZUR )	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Pelayanan penerbitan SK pensiun janda/duda, bagi pns yang masih aktif	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis), Taspen	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan ASN dan PPPK	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Efektif, Efisien dan Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Layanan penyusunan Peraturan daerah	Persidangan dan Perundang-undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan	Publik
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Penganggaran	Bidang Anggaran	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi	Bidang Akuntansi	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Gaji PNSD	BPKAD (Bidang Perbendaharaan)	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, BTT dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang Perbendaharaan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan terkait verifikasi LHKASN dan penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Adpem
	BKT-03.1 Menciptakan	Elektronik	RAL.02 Layanan	RAL.02.04 Aparatur	Layanan terkait MCP KPK dan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Administrasi Pemerintahan	Negara	Pengendalian Gratifikasi		
	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan terkait Survei Penilaian Integritas	Sub Bagian Perencanaan	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Pendaftaran Domain	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Pelaksanaan dan Pengawasan Domain	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Bidang Aptika	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Pemerintahan	Pemerintahan			
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan e-Government	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan kebijakan SPBE	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan GCIO	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Monev dan Pelaporan SPBE	Bidang Aptika	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Efektif, Efisien dan Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Sistem Keamanan Informasi	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Data dan Informasi Elektronik	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Aplikasi Perangkat Daerah	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Command Center	Bidang Aptika	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Server Perangkat Daerah	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Perangkat Jaringan dan Komunikasi	Bidang Aptika	Adpem & Publik
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Bidang Aptika	Adpem & Publik
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Smart City	Bidang Aptika	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Wifi Gratis di tempat publik	Bidang Aptika	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (VAPT)	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan Security Awareness	Bidang Persandian	Adpem & Publik
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan Monitoring Security Operation Center (SOC)	Bidang Persandian	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan CSIRT	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	Bidang Persandian	Adpem dan Publik
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan aplikasi Sistem Penghubung Layanan (SPL) untuk Tanda Tangan Elektronik	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pengelolaan aplikasi Dashboard Security	Bidang Persandian	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Efektif, Efisien dan Akuntabel				Assesment (DSA)		
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	penyusunan tata kelola di bidang persandian dan keamanan informasi	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pelaksanaan Uji Kesesuaian Sistem (UKS)	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Pemenuhan dan Pengisian mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan e-Mail melalui aplikasi Sanapati	Bidang Persandian	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Statistik email melalui website pemkot	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Publikasi Data	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Pengembangan Infrastruktur	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Membangun Metadata	Bidang Persandian	

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Akuntabel						
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Peningkatan Kelembagaan	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Bidang Persandian	Adpem
	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan Penyelenggaraan Otorisasi	Bidang Persandian	Adpem
BKT-04 Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi pada Sektor Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Informasi Kepariwisata dan Kebudayaan	Bidang Pemasaran	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Pemberian Alat Kesenian Kepada Seniman	Bidang Kebudayaan	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Pemberian Penghargaan / Uang Kadedeuh Kepada Seniman dan Budayawan	Bidang Kebudayaan	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Pelatihan Seni Budaya	Bidang Kebudayaan	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Digitalisasi Sejarah	Disparbud Bidang Kebudayaan	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Pembinaan dan Pemberian Honorarium Juru Pelihara Situs	Bidang Kebudayaan	Publik
	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.15 Pariwisata	Informasi obyek wisata dan	Bidang Destinasi Pariwisata	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pengangguran		Publik		Monitoring tiket Obyek Wisata		
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Terlantar di Luar Panti melalui LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Pemantauan anak-anak terlantar pada LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pendataan DTKS bagi Fakir Miskin dan layanan pendataan 26 PPKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Pendataan PPKS pada Sistem layanan rujukan terpadu	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemberian pendampingan dan pemulangan warga negara migran yang bermasalah	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					pengumpulan uang atau barang		
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pembinaan bagi seluruh anggota TKSK	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pembinaan bagi orsos dan Karang Taruna	Bidang Pemberdayaan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pendampingan psikososial bagi anak dan keluarga korban tindak kekerasan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemberian makanan bagi	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan pemberian alat bantu bagi Disabilitas terlantar di luar	Bidang Rehabilitasi Sosial	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					panti		
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan bimbingan sosial bagi keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Pengemis dan Masyarakat		
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan data dan pengaduan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan kedaruratan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan rujukan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan kerjasama antar lembaga atau MOU	Bidang Rehabilitasi Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adpem
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan sosialisasi kampung siaga bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	layanan koordinasi dan sosialisasi tagana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Sosialisasi, Komunikasi,	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Setiap Desa/Kelurahan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Bantuan Stimulan Bagi Korban Bencana dan Penyusun Dokumen JITUPASNA	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.40 Lingkungan	Layanan Pengembangan	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pengangguran		Publik	Hidup	Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Adpem
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Adpem
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pelatihan Pemuda Siaga Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Adpem
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Diklat Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik
	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Publik
BKT-05 Meningkatkan Daya Saing	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan	Bidang Pengawasan Koperasi	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
Ekonomi Daerah	Ekonomi				Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Bidang Pengawasan Koperasi	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Penyusunan Kebijakan Daerah mengenai Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Data Peta Potensi	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Pertumbuhan Ekonomi		Publik				
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Data Peluang Usaha Kabupaten Kota	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Penanaman Modal		
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pembinaan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Kementrian Investasi/BKPM) - OSS	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Perizinan (Milik Daerah) - SITETEH	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung - SIMBG	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem pusat	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					(kementrian investasi/BKPM)		
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem daerah	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Pelayanan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah		Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pengembangan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelompok Sub Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Publik, Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelompok Sub Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pendataan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Kelompok Sub Substansi Pendataan Pajak Daerah	Adpem/khusus hanya Cek PBB online (Publik)
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
						Sistem Informasi	
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Penetapan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pelayanan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan terkait Pengembangan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan	Elektronik	RAL.01 Layanan	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pembinaan Lembaga	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Publik	an	Pelatihan Kerja Swasta		
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pelayanan antar Kerja	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Perluasan Kesempatan Kerja	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	mendukung Pertumbuhan Ekonomi						
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Job Fair/Bursa Kerja	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	"Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota "		
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Kabupaten/Kota		
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan	Adpem
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan data jalan dan jembatan	Bidang Tata Ruang	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Informasi Kesesuaian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	Internal
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Konstruksi	Publik
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Non Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Bidang Bina Konstruksi	Publik
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Sewa Alat Berat	UPT Peralatan dan Perbengkelan	Publik, Internal

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Sedot WC Aman Dan Terjadwal	UPT Pengelolaan Limbah Terpadu	Publik, Internal
	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Pengujian Kendaraan bermotor	DISHUB (UPTD PKB)	Publik
	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	TILANG	DISHUB (Bidang Lalu Lintas)	Publik
	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Pengawasan lalulintas jalan	DISHUB (Bidang Lalu Lintas)	Adpem

## 2. Analisis Kesenjangan

Berdasarkan hasil pemetaan layanan Pemerintah Kota Bogor terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa sebagian besar proses bisnis pada telah menggunakan sistem berbasis elektronik, namun masih terdapat beberapa proses bisnis perlu peningkatan optimalisasi dukungan menggunakan aplikasi terintegrasi. Secara umum, pada proses utama (BKT-01 sampai dengan BKT-05), proses pendukung (BKT-6 sampai dengan BKT-10) dan sistem manajemen (BKT-11 sampai dengan BKT-16) sudah banyak memiliki dukungan layanan, namun terdapat beberapa layanan yang memiliki kesamaan baik pada proses utama, pendukung dan sistem manajerial.

Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan untuk penyelarasan dengan kebutuhan pengembangan Arsitektur Layanan SPBE. Pemerintah Kota Bogor memiliki sistem pendukung berupa kelompok aplikasi yang difungsikan secara terpisah. Sistem dan aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan oleh lebih dari satu pengembang, yang meliputi internal maupun oleh pengembang pihak ketiga. Aktivitas pengembangannya dibuat atas dasar kebutuhan atau permintaan masing-masing unit kerja, sehingga dampak yang terjadi sistem dan aplikasi tersebut dibuat dalam berbagai platform, dan belum memiliki sistem penghubung layanan yang berfungsi untuk komunikasi dan interaksi antar aplikasi baik dalam pertukaran data maupun layanan. Keadaan ini menjadikan berbagai sistem tersebut berdiri sendiri (stovepipe), sehingga layanan yang diberikan untuk fungsionalitas setiap unit kerja belum sepenuhnya terintegrasi. Pengguna layanan harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan prosedur dan validasi yang harus dilakukan beberapa kali.

Selain itu, dari data layanan yang ada saat ini, diperlukan pengelompokan yang berupa kodefikasi layanan berdasarkan kategori, tujuan dan fungsinya menjadi sub kategori untuk kebutuhan metadata layanan Pemerintah Kota Bogor. Sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 4 IPPD perlu didefinisikan dengan cara mengurai unsur kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 IPPD secara lebih rinci. Pendefinisian sub kategori layanan ini dapat dilakukan dengan menetapkan dukungan kinerjanya dan

penurunan hambatanya (*utility*), serta pendefinisian komponen asetnya (*service assets*). Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui pengklasifikasian layanan untuk menetapkan metadata dan tipe layanan Pemerintah Kota Bogor yang dapat memenuhi seluruh fungsi yang ada di organisasi secara terintegrasi. Penetapan model ini akan dibahas pada bagian metadata dan tipe layanan dalam laporan ini.

Tabel 1.3. Keadaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Utama Pemerintah Kota Bogor

Proses Bisnis	No .	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
BKT-01	1	BKT-01.1	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	2	BKT-01.2	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	3	BKT-01.3	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	4	BKT-01.4	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	5	BKT-01.5	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
BKT-02	1	BKT-02.1	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	2	BKT-02.2	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	3	BKT-02.3	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	4	BKT-2.4	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
BKT-03	1	BKT-03.1	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	2	BKT-03.2	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
BKT-04	1	BKT-04.1	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	2	BKT-04.2	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	3	BKT-04.3	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
BKT-05	1	BKT-05.1	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	2	BKT-05.2	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green
	3	BKT-05.3	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Green


 Perlu Optimalisasi  
 Perlu Optimalisasi  
 Perlu Optimalisasi

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka dapat disimpulkan pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas ke depan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Pemerintah Kota Bogor adalah:

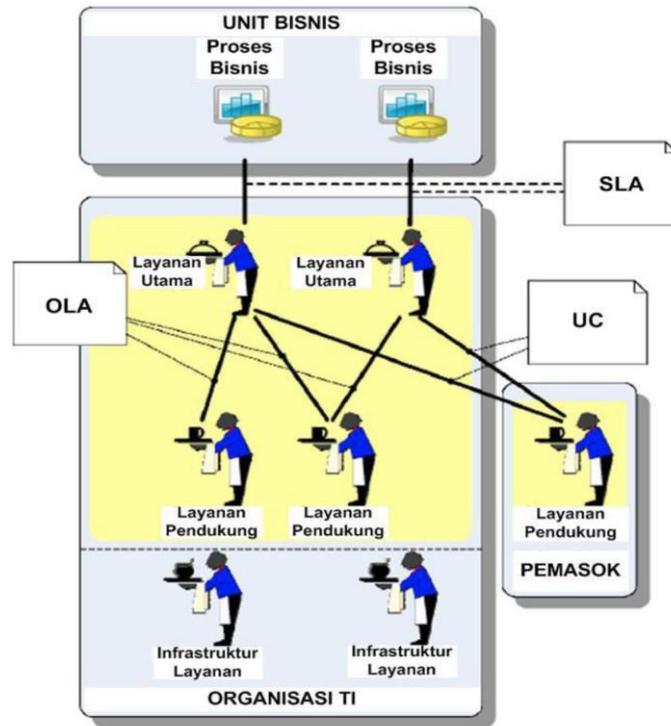
1. Perlu dirancang penyediaan layanan untuk perumusan kebijakan sebagai area layanan dukungan operasional organisasi dan area layanan lainnya yang relevan.
2. Pemerintah Kota Bogor sebaiknya membuka layanan helpdesk yang bertugas untuk memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan dari seluruh instansi yang sedang melaksanakan kegiatan.
3. Pemenuhan kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 referensi arsitektur SPBE tingkat IPPD, dapat diidentifikasi melalui penetapan dukungan kinerja dan penurunan hambatan (*utility*), serta pengelolaan tingkat layanan (*warranty*), termasuk kebutuhan komponen asetnya (*service assets*).
4. Setiap ragam layanan yang ada pada proses utama dan pendukung, perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses evaluasi terhadap layanan Kota Bogor yang didukung oleh sistem secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Selain itu, juga dapat menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi berdasarkan domain proses bisnisnya masing-masing, serta perlunya ketersediaan sistem perbaikan versi layanan untuk kebutuhan layanan masa depan.

### **3. Metadata dan Tipe Layanan**

Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem yang ada di lingkungan Kota Bogor untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan diwujudkan dengan cara pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan. Bentuk konkritnya berupa klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Kota Bogor untuk mendefinisikan hasil

berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Target dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terealisasinya Visi, Misi SPBE, arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda, seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE yang masih abstrak kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Dalam konteks penyediaan layanan di Kota Bogor, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis Layanan SPBE. Berdasarkan pemetaan unsur organisasi secara rinci dan menyeluruh, fungsi dan proses bisnis Kota Bogor diklasifikasikan seperti terlihat pada Gambar 3. Proses klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan utility bagi penyediaan layanan, serta dukungan terhadap customer assets dan penyebaran *service assets*.



Gambar 1.6. Klasifikasi Layanan Kota Bogor

Berdasarkan proses klasifikasi tersebut, dapat teridentifikasi layanan yang harus disediakan untuk setiap proses bisnis di dalam setiap unit bisnis Kota Bogor. Metode klasifikasi ini juga digunakan untuk penetapan service level agreements (SLA), operational level agreements (OLA) dan underpinning contract (UC) untuk pengelolaan tingkat layanan (warranty). Setiap layanan yang teridentifikasi ditetapkan dukungan kinerjanya atau penurunan hambatannya (utility) melalui penetapan kategori dan sub kategori layanan, serta komponen lainnya (service assets). Setiap service assets berupa aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, beserta rincian setiap komponennya akan dibahas pada Bab selanjutnya laporan ini. Penetapan metadata dan tipe layanan di lingkungan Kota Bogor didefinisikan berdasarkan klasifikasi dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat:

Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional. Area Layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Kategori Layanan menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD (Kota Bogor) sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga).

Sub Kategori Layanan menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD (Kota Bogor) pada tingkatan struktur ini dapat menyusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibuat kodifikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional. Rekomendasi kodifikasi layanan Kota Bogor sebagai penamaan konfigurasi layanan SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel 3 menunjukkan metadata layanan Kota Bogor berdasarkan tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE. Entitas metadata ini berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE Kota Bogor berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 1.4. Metadata Layanan Kota Bogor

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.0 1	Layanan Pengawasan Obat dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.0 2	Layanan Pengawasan, pencatatan sarana, prasarana dan alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.25.02.0 3	Layanan pelaporan data KIA	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.06 Pengendalian Penyakit
BKT-DAL.01.25.02.0 4	layanan Pelaporan gizi	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.0 5	Layanan Informasi Kesehatan Daerah	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.06	Layanan Penanggulangan AKI- AKB	Bidang Kesehatan masyarakat	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.07	Layanan Pemantauan Kesehatan di Tempat-tempat Umum	Dinas Kesehatan (Bidang Sumber Daya Kesehatan)	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.0 8	Layanan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.0 9	Layanan Pencatatan Pengelolaan Tempat Pengolahan Makanan	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 0	Layanan Verifikasi Kabupaten Kota sehat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 1	Layanan Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 2	Layanan Kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.1 3	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 4	Layanan Pengawasan izin pangan rumah tangga	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 5	Layanan Pengawasan apotik	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.1 6	Layanan Pencatatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.1 7	Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	m Covid-19, update kesembuhan dan kematian kasus Covid- 19								
BKT- DAL.01.25.02.1 8	Layanan Sistem Informasi Imunisasi Kota Bogor	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.1 9	Layanan Sistem Informasi	Dinkes (Bidang Pencegahan dan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pencatatan & Pelaporan Kasus Potensial KLB / Wabah	Pengendalian Penyakit)				Perilaku Bersih dan Sehat			n Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.2 0	Layanan Informasi penyakit Diare	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.2 1	Layanan Informasi Penyakit HIV/AIDS	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan n

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.2 2	Layanan Informasi penyakit Demam Berdarah Dengue	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.2 3	Layanan informasi Pencatatan pelaksanaan promosi kesehatan	Dikes (Bidang Kesehatan Masyarakat)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.2 4	Layanan Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.2 5	Layanan Farmasi	Bidang Penunjang Medik	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.2 6	Layanan Penunjang	Bidang Penunjang Medik	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.2 7	Layanan Administrasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.2 8	Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.2 9	Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.3 0	Pelayanan Keperawatan Kamar Operasi	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.3 1	Pelayanan Keperawatan Kamar Bersalin	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.3 2	Pelayanan Keperawatan Perinatologi	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.3 3	Pelayanan Keperawatan Intensif	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.3 4	Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.3 5	Pelayanan Keperawatan Rawat Inap Isolasi	Bidang Keperawatan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.3 6	Pelayanan Rekam Medis	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.3 7	Pelayanan Rawat Inap	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.3 8	Pelayanan Rawat Inap Intensif	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.3 9	Pelayanan Rawat Jalan Spesialis	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.4 0	Pelayanan Rawat Inap Isolasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.4 1	Pelayanan Gawat Darurat	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 2	Pelayanan Kamar Operasi	Bidang Pelayanan	Kesehatan	PUBLIK	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 3	Pelayanan PONEK	Bidang Pelayanan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.25.02.4 4	Layanan Laboratorium	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 5	Layanan Radiologi	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 6	Layanan Farmasi Rawat Inap	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 7	Layanan Farmasi Rawat Jalan	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.4 8	Layanan Gizi Konsultasi Gizi (Rawat Jalan & Rawat Inap)	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.4 9	Layanan CSSI	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.5 0	Layanan Anestesi	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.25.02.5 1	Layanan Rehab Medik	Bidang Penunjang	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 2	Billing System (Pembayaran pasien)	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 3	Pendaftaran khusus pasien lama online	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.25.02.5 4	Skrining pengunjung rsud	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 5	Pendaftaran vaksin di rsud	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 6	ERM khusus pasien radiologi khusus	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dokter radiologi								Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 7	Sistem informasi manajemen rumah sakit (internal petugas rs)	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT-DAL.01.25.02.5 8	mutu, kinerja, skp khusus perawat	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.25.02.5 9	Pendaftaran pasien baru	Bidang Keuangan	Kesehatan	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
BKT- DAL.01.23.01.0 1	Penyusunan Perbup Kependudukan	Bagian Hukum Setda	Hukum	Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
BKT- DAL.01.23.02.0 1	Penyusunan Grand Design Kependudukan	Bappeda	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.02.0 2	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.0 3	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.0 4	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.02.0 5	Parameter Kependudukan	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.0 6	Penyaluran Obat	DPPKB	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.0 7	Penyuluhan	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.23.02.08	Pembinaan	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT-DAL.01.23.02.09	Sarana Kb	BKKBN	Keluarga Berencana	Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT-DAL.01.23.02.10	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.02.1 1	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.1 2	Penyaluran Obat	Fasilitas Kesehatan Pratama	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.1 3	Pelayanan Akseptor	Satuan Pelayanan KB dan Faskes	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.02.1 4	Pembinaan Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pratama	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.1 5	Konseling	Kelompok Remaja	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.1 6	Pebinaan Kampung	Desa	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.23.02.1 7	Pembinaan Kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT-DAL.01.23.02.1 8	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT-DAL.01.23.02.1 9	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.02.2 0	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.23.02.2 1	Pelatihan kader	Satuan Pelayanan KB	Keluarga Berencana	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan
BKT- DAL.01.07.02.0 1	Pelayanan Pasif (Pelayanan Kesehatan hewan yang dilakukan	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dimana pemilik hewan membawa hewan ke Puskesmas)								
BKT-DAL.01.07.02.0 2	Penyediaan Statistik Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT-DAL.01.07.02.0 3	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.0 4	Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK pupuk bersubsidi	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.0 5	ijin edar Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.0 6	Toko Tani Indonesia (TTI)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.0 7	Rekom Ijin Perumahan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.0 8	Rekomenda si Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.0 9	Rekomenda si Sertifikat Kelayakan Pengolahan( SKP)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektron ik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahana n Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 0	Setifikat Good Manufacturi ng Practise (GMP) 2021	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektron ik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahana n Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 1	statistik Perikanan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektron ik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahana n Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.1 2	Layanan aktif kesehatan masyarakat veteriner	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 3	Rekomenda si Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 4	Rekomenda si Produk Hewan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 5	Rekomenda si NKV	Bidang Ketahanan		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Pangan dan Pertanian				Derajat Kesehatan Masyarakat			Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 6	Sistem Informasi Pasar Online Nasional Ternak	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 7	Layanan Inseminasi Buatan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.1 8	Jasa Pemotongan Hewan (sapi, kerbau)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.1 9	Jasa Pemotongan Unggas	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.2 0	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.2 1	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.2 2	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila,	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	gurame, lele, mas, tawes)								
BKT- DAL.01.07.02.2 3	Pelayanan Aktif (pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan di tempat pemilik ternak)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Non Elektron ik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahana n Pangan
BKT- DAL.01.07.02.2 4	Jasa Angkutan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektron ik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahana n Pangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.07.02.2 5	Jasa Sewa Kandang	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.07.02.2 6	Penyediaan benih ikan konsumsi (nila, gurame, lele, mas, tawes)	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian		Publik	Elektronik	BKT-01.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan
BKT- DAL.01.34.01.0 1	Layanan Penyelenggaraan Pengembangan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Wirausaha Pemuda								
BKT-DAL.01.34.01.02	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
BKT-DAL.01.34.01.03	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang diikuti	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Non Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	oleh Satuan Pendidikan Dasar								
BKT-DAL.01.34.01.04	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
BKT-DAL.01.34.01.05	Layanan Informasi Penyelenggaraan, Pengembangan dan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi								
BKT-DAL.01.34.01.06	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.34.01.0 7	Layanan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda
BKT-DAL.01.34.01.0 8	Layanan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Publik	Elektronik	BKT-01.2 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.17.01.0 1	Layanan data jalan dan jembatan	Bidang Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
BKT-DAL.01.17.01.0 2	Informasi Kesesuaian Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Internal	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
BKT-DAL.01.17.01.0 3	Layanan Sistem Informasi Pembinaan	Bidang Bina Kontruksi	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Jasa Konstruksi					Infrastruktur dan transportasi			Prasarana Strategis
BKT- DAL.01.17.01.0 4	Pelayanan Rekomenda si Utilitas	Bidang Bina Kontruksi	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik	Non Elektron ik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
BKT- DAL.01.17.01.0 5	Layanan Sewa Alat Berat	UPT Peralatan dan Perbengkelan	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik, Internal	Elektron ik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.17.01.0 6	Sedot WC Aman Dan Terjadwal	UPT Pengelolaan Limbah Terpadu	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Publik, Internal	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatkan Kualitas dan konektivitas Infrastruktur dan transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
BKT- DAL.01.40.04.0 1	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.40.04.02	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.03	Fasilitasi Penyusunan Dokumen KLHS RDTR	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.40.04.04 4	Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPPLH RPJMD	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.05	Informasi Indeks Kualitas Air	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.04.0 6	Informasi Indeks Kualitas Udara	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam
BKT- DAL.01.40.01.0 1	Informasi Pengendalia n Emisi Gas Rumah Kaca	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.01 Dampak Perubaha n Iklim

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.40.04.07	Informasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.08	Informasi Penghentian Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.04.0 9	Informasi Pemulihan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam
BKT- DAL.01.40.04.1 0	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Kehati	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.40.02.01	Informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem
BKT-DAL.01.40.04.11	Informasi Sarana dan Prasarana Kehati	Bidang PPKH	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.5 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.40.04.1 2	Fasilitasi Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.1 3	Pengawasan Kegiatan pada Pelaku Usaha	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.04.1 4	Informasi Kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam
BKT- DAL.01.40.04.1 5	Informasi Kegiatan Kampanye Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.04 Pengawas an Dan Keamana n Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.04.1 6	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	Bidang Tata Lingkungan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT- DAL.01.40.04.1 7	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.1 8	Pelayanan Penyelesaian Sengketa	Bidang PPL	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.1 9	Pelayanan Verifikasi Lapangan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Non Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.20	Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.21	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.2 2	Pelayanan Pengurangan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.2 3	Pelayanan Penanganan Sampah	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.2 4	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam
BKT-DAL.01.40.04.2 5	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Publik	Elektronik	BKT-01.4 Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Daya Alam
BKT-DAL.01.20.03.01	Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat
BKT-DAL.01.20.03.02	Bidang permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tidak	Bidang Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	mempunyai daftar pemetaan layanan								
BKT-DAL.01.20.01.01	Verifikasi Perhitungan Konstruksi	Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman
BKT-DAL.01.20.01.02	Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab	Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Bogor								
BKT- DAL.01.20.02.0 1	Penyelenggaraan SLF	DISRUMKIM Bidang Tata Bangunan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
BKT- DAL.01.20.02.0 2	Layanan Pengadaan Lahan	DISRUMKIM Bidang Pertanahan	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Adpem	Non Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Kawasan Perumahan dan Permukiman			Permukiman
BKT-DAL.01.20.02.03	Layanan Retribusi Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
BKT-DAL.01.20.01.03	Layanan Token Listrik Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.20.02.0 4	Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	UPT Rusunawa	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman
BKT- DAL.01.20.01.0 4	Layanan penyediaan lahan makam	UPT Pemakaman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman
BKT- DAL.01.20.01.0 5	Pelayanan Mobil jenazah	UPT Pemakaman	Perumahan dan Pemukiman Rakyat	Publik	Elektronik	BKT-01.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Kawasan Perumahan dan Permukiman			Permukiman
BKT-DAL.01.31.03.01	Layanan Informasi BOS SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT-DAL.01.31.03.02	Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.03.0 3	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT- DAL.01.31.03.0 4	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.03.0 5	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT- DAL.01.31.03.0 6	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.03.0 7	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT- DAL.01.31.03.0 8	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.03.0 9	Layanan Legalisir Ijazah jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT- DAL.01.31.03.1 0	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SD	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.03.1 1	Layanan Informasi BOS SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
BKT- DAL.01.31.05.0 1	Layanan Informasi PPDB Online jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.05.0 2	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
BKT- DAL.01.31.05.0 3	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.05.0 4	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
BKT- DAL.01.31.05.0 5	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.05.0 6	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
BKT- DAL.01.31.05.0 7	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.05.0 8	Layanan Legalisir Ijazah jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
BKT- DAL.01.31.05.0 9	Layanan Rekomendasi Mutasi Peserta Didik jenjang SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.02.0 1	Layanan Informasi BOP PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini
BKT- DAL.01.31.02.0 2	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.02.0 3	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini
BKT- DAL.01.31.02.0 4	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.0 1	Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
BKT- DAL.01.31.04.0 2	Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.0 3	Layanan Informasi Nomor Induk Siswa Nasional Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
BKT- DAL.01.31.04.0 4	Layanan Informasi Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.0 5	Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
BKT- DAL.01.31.04.0 6	Layanan Data Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.0 7	Layanan Data Pelaksanaan Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
BKT- DAL.01.31.04.0 8	Layanan Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.0 9	Layanan Rekomenda si Mutasi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD DIKMAS	Pendidikan	Publik	Elektron ik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.04 Pendidika n Khusus
BKT- DAL.01.31.04.1 0	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektron ik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.04 Pendidika n Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.04.1 1	Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus
BKT- DAL.01.31.04.1 2	Layanan Pengajuan Nomor Unik Pendidik tenaga kependidikan (NUPTK)	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.31.01.0 1	Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
BKT- DAL.01.31.01.0 2	Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kependidikan
BKT-DAL.01.31.01.03	Layanan Pembuatan SK Dinas untuk GTK Non PNS	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
BKT-DAL.01.31.01.04	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Nasional jenjang Pendidikan Dasar					dan Non Formal <i>(Smart People)</i>			
BKT- DAL.01.31.03.1 1	Layanan Rekomenda si Izin Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektron ik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal <i>(Smart People)</i>	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.03 Pendidika n Dasar
BKT- DAL.01.31.02.0 5	Layanan Pengajuan Nomor Pokok	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektron ik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.02 Pendidika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Sekolah Nasional jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan					Pendidikan Formal dan Non Formal <i>(Smart People)</i>			n Anak Usia Dini
BKT-DAL.01.31.02.06	Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal <i>(Smart People)</i>	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.31.06.0 1	Layanan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Bidang GTK dan Kurikulum	Pendidikan	Publik	Elektronik	BKT-02.1 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ( <i>Smart People</i> )	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.06 Pendidikan Non-Formal
BKT-DAL.01.27.01.0 1	Layanan Penyajian data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.27.03.0 1	Layanan Pencegahan Kekerasan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan
BKT- DAL.01.27.03.0 2	Layanan Penanganan Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.27.01.0 2	Layanan Data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberda yaan Perempua n	RAL 01.27.01 Kesetaraa n Gender
BKT- DAL.01.27.02.0 2	Layanan Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik	Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberda yaan Perempua n	RAL 01.27.02 Perlindun gan Anak
BKT- DAL.01.31.08.0 1	Layanan Peminjaman Sumber Belajar	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidika n	RAL 01.31.08 Pembinaa n

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kepustakaan
BKT-DAL.01.31.08.02	System Information Management	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
BKT-DAL.01.31.08.03	Portal Pernaskahan Nusantara	Bidang Perpustakaan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	BKT-02.2 Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.04.09.0 1	Layanan Kearsipan Dinamis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT- DAL.02.04.09.0 2	Layanan Kearsipan Statis Menggunakan Aplikasi SRIKANDI	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT- DAL.02.04.09.0 3	Layanan Informasi Arsip Dinamis	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	(JIKN) dan Statis Secara Nasional (SIKN)					Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		Reformasi Birokrasi
BKT-DAL.02.04.09.04	Layanan Usul Musnah	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT-DAL.02.04.09.05	Layanan Restorasi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		Reformasi Birokrasi
BKT-DAL.02.04.09.06	Layanan Akuisisi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT-DAL.02.04.09.07	Layanan Digitalisasi Arsip	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.04.09.0 8	Layanan Subanglaring	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT- DAL.02.04.09.0 9	Layanan Subanglaring	Bidang Kearsipan	Arsip dan Perpustakaan	Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT- DAL.02.02.01.0 1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan.tentang	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka menengah, serta untuk melakukan analisis data dan informasi pemerintahan						Pemerintahan		Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.02.01.0 2	Pelayanan Administrasi tentang Pemerintah an untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaa n tahunan dan jangka menengah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektron ik	BKT-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administ rasi Pemerinta han	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksa an Pengelola Keuangan Negara
BKT- DAL.02.02.01.0 3	Pelayanan Administrasi Pemerintah an terkait	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektron ik	BKT-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administ rasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksa an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	monitoring dan evaluasi pelaksanaan /realisasi program/kegiatan/subkegiatan sesuai perencanaan yang ada dalam satu tahun anggaran						Pemerintahan		Pengelola Keuangan Negara
BKT-DAL.02.02.01.04	Pelayanan Administrasi Pemerintah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan	RAL.02 Layanan Administr	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksa

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	an dalam rangka mendukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	asi Pemerintahan		an Pengelola Keuangan Negara
BKT-DAL.02.02.01.05	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n dan pendanaan								
BKT-DAL.02.02.01.06	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
BKT-DAL.02.02.01.07	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	rangka penyusunan dokumen kebijakan, rencana dan program tahunan maupun jangka menengah sektoral, serta untuk melakukan analisis data dan informasi						Pemerintah		Pengelola Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	pemerintah an sektor Infrastruktur dan Kewilayah an, sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam, serta Sektor Pemerintah an dan Pembangun an Manusia								

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.02.01.0 8	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka dokumen kebijakan dan rencana pada sektor Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	an dan pengkajian peraturan, Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan								

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	pembangunan, Pengembangan Inovasi dan teknologi								
BKT-DAL.02.02.01.09	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka memberikan dukungan untuk Pusat Jejaring Inovasi	Bidang PPEPD	Dalam Negeri	Adpem	Elektronik	BKT-02.3 Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah (Puja Indah)								
BKT- DAL.01.29.06.0 1	Layanan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
BKT- DAL.01.29.06.0 2	Layanan Pelaporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.29.06.0 3	Layanan penanganan aksi unras	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamana n Dan Ketertiba n Umum
BKT- DAL.01.29.06.0 4	Layanan pendataan linmas inti	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamana n Dan Ketertiba n Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.29.06.0 5	Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum
BKT- DAL.01.29.06.0 6	Layanan Diklat PPPNS dan TRC	Bidang Sumber Daya Aparatur	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.29.06.0 7	Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamana n Dan Ketertiba n Umum
BKT- DAL.01.29.06.0 8	Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamana n Dan Ketertiba n Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.01.0 1	Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Terlantar di Luar Panti melalui LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 2	Pemantauan anak-anak terlantar pada LKSA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.02.0 1	Layanan pendataan DTKS bagi Fakir Miskin dan layanan pendataan 26 PPKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penangan an Fakir Miskin
BKT- DAL.01.26.02.0 2	Pendataan PPKS pada Sistem layanan rujukan terpadu	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penangan an Fakir Miskin
BKT- DAL.01.26.02.0 3	Layanan Fakir Miskin yang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	mendapatkan bantuan BPNT dan PKH								an Fakir Miskin
BKT- DAL.01.26.02.0 4	Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.01.0 3	Layanan pemberian pendampingan dan pemulangan warga negara migran yang bermasalah	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 4	Layanan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n uang atau barang								
BKT- DAL.01.26.01.0 5	layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Non Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 6	Layanan pembinaan bagi seluruh anggota TKSK	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 7	Layanan pembinaan bagi orsos	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Karang Taruna								Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 8	Layanan pendampingan psikososial bagi anak dan keluarga korban tindak kekerasan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.0 9	Layanan rehabilitasi 5 lokasi	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	TMP/ 2 monumen					Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat			Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.1 0	Layanan pemeliharaan n 5 lokasi TMP/2 monumen	Bidang Pemberdayaan Sosial	Sosial	Publik	Elektron ik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.1 1	Layanan pemberian makanan bagi Penyandang Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penangan an Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
BKT- DAL.01.26.02.0 5	Layanan pemberian sandang bagi Penyandang Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penangan an Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
BKT- DAL.01.26.01.1 2	Layanan pemberian alat bantu bagi Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	terlantar di luar panti								
BKT- DAL.01.26.02.0 6	Layanan bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
BKT-DAL.01.26.02.07	layanan bimbingan sosial bagi keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
BKT-DAL.01.26.01.1 3	Layanan data dan pengaduan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT-DAL.01.26.01.1 4	Layanan kedaruratan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.01.1 5	Layanan rujukan bagi PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.1 6	layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Adpem	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial								
BKT- DAL.01.26.01.1 7	Layanan kerjasama antar lembaga atau MOU	Bidang Rehabilitasi Sosial	Sosial	Publik	Non Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.1 8	Layanan penyediaan makanan untuk	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektron ik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	korban bencana alam dan sosial								Jaminan Sosial
BKT-DAL.01.26.01.1 9	layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Adpem	Non Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.01.2 0	layanan sosialisasi kampung siaga bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Non Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.2 1	layanan koordinasi dan sosialisasi tagana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Publik	Elektronik	BKT-04.2 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.05.01.0 1	Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi pada Sektor Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.01 Manajem en Ekonomi Kreatif

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.15.01.0 1	Informasi Kepariwisatan dan Kebudayaan	Bidang Pemasaran	Pariwisata	Publik	Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata ataan
BKT- DAL.01.15.01.0 2	Pemberian Alat Kesenian Kepada Seniman	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata ataan
BKT- DAL.01.15.01.0 3	Pemberian Penghargaan / Uang Kadedeuh	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kepada Seniman dan Budayawan								Kepariwis ataan
BKT- DAL.01.15.01.0 4	Pelatihan Seni Budaya	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektron ik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengemb angan Kepariwis ataan
BKT- DAL.01.15.01.0 5	Digitalisasi Sejarah	Disparbud Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Elektron ik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengemb angan Kepariwis ataan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.15.03.0 1	Pembinaan dan Pemberian Honorarium Juru Pelihara Situs	Bidang Kebudayaan	Pariwisata	Publik	Non Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata
BKT-DAL.01.15.03.0 2	Informasi obyek wisata dan Monitoring tiket Obyek Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Adpem	Elektronik	BKT-04.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata
BKT-DAL.01.24.02.0 1	Layanan Fasilitasi Pelaksanaan	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta	RAL 01.24.02

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Otonomi Daerah					Pertumbuhan Ekonomi		han daerah	Otonomi Daerah
BKT-DAL.01.24.02.02	Informasi administrasi pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.02.03	Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kewilayah an	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.08.08.0 1	pelayanan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
BKT- DAL.02.08.08.0 2	Pelayanan Fasilitasi Kerja Sama Pihak Ketiga	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.02.08.08.0 3	pelayanan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
BKT-DAL.02.08.08.0 4	Layanan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah	Agama	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.26.01.2 1	Layanan Bantuan Sosial	Dinas Sosial	Agama	Publik	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.26.01.2 2	Bantuan Beasiswa SMA dan Perguruan tinggi	Sekretariat Daerah	Pendidikan	Adpem	Non Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
BKT- DAL.01.24.06.0 1	Layanan Fasilitasi Penyusunan Produk	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Hukum Daerah								Pemerintah Daerah
BKT- DAL.01.24.06.0 2	Pelayanan Fasilitasi Bantuan hukum	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BKT- DAL.01.24.06.0 3	Layanan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah	Hukum	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.06.0 4	Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BKT- DAL.01.24.06.0 5	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL 01.14.02 Kebijakan Pengadaan Barang/Ja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									sa Pemerintah
BKT- DAL.01.14.02.0 1	Pelayanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang dan Jasa	Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	RAL 01.14.02 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BKT- DAL.01.24.03.0 1	Layanan Fasilitasi Penyusunan Program	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pembangunan								Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.0 2	Layanan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.0 3	Layanan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.24.03.04	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.05	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.0 6	layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.0 7	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.0 8	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.0 9	Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.1 0	pelayanan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 1	Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.1 2	Layanan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 3	Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.1 4	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 5	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.1 6	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 7	Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 8	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Peraturan Perundang-undangan								Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.1 9	Layanan Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 0	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.2 1	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 2	Layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 3	Layanan Pengadaan Kendaraan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pertumbuhan Ekonomi		han daerah	asi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 4	Layanan Pengadaan Mebel	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ asi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 5	Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ asi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kantor atau Bangunan Lainnya								Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.2 6	Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.2 7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.2 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.2 9	Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.3 0	layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.3 1	layanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Operasional atau Lapangan								
BKT- DAL.01.24.03.3 2	Pelayanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.3 3	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.3 4	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.3 5	pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Wakil Kepala Daerah								
BKT- DAL.01.24.03.3 6	Pelayanan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Non Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.3 7	Pelayanan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.3 8	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kepala Daerah								
BKT-DAL.01.24.03.3 9	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.4 0	Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Sekretariat Daerah								
BKT-DAL.01.24.03.4 1	Pelayanan Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.4 2	Pelayanan Informasi Kinerja Sekretariat daerah/layanan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.4 3	Pelayanan Pendokumen- tasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administra- si Kewilayah- an
BKT- DAL.01.24.03.4 4	Perencanaan & Pelaporan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administra- si Kewilayah- an
BKT- DAL.01.24.03.4 5	Layanan Penyusunan RKA	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administra- si

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.4 6	Layanan Penyusunan RKA Perubahan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administra si Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.4 7	Layanan Penyusunan DPA	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administra si Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.4 8	Pelayanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.4 9	Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 0	Pelayanan Verifikasi dan Penatausah aan Keuangan	BPKAD		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 1	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.5 2	Layanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 3	Layanan Sistem Informasi managemen dan Evaluasi	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektron ik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerinta han daerah	RAL 01.24.03 Administ rasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Analisis Jabatan								
BKT-DAL.01.24.03.5 4	Layanan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.01.24.03.5 5	Layanan Peta Jabatan	Sekretariat Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.24.03.5 6	Pelayanan Pelaporan Kinerja pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 7	Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 8	Layanan Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah daerah	RAL 01.24.03 Administrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tata Laksana								Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.5 9	Pelayanan Kompetisi Inovasi pelayanan Publik KemenPAN RB	Sekretariat  Daerah		Publik	Elektron  ik	BKT-05.01  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01  Layanan Publik	RAL.01.24  Pemerinta han daerah	RAL  01.24.03 Administ asi Kewilayah an
BKT- DAL.01.24.03.6 0	Pelayanan Kompetisi Inovasi pelayanan Publik KemenPAN	Jabar Kemenpan		Publik	Elektron  ik	BKT-05.01  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01  Layanan Publik	RAL.01.24  Pemerinta han daerah	RAL  01.24.03 Administ asi Kewilayah an

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	RB Provinsi Jawa Barat								
BKT-DAL.01.24.03.6 1	Pelayanan Penilaian pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		Publik	Elektronik	BKT-05.01 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayah an
BKT-DAL.02.06.09.0 1	Layanan Hibah Bantuan kepada Lembaga Mandatori dan Ormas	Bidang Kesatuan Bangsa	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Substantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.06.09.0 2	Layanan Pendataan Ormas Kota Bogor, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasayarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektron ik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasion al Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi
BKT- DAL.02.06.09.0 3	Layanan Pengaduan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasayarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Elektron ik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasion al Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						dan Toleransi Masyarakat			
BKT-DAL.02.06.09.04	Layanan Bantuan Keuangan Parpol	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi
BKT-DAL.02.06.09.05	Pendaftaran Rekomendasi Penelitian, Magang dan PKL	Sekretariat	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Publik	Non Elektronik	BKT-02.4 Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL 02.06.09 Dukungan Subtantif Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.03.0 1	Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.23.03.0 2	Penyajian Data Kependudukan, Perekaman, Pengolahan, Dan Pemutakhiran Data	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
BKT- DAL.01.23.03.0 3	Penyediaan Jaringan, Peralatan, dan Sistem Informasi serta Hak	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Akses Aplikasi								
BKT-DAL.01.23.03.04	Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, SKPWNI, SKDWNl, Surat Datang dari Luar Negeri, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan	Data SIAK Terpusat		Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tempat Tinggal								
BKT- DAL.02.04.01.0 1	Manajemen Data Mandiri	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
BKT- DAL.02.04.01.0 2	Pelayanan Sistem informasi Manageman ASN (SIM ASN)	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.04.01.0 3	Rekonsiliasi Data PNS	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
BKT- DAL.02.04.01.0 4	Peremajaan Data	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
BKT- DAL.02.04.01.0 5	Pelayanan Pemberhentian dan Pensiun	Bidang Pengadaan, Pemberhentian,		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	(BUP/APS/UZUR)	Dan Sistem Informasi				Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
BKT-DAL.02.04.01.06	Pelayanan penerbitan SK pensiun janda/duda, bagi pns yang masih aktif	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
BKT-DAL.02.04.01.07	Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu) dan	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kartu Istri (Karis), Taspen								
BKT- DAL.02.04.01.0 8	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan ASN dan PPPK	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Sistem Informasi		Publik	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN
BKT- DAL.02.08.04.0 1	Layanan penyusunan Peraturan daerah	Persidangan dan Perundang- undangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
BKT- DAL.02.08.04.0 2	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan
BKT- DAL.02.08.04.0 3	Pelayanan administrasi pemerintahan	Bagian Program dan Keuangan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
BKT- DAL.02.08.04.0 4	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan
BKT- DAL.02.08.04.0 5	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
BKT- DAL.02.08.04.0 6	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan
BKT- DAL.02.08.04.0 7	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									g- Undangan
BKT- DAL.02.08.04.0 8	Pelayanan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
BKT- DAL.02.02.04.0 1	Layanan Penganggaran	Bidang Anggaran		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.02.04.0 2	Layanan Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
BKT- DAL.02.02.04.0 3	Layanan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi	Bidang Akuntansi		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
BKT- DAL.02.02.04.0 4	Layanan Pengelolaan Gaji PNSD	BPKAD (Bidang Perbendaharaan)		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
BKT-DAL.02.02.04.05	Layanan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, BTT dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang Perbendaharaan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
BKT-DAL.02.02.04.06	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan		
BKT-DAL.02.09.02.01	Layanan Pendaftaran Domain	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.02	Layanan Pelaksanaan dan Pengawasan Domain	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.0 3	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.0 4	Layanan e-Government	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.0 5	Layanan kebijakan SPBE	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.09.02.06	Layanan GCIO	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.07	Layanan Monev dan Pelaporan SPBE	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.0 8	Layanan Sistem Keamanan Informasi	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.0 9	Layanan Data dan Informasi Elektronik	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.1 0	Layanan Aplikasi Perangkat Daerah	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.09.02.1 1	Layanan Command Center	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.1 2	Layanan Server Perangkat Daerah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.1 3	Layananan Perangkat Jaringan dan Komunikasi	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.1 4	Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Bidang Aptika		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.1 5	Layanan Smart City	Bidang Aptika		Adpem & Publik	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.09.02.1 6	Layanan Wifi Gratis di tempat publik	Bidang Aptika		Publik	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.1 7	Kegiatan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (VAPT)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.1 8	Kegiatan Security Awareness	Bidang Persandian		Adpem dan Publik	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.1 9	Kegiatan Monitoring Security Operation Center (SOC)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.2 0	Pengelolaan CSIRT	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.09.02.2 1	Pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.2 2	Pengelolaan aplikasi Sistem Penghubung Layanan (SPL) untuk Tanda	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Tangan Elektronik								
BKT-DAL.02.09.02.2 3	Pengelolaan aplikasi Dashboard Security Assesment (DSA)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.2 4	penyusunan tata kelola di bidang persandian dan keamanan informasi	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.2 5	Pelaksanaan Uji Kesesuaian Sistem (UKS)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.2 6	Pemenuhan dan Pengisian mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.2 7	Layanan e- Mail melalui aplikasi Sanapati	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.2 8	Layanan Statistik email melalui website pemkot	Bidang Persandian			Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.2 9	Layanan Publikasi Data	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.09.02.3 0	Layanan Pengembangan Infrastruktur	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT-DAL.02.09.02.3 1	Layanan Membangun Metadata	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.09.02.3 2	Layanan Peningkatan Kelembagaan	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.3 3	Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
BKT- DAL.02.09.02.3 4	Layanan Penyelenggaraan Otorisasi	Bidang Persandian		Adpem	Elektronik	BKT-03.2 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.09 Data dan Informasi	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintahan	Pemerintahan	Informatika
BKT-DAL.02.04.09.1 1	Layanan terkait verifikasi LHKASN dan penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT-DAL.02.04.09.1 2	Layanan terkait MCP KPK dan Pengendalian Gratifikasi	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.02.04.09.1 3	Layanan terkait Survei Penilaian Integritas	Sub Bagian Perencanaan		Adpem	Elektronik	BKT-03.1 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
BKT- DAL.01.40.06.0 1	Layanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Jenis Bencana)								
BKT- DAL.01.40.06.0 2	Layanan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Setiap Desa/Kelura han	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektron ik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.06 Penangu ngan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.0 3	Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Publik	Elektron ik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkunga n Hidup	RAL 01.40.06 Penangu ngan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.06.0 4	Layanan Bantuan Stimulan Bagi Korban Bencana dan Penyusun Dokumen JITUPASNA	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.0 5	Layanan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.06.0 6	Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Adpem	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.0 7	Layanan Pengelolaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik		Adpem	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.06.0 8	Layanan Pelatihan Pemuda Siaga Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Adpem	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.0 9	Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.1 0	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Non Kebakaran								
BKT- DAL.01.40.06.1 1	Layanan Diklat Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.1 2	Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.40.06.1 3	Layanan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulan Bencana
BKT- DAL.01.40.06.1 4	Layanan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Publik	Elektronik	BKT-04.3 Menurunkan Tingkat Pengangguran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan hidup	RAL 01.40.06 Penanggulan Bencana
BKT- DAL.01.32.04.0 1	Penyusunan Rencana Tenaga	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kerja Makro (RTK)					Pertumbuhan Ekonomi			Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.32.04.0 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.32.04.0 3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Tenaga Kerja
BKT-DAL.01.32.04.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
BKT-DAL.01.32.04.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.32.04.0 6	Pelayanan antar Kerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.32.04.0 7	Penyelengg araan Unit Layanan Disabilitas Ketenagaker jaan	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.32.04.0 8	Perluasan Kesempatan Kerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.32.04.0 9	Job Fair/Bursa Kerja	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.32.04.1 0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.32.04.1 1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Pekerja Migran					Pertumbuhan Ekonomi			Kualitas Tenaga Kerja
BKT-DAL.01.32.04.1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.32.04.1 3	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kabupaten/ Kota								
BKT- DAL.01.32.04.1 4	"Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Sekretariat/Program dan Pelaporan		Adpem	Elektronik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kota"								
BKT- DAL.01.32.04.1 5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kota								
BKT- DAL.01.32.04.1 6	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kota								
BKT- DAL.01.32.04.1 7	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Daerah Kabupaten/ Kota								
BKT- DAL.01.32.04.1 8	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat/Progr am dan Pelaporan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.2 Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagak erjaan	RAL 01.32.04 Peningkat an Kualitas Tenaga Kerja
BKT- DAL.01.13.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	Bidang Pengawasan Koperasi		Publik	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah					Pertumbuhan Ekonomi			Dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
BKT-DAL.01.13.01.02	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Bidang Pengawasan Koperasi		Publik	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
BKT-DAL.01.12.03.01	Pelayanan Penyusunan Kebijakan Daerah mengenai	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Fasilitasi / Insentif Penanaman Modal								Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.12.03.0 2	Pelayanan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Ins entif Kemudahan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.12.03.0 3	Pelayanan Penyusunan Rencana Umum	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.12.03.0 4	Pelayanan Data Peta Potensi	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.12.03.0 5	Pelayanan Data Peluang Usaha	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Kabupaten Kota								Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.06	Pelayanan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.07	Pelayanan Kegiatan Promosi	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.08	Pelayanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.09	Pelayanan Pengelolaan dan Pengemban	Kelompok Substansi Penanaman Modal		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	gan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan Penanaman Modal								Sektor Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.12.03.1 0	Pelayanan Pembinaan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, Penbinaan Pengajuan Perizinan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	dan Non Perizinan								
BKT- DAL.01.12.03.1 1	Pelayanan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT- DAL.01.12.03.1 2	Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Penanaman Modal								Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 3	Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Kementrian Investasi/BKPM) - OSS	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 4	Layanan Perizinan (Milik Daerah) - SITETEH	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 5	Layanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung - SIMBG	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 6	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem pusat (kementrian investasi/BK PM)								Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 7	Pelayanan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	sebagai bagian dari proses perizinan melalui sistem daerah								Penanaman Modal
BKT-DAL.01.12.03.1 8	Layanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.12.03.1 9	Pelayanan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengemb angan Sektor Usaha Penanam an Modal
BKT- DAL.01.05.03.0 1	Layanan terkait Pengemban gan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.05.03.0 2	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelo mpok Sub Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		Publik, Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT- DAL.01.05.03.0 3	Layanan terkait Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Kelo mpok Sub Substansi Regulasi dan		Adpem	Elektron ik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Penyuluhan Pajak Daerah							
BKT-DAL.01.05.03.04	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT-DAL.01.05.03.05	Layanan terkait Pendataan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Kelompok Sub Substansi		Adpem/khusus hanya Cek PBB online (Publik)	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Pendataan Pajak Daerah							
BKT- DAL.01.05.03.0 6	Layanan terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT- DAL.01.05.03.0 7	Layanan terkait Penetapan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.05.03.0 8	Layanan terkait Pelayanan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah/Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT- DAL.01.05.03.0 9	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT- DAL.01.05.03.1 0	Layanan terkait Penagihan dan Penyelesaian	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	n Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah							
BKT-DAL.01.05.03.1 1	Layanan terkait Pemeriksaan Pajak Daerah	Bidang Pengendalian dan Evaluasi/Kelompok Sub Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai
BKT-DAL.01.05.03.1 2	Layanan terkait Pengembangan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan/Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah		Adpem	Elektronik	BKT-05.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak Dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT- DAL.01.19.01.0 1	Pengujian Kendaraan bermotor	DISHUB (UPTD PKB)		Publik	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transportasi
BKT- DAL.01.19.01.0 2	TILANG	DISHUB (Bidang Lalulintas)		Publik	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
BKT-DAL.01.19.01.03	Pengawasan lalulintas jalan	DISHUB (Bidang Lalulintas)		Adpem	Elektronik	BKT-05.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.01 Kemanan an Dan Keselamat an Transportasi

Layanan yang diinginkan di lingkungan Kota Bogor berdasarkan hasil kodifikasi dan klasifikasi metadata layanan pada Tabel 4. telah diarahkan untuk mencapai tujuan SPBE. Arsitektur layanan Kota Bogor terdiri dari 485 layanan yang diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, meliputi 270 layanan publik dan 215 layanan administrasi pemerintahan. Tahapan Klasifikasi tipe layanan ini mengacu pada hasil analisis pemetaan berdasarkan proses bisnis dan metadata layanan SPBE, seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Sementara Gambar 4 menyajikan hasil penetapan tipe layanan di Kota Bogor.



Gambar 1.7. Layanan di Pemerintah Kota Bogor

Kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SPBE adalah layanan SPBE. Berdasarkan Perpres SPBE, kapabilitas SPBE merupakan Layanan SPBE yang diarahkan untuk peningkatan kualitas dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE salah satunya dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, penerapan manajemen layanan, serta teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan di Kota Bogor. Pembahasan kebutuhan ini akan diuraikan secara rinci pada bagian kondisi yang diinginkan dalam laporan ini.

Tabel 1.5. Tipe Layanan Kota Bogor

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.06 Pengendalian Penyakit	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan masyarakat	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan (Bidang Sumber Daya Kesehatan)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dikes (Bidang Kesehatan Masyarakat)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang Medik	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang Medik	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keperawatan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	PUBLIK
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Penunjang	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Bidang Keuangan	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Bagian Hukum Setda	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	Bappeda	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	DPPKB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	DPPKB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	DPPKB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	DPPKB	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	DPPKB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	BKKBN	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Fasilitas Kesehatan Pratama	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB dan Faskes	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Fasilitas Kesehatan Pratama	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kelompok Remaja	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Desa	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Satuan Pelayanan KB	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	UPT Pusat Kesehatan Hewan	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik
	RAL.01.34 Pemuda	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Bidang Tata Ruang	Publik
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Bidang Tata Ruang	Internal
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Bidang Bina Kontruksi	Publik
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Bidang Bina Kontruksi	Publik
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	UPT Peralatan dan Perbengkelan	Publik, Internal
	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	UPT Pengelolaan Limbah Terpadu	Publik, Internal
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	UPTD Laboratorium	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPKH	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPL	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPL	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Tata Lingkungan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPL	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang PPL	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Bidang Kebersihan	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat	Bidang Perumahan	Adpem
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat	Bidang Pemukiman	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Bidang Tata Bangunan	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Bidang Tata Bangunan	Adpem
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	DISRUMKIM Bidang Tata Bangunan	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	DISRUMKIM Bidang Pertanahan	Adpem
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	UPT Rusunawa	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	UPT Rusunawa	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	UPT Rusunawa	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	UPT Pemakaman	Publik
	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	UPT Pemakaman	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang PAUD DIKMAS	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.06 Pendidikan Non-Formal	Bidang GTK dan Kurikulum	Publik
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adpem
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik
	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan	Bidang Perpustakaan	Publik
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan	Bidang Perpustakaan	Adpem
	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan	Bidang Perpustakaan	Publik
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	Pemerintahan			
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bidang Kearsipan	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem
	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bidang PPEPD	Adpem



## **B. Kondisi yang Diharapkan**

Kondisi layanan yang diinginkan di Kota Bogor didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa produk rilis aplikasi untuk mendukung layanan SPBE. Targetnya adalah tercapainya keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang terintegrasi serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dalam konteks layanan, requirement untuk mewakili persyaratan dalam mewujudkan sebuah tujuan kondisi yang diinginkan untuk SPBE adalah:

***"Kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah".***

### **1. Penyedia Layanan**

Berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018, layanan SPBE terdiri dari dua layanan, yaitu Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan ini merupakan perwujudan aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit serta merepresentasikan fungsionalitas komponen terhadap lingkungannya. Fungsionalitas ini dapat diakses melalui satu atau lebih antarmuka layanan yang disediakan oleh penyedia layanan dan diatur dalam pengelolaan tingkat layanan. Model pengelolaan tingkat layanan dapat meliputi kebijakan *service level management* (SLM) yang berhubungan dengan proses perencanaan, koordinasi, penyusunan, persetujuan, pemantauan, dan pelaporan, terdiri dari:

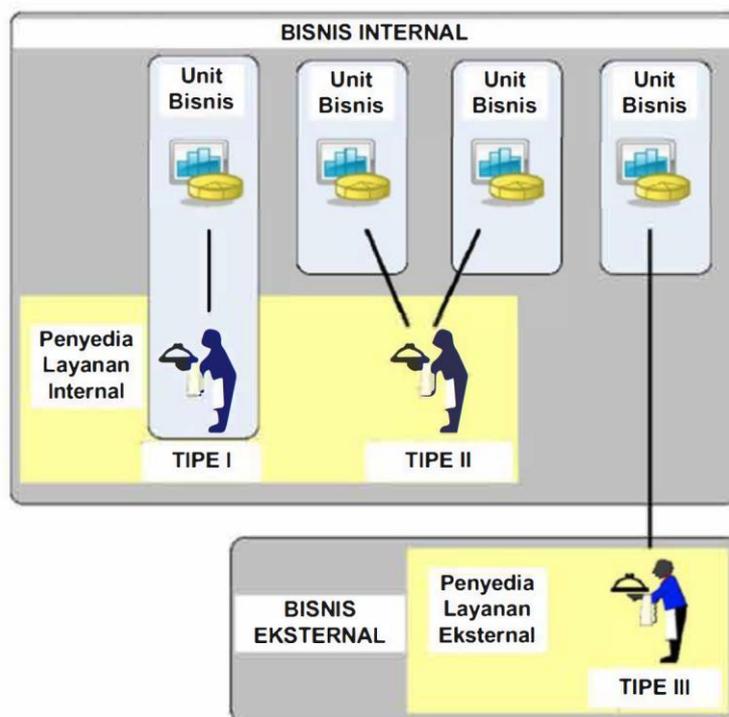
1. Pengelolaan *service level agreements* (SLA), yaitu perjanjian tertulis diantara penyedia layanan dan pelanggan, yaitu mendefinisikan target layanan utama dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. SLM berfungsi untuk memastikan semua target dan tindakan yang telah disepakati dalam SLA dengan bisnis yang didukung oleh *operational level agreements* (OLA).
2. Pengelolaan OLA, yaitu perjanjian antara penyedia layanan dan bagian lainnya dalam organisasi yang sama, tujuannya membantu penyediaan persyaratan

layanan. OLA berisi target yang mendasari SLA, memastikan target tidak dilanggar oleh kegagalan aktifitas pendukung.

3. Pengelolaan underpinning contract (UC), merupakan sebuah perjanjian dengan penyedia layanan eksternal dalam tingkatan tertentu.

Pengelolaan SLA, OLA dan UC diimplementasikan sebagai suatu proses pengelolaan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan tingkat layanan di Kota Bogor. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi tipe penyedia layanan untuk penetapan SLA, OLA dan UC, dengan cara melakukan pengelompokan penyedia layanan kedalam 3 (tiga) tipe penyedia layanan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Ketiga tipe penyedia layanan tersebut, adalah :

1. Tipe I, adalah penyedia layanan internal Kota Bogor
2. Tipe II, adalah layanan Kota Bogor yang digunakan secara bersama.
3. Tipe III, adalah penyedia layanan eksternal yang terkait dengan layanan Kota Bogor, yaitu Kominfo (Infrastruktur dan Aplikasi), PPN/Bappenas (Data), Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN (Keamanan).



Gambar 1.8. Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan

Berdasarkan hasil klasifikasi tipe layanan, pengelompokan penyedia layanan untuk kebutuhan pengelolaan tingkat layanan di Kota Bogor seperti dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan Kota Bogor

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Sumber Daya Kesehatan
RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan	Tipe I / Tipe II	Bidang Sumber Daya Kesehatan
RAL 01.25.06 Pengendalian Penyakit	Tipe I / Tipe II	Bidang Kesehatan masyarakat
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Kesehatan masyarakat
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Kesehatan masyarakat
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Kesehatan masyarakat
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinas Kesehatan (Bidang Sumber Daya Kesehatan)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Kesehatan masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Sumber daya Manusia Kesehatan)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dikes (Bidang Kesehatan Masyarakat)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Dinkes (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang Medik
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang Medik
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keperawatan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pelayanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Penunjang
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Bidang Keuangan
RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Tipe I / Tipe II	Bagian Hukum Setda
RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	Tipe I / Tipe II	Bappeda
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	DPPKB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	DPPKB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	DPPKB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	DPPKB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	DPPKB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	BKKBN
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Fasilitas Kesehatan Pratama
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB dan Faskes
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Fasilitas Kesehatan Pratama
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Kelompok Remaja
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Desa
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Tipe I / Tipe II	Satuan Pelayanan KB
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	UPT Pusat Kesehatan Hewan
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Tipe I / Tipe II	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemuda dan Olahraga
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Ruang

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Ruang
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	Bidang Bina Kontruksi
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	Bidang Bina Kontruksi
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	UPT Peralatan dan Perbengkelan
RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	UPT Pengelolaan Limbah Terpadu
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	UPTD Laboratorium
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPKH
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPL

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPL
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Lingkungan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPL
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang PPL
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	Bidang Kebersihan
RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat	Tipe I / Tipe II	Bidang Perumahan
RAL 01.20.03 Perumahan Rakyat	Tipe I / Tipe II	Bidang Pemukiman
RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Bangunan
RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Tipe I / Tipe II	Bidang Tata Bangunan
RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Tipe I / Tipe II	DISRUMKIM Bidang Tata Bangunan
RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Tipe I / Tipe II	DISRUMKIM Bidang Pertanahan

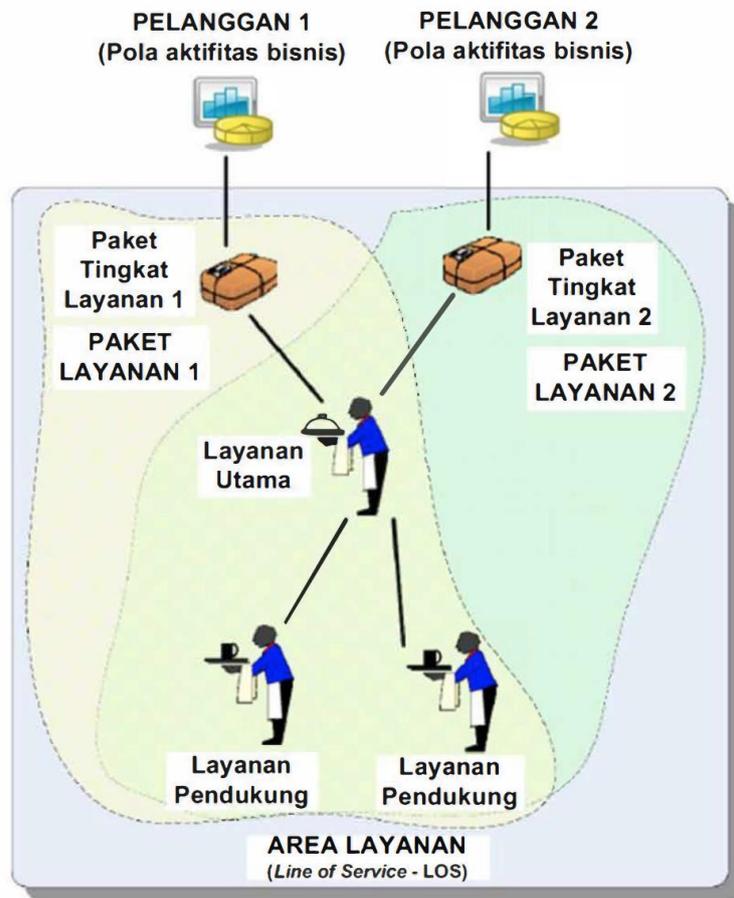
Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Tipe I / Tipe II	UPT Rusunawa
RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Tipe I / Tipe II	UPT Rusunawa
RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Tipe I / Tipe II	UPT Rusunawa
RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Tipe I / Tipe II	UPT Pemakaman
RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Tipe I / Tipe II	UPT Pemakaman
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah	Tipe I / Tipe II	Bidang Pendidikan Dasar
RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang PAUD DIKMAS
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang GTK dan Kurikulum
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang GTK dan Kurikulum

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.31.04 Pendidikan Khusus	Tipe I / Tipe II	Bidang GTK dan Kurikulum

## 2. Paket Layanan

Mendefinisikan paket layanan tujuannya adalah untuk menetapkan pola layanan sebagai sebuah paket layanan. Hal ini dilakukan sebagai dukungan aktivitas dan jaminan keberlangsungan layanan (*warranty*) melalui pendefinisian paket tingkat layanan. Konsep dari pemaketan layanan di lingkungan Kota Bogor seperti disajikan pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9. Pemaketan Layanan Kota Bogor

Berdasarkan hasil klasifikasi layanan dan tipe penyedia layanan, maka dilakukan pemaketan untuk menetapkan sub kategori layanan pendukung yang melekat ke dalam kategori layanan, atau menetapkan konsolidasi layanan yang dapat digunakan secara bersama melalui paket tingkat layanan yang berbeda, sesuai dengan pola aktivitas bisnis masing-masing pengguna seperti dapat dilihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8. Paket Layanan Kota Bogor

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	Kesehatan	Registrasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Pra Registrasi	RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan
		Operasi	RAL 01.25.06 Pengendalian Penyakit
		Pelaporan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Sertifikasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Konsultasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Penerbitan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Pengawasan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Pengaduan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Persetujuan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Sampling	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Pencabutan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Pengajuan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Penilaian	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
Permintaan dan Permohonan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat		
2	Pendidikan	Sekolah Dasar	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
		Sekolah Menengah Pertama	RAL 01.31.05 Pendidikan Menengah
		Manajemen Pendidik	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3	Informasi	Penerbitan Jurnal Ilmiah	RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi
		Dokumentasi	RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi
4	Keuangan		RAL.02.02.04 Penganggaran
		Perencanaan Keuangan Satuan Kerja	RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara
		Administrasi pengelolaan Barang Milik Negara	RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara
		Operasional	RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
		Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	RAL.02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Perencanaan	RAL.02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Pengadaan	RAL.02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan	RAL.02.03.02 Penyusunan Perencanaan
			RAL.02.03.08 Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional
6	Aparatur Negara	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Obat dan Makanan	RAL.02.04.01 Manajemen ASN
		Kepegawaian	RAL.02.04.01 Manajemen ASN
7	Dukungan Operasional Organisasi	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Survey	RAL.02.06.04 Sistem Pelaporan
		Laporan	RAL.02.06.04 Sistem Pelaporan
		Penjejak digital	RAL.02.06.06 Bantuan Hukum
		Gelar Kasus	RAL.02.06.06 Bantuan Hukum
		Pengelolaan	RAL.02.06.07 Dukungan Administrasi Organisasi
		Penomoran	RAL.02.06.07 Dukungan Administrasi Organisasi
8	Organisasi dan Tata Kelola	Peminjaman Arsip	RAL.02.08.01 Pengawasan Fungsi Organisasi
		Monitoring dan Evaluasi	RAL.02.08.01 Pengawasan Fungsi Organisasi
		Penerimaan Laporan	RAL.02.08.01 Pengawasan Fungsi Organisasi
		Tindak Lanjut	RAL.02.08.01 Pengawasan Fungsi Organisasi
		Inspeksi	RAL.02.08.02 Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria
		Kerja Sama	RAL.02.08.07 Kerja Sama Antar Instansi
		Audit	RAL.02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
9	Data dan	Pendalaman Informasi	RAL.02.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
	Informasi Pemerintahan	Informasi	RAL.02.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi

### C. Detail Kondisi yang Diinginkan

Detail dari kondisi yang diinginkan dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Detail kondisi yang diinginkan ini merupakan story atau layer pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kota Bogor. Lingkupnya adalah berupa layanan umum yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan tahapannya (rilis) masing--masing (layanan umum dibagi ke dalam komponen-komponen yang saling terhubung berdasarkan teknologi microservices), dan layanan tersebut saling terhubung dalam komputasi awan untuk mendukung Layanan SPBE. Berdasarkan Cetak Biru (BluePrint) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), rincian dari kondisi yang diinginkan dari Layanan SPBE adalah kemudahan perolehan pelayanan pemerintah diwujudkan melalui (a) Akses layanan mandiri, (b) Layanan bergerak, (c) Layanan cerdas bagi masyarakat.

Rincian Penggunaan Layanan Salah satu upaya untuk kemudahan dan kesinambungan penyediaan layanan SPBE di lingkungan Kota Bogor, adalah melalui penyediaan dukungan pola aktivitas dan warranty dari setiap paket layanan yang sudah terdefinisi sebelumnya. Tabel 1 mendeskripsikan rincian penggunaan layanan oleh setiap pengguna di seluruh organisasi Kota Bogor, serta deskripsi dari setiap spesifikasi penyediaan layanan. Opsi merupakan kategori atau kelas layanan yang dipilih berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh terhadap bisnis, seperti disajikan pada Tabel 9. Sedangkan respon merupakan aktivitas penanganan insiden atau apabila terjadi permasalahan terkait layanan yang diberikan, serta respon terhadap permintaan pengadaan atau perbaikan versi layanan. Respon diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan insiden atau permintaan, seperti dapat dilihat pada Tabel 10. Spesifikasi layanan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendefinisikan layanan secara formal sebagai katalog layanan SPBE Kota Bogor.

Tabel 1.9. Tingkat Opsi Layanan Kota Bogor

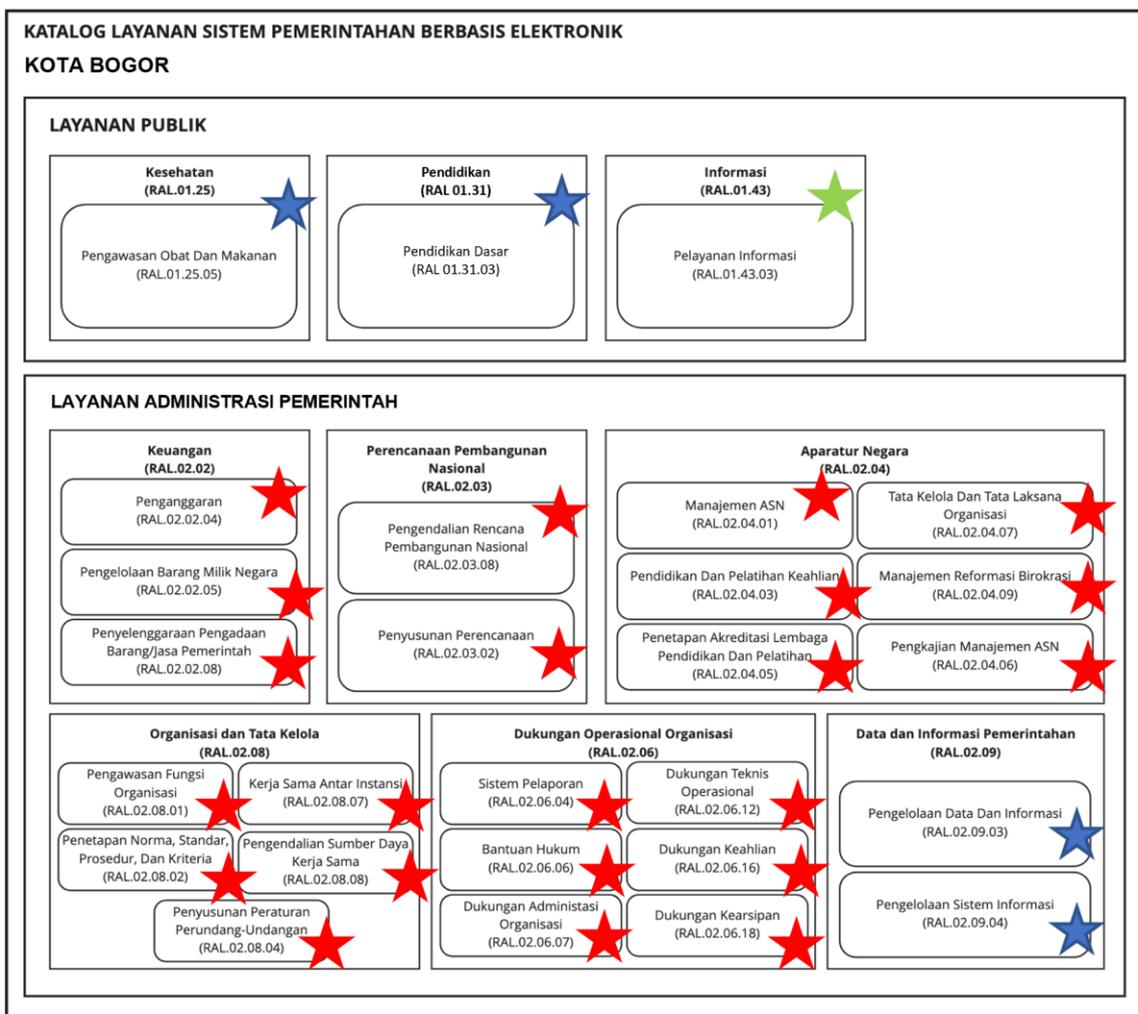
Tipe Opsi	Nama Opsi	Ketersediaan	Pemulihan
1	<i>Gold</i>	> 99 %	1 - 2 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)
2	<i>Silver</i>	> 99 %	2 - 3 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)
3	<i>Bronze</i>	> 99 %	3 - 4 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)

Tabel 1.10. Tingkat Keseriusan dan Prioritas Respon Layanan Kota Bogor

Tingkat Keseriusan	Waktu Respon	Target Resolusi	Deskripsi
1	15 Menit	2 Jam	Insiden yang menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap bisnis, melibatkan sistem atau layanan dan sejumlah orang, sampai fungsi bisnis yang terkena dampak dihentikan.
2	30 Menit	4 Jam	Insiden yang menyebabkan dampak yang signifikan terhadap bisnis, melibatkan sistem atau layanan dan sejumlah orang, tetapi fungsi bisnis yang terkena dampak tidak dihentikan.
3	3 Jam	10 Jam	Insiden yang dapat mempengaruhi layanan pelanggan, namun memiliki dampak yang kecil untuk bisnis, misalnya single user, atau suatu komponen terkena dampak tapi permasalahannya dapat dihindari.
4	10 Jam	30 Jam	Insiden yang memiliki dampak minimal terhadap bisnis, misalnya berupa request atau permintaan informasi saja.
Akuisisi	Penetapan	Penerimaan	Deskripsi
5	30 Jam dari Permintaan	15 Hari dari Persetujuan	Permintaan untuk pengadaan peralatan standar dan software standar, termasuk perbaikan versi layanan.
6	Bukan SLA	Bukan SLA	Permintaan untuk pengadaan bukan peralatan standard dan bukan software standar.

## 1. Katalog Status Layanan

Dari hasil seluruh tahapan pemodelan yang telah dilakukan, maka model katalog layanan yang direkomendasikan untuk penyediaan layanan SPBE di Kota Bogor diawali dari pendefinisian katalog layanan. Katalog layanan terdiri dari 264 layanan, yang diklasifikasikan menjadi 9 area dan 27 kategori, meliputi 142 layanan publik dan 122 layanan administrasi pemerintahan. Gambaran umum dari katalog layanan Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 8.



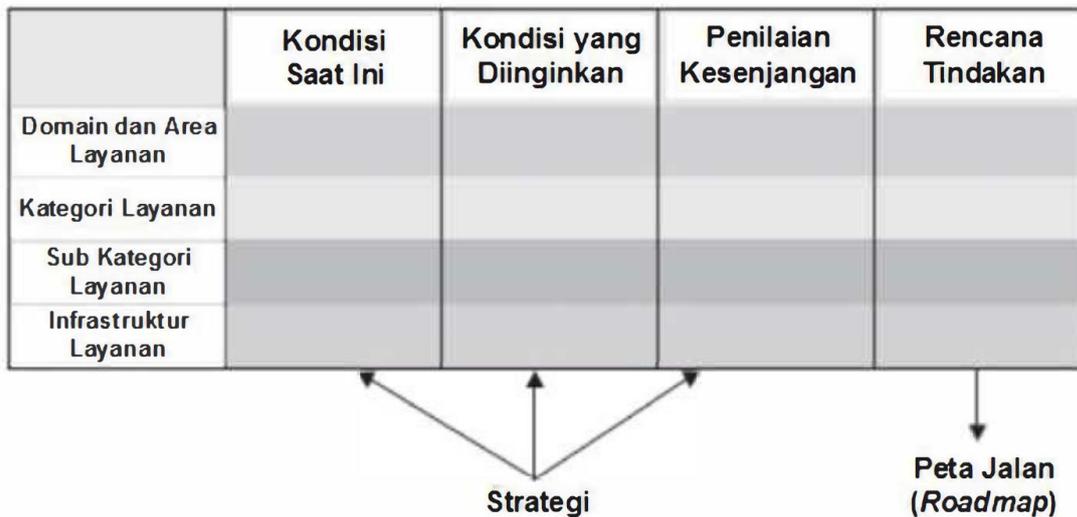
Gambar 1.10. Katalog Layanan SPBE Kota Bogor

Setiap layanan memiliki ketergantungan dan kontribusi terhadap layanan yang lainnya. Ketergantungan dan kontribusi dari setiap layanan terhadap layanan lainnya dikelola melalui dokumen persetujuan tingkat layanan yang telah terdefinisi sebelumnya, yaitu sejumlah beberapa paket SLA, 3 paket OLA, dan 2 paket UC. Dokumen SLA termasuk kedalam tipe

corporate based, yaitu paket layanan untuk mengelola tingkat layanan berdasarkan kebutuhan operasional proses bisnis, baik untuk layanan internal maupun eksternal Kota Bogor. Sementara dokumen OLA dan UC sifatnya adalah service based, yaitu pemenuhan penyediaan layanan yang melibatkan Unit TI dan Unit terkait lainnya sebagai penanggung jawab, serta pihak eksternal Kota Bogor sebagai penyedia dukungan infrastruktur dan aplikasi (Kominfo), Data (PPN/ Bappenas), dan Keamanan (Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, ketergantungan dan kontribusi diantara setiap layanan SPBE dapat diwujudkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). SPLP adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran data dan layanan. Sistem penghubung layanan pemerintah di lingkungan Kota Bogor dapat dideskripsikan sebagai antarmuka yang mewakili titik akses dimana layanan dapat digunakan oleh pengguna. Secara umum kebutuhan ini diwujudkan melalui dukungan (a) Komputasi Awan dan (b) Berbagai Pakai Layanan (menggunakan microservices) yang akan dibahas secara rinci pada Bagian Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan dalam laporan ini.

Selain SPLP, perbaikan versi layanan merupakan kotak waktu dimana SPBE memberikan nilai tambahan dalam bentuk perangkat lunak dan sistem yang berfungsi dan teruji. Perbaikan versi layanan (product increment) mendeskripsikan kondisi stabil arsitektur pada jangka waktu tertentu, kondisi ini bersifat inkremental dan dapat berkembang sesuai kegiatan yang dilakukan. Perbaikan Versi Layanan dalam SPBE terdiri dari 3 versi aplikasi, yaitu Layanan Versi 0.0, Layanan Versi 1.0, dan Layanan Versi 2.0. Produk dari elemen Perbaikan Versi Layanan akan merealisasikan kebutuhan yang ada dalam elemen daftar Kota Bogor, yaitu (a) Komputasi Awan dan (b) Berbagi Pakai Layanan.

Berdasarkan katalog layanan dan spesifikasi yang telah terdefinisi, dapat diperoleh kondisi status layanan ideal yang seharusnya ada untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan Layanan SPBE. Terkait dengan kondisi layanan di Kota Bogor saat ini, maka keberadaan dari setiap status layanan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor--faktor kesenjangan yang terjadi, serta penyesuaian dengan hasil pemodelan katalog layanan yang telah terdefinisi. Model relasi antara status layanan dalam katalog dengan status layanan yang ada saat ini, dapat dilihat pada Gambar 1.11.



Gambar 1.11. Model Relasi Status Layanan SPBE Kota Bogor

Kondisi saat ini dipetakan terhadap kondisi yang diinginkan sesuai dengan seluruh hasil pemodelan yang telah direkomendasikan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kesenjangan yang terjadi, sehingga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan rencana tindakan sebagai daftar pekerjaan Kota Bogor. Unsur yang dinilai terkait dengan kebutuhan pemenuhan kriteria Layanan SPBE, yaitu domain dan area layanan sebagai tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang menjadi struktur di tingkat nasional, kategori dan sub kategori layanan sebagai tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kota Bogor, serta infrastruktur layanan sebagai dukungan teknologi untuk memenuhi kriteria Arsitektur Layanan SPBE.

## 2. Daftar Pekerjaan Kota Bogor

Daftar pekerjaan Kota Bogor secara umum terdiri dari (a) Komputasi Awan dan (b) Berbagai Pakai Layanan (menggunakan *microservices*). Berdasarkan hasil pendefinisian katalog dan status layanan yang dibutuhkan di Kota Bogor, diperoleh rincian daftar pekerjaan solusi berupa layanan baru yang harus disediakan, layanan yang harus diperbaharui untuk kebutuhan integrasi, serta pengelolaan tingkat layanan untuk kebutuhan berbagi pakai layanan di lingkungan Kota Bogor, seperti disajikan pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11. Daftar Pekerjaan Solusi Layanan Kota Bogor

No.	Daftar Pekerjaan	Deskripsi
<p><b>1</b></p>	<p><b>Manajemen Layanan</b></p>	<p>Analisis kebutuhan dan penetapan status sistem layanan untuk mengidentifikasi layanan SPBE, terdiri dari (a) menetapkan layanan yang bersifat corporate based beserta dokumen SLA nya, (b) menetapkan layanan yang bersifat service based beserta dokumen OLA dan UC nya, untuk penyediaan layanan SPBE berbasis Teknologi 4.0 yang melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai penyedia infrastruktur dan aplikasi (Kominfo), Data (PPN/Bappenas), dan Keamanan (BSSN)</p>
	<p>Identifikasi Layanan terintegrasi fokus pada layanan pemerintah berbasis arsitektur SPBE</p>	
	<p>Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor berbasis arsitektur SPBE</p>	
	<p>Identifikasi aplikasi, data dan informasi</p>	
	<p>integrasi layanan administrasi pemerintahan (Aplikasi Umum)</p>	
	<p>Pengembangan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan</p>	
	<p>Pengembangan layanan dengan Teknologi 4.0</p>	
	<p>Sosialisasi layanan terintegrasi</p>	
<p>Operasional layanan terintegrasi</p>		
<p><b>2</b></p>	<p><b>Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan</b></p>	<p>Penetapan dan penyesuaian regulasi untuk pengelompokan layanan ke dalam domain dan area layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 SPBE Nasional, kemudian merincikan ke dalam kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 SPBE IPPD (Kota Bogor). Aktivitas proses mulai dari identifikasi kebutuhan layanan melalui pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi, sampai dengan sosialisasi dan operasionalisasi layanan</p>
	<p>Identifikasi Layanan terintegrasi</p>	
	<p>Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor</p>	
	<p>Identifikasi data dan informasi</p>	
	<p>integrasi layanan</p>	
	<p>Sosialisasi layanan terintegrasi</p>	
<p>Operasional layanan terintegrasi</p>		

#### D. Peta Jalan Arsitektur Layanan SPBE

Realisasi dari daftar pekerjaan solusi direncanakan melalui tahapan peta jalan (roadmap) yang dapat mewakili kondisi stabil arsitektur layanan SPBE di Kota Bogor pada jangka waktu tertentu. Peta jalan untuk merealisasikan layanan pemerintahan di lingkungan Kota Bogor didefinisikan melalui dua tahapan aktivitas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.12, yaitu:

- a. Tahapan pembangunan pondasi melalui manajemen layanan.
- b. Tahapan pengembangan SPBE melalui pengembangan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.

Tabel 1.12 Peta Jalan Arsitektur Layanan Kota Bogor

No.	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Manajemen Layanan</b>					
	Identifikasi Layanan terintegrasi fokus pada layanan pemerintah berbasis arsitektur SPBE	✓				
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor berbasis arsitektur SPBE	✓				
	Identifikasi aplikasi, data dan informasi	✓	✓			
	integrasi layanan administrasi pemerintahan (Aplikasi Umum)		✓	✓		
	Pengembangan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan		✓	✓	✓	
	Pengembangan layanan dengan Teknologi 4.0			✓	✓	
	Sosialisasi layanan terintegrasi		✓	✓	✓	
Operasional layanan terintegrasi		✓	✓	✓	✓	
<b>2</b>	<b>Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan</b>					
	Identifikasi Layanan terintegrasi		✓	✓	✓	
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor		✓	✓	✓	
	Identifikasi data dan informasi		✓			

No.	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
	integrasi layanan		✓	✓	✓	
	Sosialisasi layanan terintegrasi		✓	✓	✓	
	Operasional layanan terintegrasi		✓	✓	✓	✓
<b>3</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan</b>					
	a. RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional					
	Identifikasi Layanan terintegrasi	✓				
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor	✓	✓			
	Identifikasi data dan informasi	✓				
	Integrasi layanan			✓		
	Sosialisasi layanan terintegrasi			✓	✓	
	Operasional layanan terintegrasi				✓	✓
	b. RAL.02.04 Aparatur Negara					
	Identifikasi Layanan terintegrasi	✓				
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor	✓				
	Identifikasi data dan informasi	✓				
	Integrasi layanan	✓	✓			
	Sosialisasi layanan terintegrasi		✓	✓		
	Operasional layanan terintegrasi		✓	✓	✓	✓
	c. RAL.02.02 Keuangan					
	Identifikasi Layanan terintegrasi	✓				
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor	✓				
	Identifikasi data dan informasi	✓				
	Integrasi layanan	✓	✓			
	Sosialisasi layanan terintegrasi		✓	✓		
	Operasional layanan terintegrasi		✓	✓	✓	✓
	d. RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi e. RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola f. RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan					
	Identifikasi Layanan terintegrasi		✓	✓	✓	
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kota Bogor		✓	✓	✓	

No.	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
	Identifikasi data dan informasi		✓			
	Integrasi layanan		✓	✓	✓	
	Sosialisasi layanan terintegrasi		✓	✓	✓	
	Operasional layanan terintegrasi		✓	✓	✓	✓

## BAB II ARSITEKTUR PROSES BISNIS

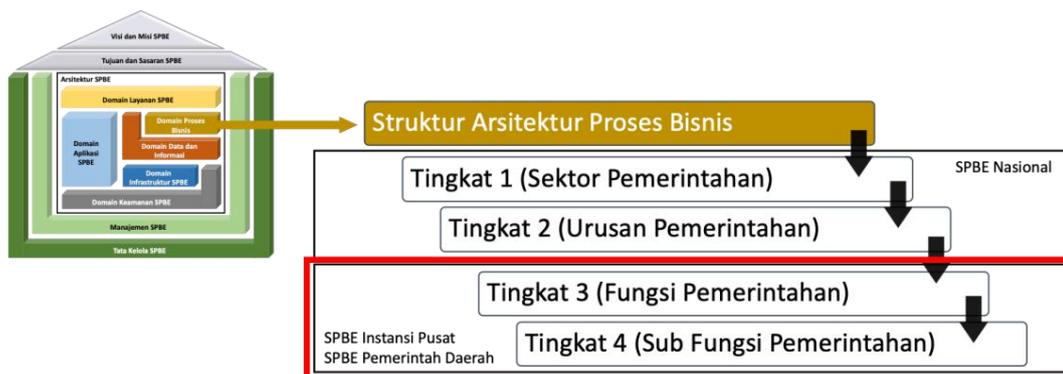
### A. Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis

#### 1. Prinsip Arsitektur Proses Bisnis

Prinsip-prinsip proses bisnis dalam *framework Enterprise* Arsitektur Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Bersifat konsisten dan komprehensif
2. Bersifat adaptif mengikuti kebutuhan *stakeholder* dan perubahan regulasi
3. Dilakukan secara berkesinambungan

Arsitektur proses bisnis Kota Bogor menggambarkan proses bisnis dan tugas utama dari Kota Bogor dengan acuan utama Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur arsitektur proses bisnis

Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, arsitektur proses bisnis berfokus pada Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) dan Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Fungsi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur Tingkat 1 dan Tingkat 2. Arsitektur proses bisnis Tingkat 3 disusun untuk mengatur fungsi pemerintahan dan dijelaskan lebih rinci pada arsitektur proses bisnis Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan).

Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

## 2. Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Domain proses bisnis juga mengacu pada referensi proses bisnis (RB) tingkat nasional, khususnya pada kode referensi Pemerintahan Umum (09) seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Referensi Proses Bisnis (RB) Tingkat Nasional Pemerintahan Umum (09)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri termasuk di dalamnya kebijakan politik dan pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan pengawalan program prioritas nasional terkait pembinaan di daerah.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara termasuk di dalamnya fiskal, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, manajemen perekonomian, pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pajak.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pelayanan informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi termasuk di dalamnya pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos, serta penyelenggaraan pos.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, strategi pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan program kerja organisasi, penyusunan rencana induk, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya pengelolaan dukungan organisasi, manajemen aparatur sipil negara, kelembagaan, pembinaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, manajemen pelayanan

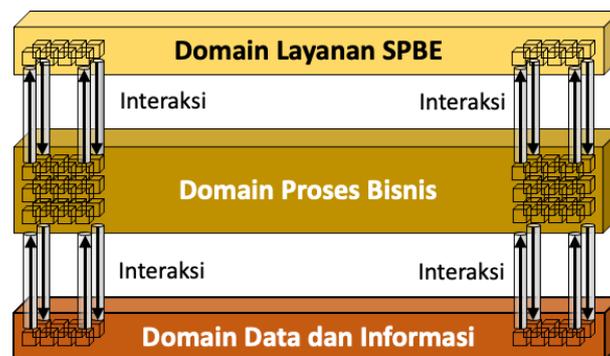
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		publik, manajemen SPBE, kearsipan nasional, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.
09.07	Kesekretariatan Negara	bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya kerumahtanggaan kepresidenan, koordinasi dengan lembaga negara, ketahanan nasional, manajemen pimpinan tinggi, pengawasan pemerintahan, pengkajian strategis, serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, politik dalam negeri, litigasi isu strategis, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Di bidang pemerintahan umum, target Arsitektur SPBE adalah untuk mewujudkan layanan digital pemerintah terintegrasi. Transformasi proses bisnis pada sektor pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan internal (G2E dan G2G) yang menerapkan konsep digital working collaboration serta smart city pada smart government, yang merupakan arah kebijakan nasional hingga tahun 2024. Transformasi digital nasional diidentifikasi untuk mendukung operasional pemerintah berupa urusan pemerintahan dalam negeri (RB 09.01), keuangan (RB 09.02), perencanaan pembangunan nasional (RB 09.05), aparatur negara (RB 09.06), sekretariat negara (RB.09.07) di tingkat nasional

### 3. Keterkaitan Antar Domain

Arsitektur proses bisnis berinteraksi dengan domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang

akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis berelasi langsung dengan domain data dan informasi, untuk menggambarkan data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain proses bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan di Kota Bogor. Keterkaitan antara domain proses bisnis, data dan informasi, serta layanan ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 2.2. Interaksi domain proses bisnis dengan domain layanan serta domain data dan informasi

Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, digital working collaboration, smart city dan smart government. Identifikasi proses bisnis di bidang kebijakan dan tata kelola *e-government* ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan *e-government*, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi Kota Bogor.

#### 4. Metadata Proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis berfokus pada SPBE Instansi Pusat dan SPBE Pemerintah Daerah, namun disusun dengan tetap berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan Perpres SPBE pasal 11 dan 12. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata proses bisnis dalam Perpres SPBE. Penggunaan metadata ini juga ditujukan untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses bisnis, serta untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dalam Satu Data Indonesia. Dalam pengumpulan data tentang proses bisnis yang diterapkan

di lingkungan Kota Bogor, atribut-atribut metadata yang diterapkan ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 2.2. Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Uraian Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

## B. Arsitektur Proses Bisnis Saat Ini

### 1. Identifikasi Stakeholder SPBE Kota Bogor

Berdasarkan visi, misi, dan sasaran Kota Bogor, dilakukan pula identifikasi mitra kerja yang merupakan stakeholders beserta keterlibatan dan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses bisnis dalam Kota Bogor, yang terdiri atas stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

Stakeholder internal Kota Bogor dapat diidentifikasi dari struktur organisasi yang tercantum mengacu pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah tampak seperti Gambar 5, yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Susunan Organisasi Kota Bogor terdiri atas:

1. Pimpinan Daerah Kota Bogor
2. Sekretariat Daerah Kota Bogor
3. Sekretariat DPRD Kota Bogor
4. Inspektorat Daerah Kota Bogor
5. Dinas Pendidikan Kota Bogor
6. Dinas Kesehatan Kota Bogor
7. Dinas Sosial Kota Bogor
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
13. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor
19. Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
22. Dinas Perhubungan Kota Bogor
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
24. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor
31. RSUD Kota Bogor
32. Kecamatan (6)
33. Kelurahan (68)
34. Puskesmas (26)

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan SOTK Kota Bogor tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja Kota Bogor, mulai dari level organisasi paling tinggi (Dinas, Badan dan Sekretariat) dan unit kerja di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 0, 1 dan 2 di Lingkungan Kota Bogor sesuai OTK baru, utamanya pada unit kerja yang terdampak langsung terhadap perubahan struktur organisasi tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan sasaran strategis antar unit kerja dan konsistensi cascading sasaran dan indikator.

Sementara itu, hasil identifikasi *stakeholder* eksternal Kota Bogor sesuai dengan dokumen peta proses bisnis yang ada, dipetakan bahwa *stakeholder* eksternal Kota Bogor meliputi:

1. Pemerintah

2. Pelaku Usaha
3. Masyarakat
4. Akademisi

## 2. Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP

Pada kondisi eksisting arsitektur proses bisnis Kota Bogor, diperlukan pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP yang sudah ada. Pemetaan tersebut berperan penting untuk memastikan keterlibatan unit-unit kerja Kota Bogor dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kota Bogor. Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Rekapitulasi SOP Utama dan FGD yang dilaksanakan, hasilnya ditunjukkan dalam bentuk ringkasan pemetaan pada Tabel .

Tabel 2.3. Ringkasan pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan unit kerja

OPD/SKPD	Proses Bisnis Terkait	Jumlah SOP
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BKT-01,BKT-02,BKT-03,BKT-04,BKT-05	67
Dinas Komunikasi dan Informatika	BKT-06,BKT-07,BKT-08,BKT-09,BKT-10	22
Sekretariat Daerah	BKT-11,BKT-12,BKT-13,BKT-14,BKT-15, BKT-16	5

Tabel menunjukkan ringkasan hasil pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan organisasi perangkat daerah. Secara umum, proses bisnis utama, pendukung dan manajerial dilaksanakan berdasarkan bidang cakupan masing-masing. Pelaksanaan enam belas proses bisnis tersebut di detailkan dalam standard operating procedures (SOP) yang saat ini sudah dimiliki Kota Bogor. Dari pemetaan tersebut, teridentifikasi bahwa jumlah sub proses bisnis yang didukung oleh SOP memiliki jumlah beragam. Selain itu, sebaran jumlah proses bisnis yang didukung oleh seluruh OPD tidak merata. Kondisi ini menggambarkan kondisi eksisting pembagian kerja di Kota Bogor berdasarkan proses

bisnis dan SOP yang teridentifikasi. Hasil analisis ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan tim Kota Bogor untuk dikonfirmasi apakah kondisi tersebut sudah ideal dan sesuai kebutuhan.

### **3. Arsitektur Proses Bisnis Target**

*Architecture Vision* adalah arsitektur yang menjelaskan gambaran umum Kota Bogor meliputi penjelasan: visi, misi, model bisnis, dan pemetaan serta sinergi semua lapisan arsitektur di dalam pengembangan Enterprise Architecture. *Architecture Vision* pada Kota Bogor terdiri dari 7 (tujuh) *artifact* sebagai berikut:

- 1. *Architecture Principles*** adalah prinsip-prinsip tentang arsitektur yang dibangun sehingga akan menjadi landasan pertimbangan setiap langkah dalam pengembangan arsitektur, yaitu fleksibilitas, keselarasan, kepatuhan realistis dan standarisasi.
- 2. *Architecture Goals*** merupakan tujuan yang ingin dihasilkan dari arsitektur yang akan dibangun selama periode waktu tertentu. Arsitektur Kota Bogor memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu simplifikasi bisnis, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan organisasi dengan keselarasan TIK.
- 3. *Vision, Mission, and Strategy*** adalah *artifact* yang menjelaskan visi, misi, dan peta strategis Kota Bogor. Kota Bogor telah menetapkan visi yang bersifat jangka panjang dan dapat memberikan aspirasi, motivasi dan gambaran dari organisasi yang ingin dikembangkan. (sesuai dengan Review Renstra Kota Bogor 2021).
- 4. *Value Chain Diagram*** adalah diagram yang menggambarkan fungsi inti dan pendukung yang saling bersinergi untuk mewujudkan visi Kota Bogor. Misi pembangunan Kota Bogor diacu sebagai gambaran fungsi utama yang harus menjadi prioritas.
- 5. *Business Model Canvas (BMC)*** adalah sebuah gambaran model bisnis yang merepresentasikan strategi dan proses bisnis dalam organisasi. BMC Kota Bogor memiliki 9 (sembilan) bagian informasi. Bagian tersebut terdiri dari key partners, key activities, key resources, value propositions, customer relationships, customer segment, channels, cost structure, revenue streams.

6. **Solution Concept Diagram** adalah *grand design enterprise architecture* yang menyajikan hubungan *Strategic Plan, Business Architecture, Data Architecture, Application Architecture, Technology Architecture, Services Architecture* dan *Security Architecture*. Hubungan ini mengindikasikan dukungan arsitektur yang dibutuhkan untuk mencapai IKU.

### 3.1. Pemetaan Visi, Misi & Strategi (*Vision, Mission, and Strategy*)

Visi, Misi dan Strategi SPBE Kota Bogor merupakan turunan penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi sebagai mandat kepada Walikota Kota Bogor yang harus memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional.

Visi Kota Bogor adalah **“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”**

Dengan visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Bogor, meliputi:

1. Mewujudkan Kota yang Sehat.

adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota yang Cerdas.

adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada didalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

### 3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera

adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

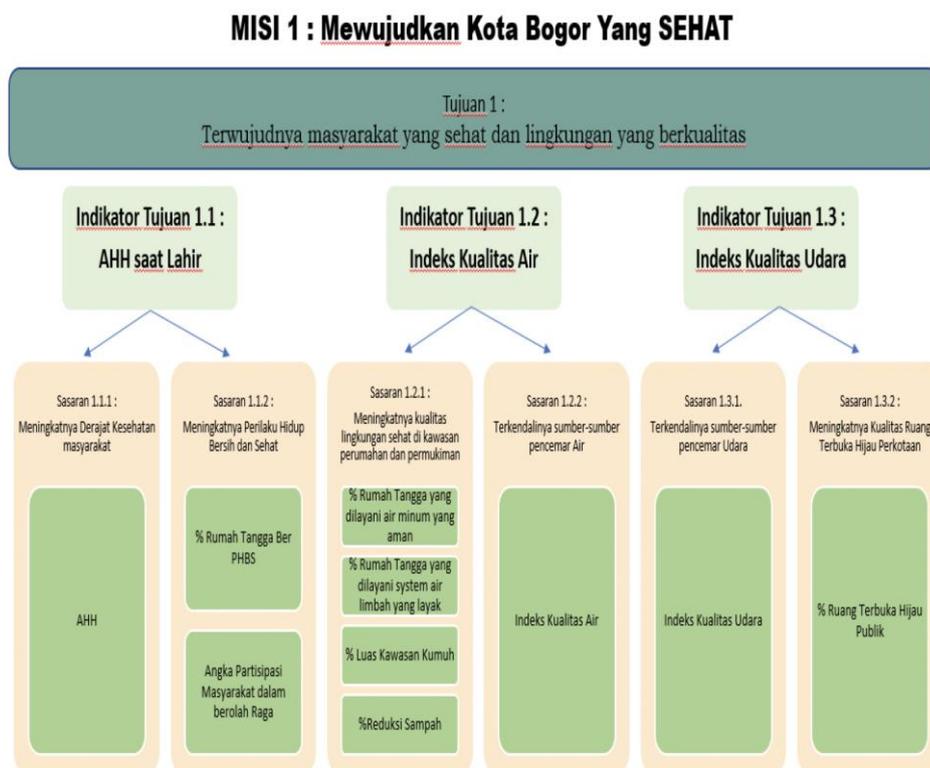
Tujuan Kota Bogor dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.
2. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama

Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama

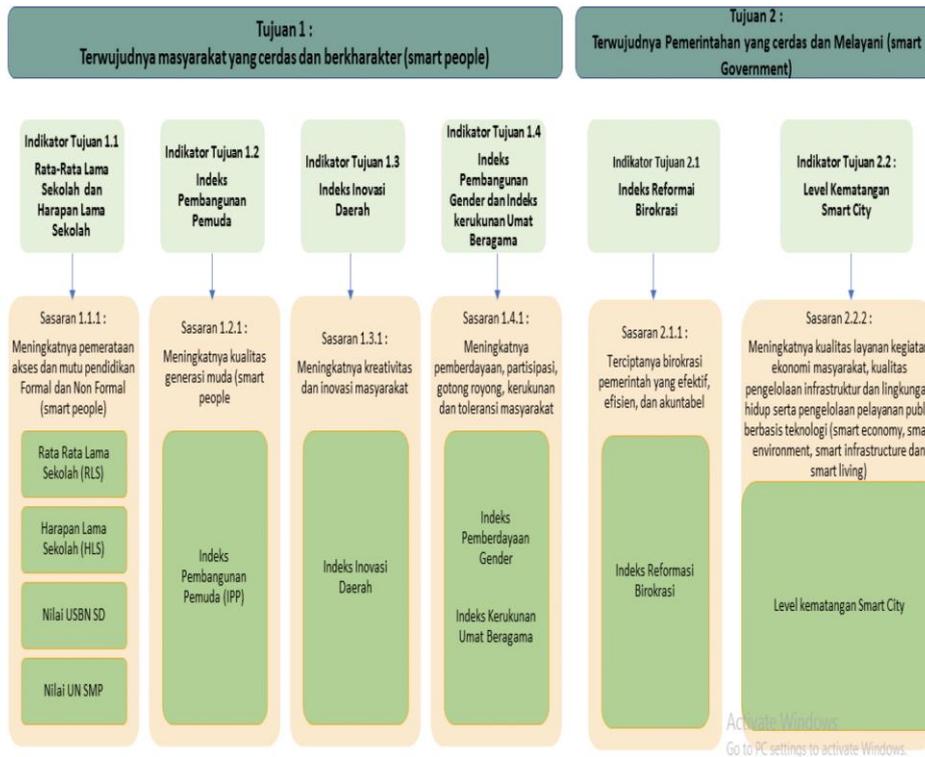
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.
4. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
5. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Berikut ini adalah penjabaran 3 Misi Kota Bogor terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024



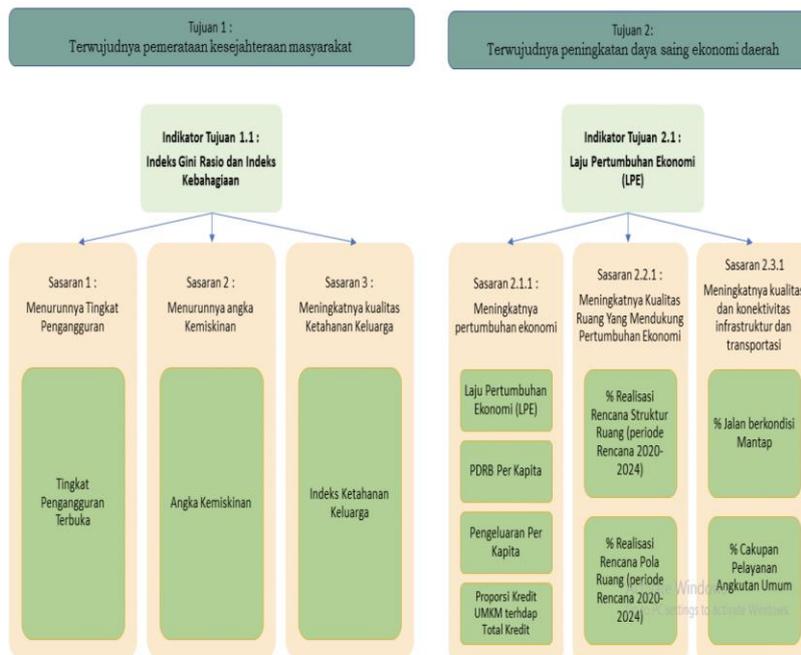
Gambar 2.3. Misi 1 Kota Bogor

## MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS



Gambar 2.4. Misi 2 Kota Bogor

## MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA



Gambar 2.5. Misi 3 Kota Bogor

### 3.2. Proses Bisnis Kota Bogor

Selain itu, sesuai dengan arahan Keputusan Walikota Bogor nomor 061/Kep.071.1-Bag.Org/2021 tahun 2021 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor 061.45-417 tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah melakukan pemodelan Peta Proses Bisnis seperti tampak pada Gambar dibawah dan penjelasan Peta Relasi pada Gambar berikutnya . Kota Bogor memetakan 5 (lima) Proses Utama, 5 (lima) Proses Pendukung dan 6 (enam) Sistem Manajemen. Pengelompokan proses bisnis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Proses Utama Kota Bogor

BKT-01	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-02	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter
BKT-03	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani
BKT-04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
BKT-05	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Gambar 2.5. Proses Pendukung Kota Bogor

BKT-06	Pengelolaan Data dan Informasi
BKT-07	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
BKT-08	Pengelolaan Saran dan Prasarana
BKT-09	Pengelolaan Pelaporan
BKT-10	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

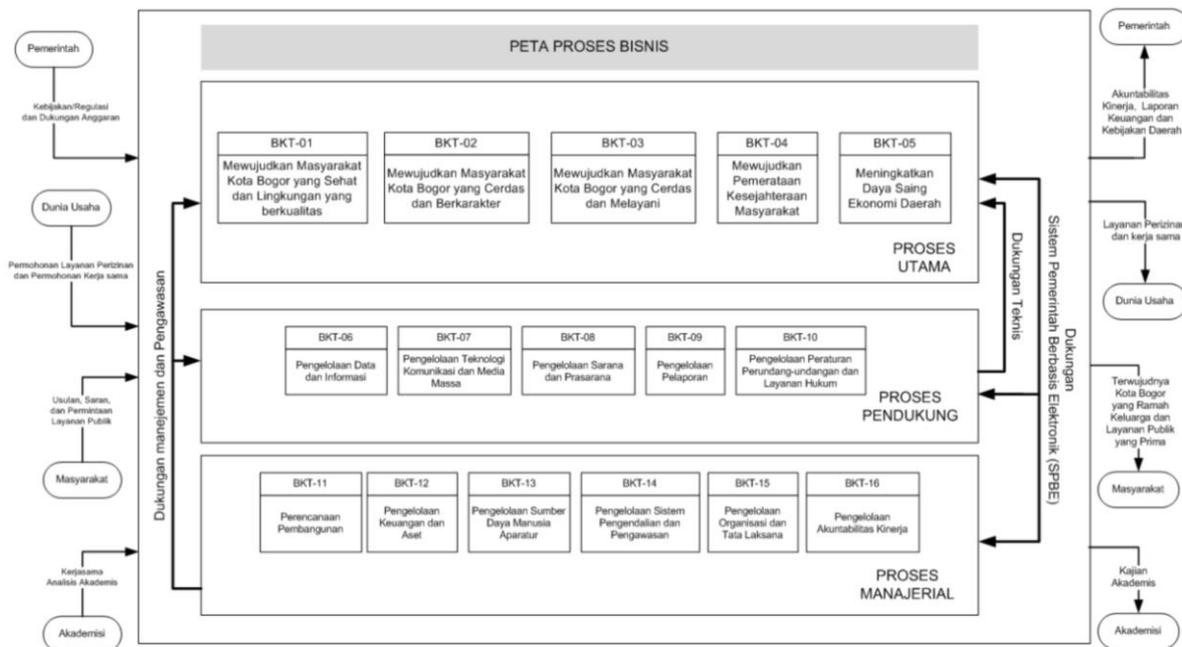
Tabel 2.6. Proses Manajerial Kota Bogor

BKT-11	Perencanaan Pembangunan
BKT-12	Pengelolaan Keuangan dan Aset
BKT-13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
BKT-14	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
BKT-15	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
BKT-16	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Jika didasarkan pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) nasional maka pengelompokan proses Bisnis Kota Bogor akan berada pada posisi pemetaan sebagai berikut:

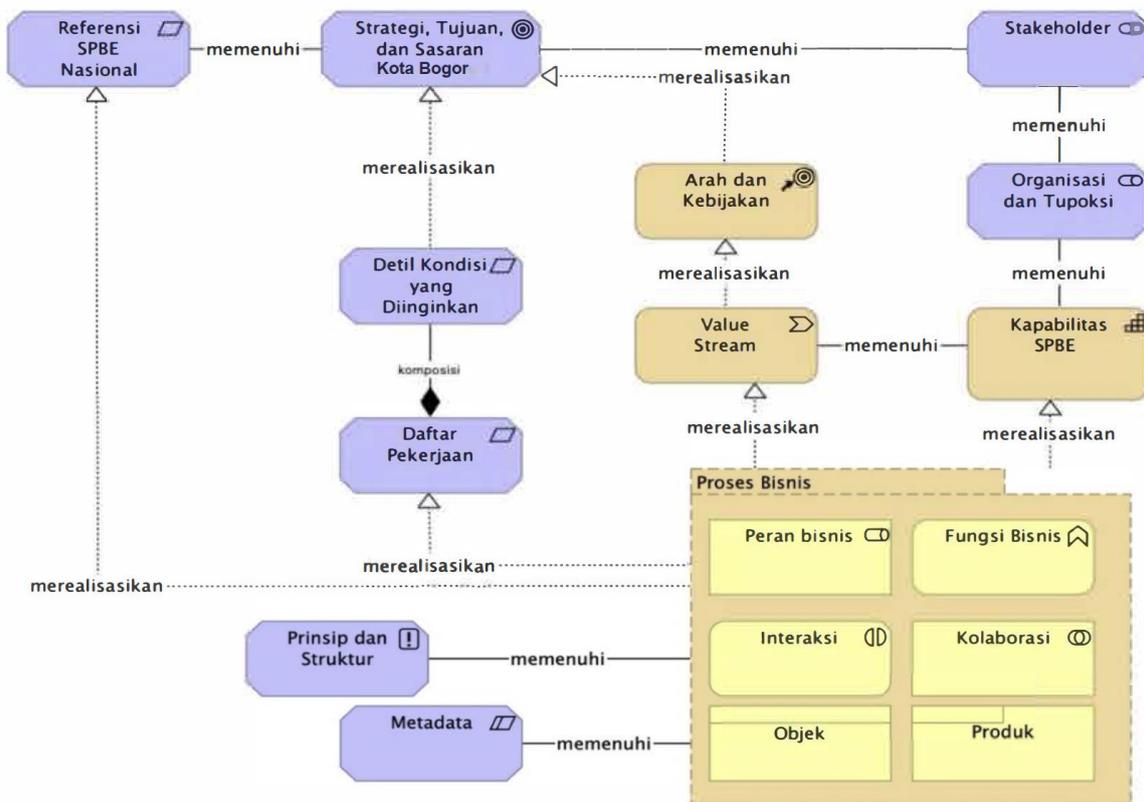
- **Level 1** : berada pada kelompok **RAB.09 Pemerintahan Umum**
- **Level 2** : berada pada kelompok **RAB.09.01 - 09.07**
- **Level 3** : berada pada kelompok **sesuai dengan urusan OPD**

Sehingga seluruh Level 0 proses bisnis Kota Bogor akan berada mulai pada Level-4 sampai Level ke-N proses bisnis jika dilihat secara nasional.



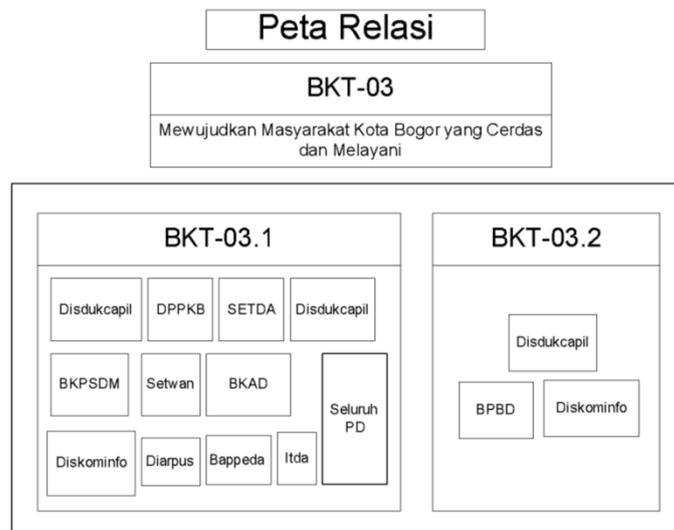
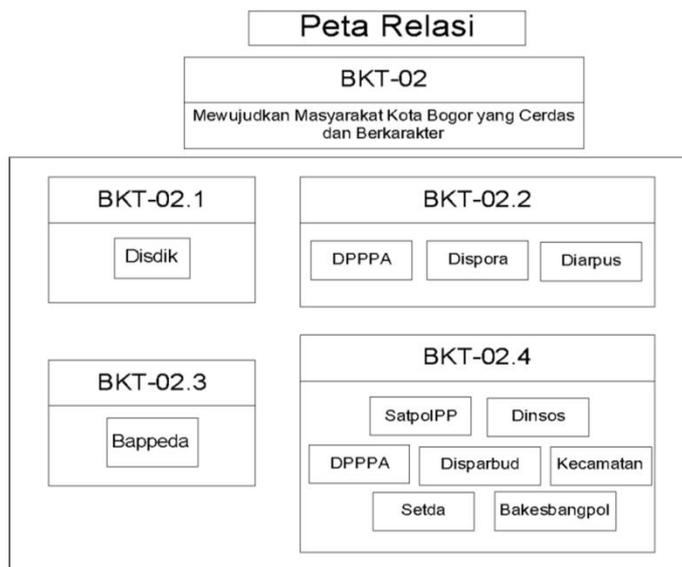
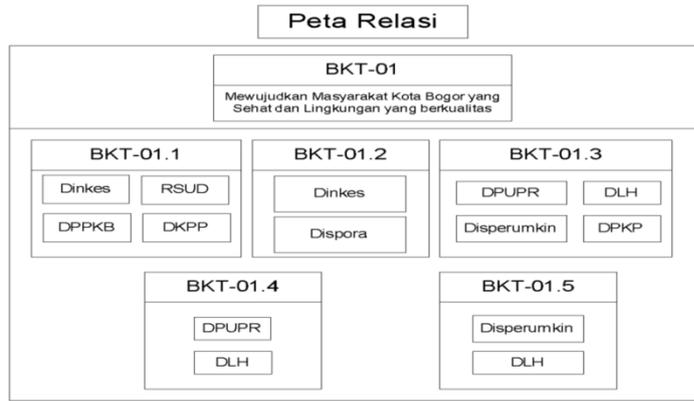
Gambar 2.6. Peta Proses Bisnis Kota Bogor

#### 4. Kerangka Arsitektur Proses Bisnis Target



Gambar 2.7. Kerangka arsitektur proses bisnis target

Kerangka arsitektur proses bisnis target pada Gambar 19 menunjukkan bahwa Referensi SPBE nasional menjadi acuan utama yang selaras dengan strategi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Bogor, yang selanjutnya diturunkan ke dalam arah dan kebijakan, dan diturunkan dalam value streams. Selain itu, strategi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Bogor juga menjadi acuan dalam penetapan stakeholders, organisasi, dan tupoksi serta kapabilitas SPBE. Arsitektur proses bisnis meliputi pemetaan peran bisnis, fungsi bisnis, interaksi, kolaborasi, objek dan produk yang berkaitan dengan value streams, kapabilitas, serta tetap mengacu pada referensi SPBE nasional, prinsip dan struktur, serta metadata proses bisnis. Kapabilitas SPBE juga harus dapat menggambarkan keselarasan antara people (peran dan struktur organisasi), process (proses bisnis yang baik sesuai panduan dan pencapaian sasaran organisasi), serta technology (aplikasi dan infrastruktur pendukung



Gambar 2.8. Peta Relasi Proses Bisnis Kota Bogor

## 5. Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Daftar proses bisnis dan metadatanya ditunjukkan pada Tabel 2.7.

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
<b>Proses Utama</b>						
BKT-DAB.01	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas		RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-DAB.01.01	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	DINKES,RSUD,DPPKB, DKPP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas

<b>ID</b>	<b>Nama Bisnis/Urusan</b>	<b>→ Unit Kerja (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 2 (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 3 (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 4 (Dependency)</b>
BKT-DAB.01.02	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DINKES,DISPORA	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-DAB.01.03	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	DPUPR,DLH,DISPERKIM,DPKP	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-DAB.01.04	Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar dan kerusakan lingkungan	DPUPR,DLH	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
BKT-DAB.01.05	Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	DISPERKIM,DLH	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-DAB.02	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)		RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Manajemen Tenaga Pendidikan	
BKT-DAB.02.01	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	DISDIK	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Manajemen Tenaga Pendidikan	
BKT-DAB.02.02	Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	DPPPA,DISPORA,DIAR PUS	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.05.01 Pemberdayaan Pemuda	
BKT-DAB.02.03	Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	BAPPEDA	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	RAB.06.03.05 Pengelolaan Inovasi Dan Inovasi	
BKT-DAB.02.04	Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	SATPOL PP, DINSOS,DPPPA,DISPA RBUD,Kecamatan,SET DA,BAKESBANGPOL	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	
BKT-DAB.03	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melavani (Smart Government)		RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.03.04 perumahan	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
BKT-DAB.03.01	Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DISDUKCAPIL,DPPKB,SETDA,BKPSDM,SETWANA,BKAD,DISKOMINFO,DIARPUS,BAPPEDA,ITDA	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	
BKT-DAB.03.02	Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	DISDUKCAPIL,BPBD,DISKOMINFO	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Pemerintahan	
BKT-DAB.04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat					
BKT-DAB.04.01	Menurunkan Tingkat Pengangguran	DISNAKER,DISPARBUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
BKT-DAB.04.02	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	DINSOS,BAPPEDA,SETDA,BPBD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
BKT-DAB.04.03	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	DISPERUMKIM,DPPPA ,DKPP,BPBD	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	
BKT-DAB.05	Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekanami Daerah		RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	
BKT-DAB.05.01	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	DINKUMDAGIN,BAPPEDA,DMPTSP,DKPP,DI SPARBUD,BAPPENDA, SETDA	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	
BKT-DAB.05.02	Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	DPUPR,BAPPEDA,SET DA,DLH	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.01 Pembinaan Industri Regional	
BKT-DAB.05.03	Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	DPUPR,DISHUB	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.04 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	
<b>Proses Pendukung</b>						
BKT-DAB.06	Pengelolaan Data dan Informasi					
BKT-DAB.07	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa					

ID	Nama Bisnis/Urusan	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)
BKT-DAB.08	Pengelolaan Saran dan Prasarana					
BKT-DAB.09	Pengelolaan Pelaporan					
<b>Proses Manajerial</b>						
BKT-DAB.10	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum					
BKT-DAB.11	Perencanaan Pembangunan					
BKT-DAB.12	Pengelolaan Keuangan dan Aset					
BKT-DAB.13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur					
BKT-DAB.14	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan					
BKT-DAB.15	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana					

<b>ID</b>	<b>Nama Bisnis/Urusan</b>	<b>→ Unit Kerja (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 2 (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 3 (Dependency)</b>	<b>→ RAB Level 4 (Dependency)</b>
BKT-DAB.16	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					

## 6. Identifikasi dan Deskripsi Proses Bisnis Kota Bogor Proses Bisnis Utama

No	Proses Bisnis Utama	Sub Proses Bisnis	Unit Kerja
1	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas (BKT-01)</b>	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (BKT-01.01)	Dinkes, RSUD, DPPKB, DKPP
		Meningkatkan Prilaku Hidup Sehat (BKT-01.02)	Dinkes, Dispora
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman (BKT-01.03)	DPUPR, DLH, Disperumkim, DPKP
		Mengendalikan Sumber-sumber Pencemar dan kerusakan Lingkungan (BKT-01.04)	DPUPR, DLH
		Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan (BKT-01.04)	Disperumkin, DLH
2	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (BKT-02)</b>	Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (BKT-02.01)	Disdik
		Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	DPPPA, Dispora, Diarpus

		(BKT-02.02)	
		Meningkatkan Kretivitas dan Inovasi Masyarakat (BKT-02.03)	Bappeda
		Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat (BKT-02.04)	SatpolPP, Dinsos, DPPPA, Disparbud, Kecamatan, SETDA, Bakesbangpol
3	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani (BKT-03)</b>	Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (BKT-03.01)	Seluruh PD
		Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta pengelolaan Pelayanan Publik berbasis Teknologi / Smart City (BKT-03.02)	Disdukcapri, BPBD, Diskominfo
4	<b>Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (BKT-04)</b>	Menurunkan Tingkat Pengangguran (BKT-04.01)	Disnaker, Disparbud
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan (BKT-04.02)	Dinsos, Setda, Bappeda, BPBD

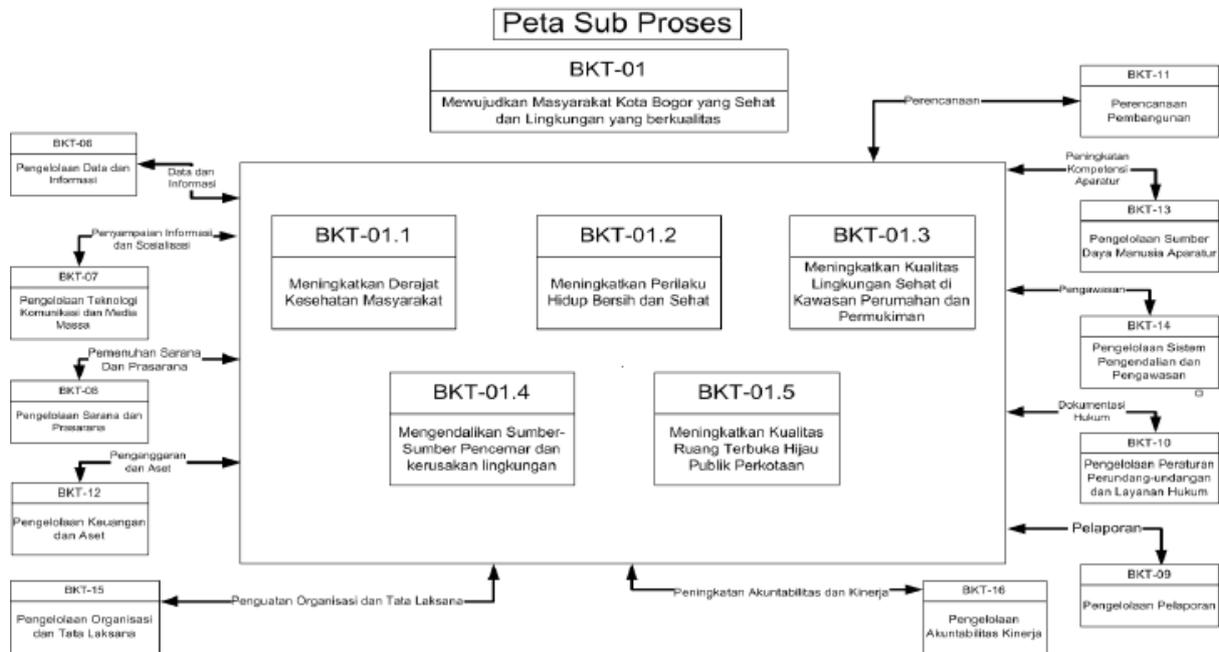
		Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan (BKT-04.03)	Disperumkin, DKPP, DPPPA, BPBD
5	<b>Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah (BKT-05)</b>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (BKT-05.01)	DinKUKMDagin, Bappeda, DMPTSP, DKPP, Disparbud, Bapenda, SETDA
		Meningkatkan Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (BKT-05.02)	DPUPR, Bappeda, SETDA, DLH
		Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi (BKT-05.03)	DPUPR, Dishub

## 7. Gambar ulang peta sub proses bisnis utama level-O

Tahap ini dilakukan untuk menyederhanakan dan meningkatkan pemahaman terhadap peta sub proses bisnis utama Kota Bogor, yaitu BKT-O1, BKT-02, BKT-3, BKT-04, BKT-05,

### **BKT-O1**

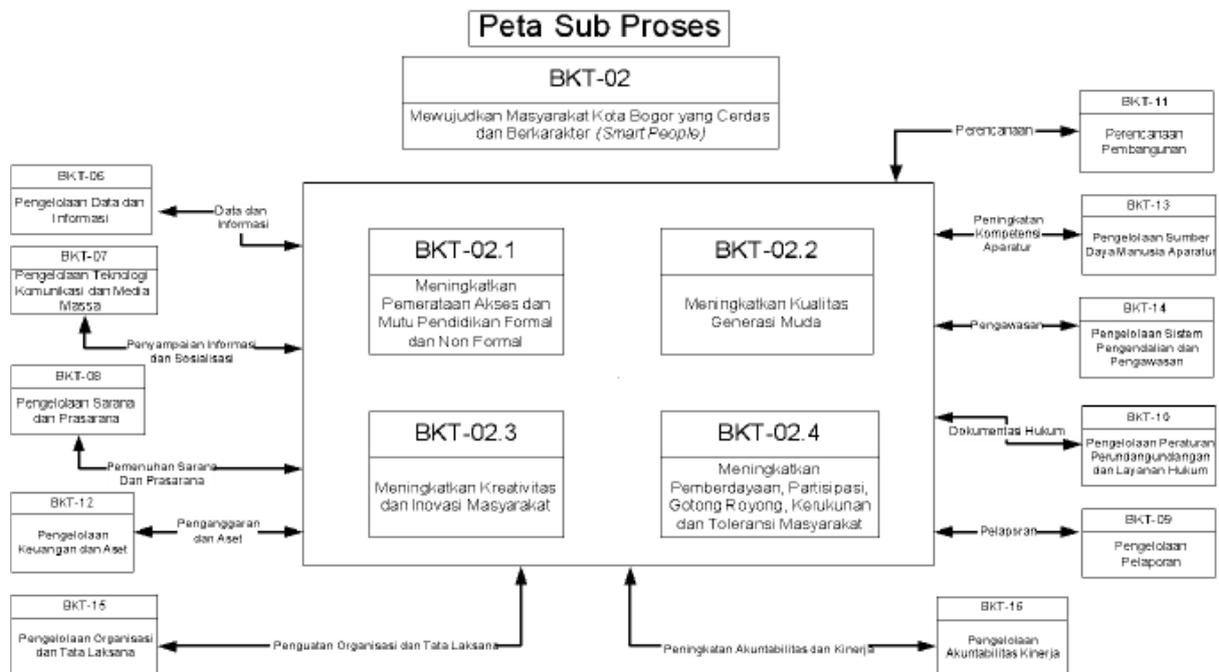
BKT-O1 merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas



Gambar 2.9. Peta Sub Proses BKT-01

## BKT-02

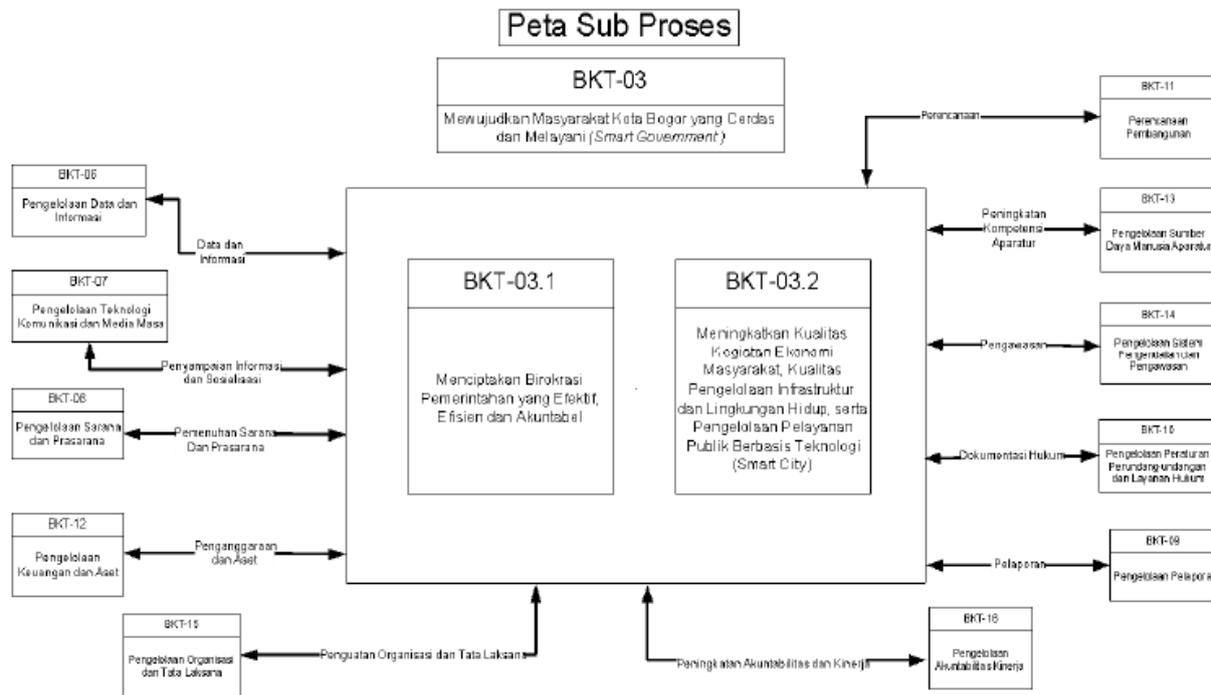
BKT-02 merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter.



Gambar 2.10. Peta Sub Proses BKT-02

## BKT-03

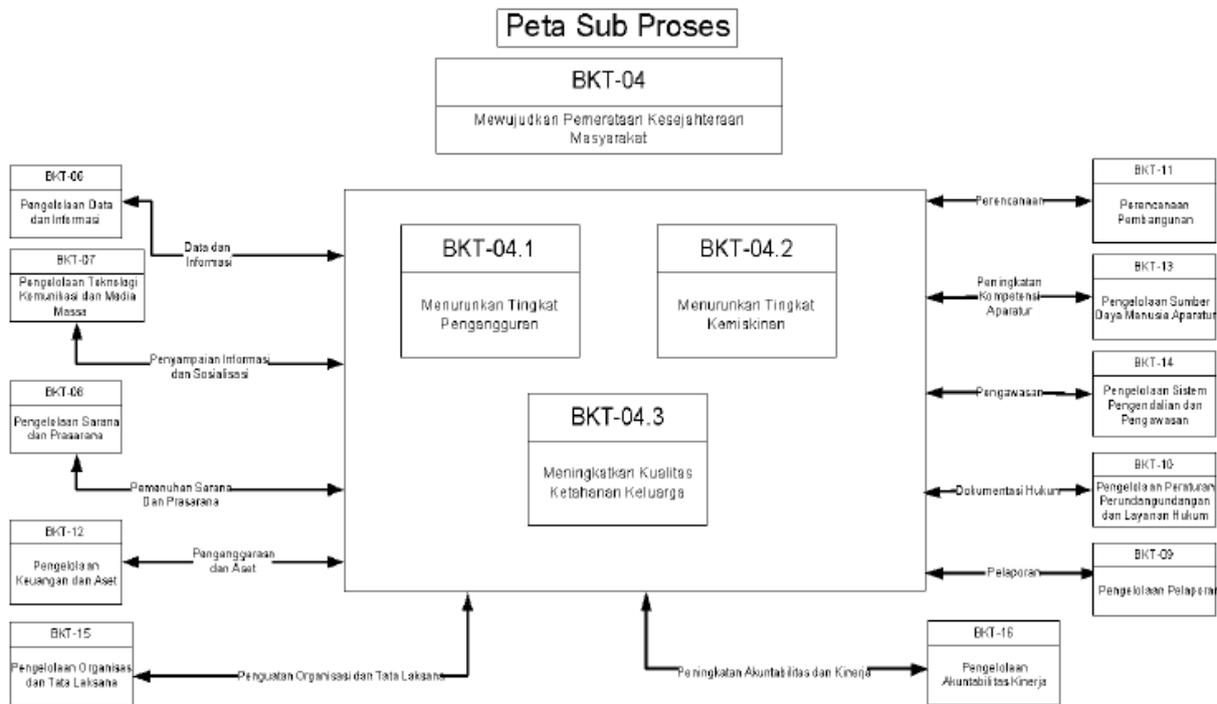
BKT-03 merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani.



Gambar 2.11 Peta Sub Proses BKT-03

## BKT-04

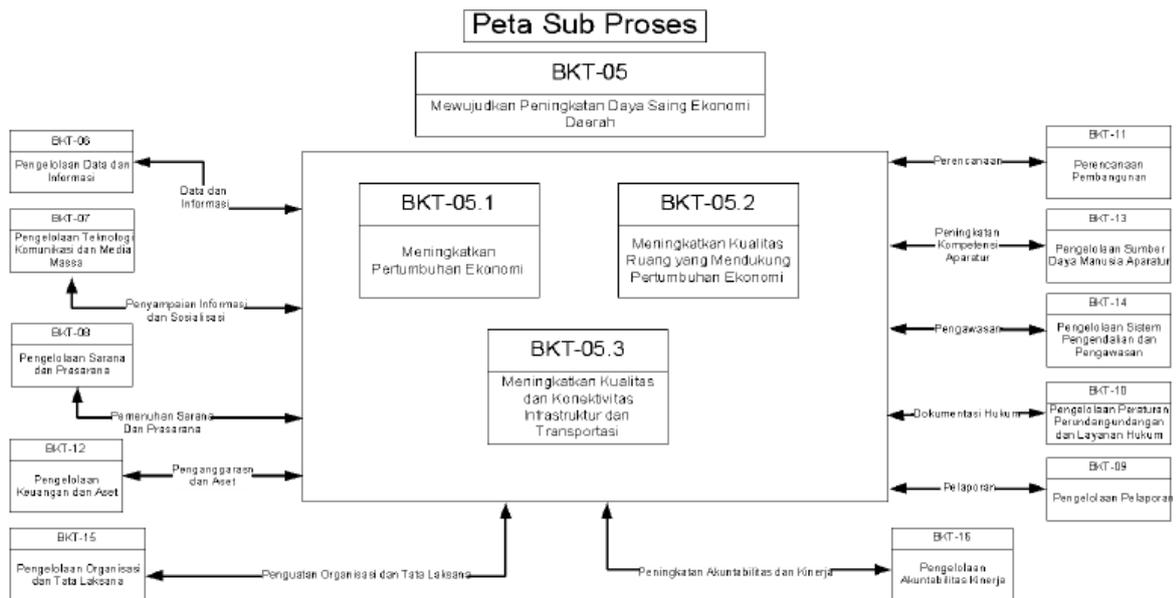
BKT-04 merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.



Gambar 2.12. Peta Sub Proses BKT-04

### BKT-05

BKT-05 merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah.



Gambar 2.13. Peta Sub Proses BKT-05

## C. Analisis Gap dan Rekomendasi

### 1. Analisis terhadap kondisi saat ini

Berdasarkan analisis dokumen dengan unit kerja Kota Bogor, telah dilakukan identifikasi proses bisnis terhadap daftar SOP utama di Kota Bogor. Sejumlah 94 SOP dan diidentifikasi telah dipetakan berdasarkan proses bisnis. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2.9.

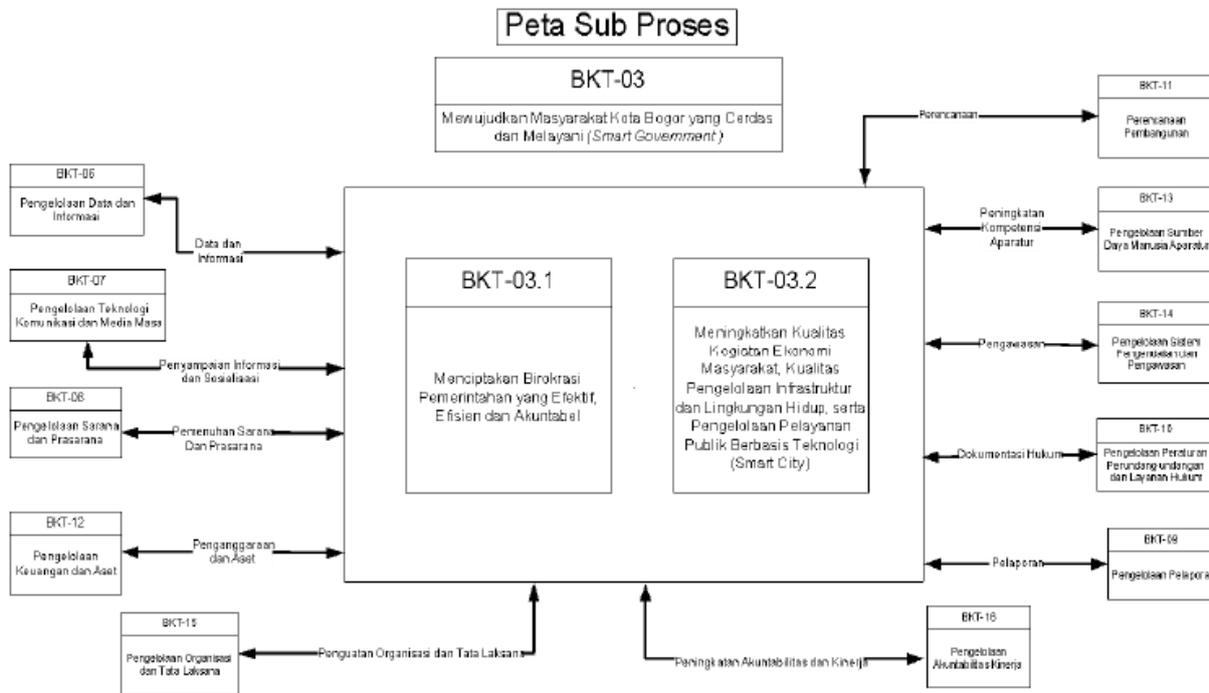
Tabel 2.9. Ringkasan pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan unit kerja

Proses Bisnis	Unit	Jumlah SOP
BKT-01,BKT-02,BKT-03,BKT-04,BKT-05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67
BKT-06,BKT-07,BKT-08,BKT-09,BKT-10	Dinas Komunikasi dan Informatika	22
BKT-11,BKT-12,BKT-13,BKT-14,BKT-15, BKT-16	Sekretariat Daerah	5

Tabel 20 menunjukkan bahwa enam belas proses bisnis yang meliputi lima proses bisnis utama, lima proses bisnis pendukung dan enam proses bisnis manajerial telah tersebar di seluruh perangkat Daerah Kota Bogor. Kondisi tersebut perlu didiskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait untuk memastikan apakah kondisi eksisting tersebut telah sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, berdasarkan analisis lebih lanjut pada arsitektur proses bisnis eksisting, terdapat beberapa poin analisis yang perlu didiskusikan:

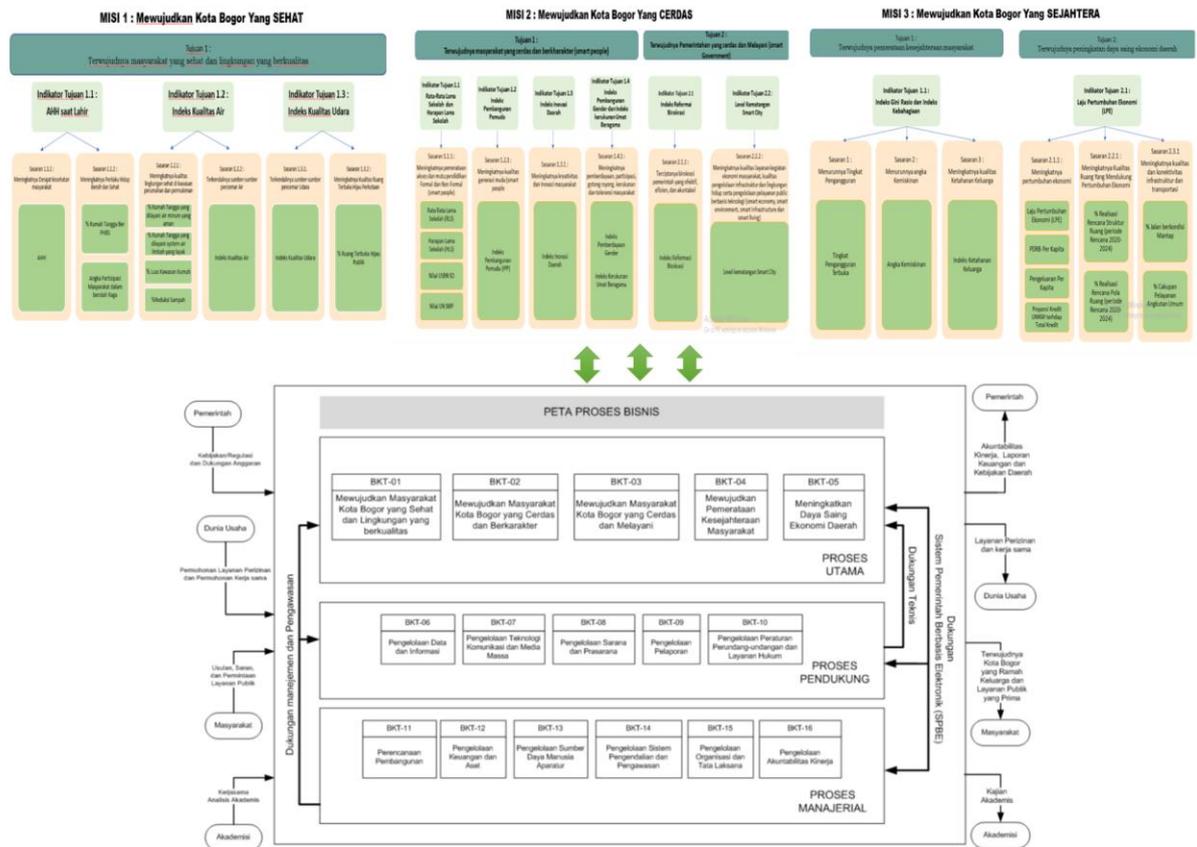
- a) Penggambaran proses bisnis belum menjelaskan alur proses dari awal (masukan) ke akhir (keluaran). Sebagai contoh, proses bisnis BKT-03 ditunjukkan pada Gambar 39.



Gambar 2.14. Proses bisnis BKT-03: Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani

Gambar 39 sudah menunjukkan entitas masukan di sebelah kiri, proses di tengah, dan entitas keluaran di sebelah kanan. Namun, keterlibatan entitas masukan dalam proses belum tergambar secara jelas. Misalnya, Organisasi memberikan draft Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani (03) sebagai masukan dalam proses bisnis BKT-03, tapi tidak tergambar draft tersebut disampaikan sebagai masukan untuk aktivitas mana dalam BKT-03. Selain itu, alur proses bisnis belum menunjukkan urutan aktivitas dari masukan yang diberikan oleh entitas masukan, digunakan dalam aktivitas-aktivitas pada proses bisnis, hingga menghasilkan keluaran yang dapat digunakan oleh entitas keluaran. Kondisi ini juga terjadi pada seluruh penggambaran proses bisnis di Kota Bogor.

- b) Pemetaan sasaran bisnis dan IKU ke proses bisnis belum menunjukkan pembagian peran proses bisnis dalam pencapaian sasaran. Sebagai contoh, Gambar 40 menunjukkan Kerangka Proses Bisnis Kota Bogor untuk ketiga proses bisnis utama.



Gambar 2.15. Kerangka Proses Bisnis Kota Bogor untuk Proses Bisnis Utama

Gambar menunjukkan pemetaan proses bisnis BKT-01, BKT-02, BKT-03, BKT-04, BKT-05 dan BKT-06 ke tujuan, sasaran dan IKU Kota Bogor. Namun masing-masing proses bisnis terpetakan ke semua tujuan, sasaran, dan IKU. Penggambaran ini dapat ditingkatkan dengan memetakan masing-masing proses bisnis ke tujuan, sasaran, dan IKU terkait saja, untuk memastikan bahwa pengukuran pencapaian tujuan, sasaran, dan IKU telah dapat dipenuhi dengan proses-proses bisnis yang ada. Kondisi ini juga terjadi pada pemetaan proses bisnis pendukung.

## 2. Analisis Gap dan Rekomendasi

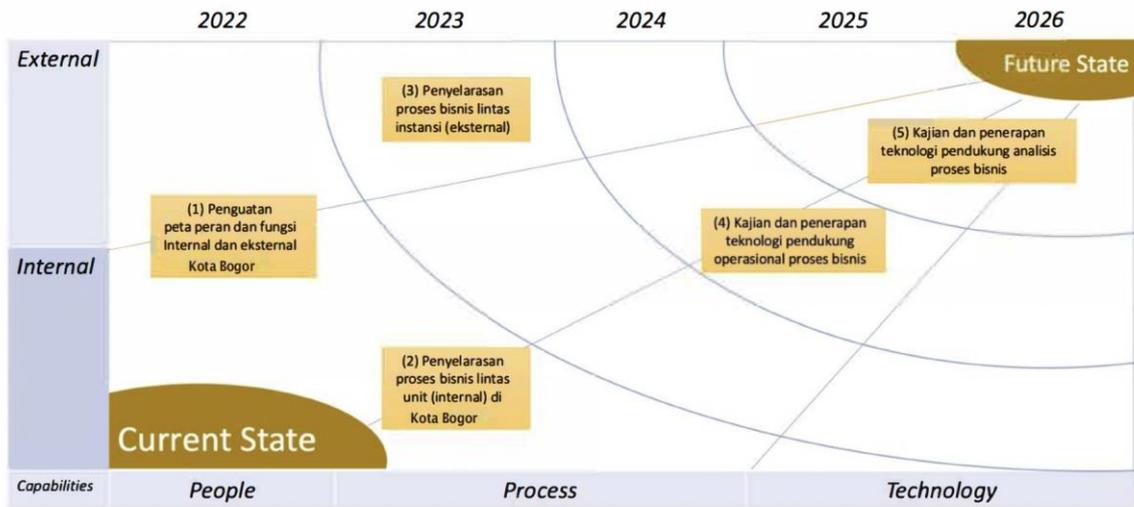
No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
1	- Pemetaan proses bisnis ke dalam SOP utama menunjukkan adanya aktivitas/ proses bisnis yang serupa dilakukan oleh unit-unit bisnis yang berbeda. - Beberapa SOP terkait proses tertentu belum tersedia.	Seluruh aktivitas / proses bisnis yang serupa dilakukan oleh unit-unit bisnis yang berbeda dilaksanakan dengan cara yang sama dengan perbedaan-perbedaan pada detail spesifik yang terdokumentasi.	Peta peran dan fungsi internal dan eksternal perlu di-review dan diselaraskan lagi antara strategi, stakeholders, peran dan fungsi bisnisnya.	Penguatan peta peran dan fungsi internal dan eksternal Kota Bogor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stakeholder map</li> <li>- Strategy map</li> <li>- Peta proses bisnis</li> </ul>
2	Penggambaran proses bisnis lintas unit (internal) di Kota Bogor belum jelas menunjukkan keterhubungan antar unit yang berperan dalam proses bisnis.	Penggambaran proses bisnis harus dapat menunjukkan input, proses, output, serta keterkaitan antara satu unit dengan unit lain yang berkaitan.	Perlu dilakukan diskusi dan penggambaran kembali proses bisnis lintas unit (internal) di Kota Bogor.	Penyelarasan proses bisnis lintas unit (internal) di Kota Bogor
3	Keterlibatan stakeholder eksternal pada proses bisnis di Kota Bogor belum tergambar dengan lengkap, misalnya harmonisasi dalam perumusan kebijakan.	Penggambaran proses bisnis harus mengacu pada referensi SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap.	Penggambaran proses bisnis perlu ditinjau ulang untuk menyelaraskan dengan referensi SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap.	Penyelarasan proses bisnis lintas instansi (eksternal)
4	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit belum diotomatisasi dengan	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit sebaiknya dapat diotomatisasi	Perlu dilakukan kajian dan penerapan teknologi pendukung	Kajian dan penerapan teknologi pendukung operasional proses bisnis, misalnya:

No	Kondisi saat ini	Kondisi Target	Analisis GAP	Rekomendasi
	teknologi pendukung operasional proses bisnis.	dengan teknologi pendukung operasional proses bisnis.	operasional proses bisnis di Kota Bogor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi perumusan kebijakan</li> <li>- Aplikasi helpdesk</li> <li>- Aplikasi SDM</li> </ul>
5	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit belum dianalisis dengan dukungan teknologi analisis proses bisnis	Proses bisnis utama berpotensi untuk dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan teknologi analisis proses bisnis	Perlu kajian dan penerapan teknologi pendukung analisis proses bisnis di Kota Bogor	<p>Kajian dan penerapan teknologi pendukung analisis proses bisnis, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dashboard</li> <li>- Business Process Analytics</li> <li>- Performance Analysis</li> </ul>

#### D. Roadmap Arsitektur Proses Bisnis Target

No	Aktivitas	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penguatan peta peran dan fungsi internal dan eksternal Kota Bogor - Stakeholder map - Strategy map - Peta proses bisnis dan lintas unit kerja					
2	Penyelarasan proses bisnis lintas unit (internal) di Kota Bogor					
3	Penyelarasan proses bisnis lintas instansi (eksternal)					
4	Kajian dan penerapan teknologi pendukung operasional proses bisnis, misalnya: - Aplikasi perumusan kebijakan - Aplikasi helpdesk - Aplikasi SDM					
5	Kajian dan penerapan teknologi pendukung analisis proses bisnis, antara lain: - Dashboard - Business process analytics - Performance analysis					

Aktivitas pertama dalam roadmap tersebut berfokus pada aspek people, aktivitas kedua dan ketiga berfokus pada aspek process, sedangkan aktivitas keempat dan kelima berfokus pada aspek technology. Ilustrasi pencapaian kondisi target dari kondisi saat ini berdasarkan roadmap tersebut ditunjukkan pada Gambar 43.



Gambar 2.16. Pencapaian kondisi target dari kondisi saat ini arsitektur proses bisnis

## **BAB III**

### **ARSITEKTUR APLIKASI**

#### **A. Pendahuluan**

Arsitektur aplikasi merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur aplikasi menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Di Pemerintah Kota Bogor, aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan arsitektur aplikasi juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan delivery/prosesnya.

Arsitektur aplikasi menggambarkan kondisi arsitektur aplikasi di Pemerintah Kota Bogor saat ini, arsitektur aplikasi target, hasil analisis gap, rekomendasi serta roadmap penyusunan aplikasi itu sendiri. Dalam menyusun Arsitektur aplikasi terdapat beberapa dokumen yang dijadikan acuan diantaranya:

1. Rencana Perpres Arsitektur SPBE Nasional, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Laporan Analisis dan Pemetaan Model Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government
5. Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020-2024

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, terdapat beberapa aturan mengenai penyusunan Arsitektur SPBE sebagai berikut.

### A.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi

Berdasarkan dokumen Rencana Perpres Arsitektur SPBE Nasional, domain arsitektur aplikasi SPBE diklasifikasikan kedalam tingkatan struktur domain arsitektur menjadi 4 (empat) tingkat yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

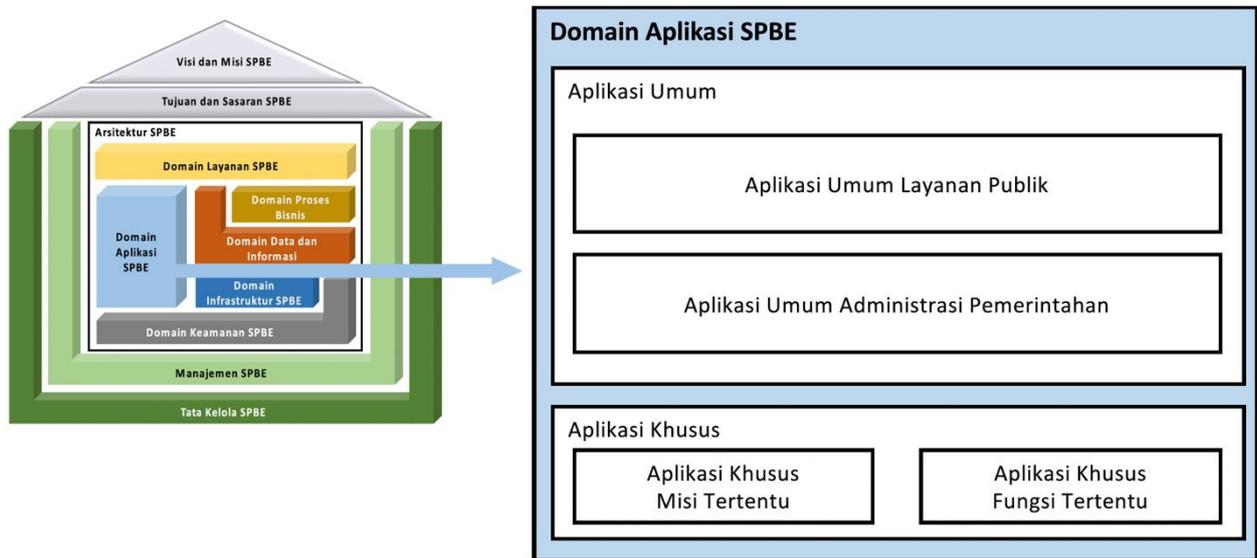
Berdasarkan gambar III.1.1, dapat dilihat bahwa arsitektur aplikasi Pemerintah Kota Bogor ada pada tingkat 3 dan tingkat 4 dengan mengacu pada SPBE Nasional di tingkat 1 dan tingkat 2 yang akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penjelasan untuk setiap tingkatan struktur domain aplikasi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Meta Data untuk Data Khusus yang Ada di Unit Kerja Pemerintah Kota Bogor.

Tingkatan Struktur Domain		Deskripsi Aplikasi
1	Domain Aplikasi	Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, yang menjadi struktur di tingkat nasional.
2	Area Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan yang menjadi struktur di tingkat nasional.
3	Kategori Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional.

<b>4</b>	Sub Kategori Aplikasi	Aplikasi yang disusun oleh IPPD sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.
----------	-----------------------	---

Domain arsitektur aplikasi SPBE memiliki beberapa komponen di dalamnya. Pembagian komponen dalam referensi aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Secara umum aplikasi pada arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi dua bagian yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi umum memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum layanan publik dan aplikasi umum administrasi pemerintahan. Sedangkan aplikasi khusus juga memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi khusus misi tertentu dan fungsi tertentu. Penjelasan untuk setiap referensi arsitektur dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

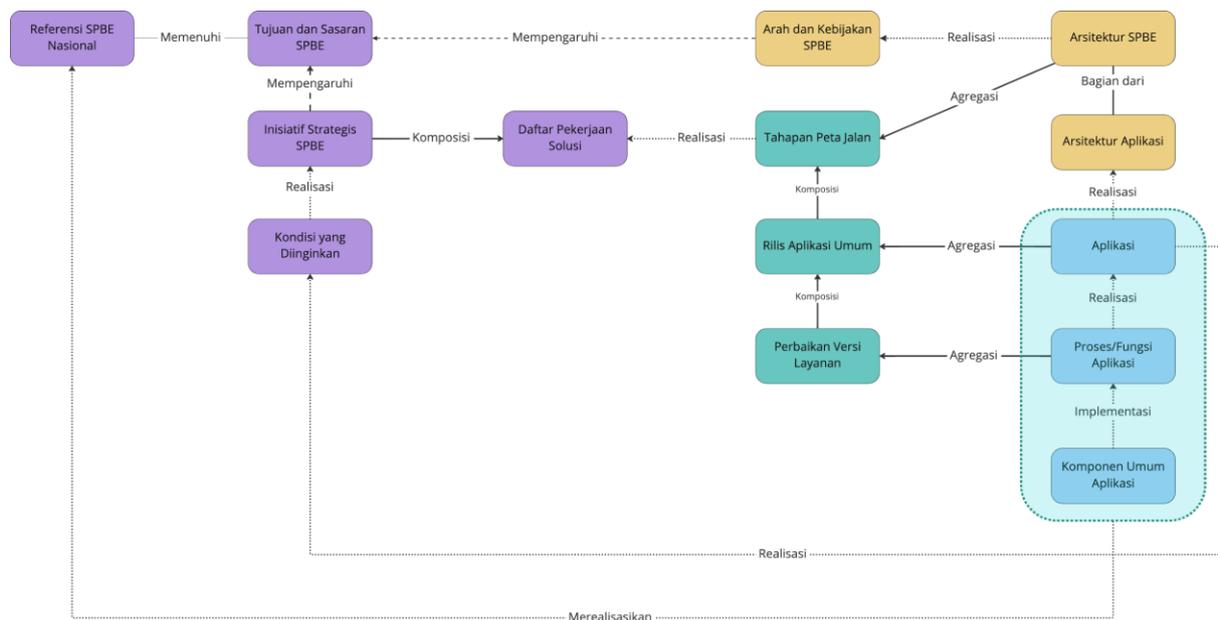
Tabel 3.2 Referensi Aplikasi SPBE (RA) Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
<b>Aplikasi Umum (01)</b>		
01.01	Aplikasi Layana n Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.

01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

## **A.2 Posisi Arsitektur Aplikasi dan Keterkaitan Antar Domain**

Penyusunan arsitektur aplikasi bukan semata-mata melihat kebutuhan aplikasi yang ada saja, tetapi juga perlu memperhatikan keselarasan antara aplikasi yang dibangun dengan tujuan dan sasaran SPBE. Keterkaitan antara domain arsitektur aplikasi dengan tujuan dan sasaran SPBE dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.

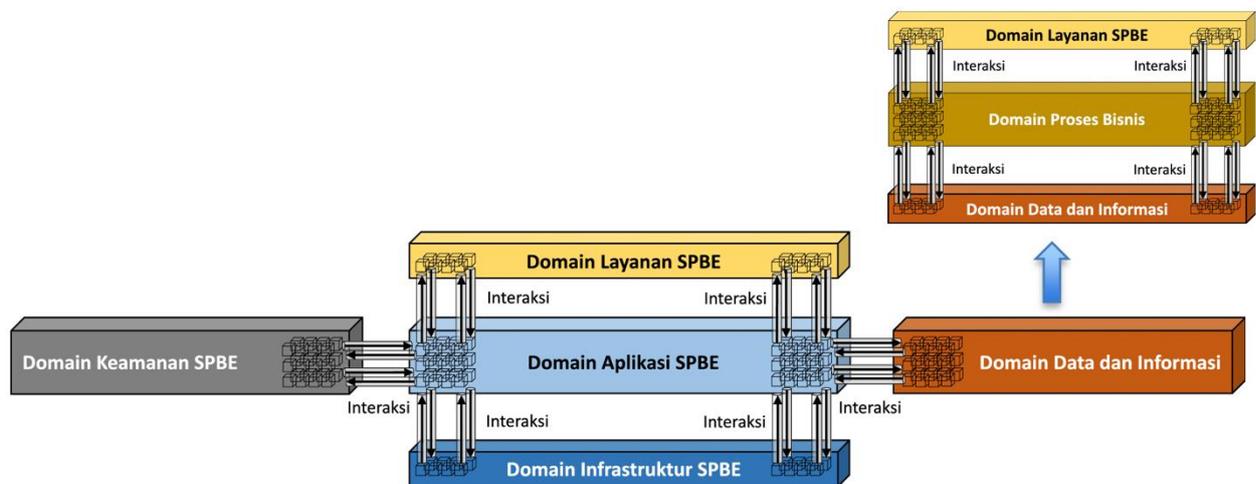


Gambar 3.3 Keselarasan antara aplikasi dan domain lainnya.

Dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran SPBE harus memenuhi Referensi SPBE Nasional dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dan Sasaran SPBE selanjutnya diturunkan menjadi Arah dan Kebijakan SPBE yang direalisasikan dalam bentuk arsitektur SPBE. Pada Arsitektur SPBE terdapat enam domain yang disusun, salah satunya adalah arsitektur Aplikasi SPBE. Keluaran dari Arsitektur Aplikasi SPBE salah satunya adalah rincian data aplikasi, proses/fungsi dari aplikasi dan komponen umum aplikasi. Keluaran ini merupakan bagian dari daftar aplikasi umum yang di dalamnya juga terdapat perbaikan detail layanan. Daftar aplikasi ini sebaiknya disajikan dalam bentuk peta jalan untuk periode tertentu sehingga dapat dijadikan target dan acuan untuk pengembangan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu daftar aplikasi juga harus diselaraskan dengan kondisi yang diharapkan oleh pengguna sehingga dapat mendukung Inisiatif Strategi SPBE dan secara tidak langsung menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran SPBE.

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE dapat berupa sebuah aplikasi atau pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Untuk mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintah secara nasional, maka pembangunan aplikasi wajib mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE yang terintegrasi secara lintas sektoral.

Arsitektur Aplikasi tidak dapat dirancang hanya untuk fokus pada data aplikasinya saja, tetapi harus dapat berkolaborasi dan bersesuaian dengan domain arsitektur yang lain. Secara langsung Arsitektur Aplikasi berinteraksi dengan arsitektur data dan informasi dalam penyampaian sistem informasi yang efektif. Secara tidak langsung, domain data dan informasi berinteraksi dengan domain proses bisnis, yang akan diselaraskan dengan domain aplikasi. Arsitektur aplikasi juga berinteraksi dengan domain infrastruktur dan keamanan tentang penggunaannya pada aplikasi. Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Sehingga domain aplikasi harus berinteraksi dengan domain layanan. Keterkaitan domain aplikasi dengan domain lainnya dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Keterkaitan Domain Aplikasi dengan Domain Lainnya

Selain berinteraksi dengan domain yang lain, Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE juga dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. Disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- b. Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (open source).

### A.3. Metadata Aplikasi SPBE

Dalam proses inventarisasi aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan disesuaikan dengan format Metadata Aplikasi SPBE yang tercantum pada dokumen rencana Perpres tentang SPBE Nasional. Atribut pada metadata bukan hanya berfokus pada nama dan fungsi aplikasi, tetapi juga harus mewadahi platform, data yang digunakan, serta hal-hal teknis lainnya terkait aplikasi. Atribut metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata arsitektur layanan SPBE.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata arsitektur data dan informasi.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)

10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile).
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau framework yang digunakan oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
21	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata Arsitektur SPBE terkait

## B. Arsitektur Aplikasi Saat Ini

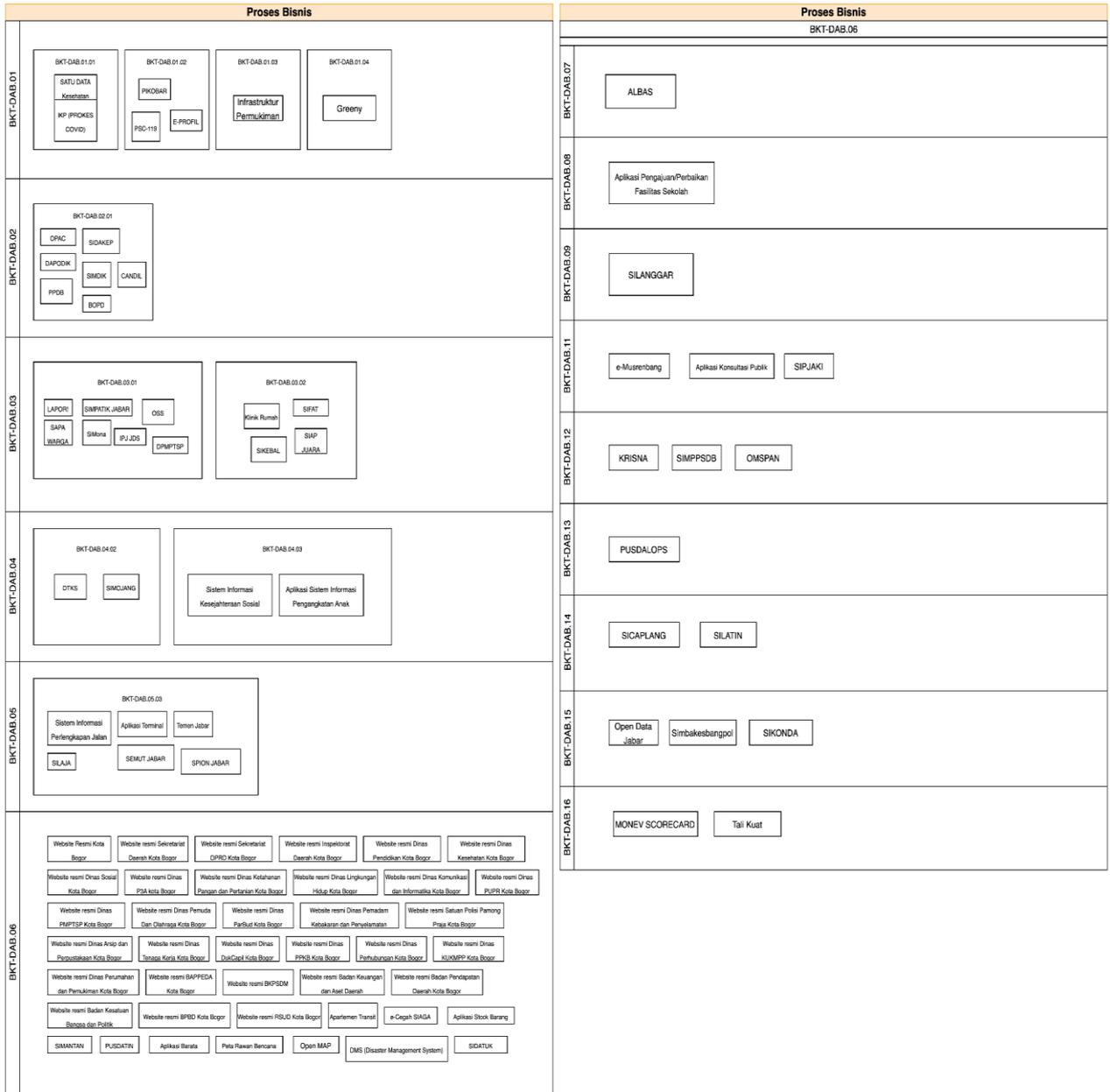
Daftar aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor didapatkan dari beberapa sumber dokumen dan juga melalui proses wawancara serta diskusi. Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bukan hanya untuk mendata aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, tetapi juga melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya. Melalui klasifikasi dan pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional yaitu berupa penciptaan layanan yang terintegrasi, dapat mengidentifikasi

peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi. Berdasarkan analisis dokumen dan hasil diskusi, maka didapatkan analisis penilaian arsitektur aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan empat bidang diantaranya:

### **B.1. Pemetaan aplikasi terhadap proses bisnis**

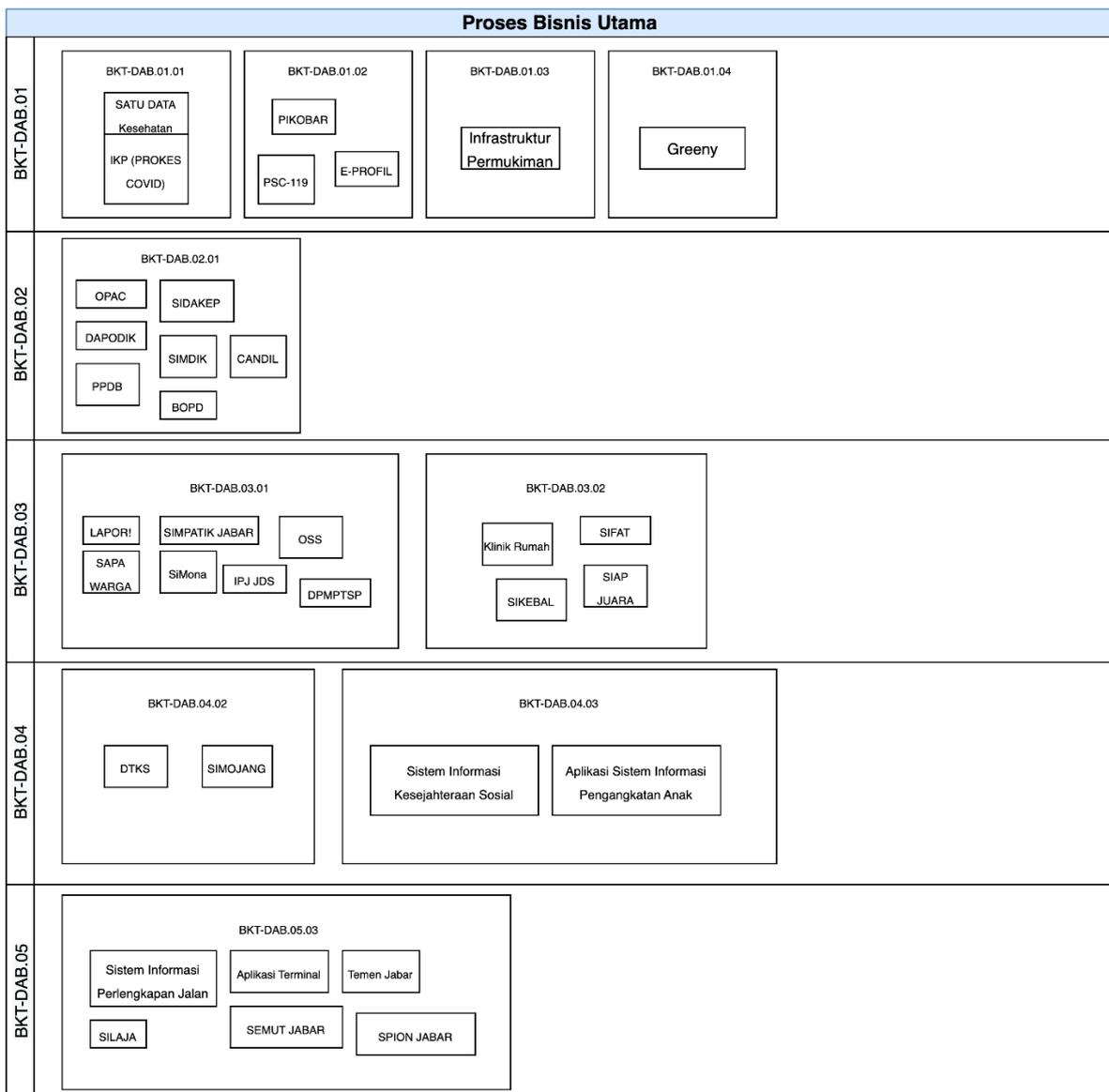
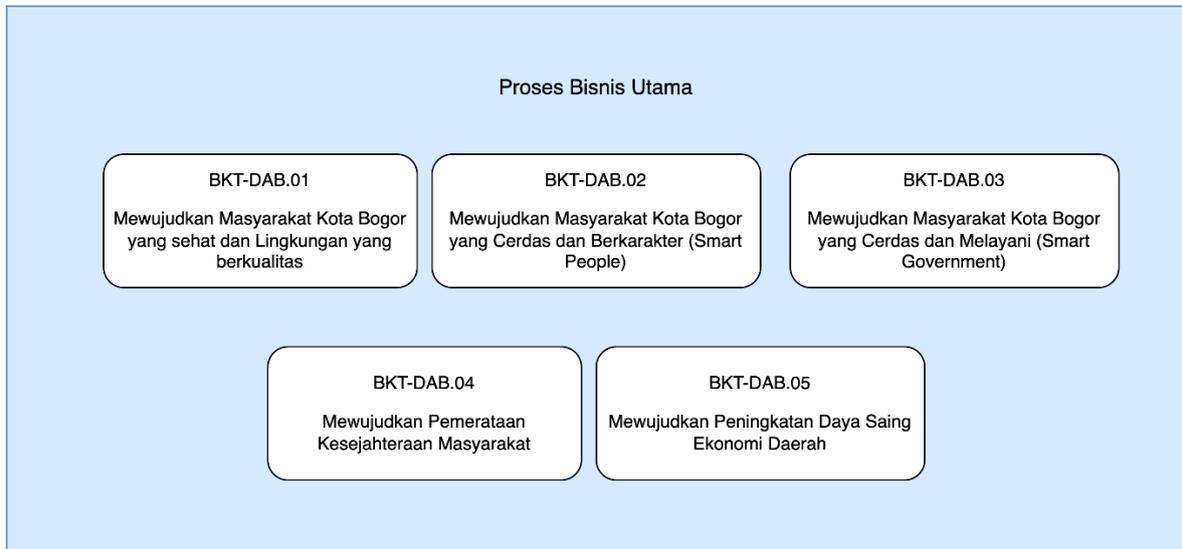
Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government di Kota Bogor, proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Bogor dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu Proses Utama, Proses Bisnis Pendukung dan Proses Bisnis Manajerial. Pada bagian ini akan digambarkan pemetaan aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terhadap proses bisnis utama dan pendukung. Pemetaan ini didasarkan pada dokumen Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Laporan Analisis dan Pemetaan Model Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022. Selain itu, beberapa informasi juga digali melalui wawancara dan diskusi yang telah dilakukan dengan perwakilan masing-masing OPD. Pada dokumen Rencana Induk TI Pemerintah Kota Bogor disajikan daftar nilai penggunaan aplikasi dari skala 1-5. Sebagian besar aplikasi berada pada tingkat penggunaan yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi belum digunakan secara optimal sehingga dibutuhkan pengembangan aplikasi atau bahkan diintegrasikan dengan aplikasi lain. Pemetaan antara aplikasi dengan proses bisnis dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut.

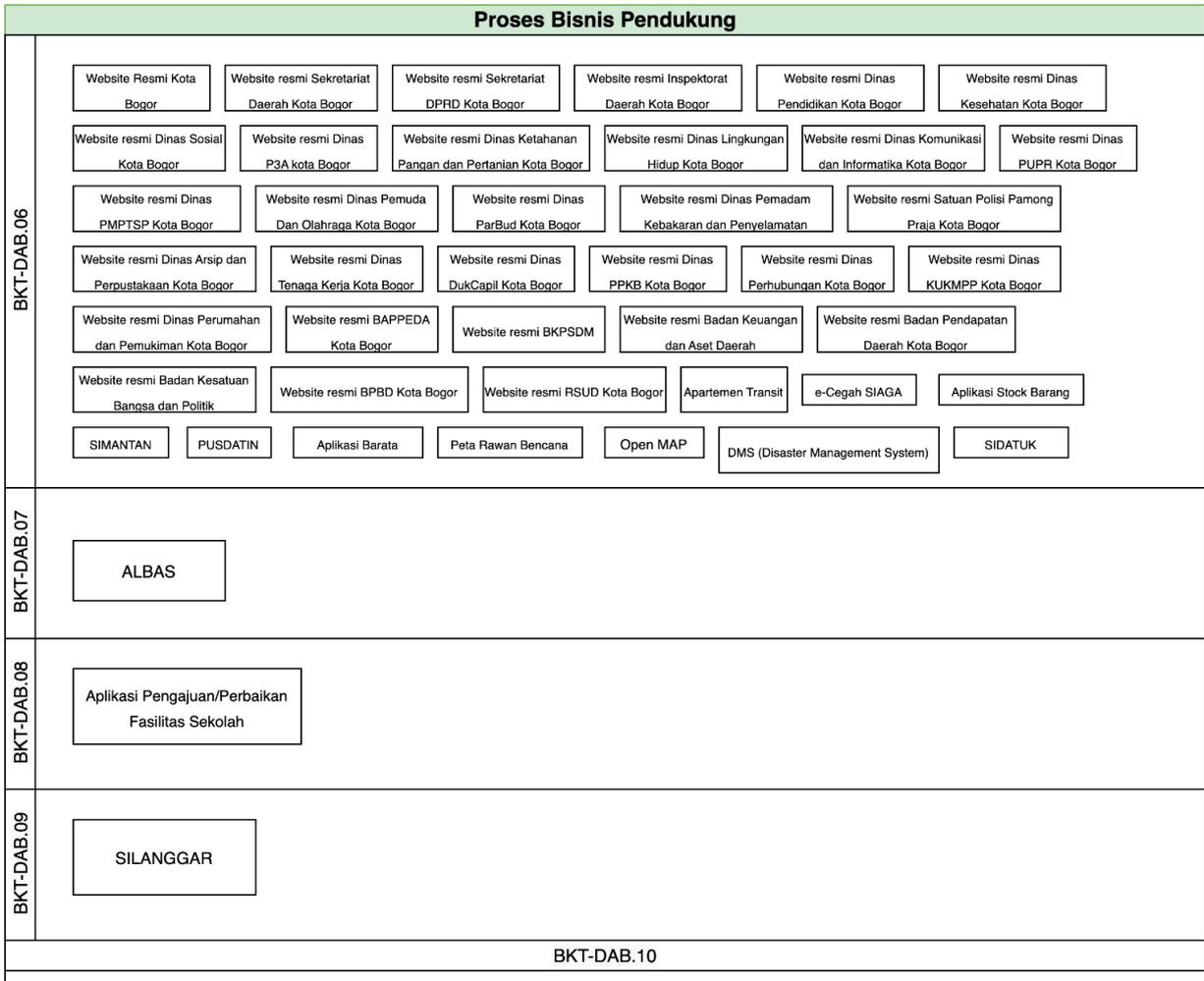
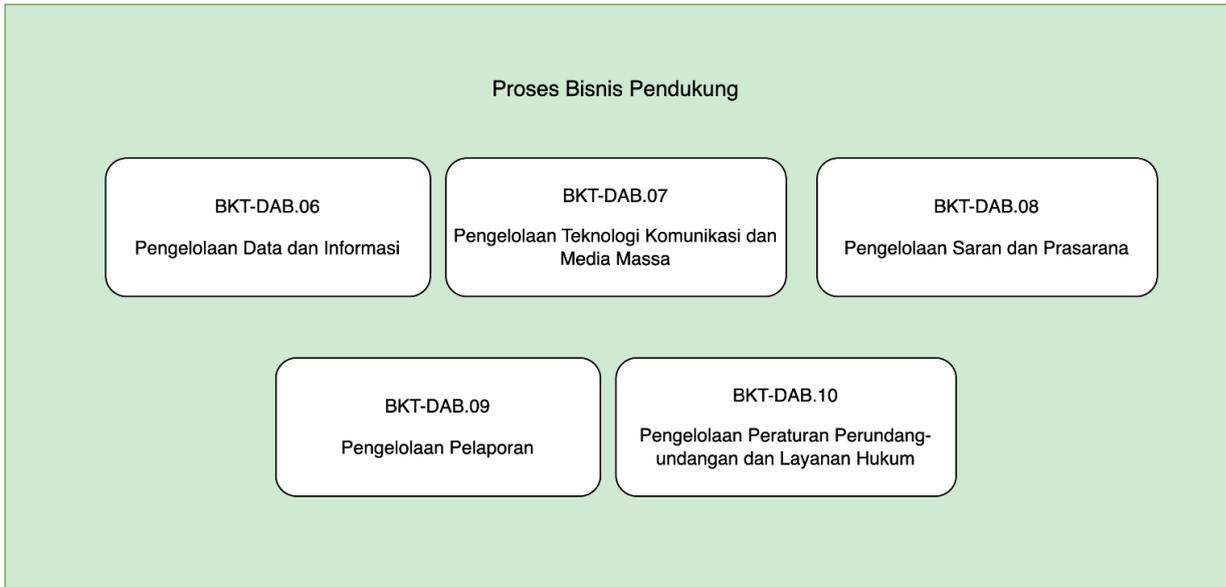


Gambar 3.5 Analisis Kondisi Awal Arsitektur Aplikasi

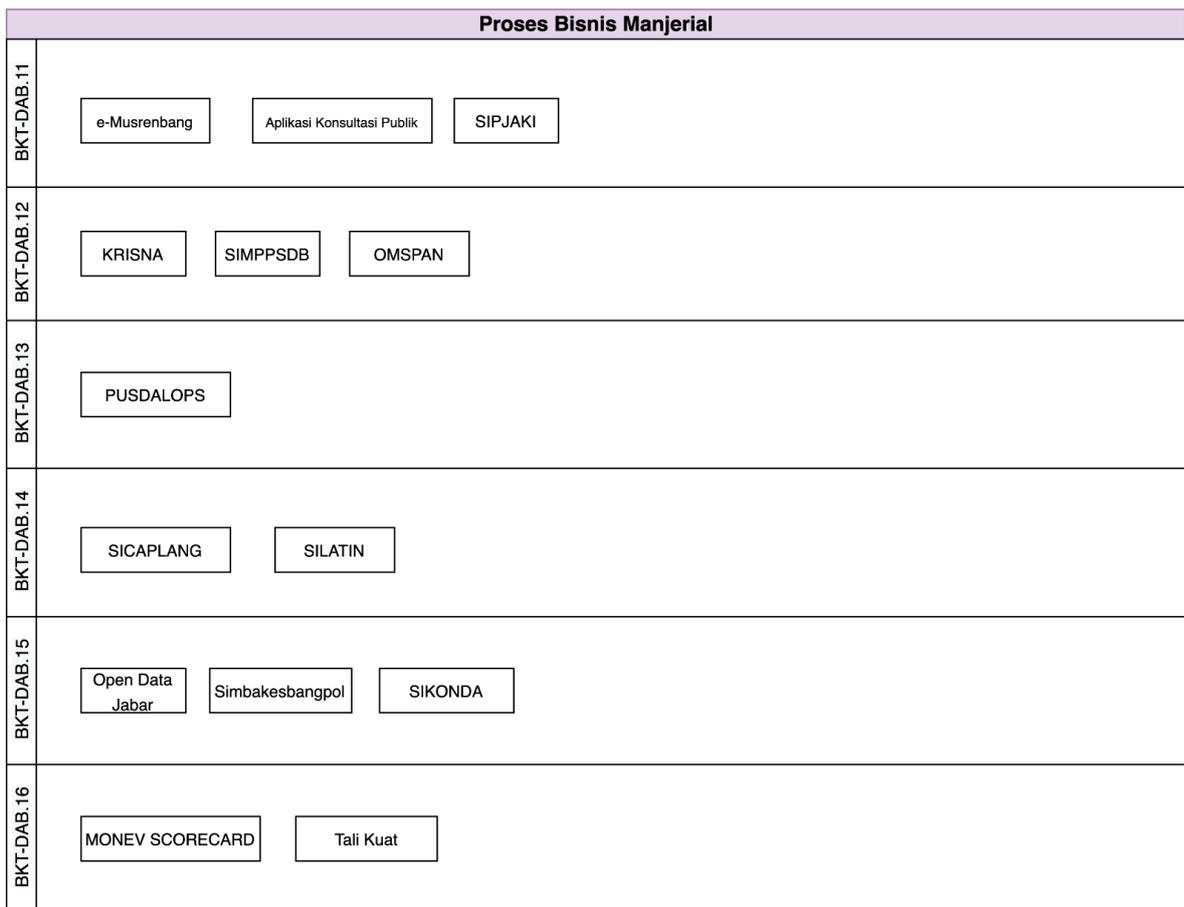
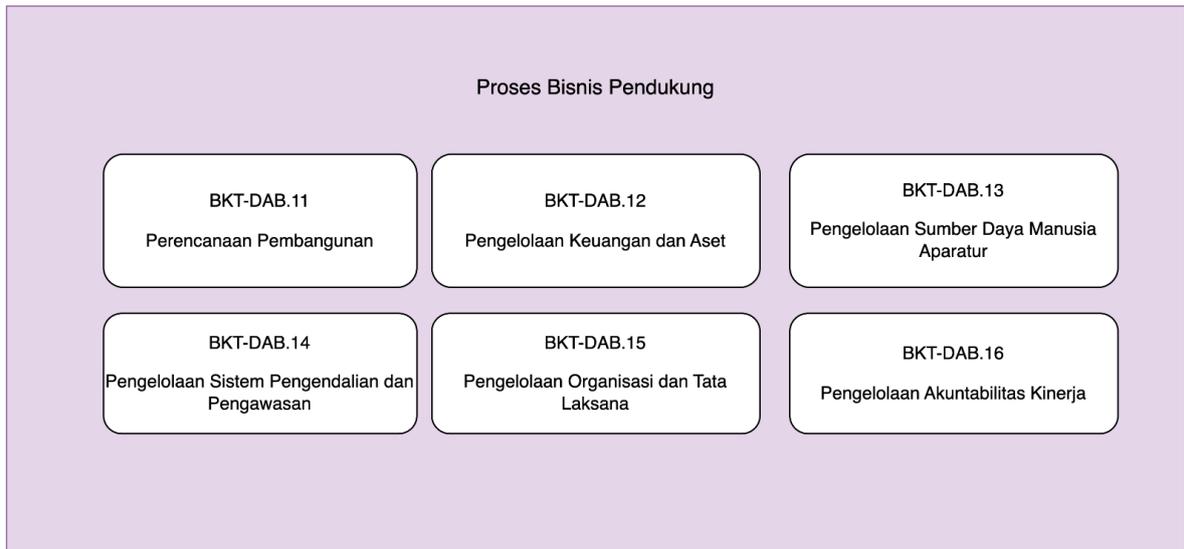
Pemetaan secara detail untuk setiap proses bisnis disajikan pada Gambar 3.6-3.8 sebagai berikut:



Gambar 3.6 Pemetaan Aplikasi pada Proses Bisnis Utama



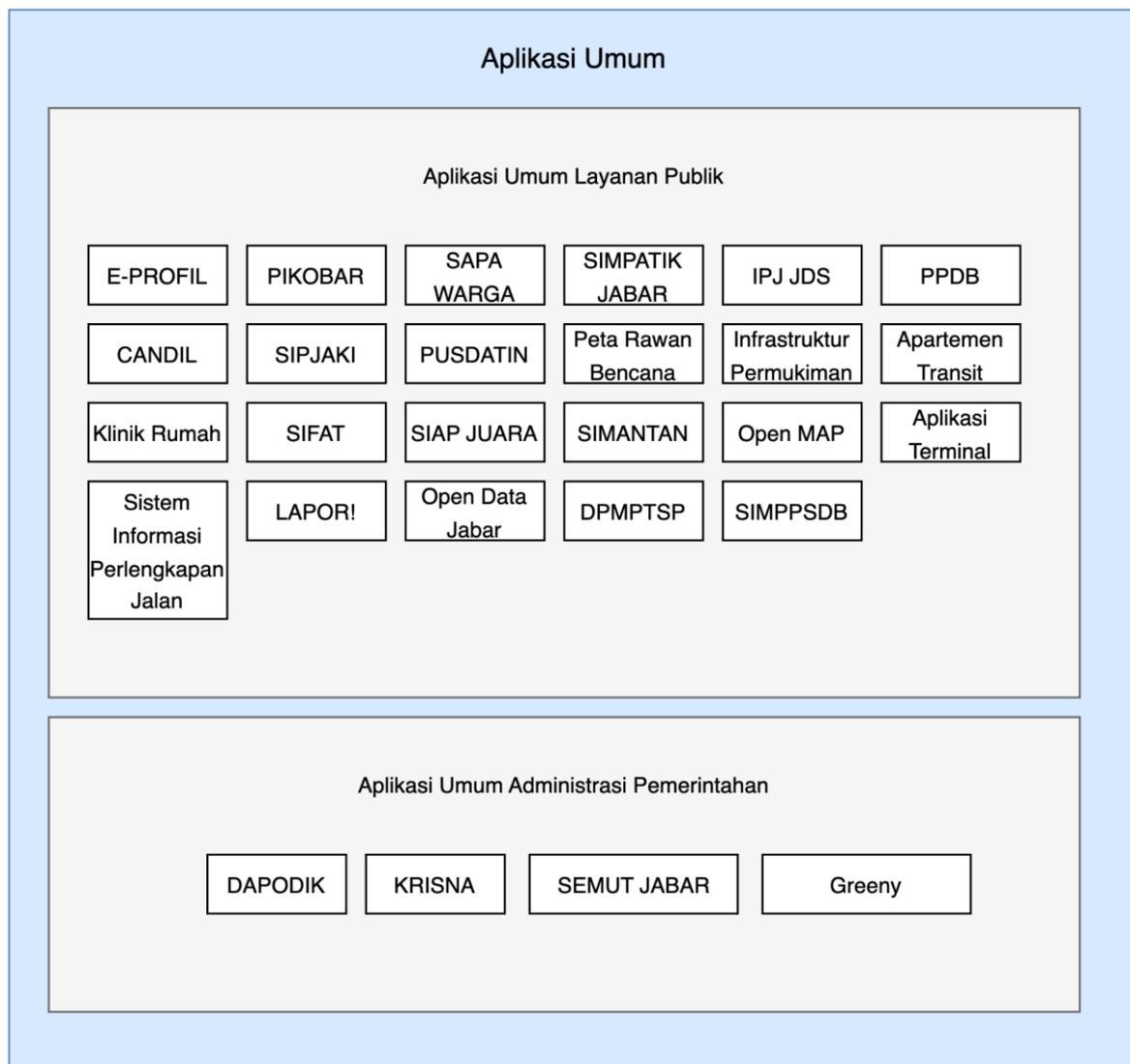
Gambar 3.7 Pemetaan Aplikasi pada Proses Bisnis Pendukung



Gambar 3.8 Pemetaan Aplikasi pada Proses Bisnis Manjerial

## B.2 Pemetaan aplikasi disesuaikan dengan taksonomi aplikasi

Sesuai dengan pembagian jenis aplikasi pada dokumen Rencana Perpres tentang SPBE Nasional, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor harus diidentifikasi jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemetaan aplikasi umum dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan Gambar 3.10.



Gambar 3.9 Pemetaan Aplikasi Umum

## Aplikasi Khusus

### Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Website Resmi Kota Bogor	Website resmi Sekretariat Daerah Kota Bogor	Website resmi Sekretariat DPRD Kota Bogor	Website resmi Inspektorat Daerah Kota Bogor	SATU DATA Kesehatan	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	OMSPAN	SIMDIK
Website resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor	Website resmi Dinas Kesehatan Kota Bogor	Website resmi Dinas Sosial Kota Bogor	Website resmi Dinas P3A kota Bogor	SIDAKEP	OPAC	OSS	BOPD
Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Website resmi Dinas PMPTSP Kota Bogor	MONEV SCORECARD	Temen Jabar	Tali Kuat	Aplikasi Konsultasi Publik
Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor	Website resmi Dinas ParBud Kota Bogor	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	e-Musrenbang	Aplikasi Barata	e-Cegah SIAGA	DMS (Disaster Management System)
Website resmi Dinas PUPR Kota Bogor	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	Website resmi Dinas DukCapil Kota Bogor	SiMona	SIKEBAL	SILAJA	SPION JABAR
Website resmi Dinas PPKB Kota Bogor	Website resmi Dinas Perhubungan Kota Bogor	Website resmi Dinas KUKMPP Kota Bogor	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor	SICAPLANG	SILATIN	SILANGGAR	PUSDALOPS
Website resmi BAPPEDA Kota Bogor	Website resmi BKPSDM	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	IKP (PROKES COVID)	Simbakesbangpol	SIMOJANG	DTKS
Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website resmi BPBD Kota Bogor	Website resmi RSUD Kota Bogor	PSC-119	SIDATUK	ALBAS	Aplikasi Stock Barang	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	SIKONDA						

### Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Gambar 3.10 Pemetaan Aplikasi Khusus

### B.3 Pemetaan aplikasi berdasarkan unit kerja

Berdasarkan dokumen kebijakan dan peraturan Pemerintah Kota Bogor tentang Rencana Induk Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Laporan Analisis dan Pemetaan Model Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Pada Kota Bogor Tahun 2022, setiap aplikasi memiliki unit pengelola atau product owner-nya. Berikut ini akan disajikan pemetaan aplikasi berdasarkan product owner-nya yang disesuaikan dengan unit kerja/organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Bogor. Pemetaan aplikasi terhadap unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 3.11, 3.12 dan 3.13 sebagai berikut.

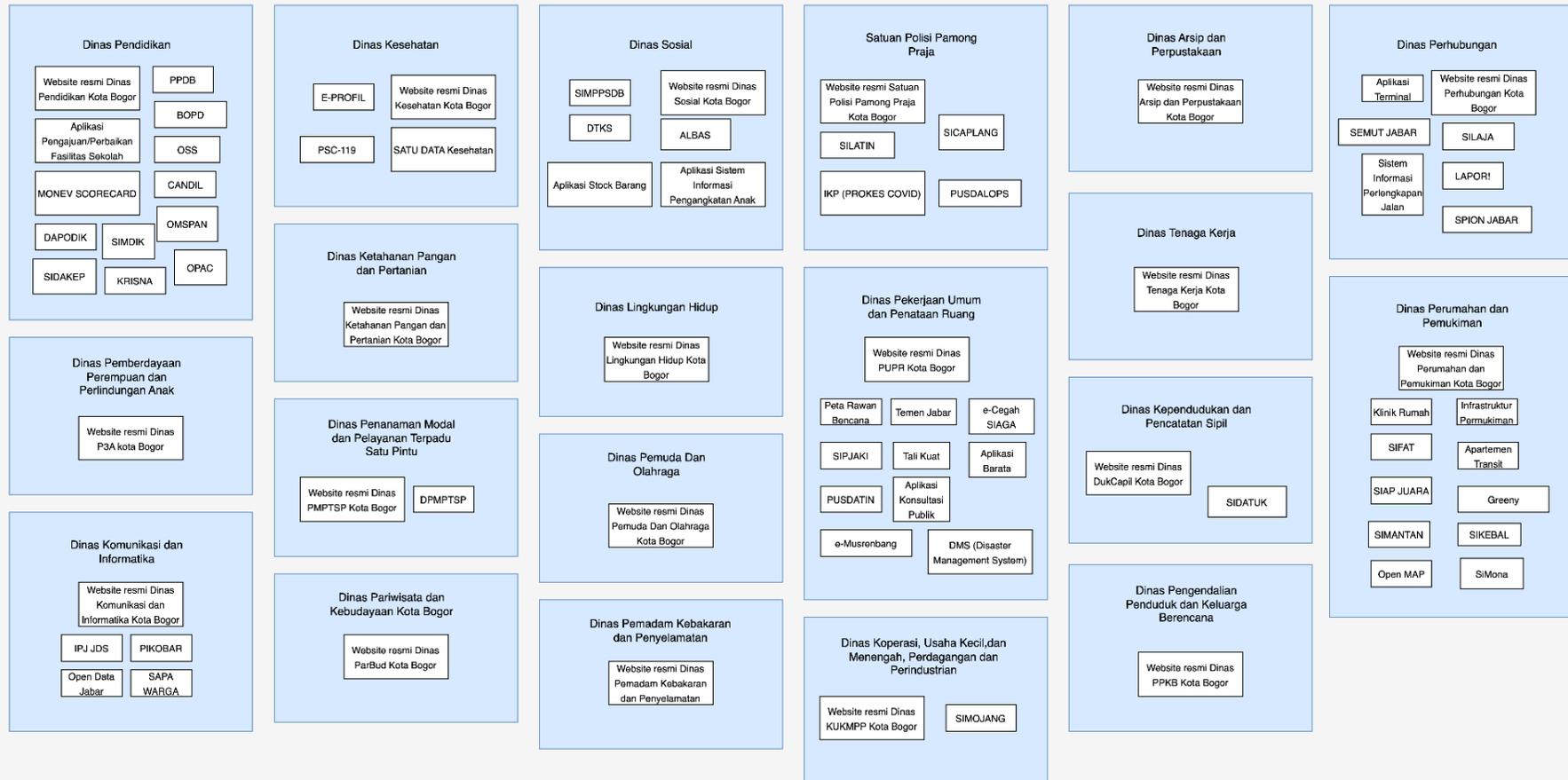


Gambar 3.11 Pemetaan Aplikasi di tingkat Kota, Sekretariat, dan Inspektorat



Gambar 3.12 Pemetaan Aplikasi di tingkat Lembaga Teknis Daerah

## Pemetaan Aplikasi



Gambar 3.13 Pemetaan Aplikasi di tingkat Dinas Daerah

#### B.4 Pemetaan aplikasi berdasarkan layanan

Aplikasi sangat erat kaitannya dengan layanan. Satu aplikasi bisa mendukung satu atau beberapa layanan. Pada bagian ini akan disajikan tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Pemetaan aplikasi berdasarkan layanan.

Domain Layanan	Aplikasi
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat Daerah Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat DPRD Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Inspektorat Daerah Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kesehatan Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Sosial Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi	Website resmi Dinas Pemadam

Domain Layanan	Aplikasi
Publik	Kebakaran dan Penyelamatan
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perhubungan Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor
BKT-DAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Website resmi RSUD Kota Bogor
BKT-DAL.01.25.02.05 Layanan Informasi Kesehatan Daerah	E-PROFIL
BKT-DAL.01.25.02.17 Pencatatan data Covid-19	PIKOBAR
BKT-DAL.02.09.02.29 Layanan Publikasi Data	
BKT-DAL.02.09.02.04 Layanan e-Government	SAPA WARGA

Domain Layanan	Aplikasi
BKT-DAL.01.25.02.12 Layanan Kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat	PSC-119
BKT-DAL.01.12.03.09 Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan Penanaman Modal	SIMPATIK JABAR
BKT-DAL.02.09.02.09 Layanan Data dan Informasi Elektronik	IPJ JDS
BKT-DAL.02.09.02.09 Layanan Data dan Informasi Elektronik	SATU DATA Kesehatan
BKT-DAL.01.31.03.02 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.01 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SMP	PPDB
BKT-DAL.01.31.02.04 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD BKT-DAL.01.31.03.06 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.05 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah
BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP	OMSPAN
BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP BKT-DAL.01.31.03.03 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.02 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	DAPODIK
BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIMDIK
BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIDAKEP
BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan BKT-DAL.01.31.01.01 Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	OPAC
BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	KRISNA
BKT-DAL.01.31.02.06 Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	OSS
BKT-DAL.01.31.04.10 Layanan Informasi Kurikulum	CANDIL

Domain Layanan	Aplikasi
Mulok jenjang Pendidikan Dasar	
BKT-DAL.01.31.04.01 Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesetaraan	BOPD
BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	MONEV SCORECARD
BKT-DAL.01.17.01.01 Layanan data jalan dan jembatan	Temen Jabar
BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Tali Kuat
BKT-DAL.01.17.01.03 Layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	SIPJAKI
BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Aplikasi Konsultasi Publik
BKT-DAL.01.17.01.02 Informasi Kesesuaian Tata Ruang	e-Musrenbang
BKT-DAL.01.40.06.03 Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Aplikasi Barata
BKT-DAL.01.40.06.03 Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	PUSDATIN
BKT-DAL.01.40.06.03 Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Peta Rawan Bencana
BKT-DAL.01.40.06.01 Layanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	e-Cegah SIAGA
BKT-DAL.01.40.06.06 Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	DMS (Disaster Management System)
BKT-DAL.01.24.03.09 Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Infrastruktur Permukiman
BKT-DAL.01.24.03.27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SiMona
BKT-DAL.01.40.04.24 Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Greeny
BKT-DAL.01.20.03.01 Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Apartemen Transit
BKT-DAL.01.20.01.02 Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Bogor	Klinik Rumah
BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa	SIKEBAL
BKT-DAL.01.20.02.04 Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	SIFAT (Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit)
BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa	SIAP JUARA
BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	SIMANTAN (Sistem Informasi Pertanahan)

Domain Layanan	Aplikasi
BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	Open MAP
BKT-DAL.01.19.01.03 Pengawasan lalulintas jalan	Aplikasi Terminal
BKT-DAL.01.19.01.03 Pengawasan lalulintas jalan	SEMUT JABAR
BKT-DAL.01.19.01.03 Pengawasan lalulintas jalan	SILAJA
BKT-DAL.01.19.01.03 Pengawasan lalulintas jalan	SPION JABAR
BKT-DAL.01.19.01.03 Pengawasan lalulintas jalan	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan
BKT-DAL.01.40.04.17 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	LAPOR!
BKT-DAL.01.29.06.07 Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	SICAPLANG
BKT-DAL.01.29.06.04 Layanan pendataan linmas inti	SILATIN
BKT-DAL.01.29.06.08 Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	SILANGGAR
BKT-DAL.01.29.06.05 Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	PUSDALOPS
BKT-DAL.01.25.02.17 Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19, update kesembuhan dan kematian kasus Covid-19	IKP (PROKES COVID
BKT-DAL.02.06.09.02 Layanan Pendataan Ormas Kota Bogor, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Simbakesbangpol
BKT-DAL.02.09.02.29 Layanan Publikasi Data	Open Data Jabar
BKT-DAL.02.06.09.03 Layanan Pengaduan Ormas	SIKONDA
BKT-DAL.02.06.09.03 Layanan Pengaduan Ormas	DPMPTSP
BKT-DAL.01.26.01.04 Layanan penerbitan izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang	SIMPPSDB
BKT-DAL.01.26.02.03 Layanan Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH	SIMOJANG
BKT-DAL.01.26.02.04 Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	DTKS
BKT-DAL.01.23.02.02 Parameter Kependudukan	SIDATUK
BKT-DAL.01.26.01.18 Layanan penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial	ALBAS
BKT-DAL.01.26.01.19 Layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	
BKT-DAL.01.24.06.04 Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Aplikasi Stock Barang
BKT-DAL.01.26.01.05 Layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Domain Layanan	Aplikasi
BKT-DAL.01.23.03.01 Penerbitan Akta Kelahiran,Akta Kematian,Akta Perkawinan,Akta Perceraian,Akta Pengesahan Anak,Akta Pengakuan Anak,Akta Pengangkatan Anak	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak

## C. Arsitektur Aplikasi Target

### C.1 Rekomendasi

Berdasarkan analisis pada kondisi saat ini Pemerintah Kota Bogor belum semua menggunakan IT untuk menunjang strategi yang ada di Pemerintah Kota Bogor. Hal ini dilihat dari beberapa permasalahan diantaranya:

#### a. Peranan TI

Paradigma yang tidak tepat dalam memposisikan TI, dengan mengartikannya hanya sebagai instrumen percepatan proses dan alat bantu penyelesaian tugas. TI belum sepenuhnya untuk kepentingan analisis dan bahkan tidak digunakan untuk menunjang strategi organisasi, misalnya transparansi kinerja pemerintahan.

#### b. Organisasi Internal

Fungsi perencanaan dan pengembangan TI secara alih daya ada di masing-masing Unit Kerja. Meski demikian, pada kenyataannya pengembangan dan operasional TI secara keseluruhan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo), yang menyebabkan pengelolaan TI menjadi kompleks dan tidak terintegrasi karena tidak adanya standar dari unit yang mengelola TI secara menyeluruh dari perencanaan hingga operasional (belum ada bagian yang bertanggung jawab terhadap TI secara menyeluruh).

#### c. Aplikasi

Berdasarkan kondisi organisasi internal di atas, diketahui aplikasi yang ada saat ini tidak terintegrasi dengan adanya pulau-pulau aplikasi. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi data dan penggunaan sumber daya infrastruktur TI yang tidak efisien. Perencanaan pengembangan aplikasi belum ada sehingga aplikasi internal dan aplikasi eksternal yang dikembangkan secara inhouse maupun alih daya tidak tersentralisasi dan tidak terintegrasi dalam mendukung aktivitas utama Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi dikembangkan secara terpisah, hanya berdasarkan kebutuhan yang ada pada saat itu dan dikembangkan secara ad hoc.

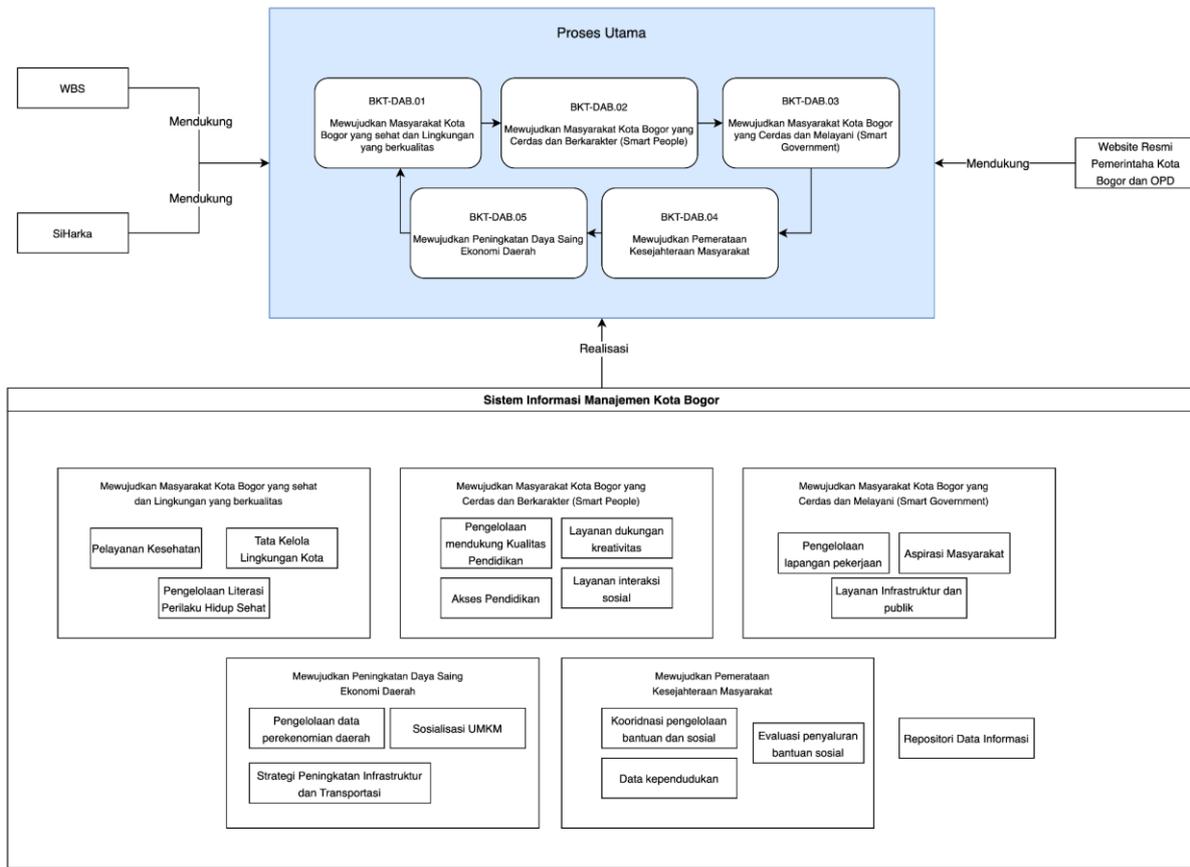
Terdapat beberapa aplikasi internal dan aplikasi eksternal yang pengembangannya berbeda dengan standar pengembangan aplikasi yang dilakukan secara inhouse. Aplikasi internal yang menggunakan platform berbasis desktop dan tidak menggunakan framework pengembangan aplikasi berbasis open source adalah aplikasi Internal untuk kendali mutu dan kinerja, yaitu TALI KUAT . Aplikasi ini menggunakan framework pengembangan aplikasi Visual Basic dan basis data Ms. Access.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka disusun rekomendasi untuk arsitektur aplikasi SPBE Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Perlu dirancang Sistem Informasi yang menangani proses bisnis utama Pemerintah Kota Bogor yaitu mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Sistem Informasi ini harus terintegrasi di setiap prosesnya sehingga tidak ada silo-silo aplikasi.
2. Beberapa aplikasi umum seharusnya memiliki fungsi yang general dan standar sehingga dapat menerapkan prinsip berbagi pakai, integrasi, efisiensi dan optimasi layanan.
3. Aplikasi yang ada saat ini sebaiknya diintegrasikan sesuai dengan domainnya masing-masing, sehingga tidak terlalu banyak dari segi jumlah tetapi dapat mewadahi seluruh operasional di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

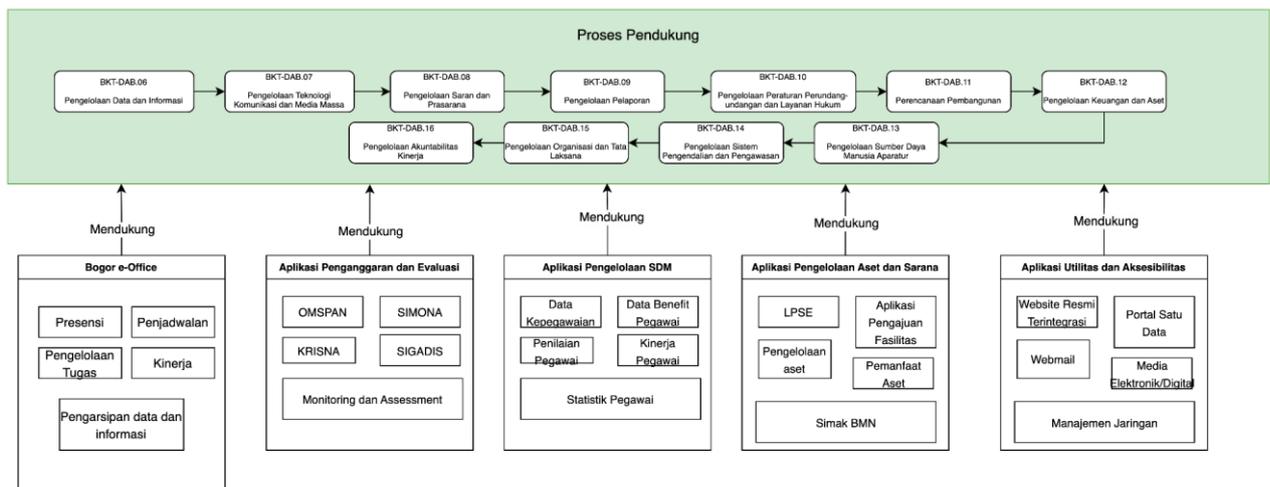
#### **D. Arsitektur Aplikasi Usulan**

Berdasarkan rekomendasi yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka dibuat arsitektur aplikasi usulan untuk Pemerintah Kota Bogor. Arsitektur aplikasi usulan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk proses utama (BKT.01 - BKT.05) dan untuk proses pendukung (BKT.06 - BKT.16). Arsitektur aplikasi untuk proses utama dapat dilihat pada Gambar 3.14.



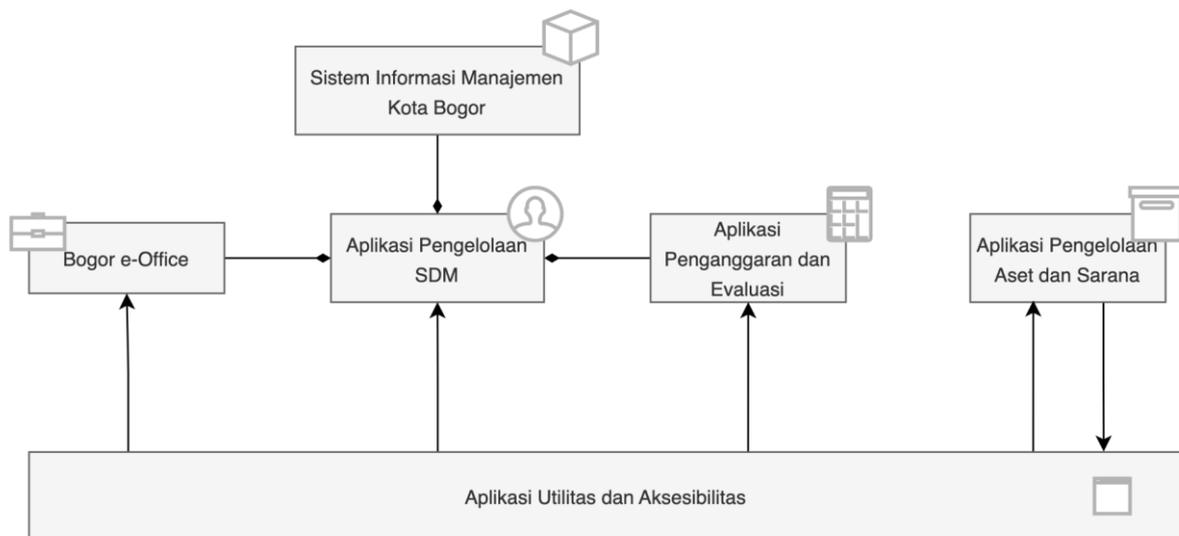
Gambar 3.14 Arsitektur Aplikasi Target untuk Proses Utama

Selain itu, disusun juga Arsitektur Aplikasi Target untuk proses pendukung yang didasarkan pada pengelompokan dan integrasi aplikasi yang sudah ada saat ini, Arsitektur aplikasi target untuk proses pendukung dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Arsitektur Aplikasi Target untuk proses pendukung.

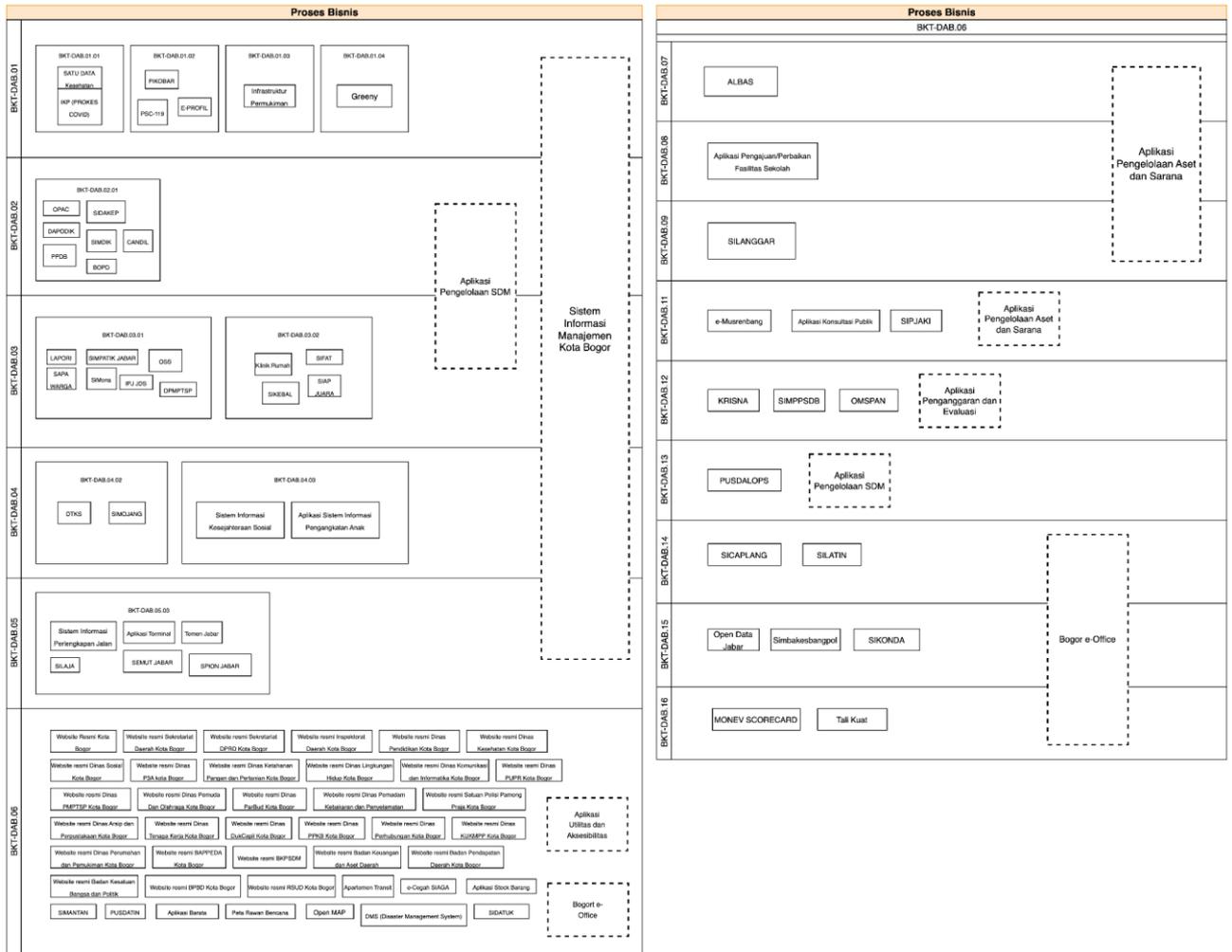
Selain memenuhi prinsip berbagi pakai dan integrasi, aplikasi-aplikasi yang dibangun juga harus terkait satu sama lain sehingga dapat menggunakan sumber data yang sama. Pada gambar 3.16 ini diilustrasikan rencana integrasi antara satu kelompok aplikasi dengan kelompok aplikasi lainnya.



Gambar 3.16 Rencana Integrasi Antar Aplikasi

### E. Analisis Gap

Berdasarkan Arsitektur Aplikasi Saat Ini dan Arsitektur Aplikasi Target, maka perlu dilakukan gap analisis untuk menyusun rencana dan peta jalan agar arsitektur aplikasi target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Gap analysis yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Gap Analysis Arsitektur Aplikasi

## F. Metadata Aplikasi

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor harus memiliki Metadata Aplikasi dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk Aplikasi dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Metadata Aplikasi

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.02.01.01	Website resmi Kota Bogor	Website resmi dari Kota Bogor yang berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.02	Website resmi Sekretariat Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bogor	Proprietary	PHP	CMS Wordpress	MySQL		Sekretariat Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.03	Website resmi Sekretariat DPRD Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Sekretariat DPRD
BKT-DAA.02.01.04	Website resmi Inspektorat Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Inspektorat Daerah
BKT-DAA.02.01.05	Website resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bogor	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.06	Website resmi Dinas Kesehatan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Kesehatan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.02.01.07	Website resmi Dinas Sosial Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Bogor	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.08	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKT-DAA.02.01.09	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	Proprietary	PHP	Native	MySQL		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BKT-DAA.02.01.10	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Lingkungan Hidup
BKT-DAA.02.01.11	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.12	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		Bogor						
BKT-DAA.02.01.13	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pemuda Dan Olahraga
BKT-DAA.02.01.14	Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.15	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
BKT-DAA.02.01.16	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.17	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.18	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Arsip dan Perpustakaan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		Bogor						
BKT-DAA.02.01.19	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Tenaga Kerja
BKT-DAA.02.01.20	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BKT-DAA.02.01.21	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BKT-DAA.02.01.22	Website resmi Dinas Perhubungan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.23	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
BKT-DAA.02.01.24	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Dinas Perumahan dan Pemukiman

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
	Bogor	di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor						
BKT-DAA.02.01.25	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKT-DAA.02.01.26	Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKT-DAA.02.01.27	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKT-DAA.02.01.28	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Pendapatan Daerah
BKT-DAA.02.01.29	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAA.02.01.30	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		Bencana Daerah Kota Bogor						
BKT-DAA.02.01.31	Website resmi RSUD Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di RSUD Kota Bogor	Proprietary	PHP	Codeigniter	MySQL		RSUD Kota Bogor
BKT-DAA.01.01.01	E-PROFIL	Aplikasi memuat Profil Kesehatan secara Umum Daerah Kota Bogor	Open Source	PHP	Laravel	MySQL		Dinas Kesehatan
BKT-DAA.01.01.02	PIKOBAR	Aplikasi Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat	Open Source	PHP, Dart		MySQL, Firebase		Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.01.01.03	SAPA WARGA	Aplikasi Layanan Publik Sapawarga bantu warga salurkan aspirasi, dapatkan informasi penting, dan akses layanan publik secara digital	Open Source	PHP, Dart		MySQL, Firebase		Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.32	PSC-119	Pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat bencana, kecelakaan kerja dan kebakaran dan kecelakaan lalu lintas)	Proprietary	PHP		MySQL		Dinas Kesehatan
BKT-DAA.01.01.04	SIMPATIK JABAR	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Untuk Publik merupakan sistem perizinan online Dinas PMPTSP JAWA BARAT yang telah direplikasi di	Open Source	PHP, Dart		MySQL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		18 provinsi Indonesia. SIMPATIK memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin secara online, mengetahui berbagai informasi mengenai perizinan dan persyaratannya, mentracing status perizinannya, melakukan cetak mandiri dokumen perizinan, dan lain-lain						
BKT-DAA.01.01.05	IPJ JDS	Integrated Portal Jabar atau Website Portal Jabar merupakan website satu pintu pengelolaan informasi seputar pelayanan pemerintahan, berita terkini, dan sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia terutama warga Jawa Barat dengan tujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam memberikan informasi.	Open Source					Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.33	SATU DATA Kesehatan	Aplikasi Portal Satu Data Kesehatan mengintegrasikan berbagai data informasi yang akurat	Open Source					Dinas Kesehatan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.01.01.06	PPDB	Aplikasi berbasis website yang mendukung pelayanan penerimaan Peserta Didik Baru	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.34	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	Aplikasi untuk mengajukan perbaikan atau pengadaan sekolah-sekolah	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.35	OMSPAN	Aplikasi berbasis web yang dinamakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.	Open Source					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.01.02.01	DAPODIK	Aplikasi Dapodik berfungsi untuk menghimpun data terkait sarana prasarana sekolah, siswa, guru dan tendik. Dapodik juga menjadi dasar pemberian segala jenis tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus dan bentuk lainnya seperti dana BOS.	Open Source					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.36	SIMDIK	Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan proses manajerial dan pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan. Termasuk didalamnya pengolahan Data Pokok Pendidikan, Seleksi	Proprietary					Dinas Pendidikan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		Calon Kepala Sekolah, RKAS Online, dan sebagainya.						
BKT-DAA.02.01.37	SIDAKEP	Aplikasi Sistem Pendataan Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.39	OPAC	Aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Aplikasi ini digunakan oleh guru SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat untuk mengusulkan kenaikan pangkat jabatan dengan menginputkan data pendidikan, data penugasan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan data penunjang.	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.01.02.02	KRISNA	Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian,	Open Source					Dinas Pendidikan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.						
BKT-DAA.02.01.40	OSS	Aplikasi yang mengurus tentang sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.01.01.07	CANDIL	Aplikasi yang memuat buku-buku digital dan literasi digital yang dapat diakses oleh siswa atau masyarakat	Open Source					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.41	BOPD	Aplikasi yang mengelola Biaya Operasional Pendidikan	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.42	MONEV SCORECARD	Aplikasi monitoring dan evaluasi penilaian kinerja	Proprietary					Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.43	Temen Jabar	Aplikasi Publik yang akan rilis, dikembangkan sebagai media Informasi Data Jalan dan Jembatan, serta Aset	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.44	Tali Kuat	Aplikasi Internal untuk kendali mutu dan kinerja	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.08	SIPJAKI	Aplikasi dari Kementrian PU, untuk mengelolala	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		Jasa Konstruksi						
BKT-DAA.02.01.45	Aplikasi Konsultasi Publik	Aplikasi untuk menerima keluhan publik terkait masalah pembangunan	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.46	e-Musrenbang	Aplikasi online untuk melakukan musyawaran rencana Pembangunan	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.47	Aplikasi Barata	Aplikasi berbasis website yang menampilkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Jawa Barat	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.09	PUSDATIN	Aplikasi berbasis website yang menampilkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Kota Bogor	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.10	Peta Rawan Bencana	Aplikasi yang menampilkan daerah - daerah rawan bencana berupa peta	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.48	e-Cegah SIAGA	Aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai elearning dalam menghadapi bencana	Open Source					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.49	DMS (Disaster Management System)	Aplikasi yang digunakan untuk mengatur dalam keadaan bencana	Proprietary					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.11	Infrastruktur Permukiman	Aplikasi yang berisi sistem informasi Pengelolaan Air Minum, Drainase, Persampahan,	Open Source					Dinas Perumahan dan Permukiman

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		dan Air Limbah Lintas Kab/Kota.						
BKT-DAA.02.01.50	SiMona	Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan SPAM Regional.	Proprietary					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.02.03	Greeny	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola persampahan regional.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.12	Apartemen Transit	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait Apartemen Transit dan registrasi Apartemen Transit.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.13	Klinik Rumah	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana konsultasi perbaikan rumah.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.02.01.51	SIKEBAL	Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan perawatan Rusun.	Proprietary					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.14	SIFAT (Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit)	Aplikasi yang digunakan sebagai sistem informasi pengaduan, sistem informasi pemberdayaan, pengelolaan Ex-Penghuni, sistem informasi gerakan menabung apartemen transit, dan kepenghunian Apartemen Transit.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.01.01.15	SIAP JUARA	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan penghuni Apartemen Transit.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.16	SIMANTAN (Sistem Informasi Pertanahan)	Aplikasi yang berfungsi untuk menampung informasi terkait pertanahan.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.17	Open MAP	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan peta kolaborasi.	Open Source					Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.18	Aplikasi Terminal	Aplikasi yang berisi informasi lokasi terminal, jadwal keberangkatan bus, dan jumlah penumpang bus.	Open Source					Dinas Perhubungan
BKT-DAA.01.02.04	SEMUT JABAR	Aplikasi track kendaraan yang telah di pasang GPS dimana dapat mengetahui lokasi dan posisi kendaraan tersebut.	Open Source					Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.52	SILAJA	Aplikasi yang digunakan untuk monitoring kondisi trafik lalu lintas jalanan di Provinsi Jawa Barat.	Proprietary					Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.53	SPION JABAR	Aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perizinan penyelenggaraan angkutan umum.	Proprietary					Dinas Perhubungan
BKT-DAA.01.01.19	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan	Aplikasi yang membantu dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan.	Open Source					Dinas Perhubungan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.01.01.20	LAPOR!	Aplikasi LAPOR! Adalah sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.	Open Source					Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.54	SICAPLANG	Aplikasi untuk memudahkan pelacakan dan pencatatan bukti pelanggaran, yang bisa digunakan Satpol PP dan juga bisa diketahui masyarakat.	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.55	SILATIN	Aplikasi yang berisi seluruh tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.56	SILANGGAR	Aplikasi pengaduan	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.57	PUSDALOPS	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas membantu penanggulangan bencana	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.58	IKP (PROKES COVID	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas menerapkan prokes COVID-19	Proprietary					Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.59	Simbakesbangpol	Website pengelolaan data Bidang Kesbangpol. Penyajian data yang ada di dalam Website merupakan hasil input	Proprietary					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		data oleh Perangkat Daerah Kesbangpol Kabupaten/Kota se Jawa Barat.						
BKT-DAA.01.01.21	Open Data Jabar	Aplikasi yang menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat.	Open Source					Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.60	SIKONDA	Website yang menyediakan laporan mengenai kegiatan /kejadian terkait kesatuan bangsa dan politik.	Proprietary					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAA.01.01.22	DPMPSTP	Website kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Open Source					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BKT-DAA.01.01.23	SIMPPSDB	Aplikasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	Open Source					Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.61	SIMOJANG	Aplikasi yang memberikan informasi dalam program pemberian bantuan akses listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat.	Proprietary					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
BKT-DAA.02.01.62	DTKS	Aplikasi yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.	Proprietary					Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.63	SIDATUK	Aplikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pemadaan, penyandingan, pencocokan, dan pencarian data kependudukan pada data warehouse kependudukan se-Kota Bogor.	Proprietary					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BKT-DAA.02.01.64	ALBAS	Aplikasi pelaporan bencana alam dan sosial. Albas menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana alam maupun sosial agar dapat ditangani secepatnya. Selain itu, Albas juga menyertakan update terbaru seputar bencana	Proprietary					Dinas Sosial

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembang	Unit Operasional
		yang terjadi, penerimaan dan penyaluran bantuan dari masyarakat.						
BKT-DAA.02.01.65	Aplikasi Stock Barang	Aplikasi yang digunakan untuk mendata stok barang bagi korban bencana alam di Provinsi Jawa Barat	Proprietary					Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.66	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jawa Barat	Proprietary					Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.67	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	Aplikasi yang ditujukan untuk membantu proses adopsi/pengangkatan anak	Proprietary					Dinas Sosial

## **G. Integrasi Aplikasi**

Untuk memenuhi prinsip berbagi pakai, efektif dan efisien maka aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Bogor sebaiknya diintegrasikan sesuai domain masing-masing. Di bawah ini merupakan pembagian untuk integrasi aplikasi yang disarankan:

1. Bogor Management Information System mengintegrasikan proses bisnis utama dari Pemerintah Kota Bogor yaitu BKT.01-BKT.05, diantaranya:
  - a. SiMONA
  - b. LAPOR!
  - c. WBS
  - d. SIKEBAL
  - e. PIKOBAR
  - f. IKP
  - g. SIFAT
  - h. SIAP JUARA
2. Bogor e-Office, menangani semua urusan perkantoran dan manajemen kinerja:
  - a. PUSDATIN
  - b. SIMANTAN
  - c. Aplikasi Barata
  - d. Open MAP
  - e. SIDATUK
  - f. MONEV SCORECARD
  - g. SILATIN
  - h. SICAPLANG
3. Aplikasi Penganggaran dan Evaluasi
  - a. KRISNA
  - b. SIMPPSDB
  - c. OMSPAN
  - d. SIMONA
  - e. SIGADIS
4. Aplikasi Pengelolaan data SDM

- a. PUSDALOPS
  - b. DAPODIK
  - c. SIMDIK
5. Aplikasi Manajemen Aset dan Sarana
- a. LPSE
  - b. e-Munsrebang
  - c. SIPJAKI
  - d. Aplikasi Konsultasi Publik
6. Aplikasi Pengelolaan TIK (Aksesibilitas dan Utilitas)
- a. Website Kota Bogor Terintegrasi
  - b. Portal Satu Data
  - c. Webmail
  - d. Media Elektronik/Digital
  - e. Manajemen Jaringan

## H. Roadmap

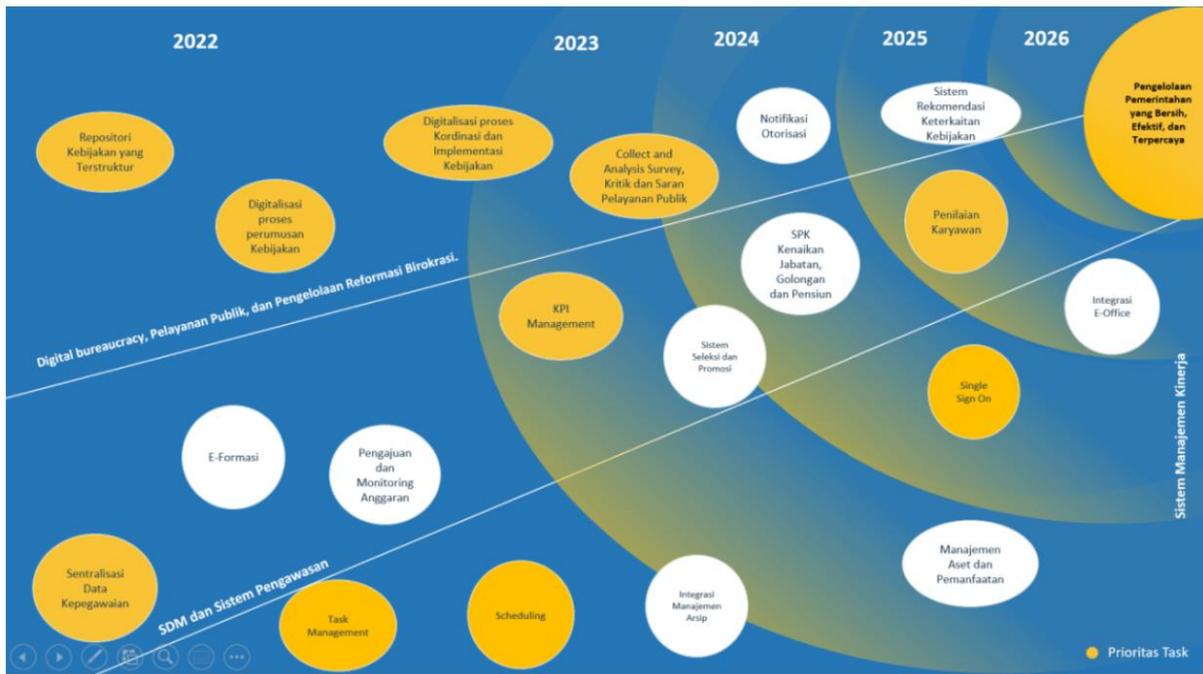
Untuk mengimplementasikan arsitektur aplikasi target maka perlu disusun peta jalan agar perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi menjadi lebih terarah. Di bawah ini merupakan peta jalan untuk domain arsitektur aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Gambar 3.18.

Tabel 3.7 Pengembangan Aplikasi

No	Aplikasi	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
1.	Bogor Management Information System						
2.	Bogor e-Office						
3.	Aplikasi Penganggaran dan Evaluasi						
4.	Aplikasi Pengelola Data SDM						
5.	Aplikasi Manajemen Aset dan Sarana						

6.	Aplikasi Pengelolaan TIK						
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Jenis\Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Transformasi Digital, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	1. Repository Kebijakan yang Terstruktur 2. Digitalisasi Proses Perumusan Kebijakan	1. Digitalisasi Proses Koordinasi dan Implementasi Kebijakan 2. Survei kepuasan	1. Notifikasi Otorisasi	Sistem Rekomendasi Keterkaitan Kebijakan	1. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya 2. Integrasi Bogor e-Office
SDM dan Sistem Pengawasan	1. Sentralisasi Data Kepegawaian 2. E formasi 3. Pengajuan dan Monitoring Anggaran	1. KPI Manajemen	1. Sistem Seleksi dan Promosi 2. SPK Kenaikan Jabatan, Golongan dan Pensiun	Penilaian Pegawai	
Sistem Manajemen Kinerja	1. Task Management	1. Scheduling	Integrasi Manajemen Arsip	1. Single Sign On 2. Manajemen Aset dan Pemanfaatan	Integrasi e-Office

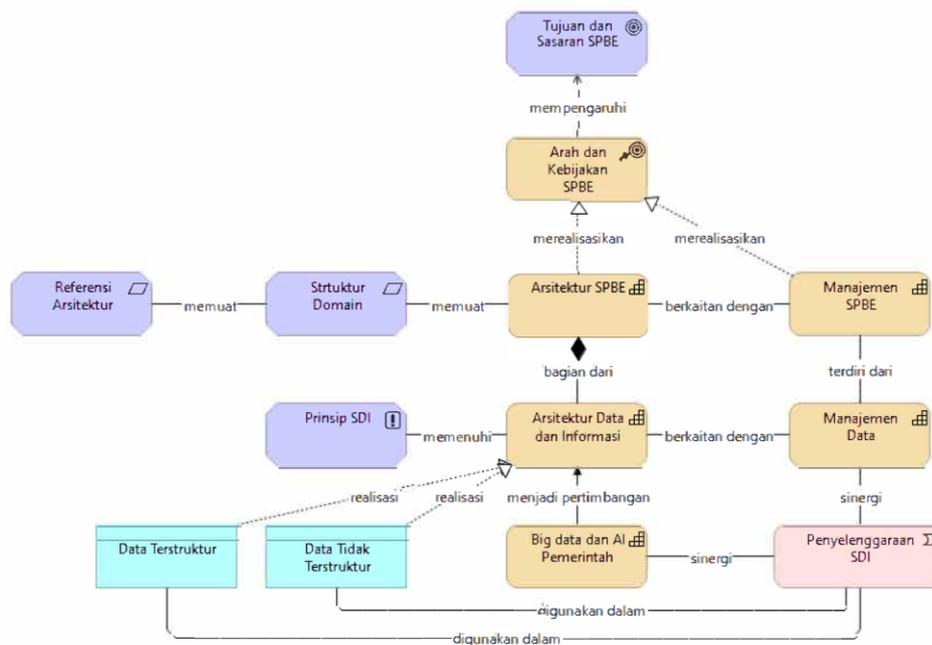


Gambar 3.18 Peta jalan arsitektur aplikasi

## BAB IV ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

### A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelarasan rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas sebagai pengelola Satu Data Indonesia. Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan satu data Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4. 2.Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

#### A1. Arsitektur Data dan Informasi As-Is

Secara umum arsitektur data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat berdasarkan proses bisnis yang berjalan, dalam implementasi sebuah proses bisnis akan terbagi menjadi beberapa layanan yang dimana layanan ini secara umum akan menggunakan aplikasi sebagai salah satu perangkat utama, dalam menjalankan aplikasi sendiri tentunya akan menggunakan data maupun informasi. Arsitektur data dapat menggambarkan relasi

dukungan layanan dan proses bisnis Pemerintah Kota Bogor dengan instansi yang menjadi stakeholder (K/L/D), atau yang disebut layanan eksternal. Arsitektur data ini nantinya akan menjadi komponen satu data lingkup Pemerintahan Kota Bogor. Tujuan dari arsitektur data eksternal ini adalah terintegrasinya data dari layanan aplikasi kepada K/L/Pemda sebagai mitra dari Pemerintah Kota Bogor, sehingga terwujud data yang unik untuk semua aplikasi yang saling terkait. Namun demikian data yang dikelola dalam aplikasi yang saat ini digunakan di Pemerintahan Kota Bogor belum semua dikelompokkan ke dalam arsitektur data dan informasi sehingga perlu dilakukan pemetaan untuk kondisi arsitektur data dan informasi yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Bogor

Tabel 4. 1. Identifikasi Data Berdasarkan Aplikasi

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.01	Website resmi Kota Bogor	Website resmi dari Kota Bogor yang berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.02	Website resmi Sekretariat Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Sekretariat Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.03	Website resmi Sekretariat DPRD Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Sekretariat DPRD
BKT-DAA.02.01.04	Website resmi Inspektorat Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Inspektorat Daerah
BKT-DAA.02.01.05	Website resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pendidikan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.06	Website resmi Dinas Kesehatan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Kesehatan
BKT-DAA.02.01.07	Website resmi Dinas Sosial Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.08	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKT-DAA.02.01.09	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BKT-DAA.02.01.10	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Lingkungan Hidup

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.11	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.12	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BKT-DAA.02.01.13	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pemuda Dan Olahraga
BKT-DAA.02.01.14	Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
BKT-DAA.02.01.15	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.16	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.17	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.18	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Arsip dan Perpustakaan
BKT-DAA.02.01.19	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Tenaga Kerja
BKT-DAA.02.01.20	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.21	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BKT-DAA.02.01.22	Website resmi Dinas Perhubungan Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.23	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
BKT-DAA.02.01.24	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.02.01.25	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.26	Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKT-DAA.02.01.27	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKT-DAA.02.01.28	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Pendapatan Daerah
BKT-DAA.02.01.29	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAA.02.01.30	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.31	Website resmi RSUD Kota Bogor	Website resmi berisikan semua informasi dan berita kegiatan yang ada di RSUD Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik	RSUD Kota Bogor
BKT-DAA.01.01.01	E-PROFIL	Aplikasi memuat Profil Kesehatan secara Umum Daerah Kota Bogor	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.03.01 Data Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
BKT-DAA.01.01.02	PIKOBAR	Aplikasi Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Propinsi Jawa Barat	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.03.01 Data Layanan Kesehatan, BKT-DAD.03.08 Data Covid-19	Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.01.01.03	SAPA WARGA	Aplikasi Layanan Publik Sapawarga bantu warga salurkan aspirasi, dapatkan informasi penting, dan akses layanan publik secara digital	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.05.03 Data konsultasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.32	PSC-119	Pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat bencana, kecelakaan kerja dan kebakaran dan kecelakaan lalu lintas)	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.08.05 Data Informasi Bencana Alam, BKT-DAD.03.01 Data Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
BKT-DAA.01.01.04	SIMPATIK JABAR	<p>Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Untuk Publik merupakan sistem perizinan online Dinas PMPTSP JAWA BARAT yang telah direplikasi di 18 provinsi Indonesia. SIMPATIK memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin secara online, mengetahui berbagai informasi mengenai perizinan dan persyaratannya, mentracing status perizinannya, melakukan cetak mandiri dokumen perizinan, dan lain-lain</p>	<p>BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.16.02 Data Layanan Perizinan</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor</p>

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.01.01.05	IPJ JDS	Integrated Portal Jabar atau Website Portal Jabar merupakan website satu pintu pengelolaan informasi seputar pelayanan pemerintahan, berita terkini, dan sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia terutama warga Jawa Barat dengan tujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam memberikan informasi.	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.16.01 Data Layanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.33	SATU DATA Kesehatan	Aplikasi Portal Satu Data Kesehatan mengintegrasikan berbagai data informasi yang akurat	BKT-DAD.15.01 Data Informasi Publik, BKT-DAD.03.01 Data Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
BKT-DAA.01.01.06	PPDB	Aplikasi berbasis website yang mendukung pelayanan penerimaan Peserta Didik Baru	BKT-DAD.01.14 Data Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.34	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	Aplikasi untuk mengajukan perbaikan atau pengadaan sekolah-sekolah	BKT-DAD.01.10 Data Fasilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.35	OMSPAN	Aplikasi berbasis web yang dinamakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.	BKT-DAD.17.01 Data Rencana Anggaran, BKT-DAD.17.02 Data Realisasi Anggaran	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.01.02.01	DAPODIK	Aplikasi Dapodik berfungsi untuk menghimpun data terkait sarana prasarana sekolah, siswa, guru dan tendik. Dapodik juga menjadi dasar pemberian segala jenis tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus dan bentuk lainnya seperti dana BOS.	BKT-DAD.01.01 Data Fasilitas Fisik Sekolah, BKT-DAD.01.07 Data Guru dan Tendik, BKT-DAD.01.03 Data Siswa	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.36	SIMDIK	Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan proses manajerial dan pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan. Termasuk didalamnya pengolahan Data Pokok Pendidikan, Seleksi Calon Kepala Sekolah, RKAS Online, dan sebagainya.	BKT-DAD.01.09 Data Pokok Pendidikan, BKT-DAD.01.11 Dokumen Silabus, BKT-DAD.01.13 Data Kurikulum	Dinas Pendidikan

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
BKT-DAA.02.01.37	SIDAKEP	Aplikasi Sistem Pendataan Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	BKT-DAD.01.02 Data Sekolah, BKT-DAD.01.07 Data Guru dan Tendik	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.39	OPAC	Aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Aplikasi ini digunakan oleh guru SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat untuk mengusulkan kenaikan pangkat jabatan dengan menginputkan data pendidikan, data penugasan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan data penunjang.	BKT-DAD.01.15 Data Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Pendidik, BKT-DAD.01.16 Data Penugasan Guru dan Tenaga Pendidik, BKT-DAD.01.17 Data Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.01.02.02	KRISNA	Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.	BKT-DAD.17.01 Data Rencana Anggaran, BKT-DAD.17.02 Data Realisasi Anggaran, BKT-DAD.17.04 Data Laporan Anggaran	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.40	OSS	Aplikasi yang mengurus tentang sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi	BKT-DAD.16.02 Data Layanan Perizinan	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.01.01.07	CANDIL	Aplikasi yang memuat buku-buku digital dan literasi digital yang dapat diakses oleh siswa atau masyarakat	BKT-DAD.01.12 E-book/Buku Cetak	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.41	BOPD	Aplikasi yang mengelola Biaya Operasional Pendidikan	BKT-DAD.01.08 Data Pembiayaan Peserta Didik, BKT-DAD.01.18 Data Biaya Operasional Pendidikan	Dinas Pendidikan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.42	MONEV SCORECARD	Aplikasi monitoring dan evaluasi penilaian kinerja	BKT-DAD.19.01 Data Sasaran Kinerja, BKT-DAD.19.02 Data Capaian Kinerja, BKT-DAD.19.03 Data Laporan Kinerja	Dinas Pendidikan
BKT-DAA.02.01.43	Temen Jabar	Aplikasi Publik yang akan rilis, dikembangkan sebagai media Informasi Data Jalan dan Jembatan, serta Aset	BKT-DAD.09.07 Data Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, BKT-DAD.09.12 Data Pembangunan Jalan dan Jembatan, BKT-DAD.09.13 Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.44	Tali Kuat	Aplikasi Internal untuk kendali mutu dan kinerja	BKT-DAD.19.01 Data Sasaran Kinerja, BKT-DAD.19.02 Data Capaian Kinerja, BKT-DAD.19.03 Data Laporan Kinerja, BKT-DAD.19.10 Data Kendali Mutu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.08	SIPJAKI	Aplikasi dari Kementerian PU, untuk mengelola Jasa Konstruksi	BKT-DAD.09.02 Data Jasa Konstruksi, BKT-DAD.09.05 Data Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.45	Aplikasi Konsultasi Publik	Aplikasi untuk menerima keluhan publik terkait masalah pembangunan	BKT-DAD.09.05 Data Pembangunan, BKT-DAD.16.03 Data Layanan Pengaduan Publik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.46	e-Musrenbang	Aplikasi online untuk melakukan musyawaran rencana Pembangunan	BKT-DAD.09.15 Data Rencana pembangunan (RTRW dan RPJMD) kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.47	Aplikasi Barata	Aplikasi berbasis website yang menampilkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Jawa Barat	BKT-DAD.08.05 Data Informasi Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.09	PUSDATIN	Aplikasi berbasis website yang menampilkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di sekitar Jawa Barat	BKT-DAD.08.05 Data Informasi Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.01.01.10	Peta Rawan Bencana	Aplikasi yang menampilkan daerah - daerah rawan bencana berupa peta	BKT-DAD.08.05 Data Informasi Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.48	e-Cegah SIAGA	Aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai elearning dalam menghadapi bencana	BKT-DAD.08.08 Data Pelatihan Bencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BKT-DAA.02.01.49	DMS (Disaster Management System)	Aplikasi yang digunakan untuk mengatur dalam keadaan bencana	BKT-DAD.08.07 Data Kebutuhan Pasca Bencana,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Data yang digunakan	Unit Operasional Teknologi
			BKT-DAD.08.08 Data Pelatihan Bencana	
BKT-DAA.01.01.11	Infrastruktur Permukiman	Aplikasi yang berisi sistem informasi Pengelolaan Air Minum, Drainase, Persampahan, dan Air Limbah Lintas Kab/Kota.	BKT-DAD.14.08 Data Drainase yang tertangani, BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.02.01.50	SiMona	Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan SPAM Regional.	BKT-DAD.16.04 Data Layanan Pengelolaan SPAM	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.02.03	Greeny	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola persampahan regional.	BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.12	Apartemen Transit	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait Apartemen Transit dan registrasi Apartemen Transit.	BKT-DAD.14.02 Data Rumah Tangga Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.13	Klinik Rumah	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana konsultasi perbaikan rumah.	BKT-DAD.14.18 Data usulan calon penerima manfaat perbaikan rutilahu, BKT-DAD.14.19 Data Anggaran bantuan rutilahu	Dinas Perumahan dan Pemukiman

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.51	SIKEBAL	Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan dan perawatan Rusun.	BKT-DAD.14.20 Data Perencanaan Rumah Susun, BKT-DAD.14.21 Data Perawatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.14	SIFAT (Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit)	Aplikasi yang digunakan sebagai sistem informasi pengaduan, sistem informasi pemberdayaan, pengelolaan Ex-Penghuni, sistem informasi gerakan menabung apartemen transit, dan kepenghunan Apartemen Transit.	BKT-DAD.16.03 Data Layanan Pengaduan Publik, BKT-DAD.14.22 Data Pemberdayaan Apartemen Transit BKT-DAD.14.23 Data Kepenghunan Apartemen Transit	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.15	SIAP JUARA	Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan penghuni Apartemen Transit.	BKT-DAD.14.22 Data Pemberdayaan Apartemen Transit, BKT-DAD.14.23 Data Kepenghunan Apartemen Transit	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.16	SIMANTAN (Sistem Informasi Pertanahan)	Aplikasi yang berfungsi untuk menampung informasi terkait pertanahan.	BKT-DAD.09.03 Data Lahan / Tanah	Dinas Perumahan dan Pemukiman
BKT-DAA.01.01.17	Open MAP	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan peta kolaborasi.	BKT-DAD.14.13 Penetapan Lokasi/Data Terkait lahan	Dinas Perumahan dan Pemukiman

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.01.01.18	Aplikasi Terminal	Aplikasi yang berisi informasi lokasi terminal, jadwal keberangkatan bus, dan jumlah penumpang bus.	BKT-DAD.04.22 Data Site Lokasi Terminal, BKT-DAD.04.23 Data Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.01.02.04	SEMUT JABAR	Aplikasi track kendaraan yang telah di pasang GPS dimana dapat mengetahui lokasi dan posisi kendaraan tersebut.	BKT-DAD.04.08 Data Kendaraan AKDP BKT-DAD.04.09 Data Kondisi Trafik Jalan Provinsi BKT-DAD.04.10 Data Kondisi Trafik Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.52	SILAJA	Aplikasi yang digunakan untuk monitoring kondisi trafik lalu lintas jalanan di Provinsi Jawa Barat.	BKT-DAD.04.09 Data Kondisi Trafik Jalan Provinsi BKT-DAD.04.10 Data Kondisi Trafik Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.53	SPION JABAR	Aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perizinan penyelenggaraan angkutan umum.	BKT-DAD.04.02 Data Izin Usaha Jasa Angkutan	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.01.01.19	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan	Aplikasi yang membantu dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan.	BKT-DAD.04.07 Data Kebutuhan Pelaksanaan Andalalin	Dinas Perhubungan

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.01.01.20	LAPOR!	Aplikasi LAPOR! Adalah sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.	BKT-DAD.16.03 Data Layanan Pengaduan Publik	Dinas Perhubungan
BKT-DAA.02.01.54	SICAPLANG	Aplikasi untuk memudahkan pelacakan dan pencatatan bukti pelanggaran, yang bisa digunakan Satpol PP dan juga bisa diketahui masyarakat.	BKT-DAD.10.02 Data Pelanggaran, BKT-DAD.10.03 Data Bahan Bukti	Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.55	SILATIN	Aplikasi yang berisi seluruh tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.	BKT-DAD.10.11 Data Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.56	SILANGGAR	Aplikasi pengaduan	BKT-DAD.16.03 Data Layanan Pengaduan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.57	PUSDALOPS	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas membantu penanggulangan bencana	BKT-DAD.08 Data Penanggulangan Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAA.02.01.58	IKP (PROKES COVID	Aplikasi yang membantu Satpol PP dalam bertugas menerapkan prokes COVID-19	BKT-DAD.03.08 Data Covid-19	Satuan Polisi Pamong Praja

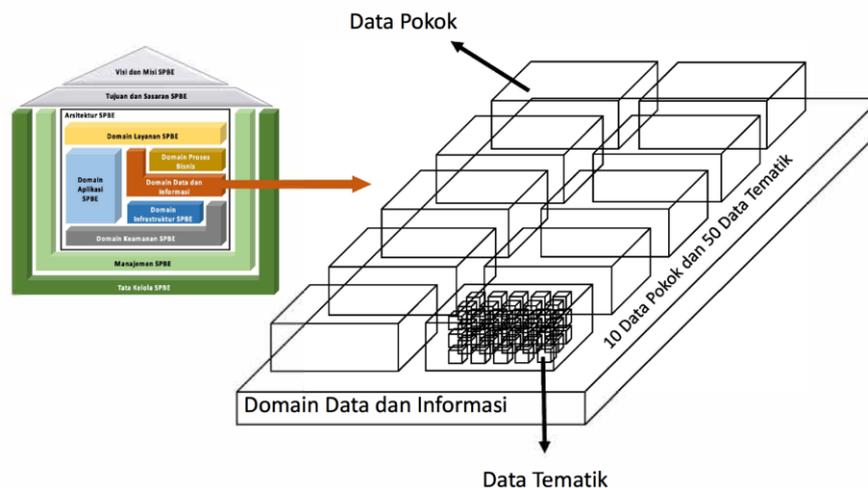
<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.59	Simbakesbangpol	Website pengelolaan data Bidang Kesbangpol. Penyajian data yang ada di dalam Website merupakan hasil input data oleh Perangkat Daerah Kesbangpol Kabupaten/Kota se Jawa Barat.	BKT-DAD.12.06 Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAA.01.01.21	Open Data Jabar	Aplikasi yang menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat.	BKT-DAD.11.04 Data Organisasi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
BKT-DAA.02.01.60	SIKONDA	Website yang menyediakan laporan mengenai kegiatan /kejadian terkait kesatuan bangsa dan politik.	BKT-DAD.12.18 Data Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, BKT-DAD.12.19 Data Kejadian Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAA.01.01.22	DPMPTSP	Website kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	BKT-DAD.20.06 Data Wilayah Bebas dari Korupsi, BKT-DAD.20.07 Data Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.01.01.23	SIMPPSDB	Aplikasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	BKT-DAD.13.01 Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang, BKT-DAD.13.02 Data Izin Penyelenggaraan Undian	Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.61	SIMOJANG	Aplikasi yang memberikan informasi dalam program pemberian bantuan akses listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat.	BKT-DAD.13.36 Data Bantuan Akses Listrik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
BKT-DAA.02.01.62	DTKS	Aplikasi yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.	BKT-DAD.13.30 Data Pelayanan Dukungan Sosial yang Membutuhkan, BKT-DAD.13.37 Data Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial	Dinas Sosial

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.63	SIDATUK	Aplikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pemetaan, penyandingan, pencocokan, dan pencarian data kependudukan pada data warehouse kependudukan se-Jawa Barat.	BKT-DAD.02 Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BKT-DAA.02.01.64	ALBAS	Aplikasi pelaporan bencana alam dan sosial. Albas menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana alam maupun sosial agar dapat ditangani secepatnya. Selain itu, Albas juga menyertakan update terbaru seputar bencana yang terjadi, penerimaan dan penyaluran bantuan dari masyarakat.	BKT-DAD.08.05 Data Informasi Bencana Alam	Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.65	Aplikasi Stock Barang	Aplikasi yang digunakan untuk mendata stok barang bagi korban bencana alam di Provinsi Jawa Barat	BKT-DAD.08.06 Request permintaan bantuan dari kabupaten/kota, BKT-DAD.08.07 Data Kebutuhan Pasca Bencana	Dinas Sosial

<b>ID</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Uraian Aplikasi</b>	<b>Data yang digunakan</b>	<b>Unit Operasional Teknologi</b>
BKT-DAA.02.01.66	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jawa Barat	BKT-DAD.13.06 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga, BKT-DAD.13.38 Data Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial
BKT-DAA.02.01.67	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	Aplikasi yang ditujukan untuk membantu proses adopsi/pengangkatan anak	BKT-DAD.13.23 Data SK Izin Adopsi, BKT-DAD.13.24 Data Calon Anak, BKT-DAD.13.25 Data Calon Orang Tua	Dinas Sosial

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan keterhubungan antara domain data dan informasi dengan proses bisnis. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa penyusunan proses bisnis dan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta mendukung penerapan Aplikasi SPBE.



Gambar 4. 3. Struktur Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Berdasarkan karakteristik dari data yang ada, data yang dikelola di Pemerintah Kota Bogor masuk dalam kategori data pokok kode 03 (Informasi Pembangunan Kewilayahan), kode 04 (Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan), kode 05 (Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan), kode 06 (Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja), kode 09 (Informasi Pemerintahan Umum) dan kode 10 (Data Pendukung Umum). Adapun Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4. 2. Referensi Data dan Informasi (RD) Tingkat Nasional

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pembangunan Kewilayahan (3)		
RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
RAD.03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
RAD.03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
RAD.03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (4)		

Kode	Referensi	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
RAD.04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (5)		
RAD.05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (6)		
RAD.06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Informasi Pemerintahan Umum (9)		
RAD.09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
RAD.09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
Data Pendukung Umum (10)		
RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
RAD.10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
RAD.10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Berdasarkan kategori rancangan arsitektur data, maka dipetakan data yang dikelola dalam ruang lingkup Pemerintahan Kota Bogor, dimana pemetaan dilakukan hingga sub topik dari rancangan arsitektur data yang nantinya menjadi data utama dalam domain arsitektur data, pemetaan data berdasarkan rancangan arsitektur data dapat dilihat pada table berikut.

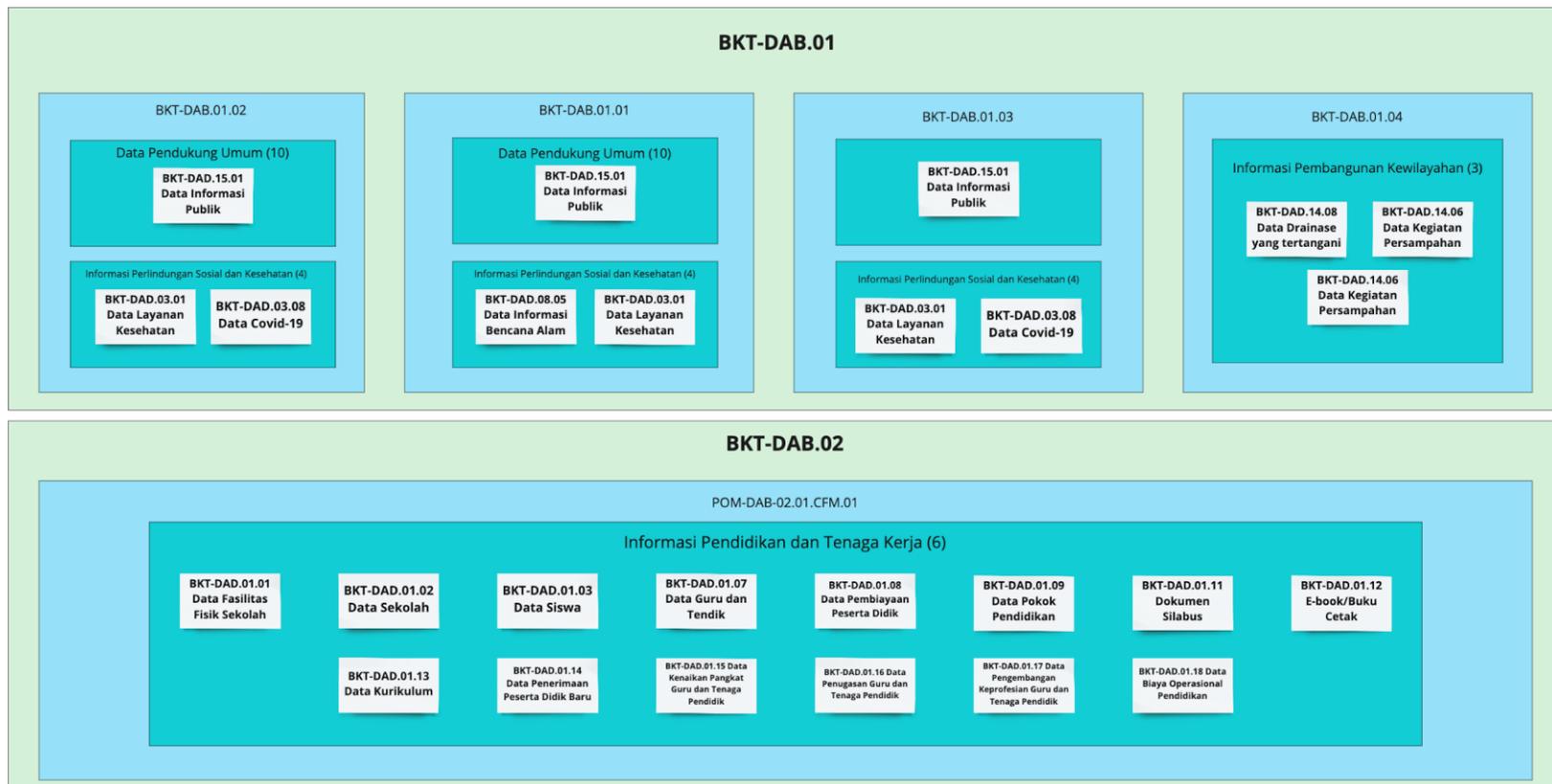
Tabel 4. 3. Pemetaan Data Pokok, Data Tematik, Data Topik, dan Data SubTopik

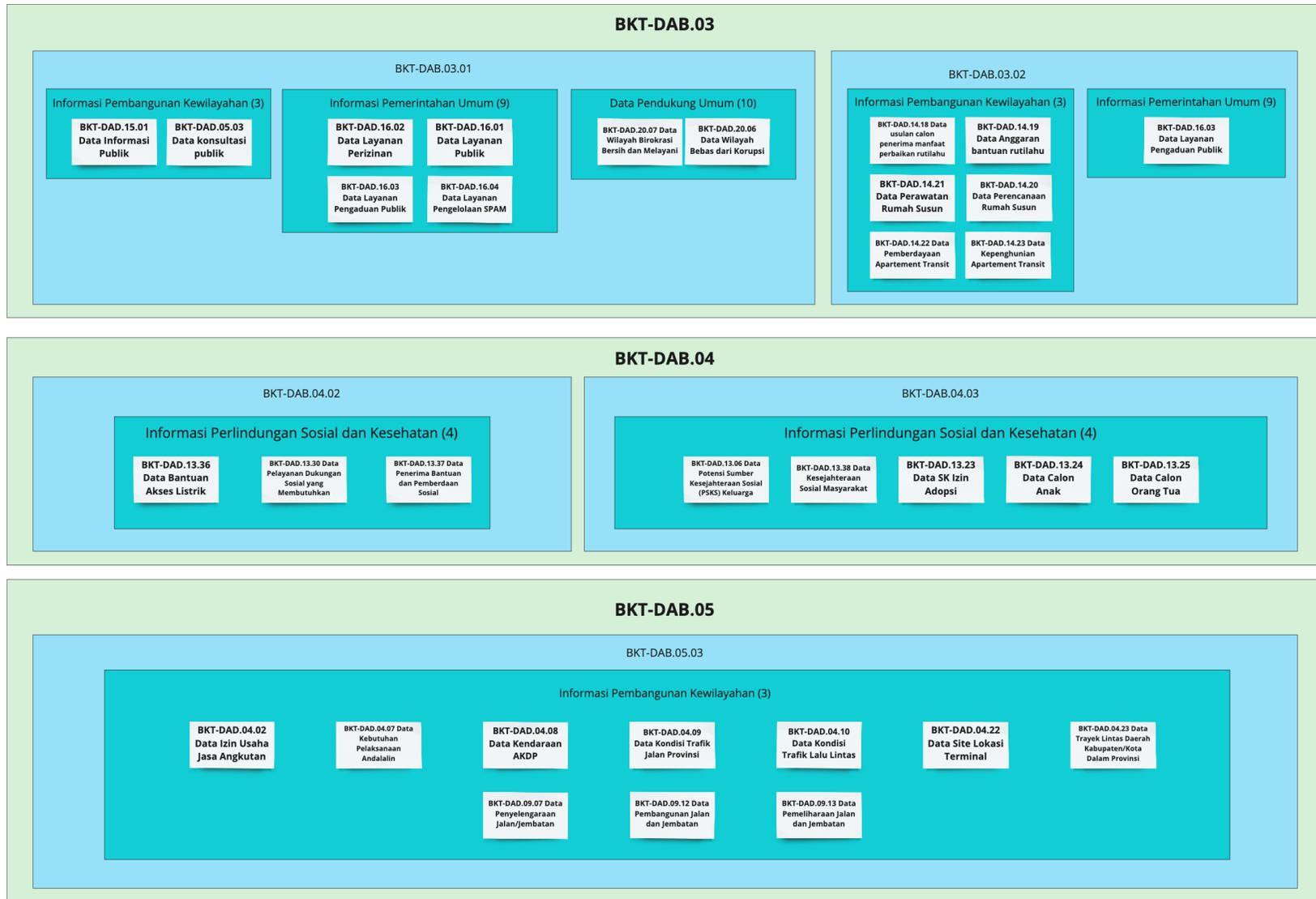
<b>Informasi Pembangunan Kewilayahan (3)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.03	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	BKT-DAD.05	Data Rencana Pembangunan Daerah
RAD.03	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01	Data Pekerjaan Umum	BKT-DAD.09	Data Bina Marga dan Pembangunan Daerah
RAD.03	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03	Data Transportasi	BKT-DAD.04	Data Perhubungan
RAD.03	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	BKT-DAD.14	Data Pemukiman
RAD.03	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07	Data Kependudukan	BKT-DAD.02	Data Kependudukan
<b>Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (4)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.04	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01	Data Kesehatan	BKT-DAD.03	Data Kesehatan
RAD.04	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02	Data Sosial	BKT-DAD.08	Data Penanggulangan Bencana
RAD.04	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02	Data Sosial	BKT-DAD.13	Data Sosial dan Masyarakat
<b>Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (5)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.05	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02	Data Keamanan	BKT-DAD.10	Data Ketertiban
<b>Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (6)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.06	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01	Data Pendidikan	BKT-DAD.01	Data Kependidikan

RAD.06	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	BKT-DAD.06	Data TIK
<b>Informasi Pemerintahan Umum (9)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.09	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02	Data Keuangan	BKT-DAD.17	Data Anggaran
RAD.09	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06	Data Aparatur Negara	BKT-DAD.16	Data Layanan
RAD.09	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06	Data Aparatur Negara	BKT-DAD.19	Data Kinerja
<b>Data Pendukung Umum (10)</b>					
<b>Data Tematik</b>		<b>Data Topik</b>		<b>Data Sub Topik</b>	
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	BKT-DAD.07	Data Pelaksanaan SPBE
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	BKT-DAD.11	Data Peraturan dan Pemerintahan
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	BKT-DAD.12	Data Kesatuan Bangsa dan Politik
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.01	Data Kebijakan Pemerintah	BKT-DAD.20	Data Reformasi Birokrasi
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.04	Data Dukung Lainnya	BKT-DAD.15	Data Informasi
RAD.10	RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.02	Data Manajemen Kegiatan	BKT-DAD.18	Data Kegiatan

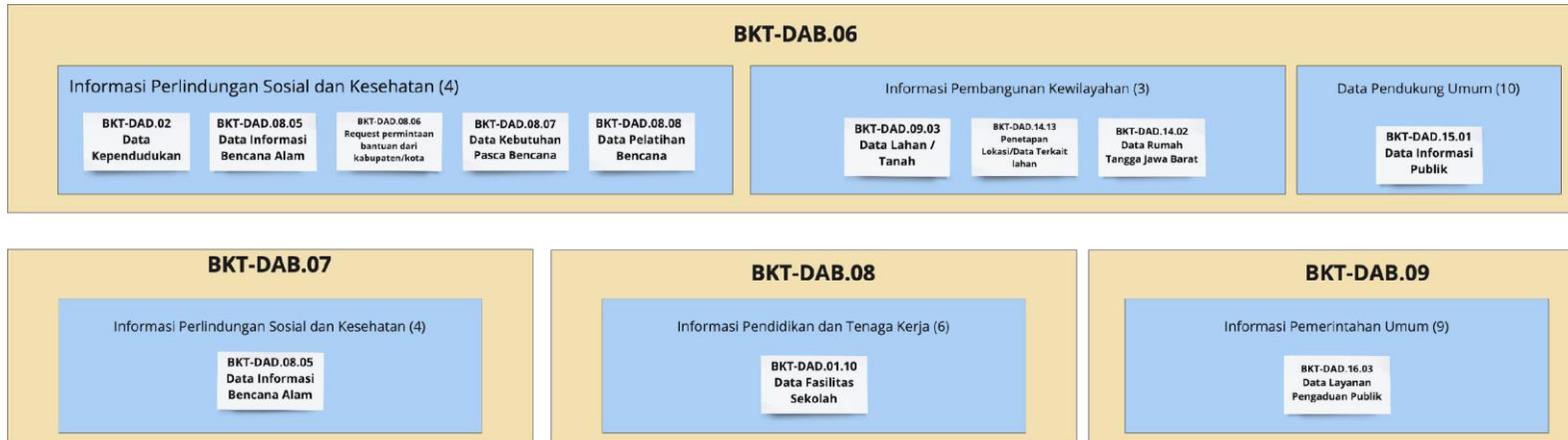
Dapat dilihat berdasarkan pemetaan untuk perwakilan setiap data berdasarkan referensi arsitektur dimana diambil dari kondisi saat ini di Pemerintahan Kota Bogor terkait dari data dan informasi. setiap data yang diolah pada proses pelaksanaan layanan di Pemerintahan Kota Bogor akan memiliki referensi arsitektur data dan informasi sehingga dapat dikelompokkan sebagai salah satu *resource* untuk implementasi satu data kedepannya.

Arsitektur Data dan Informasi juga dapat dibentuk berdasarkan proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, serta proses bisnis manajerial yang ada di Pemerintah Kota Bogor. Data merupakan aset yang digunakan ataupun yang diperoleh dari proses bisnis, sehingga arsitektur data dan Informasi memiliki kaitan yang erat dengan arsitektur proses bisnis. Data Topik dan data subtopik yang ada pada Tabel 31 dijadikan dasar pembuatan arsitektur data dan informasi berdasarkan pengelompokan proses bisnis utama, pendukung dan manajerial, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

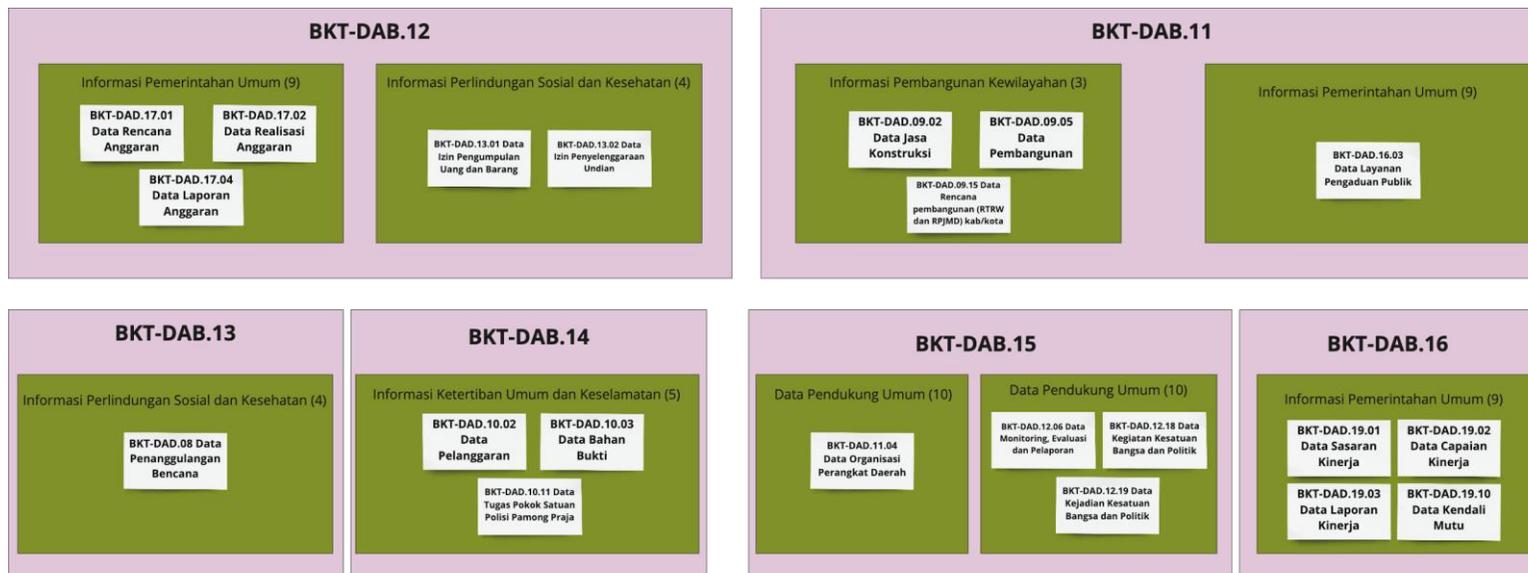




Gambar 4. 4. Pemetaan Data berdasarkan Proses Bisnis Utama

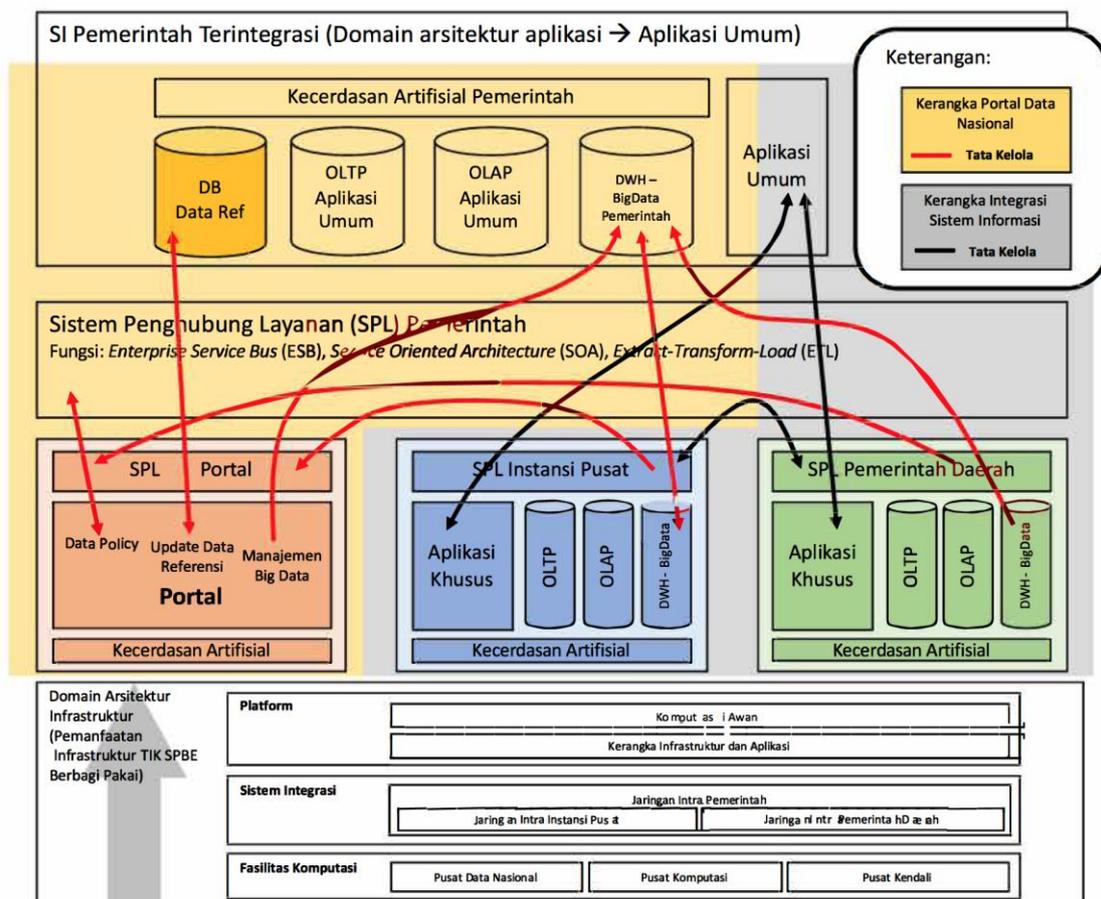


Gambar 4. 5. Pemetaan Data berdasarkan Proses Bisnis Pendukung



Gambar 4. 6. Pemetaan Data berdasarkan Proses Bisnis Manajerial

Saat ini, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) digunakan pada proses integrasi data, dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Interkoneksi yang dibutuhkan dalam operasional aplikasi umum dalam bentuk SPLP, fungsi extract, transform, load (ETL) untuk interkoneksi ke database yang diperlukan dalam SI Pemerintah Terintegrasi. Proses integrasi ini termasuk sinkronisasi semua data dan informasi yang dimiliki oleh IPPD melalui Application Programming Interface (API) antara sistem/aplikasi yang dikembangkan IPPD dengan Portal SDI.



Gambar 4. 7. Kerangka Portal Data Nasional dan Integrasi SI

Namun demikian, fasilitas komputasi di Pemerintah Kota Bogor belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Dalam Perpres No 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan

data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah. Perangkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor saat ini terdiri dari perangkat firewall yang terdapat komponen proxy, content filtering, intrusion detection and prevention, identity and access management, public key infrastructure (SSL), dan antivirus. Komponen antivirus terdapat antimalware dan antispam serta patch management.

## A2. Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Tahap awal dalam penyusunan arsitektur data dan informasi adalah optimasi arsitektur data dan informasi melalui taktik business driven. Pada fase ini, Pemerintah Kota Bogor akan menentukan fokusnya untuk mengoptimalkan arsitektur data dan informasi berdasarkan driver bisnis yang umumnya dirasakan oleh sebagian besar organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut



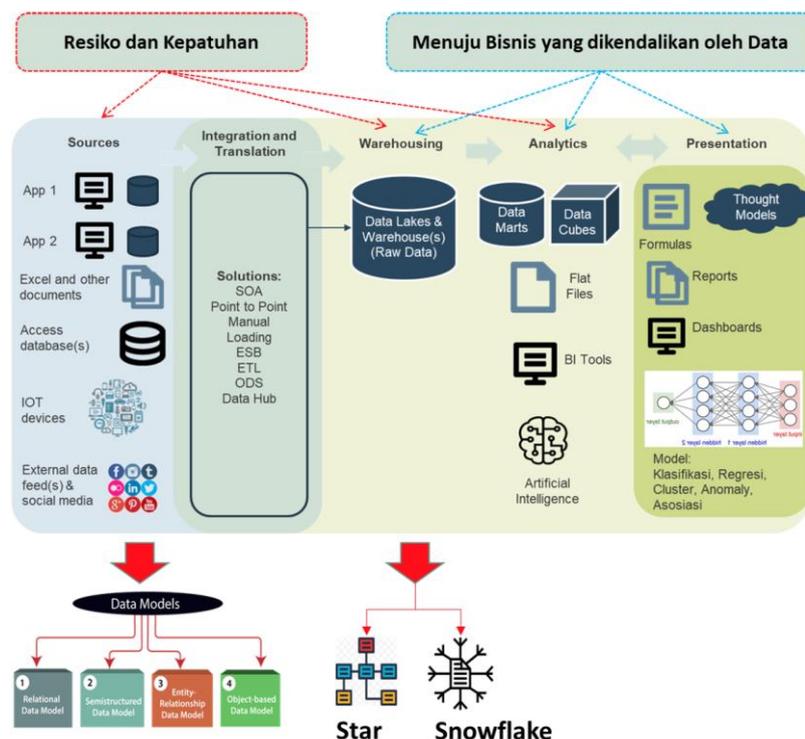
Gambar 4. 8. Empat Penggerak Utama Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, dan Rencana Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE nasional, penggerak utama penyusunan Arsitektur Data dan Informasi berkaitan dengan risiko dan kepatuhan serta menuju bisnis yang dikendalikan oleh data. Setelah 2 (dua) pendorong utama ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pemetaan pada Lima Lapisan Utama Model Arsitektur Data dan Informasi.

Dari pemetaan tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber data yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor. Sumber data yang dikumpulkan berupa data terstruktur yang berasal dari aplikasi, dokumen, file, dll juga data tidak terstruktur yang berasal dari media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor.

Penyusunan arsitektur data dan informasi didasarkan pada referensi arsitektur data dan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor yang merupakan instansi pusat perlu melakukan identifikasi berkaitan dengan data pada tingkat 3 (data topik) dan tingkat 4 (data subtopik). Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan arsitektur data dan informasi adalah memetakan data yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor. Hasil identifikasi dari karakteristik data yang ada saat ini di Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa Data pokok kode 03 (Informasi Pembangunan Kewilayahan), kode 04 (Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan), kode 05 (Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan), kode 06 (Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja) , kode 09 (Informasi Pemerintahan Umum) dan kode 10 (Data Pendukung Umum) merupakan 4 data pokok yang paling relevan.



Gambar 4. 9. Pemetaan Penggerak Utama Pada Lima Lapisan Utama Model Arsitektur Data dan Informasi

Target Pengelolaan data adalah terwujudnya Satu Data Pemerintah Kota Bogor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Big Data dan Analytics khususnya yang melibatkan proses bisnis utama, yaitu BKT-DAB.01, BKT-DAB.02, BKT-DAB.03, BKT-DAB.04 dan BKT-DAB.05

#### **a. Identifikasi Kebutuhan Data Pemerintah Kota Bogor**

Kebutuhan data yang saat ini perlu dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, baik berkaitan dengan kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja dan SDM aparatur. Berikut identifikasi kebutuhan data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

1. Data Administrasi Kepegawaian
2. Data Peningkatan Kompetensi SDM
3. Data Bahan/Referensi Pembuatan Kebijakan (Peraturan Perundang - undangan, dll)
4. Data Kerangka Regulasi
5. Data Hasil Evaluasi Kebijakan/Data Persetujuan
6. Data Kerjasama
7. Data Kunjungan Kerja

Salah satu strategi dalam implementasi program satu data Pemerintah Kota Bogor dengan penyusunan data warehouse di Pemerintah Kota Bogor sudah direncanakan sebelumnya. Penyusunan data warehouse di Pemerintah Kota Bogor dimulai dengan melakukan identifikasi database dengan pengelompokan sebagai berikut

1. *Database* Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
2. *Database* Kelembagaan dan Tata Laksana
3. *Database* SDM Aparatur
4. *Database* Pelayanan Publik
5. *Database* Aset, Keuangan dan Anggaran
6. *Database* Kepegawaian
7. *Database* Kebijakan dan regulasi

Hasil pemetaan database tersebut terhadap data pendukung yang bersesuaian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 4. Pemetaan Data Berdasarkan Sub Data

Data Induk		Kelompok Data	
BKT-DAD.01	Data Kependidikan	BKT-DAD.01.01	Data Fasilitas Fisik Sekolah
		BKT-DAD.01.02	Data Sekolah
		BKT-DAD.01.03	Data Siswa
		BKT-DAD.01.04	Data Alat praktek dan Peraga
		BKT-DAD.01.05	Data Kebutuhan Fasilitas Sekolah
		BKT-DAD.01.06	Data Perlengkapan Sekolah
		BKT-DAD.01.07	Data Guru dan Tendik
		BKT-DAD.01.08	Data Pembiayaan Peserta Didik
		BKT-DAD.01.09	Data Pokok Pendidikan
		BKT-DAD.01.10	Data Fasilitas Sekolah
		BKT-DAD.01.11	Dokumen Silabus
		BKT-DAD.01.12	E-book/Buku Cetak
		BKT-DAD.01.13	Data Kurikulum
		BKT-DAD.01.14	Data Penerimaan Peserta Didik Baru
		BKT-DAD.01.15	Data Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Pendidik
		BKT-DAD.01.16	Data Penugasan Guru dan Tenaga Pendidik
		BKT-DAD.01.17	Data Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Pendidik
		BKT-DAD.01.18	Data Biaya Operasional Pendidikan
BKT-DAD.02	Data Kependudukan	BKT-DAD.02.01	Data NIK
		BKT-DAD.02.02	Data NIK Lama
		BKT-DAD.02.03	Data Keluarga
		BKT-DAD.02.04	Data Kepala Keluarga
		BKT-DAD.02.05	Data Jumlah Penduduk
BKT-DAD.03	Data Kesehatan	BKT-DAD.03.01	Data Layanan Kesehatan
		BKT-DAD.03.02	Data Posyandu

Data Induk		Kelompok Data			
		BKT-DAD.03.03	Data Ibu dan Anak		
		BKT-DAD.03.04	Data Gizi		
		BKT-DAD.03.05	Data Lingkungan		
		BKT-DAD.03.06	Data Jaminan Kesehatan		
		BKT-DAD.03.07	Data Penyakit Menular dan Tidak Menular		
		BKT-DAD.03.08	Data Covid-19		
		BKT-DAD.03.09	Data Pelayanan Kesehatan		
		BKT-DAD.03.10	Data Informasi Kesehatan		
		BKT-DAD.03.11	Data Fasilitas Kesehatan		
		BKT-DAD.03.12	Data Mutu Layanan Kesehatan		
		BKT-DAD.03.13	Data Dokter		
		BKT-DAD.03.14	Data Rumah Sakit		
		BKT-DAD.03.15	Data Gawat Darurat		
		BKT-DAD.03.16	Data Pasien		
		BKT-DAD.03.17	Data Profil Kesehatan		
		BKT-DAD.03.18	Data STR (Surat Tanda Registrasi)		
		BKT-DAD.03.19	Data PBF (Pedagang Besar Farmasi)		
		BKT-DAD.03.20	Data PAK (Penyalur Alat Kesehatan)		
		BKT-DAD.03.21	DATA UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional)		
		BKT-DAD.03.22	Data Master Sistem Informasi Kesehatan		
		BKT-DAD.03.23	Data Obat yang Dibutuhkan		
		BKT-DAD.03.24	Data Kejadian Luar Biasa		
		BKT-DAD.04	Data Perhubungan	BKT-DAD.04.01	Data Bongkar Muat Perusahaan Pelayaran
				BKT-DAD.04.02	Data Izin Usaha Jasa Angkutan
BKT-DAD.04.03	Data Kajian Teknis Angkutan Laut				
BKT-DAD.04.04	Data Kapasitas dan Kepadatan Pengunjung Pelabuhan				

Data Induk		Kelompok Data			
		BKT-DAD.04.05	Data Kapasitas dan Kepadatan Pengunjung Terminal		
		BKT-DAD.04.06	Data Kebutuhan dan Rancang Bangun Terminal		
		BKT-DAD.04.07	Data Kebutuhan Pelaksanaan Andalalin		
		BKT-DAD.04.08	Data Kendaraan AKDP		
		BKT-DAD.04.09	Data Kondisi Trafik Jalan Provinsi		
		BKT-DAD.04.10	Data Kondisi Trafik Lalu Lintas		
		BKT-DAD.04.11	Data Kunjungan Kapal Penumpang Bongkar Muat		
		BKT-DAD.04.12	Data Pelaksana Audit		
		BKT-DAD.04.13	Data Pemohon Pelaksanaan Andalalin		
		BKT-DAD.04.14	Data Pengelolaan Pelabuhan		
		BKT-DAD.04.15	Data Pengendara		
		BKT-DAD.04.16	Data Pengguna/Penumpang		
		BKT-DAD.04.17	Data Pengolaan Fasilitas Terminal		
		BKT-DAD.04.18	Data Perlengkapan Jalan		
		BKT-DAD.04.19	Data Perusahaan Yang Telah Daftar Ulang		
		BKT-DAD.04.20	Data Rekapitulasi Kondisi dan Produktivitas Terminal		
		BKT-DAD.04.21	Data Site Lokasi Lalu Lintas Jalan Provinsi		
		BKT-DAD.04.22	Data Site Lokasi Terminal		
		BKT-DAD.04.23	Data Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi		
		BKT-DAD.04.24	Informasi Lalu Lintas		
		BKT-DAD.04.25	Data Kontak Informasi Perhubungan		
		BKT-DAD.05	Data Rencana Pembangunan Daerah	BKT-DAD.05.01	Data RT/RW
				BKT-DAD.05.02	Data Permasalahan di Daerah
				BKT-DAD.05.03	Data konsultasi publik
				BKT-DAD.05.04	Data Musrenbang
BKT-DAD.05.05	Data Perencanaan Pembangunan				

Data Induk		Kelompok Data	
BKT-DAD.06	Data TIK	BKT-DAD.06.01	Data Permohonan Rekomendasi Aplikasi
		BKT-DAD.06.02	Data Persetujuan Rekomendasi Aplikasi
		BKT-DAD.06.03	Data Pendaftaran Aplikasi
		BKT-DAD.06.04	Data Permohonan Hosting
		BKT-DAD.06.05	Data Persetujuan Hosting
		BKT-DAD.06.06	Data Permohonan IP Publik
		BKT-DAD.06.07	Data Persetujuan IP Publik
		BKT-DAD.06.08	Data Pengadaan/Rekmendasi Perangkat
		BKT-DAD.06.09	Data Persetujuan Pengadaan Perangkat
		BKT-DAD.06.10	Data Pendaftaran Perangkat TI
		BKT-DAD.06.11	Data Kebijakan/Pedoman TI
		BKT-DAD.06.12	Data Standarisasi TIK
		BKT-DAD.06.13	Data Audit TIK
		BKT-DAD.06.14	Monitoring Aplikasi
BKT-DAD.07	Data Pelaksanaan SPBE	BKT-DAD.07.01	Data Program Smart City
		BKT-DAD.07.02	Data Proses Evaluasi SPBE
		BKT-DAD.07.03	Data Hasil Evaluasi SPBE
BKT-DAD.08	Data Penanggulangan Bencana	BKT-DAD.08.01	Data Indeks Ketahanan Daerah
		BKT-DAD.08.02	Data Laporan Kepala Daerah
		BKT-DAD.08.03	Data Indeks Kesiapsiagaan masyarakat
		BKT-DAD.08.04	Data Indikator Desa Tangguh
		BKT-DAD.08.05	Data Informasi Bencana Alam
		BKT-DAD.08.06	Request permintaan bantuan dari kabupaten/kota
		BKT-DAD.08.07	Data Kebutuhan Pasca Bencana
		BKT-DAD.08.08	Data Pelatihan Bencana
		BKT-DAD.08.09	Data bencana provinsi

Data Induk		Kelompok Data	
BKT-DAD.09	Data Bina Marga dan Pembangunan Daerah	BKT-DAD.09.01	Data Analisis Dampak Lingkungan
		BKT-DAD.09.02	Data Jasa Konstruksi
		BKT-DAD.09.03	Data Lahan / Tanah
		BKT-DAD.09.04	Data Pelatihan Tenaga Konstruksi
		BKT-DAD.09.05	Data Pembangunan
		BKT-DAD.09.06	Data penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang
		BKT-DAD.09.07	Data Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
		BKT-DAD.09.08	Data Perizinan Lahan
		BKT-DAD.09.09	Data Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
		BKT-DAD.09.10	Data Kajian insentif dan disinsentif
		BKT-DAD.09.11	Data Kondisi Jalan
		BKT-DAD.09.12	Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
		BKT-DAD.09.13	Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		BKT-DAD.09.14	Data Panjang Jalan Provinsi sesuai SK Gubernur
		BKT-DAD.09.15	Data Rencana pembangunan (RTRW dan RPJMD) kab/kota
		BKT-DAD.09.16	Data Usulan kesesuaian pemanfaatan ruang
BKT-DAD.10	Data Ketertiban	BKT-DAD.10.01	Data Gangguan Trantibum
		BKT-DAD.10.02	Data Pelanggaran
		BKT-DAD.10.03	Data Bahan Bukti
		BKT-DAD.10.04	Data Penyidik
		BKT-DAD.10.05	Berkas Perkara
		BKT-DAD.10.06	Dokumen Pemetaan
		BKT-DAD.10.07	Dokumen Permasalahan
		BKT-DAD.10.08	Data Hasil Deteksi
		BKT-DAD.10.09	Data Kendala
		BKT-DAD.10.10	Data Pengamanan

Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.10.11	Data Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja
BKT-DAD.11	Data Peraturan dan Pemerintahan	BKT-DAD.11.01	Data SOP terdahulu
		BKT-DAD.11.02	Data Perda (Peraturan Daerah)
		BKT-DAD.11.03	Data Perkada (Peraturan Kepala Daerah)
		BKT-DAD.11.04	Data Organisasi Perangkat Daerah
		BKT-DAD.11.05	Data Aset Milik Perangkat Daerah
		BKT-DAD.11.06	Data Aset Pemerintah Provinsi
		BKT-DAD.11.07	Data Wilayah Perbatasan
		BKT-DAD.11.08	Data Rencana Strategis
		BKT-DAD.11.09	Data Rencana Kerja
		BKT-DAD.11.10	Data Evaluasi Perangkat Daerah
		BKT-DAD.11.11	Data SK Bupati/Walikota
		BKT-DAD.11.12	Data SK Gubernur
		BKT-DAD.11.13	Data Rancangan Peraturan Daerah RT/RW Kab/ Kota
BKT-DAD.12	Data Kesatuan Bangsa dan Politik	BKT-DAD.12.01	Data Program Kerja
		BKT-DAD.12.02	Data Pelaksanaan Program Kerja
		BKT-DAD.12.03	Data Rumusan Kebijakan
		BKT-DAD.12.04	Data Pelaksanaan Kebijakan
		BKT-DAD.12.05	Data Pelaksanaan Koordinasi
		BKT-DAD.12.06	Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		BKT-DAD.12.07	Data Pelaksanaan Pemilu per kab/kota
		BKT-DAD.12.08	Jumlah Bantuan Keuangan per Kab/Kota
		BKT-DAD.12.09	Data Pengawasan Organisasi Masyarakat Umum dan Asing di Daerah
		BKT-DAD.12.10	Data Jumlah Organisasi Kemasyarakatan per Kab/Kota

Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.12.11	Data Fasilitas Pencegahan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama
		BKT-DAD.12.12	Data Fasilitas Pencegahan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragam
		BKT-DAD.12.13	Data Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
		BKT-DAD.12.14	Data Konflik Daerah yang Sudah Ditangani
		BKT-DAD.12.15	Data Jumlah Potensi Konflik/Konflik per Kab/Kota
		BKT-DAD.12.16	Data Forum Koordinasi
		BKT-DAD.12.17	Data Laporan Koordinasi Terakhir
		BKT-DAD.12.18	Data Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik
		BKT-DAD.12.19	Data Kejadian Kesatuan Bangsa dan Politik
BKT-DAD.13	Data Sosial dan Masyarakat	BKT-DAD.13.01	Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang
		BKT-DAD.13.02	Data Izin Penyelenggaraan Undian
		BKT-DAD.13.03	Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
		BKT-DAD.13.04	Data PSKS Lainnya
		BKT-DAD.13.05	Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
		BKT-DAD.13.06	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga
		BKT-DAD.13.07	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat
		BKT-DAD.13.08	Data Fasilitas Pemulangan
		BKT-DAD.13.09	Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		BKT-DAD.13.10	Data Stock Makanan Tersisa
		BKT-DAD.13.11	Data Penyandang Disabilitas yang Membutuhkan
		BKT-DAD.13.12	Data Stock Pakaian Tersisa
		BKT-DAD.13.13	Data Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		BKT-DAD.13.14	Data Anak Terlantar yang Membutuhkan Panti

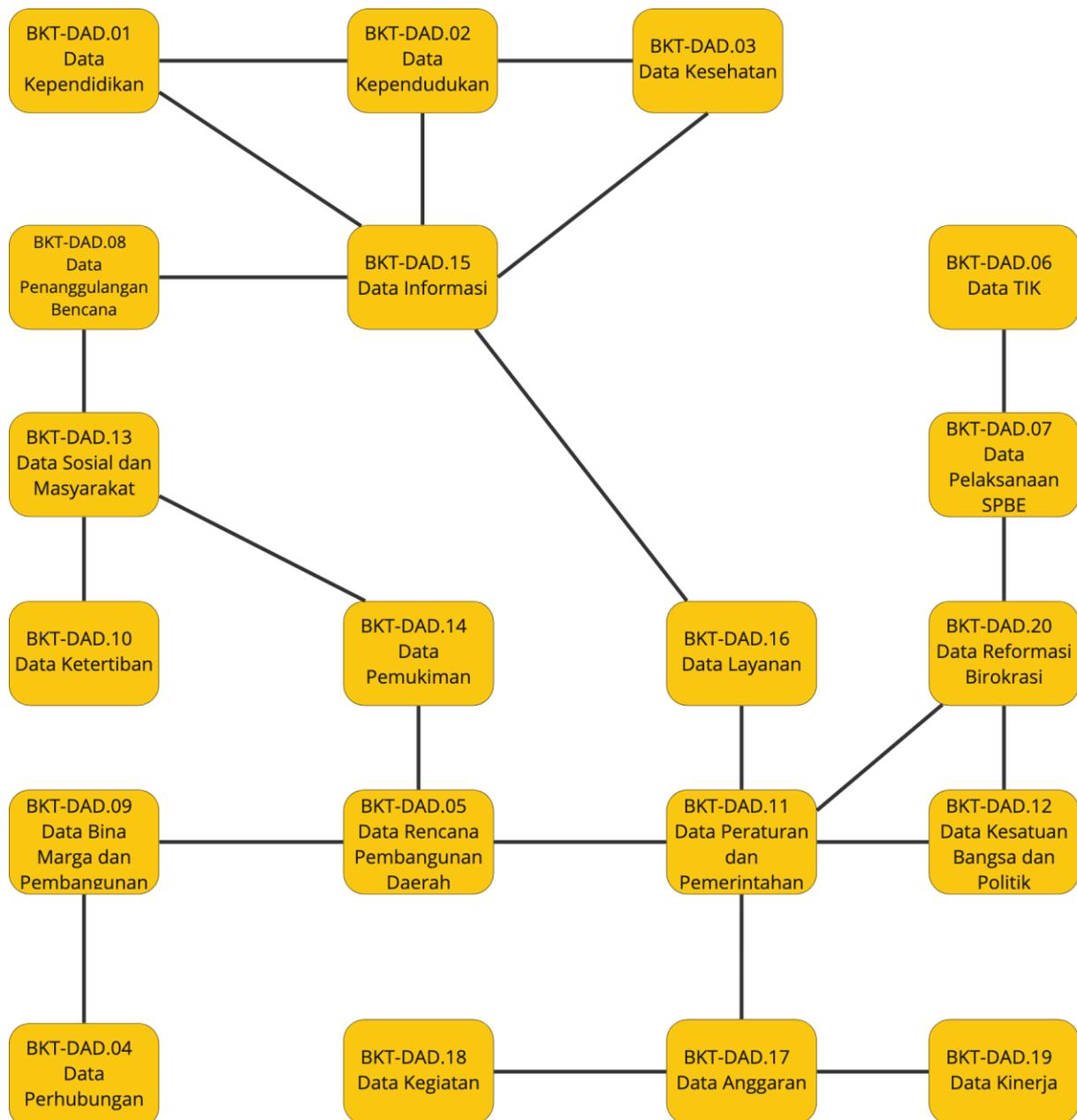
Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.13.15	Data Anak Terlantar yang Tidak Membutuhkan Panti
		BKT-DAD.13.16	Data Anak Terlantar yang membutuhkan
		BKT-DAD.13.17	Data Layanan Pengasuhan
		BKT-DAD.13.18	Data Lanjut Usia yang Membutuhkan
		BKT-DAD.13.19	Data Jenazah
		BKT-DAD.13.20	Data Gelandangan dan Pengemis yang Membutuhkan
		BKT-DAD.13.21	Data Daerah Asal
		BKT-DAD.13.22	Data PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Membutuhkan
		BKT-DAD.13.23	Data SK Izin Adopsi
		BKT-DAD.13.24	Data Calon Anak
		BKT-DAD.13.25	Data Calon Orang Tua
		BKT-DAD.13.26	Data Kube
		BKT-DAD.13.27	Data Fakir Miskin
		BKT-DAD.13.28	Data Pengembangan Ekonomi
		BKT-DAD.13.29	Data Buffer Stock
		BKT-DAD.13.30	Data Pelayanan Dukungan Sosial yang Membutuhkan
		BKT-DAD.13.31	Data Kelompok Rentan
		BKT-DAD.13.32	Data Sarana dan Prasarana Tersedia
		BKT-DAD.13.33	Data Taman Makam Pahlawan
		BKT-DAD.13.34	Data Pemeliharaan
		BKT-DAD.13.35	Data Pemberdayaan Masyarakat
		BKT-DAD.13.36	Data Bantuan Akses Listrik
		BKT-DAD.13.37	Data Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial
		BKT-DAD.13.38	Data Kesejahteraan Sosial Masyarakat
BKT-DAD.14	Data Pemukiman	BKT-DAD.14.01	Data Sanitasi Layak di Jawa Barat

Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.14.02	Data Rumah Tangga Jawa Barat
		BKT-DAD.14.03	Data Usulan pengadaan lahan
		BKT-DAD.14.04	Data Usulan kegiatan persampahan
		BKT-DAD.14.05	Data TPS3R
		BKT-DAD.14.06	Data Kegiatan Persampahan
		BKT-DAD.14.07	Data perencanaan dalam rangka identifikasi titik genangan permukiman
		BKT-DAD.14.08	Data Drainase yang tertangani
		BKT-DAD.14.09	Data pembangunan bangunan gedung di Provinsi Jawa Barat
		BKT-DAD.14.10	Data Penatausahaan Rumah Negara Gol III
		BKT-DAD.14.11	Data Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung di kab/Kota di Jawa Barat
		BKT-DAD.14.12	Data Pembangunan Masjid
		BKT-DAD.14.13	Penetapan Lokasi/Data Terkait lahan
		BKT-DAD.14.14	Data pembangunan Sarana dan Prasarana selain Masjid
		BKT-DAD.14.15	Data Usulan penataan kawasan kumuh
		BKT-DAD.14.16	Data kawasan kumuh
		BKT-DAD.14.17	Data DED penataan kawasan kumuh
		BKT-DAD.14.18	Data usulan calon penerima manfaat perbaikan rutilahu
		BKT-DAD.14.19	Data Anggaran bantuan rutilahu
		BKT-DAD.14.20	Data Perencanaan Rumah Susun
		BKT-DAD.14.21	Data Perawatan Rumah Susun
		BKT-DAD.14.22	Data Pemberdayaan Apartement Transit
		BKT-DAD.14.23	Data Kepenghunian Apartement Transit
BKT-DAD.15	Data Informasi	BKT-DAD.15.01	Data Informasi Publik

Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.15.02	Data Informasi Pemerintahan
BKT-DAD.16	Data Layanan	BKT-DAD.16.01	Data Layanan Publik
		BKT-DAD.16.02	Data Layanan Perizinan
		BKT-DAD.16.03	Data Layanan Pengaduan Publik
		BKT-DAD.16.04	Data Layanan Pengelolaan SPAM
BKT-DAD.17	Data Anggaran	BKT-DAD.17.01	Data Rencana Anggaran
		BKT-DAD.17.02	Data Realisasi Anggaran
		BKT-DAD.17.03	Data Anggaran Disetujui
		BKT-DAD.17.04	Data Laporan Anggaran
		BKT-DAD.17.05	Data Pertanggungjawaban Anggaran
		BKT-DAD.17.06	Data Reviu Pengelolaan Anggaran (PA) Pengadaan Barang dan Jasa
BKT-DAD.18	Data Kegiatan	BKT-DAD.18.01	Data Rencana Kegiatan
		BKT-DAD.18.02	Data Realisasi Kegiatan
		BKT-DAD.18.03	Data Kegiatan Disetujui
		BKT-DAD.18.04	Data Laporan Kegiatan
		BKT-DAD.18.05	Data Pertanggungjawaban Kegiatan
		BKT-DAD.18.06	Data Rencana Operasi
BKT-DAD.19	Data Kinerja	BKT-DAD.19.01	Data Sasaran Kinerja
		BKT-DAD.19.02	Data Capaian Kinerja
		BKT-DAD.19.03	Data Laporan Kinerja
		BKT-DAD.19.04	Data Rencana Strategis
		BKT-DAD.19.05	Data Indikator Kinerja Utama
		BKT-DAD.19.06	Data Rencana Kerja
		BKT-DAD.19.07	Data Kerangka Acuan Kerja
		BKT-DAD.19.08	Data Analisis Beban Kerja

Data Induk		Kelompok Data	
		BKT-DAD.19.09	Data Bimbingan/Konseling Kinerja
		BKT-DAD.19.10	Data Kendali Mutu
BKT-DAD.20	Data Reformasi Birokrasi	BKT-DAD.20.01	Data Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
		BKT-DAD.20.02	Data Kegiatan Reformasi Birokrasi
		BKT-DAD.20.03	Data Monev Reformasi Birokrasi
		BKT-DAD.20.04	Data Capaian Progress Monev Reformasi Birokrasi
		BKT-DAD.20.05	Data Verifikasi Tim Monev RB
		BKT-DAD.20.06	Data Wilayah Bebas dari Korupsi
		BKT-DAD.20.07	Data Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat relasi dari data yang sudah diidentifikasi sebelumnya untuk melihat keterhubungan dari masing-masing data yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan interoperabilitas data. Selain itu relasi data ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan proses integrasi aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan atau pengembangan aplikasi untuk mendukung proses bisnis dan memenuhi layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik. Relasi dari data yang ada dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 4. 10. Relasi Antar Data

Sebagian besar data yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor saat ini merupakan data yang berkaitan dengan produk, reformasi birokrasi, kelembagaan dan tata laksana, SDM Aparatur, ataupun pelayanan publik, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada data maupun kelompok data baru yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor.

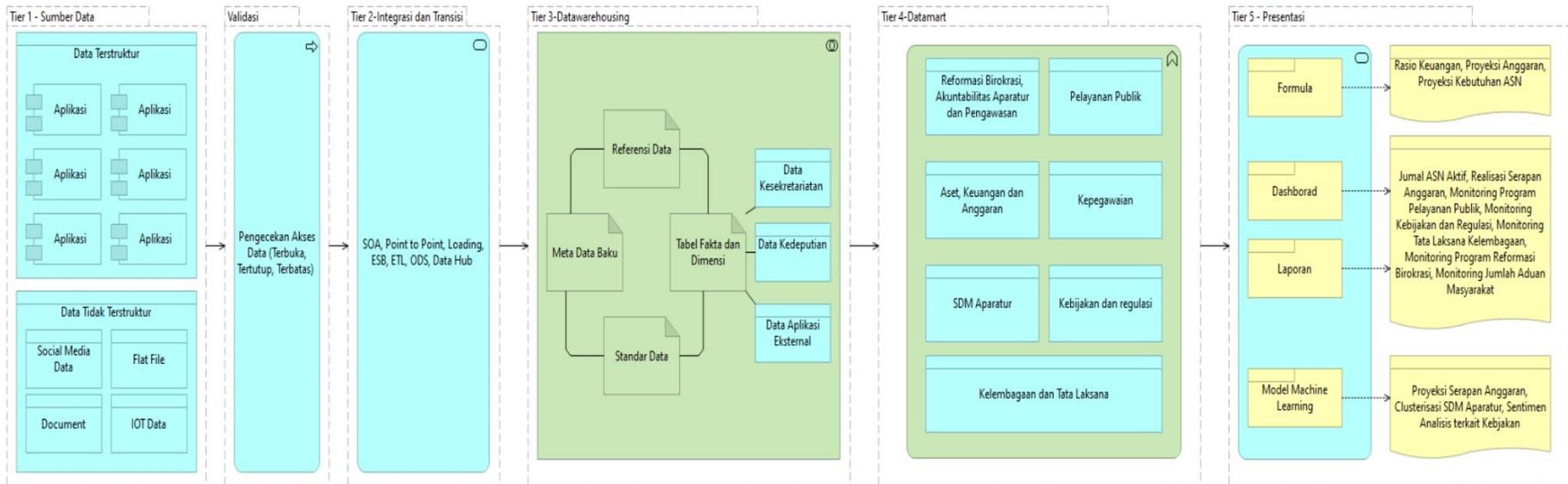
Hasil kajian lainnya menunjukkan bahwa, saat ini sudah ada upaya untuk mengimplementasikan konsep Data Warehouse pada data yang saat ini dikelola, namun perlu identifikasi lebih detail dari masing--masing data dan kebutuhan. Selain itu, saat ini Pemerintah Kota Bogor masih fokus pada data yang sifatnya terstruktur, data yang dihasilkan atau dikelola melalui sebuah perangkat lunak/ aplikasi atau data dalam bentuk format excel, csv dan data jenis lainnya. Data tidak terstruktur yang berasal dari website dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk mendapatkan saran dan masukan pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.

Keberadaan arsitektur data dan informasi to-be yang mengarah pada pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dengan harapan:

- a. Seluruh data sudah terstandard dan siap untuk diproses secara digital
- b. Tata kelola data sudah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Sistem sudah dapat melakukan analisa data secara otomatis

Pemerintah Kota Bogor memerlukan Single Source of Truth Data yang handal yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan valid. Hal tersebut dapat dicapai, salah satunya dengan dukungan dari Data Warehouse. Data Warehouse akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bogor yang sudah memiliki cukup banyak aplikasi dan mengintegrasikan data dalam aplikasi-aplikasi tersebut serta data lain sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya di level eksekutif atau top level manajemen.

Selain itu, pemanfaatan data warehouse di Pemerintah Kota Bogor diharapkan akan banyak membantu mendukung proses-proses yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dengan dukungan data yang terpusat. Oleh karena itu, arsitektur data dan informasi to-be di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan disusun dengan menggunakan pendekatan arsitektur sistem pengambilan keputusan berbasis data yang didukung oleh teknologi big data analytics sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 80 berikut.



Gambar 4. 11. Arsitektur Data dan Informasi (To-Be)

Arsitektur data dan informasi usulan tersebut memuat proses integrasi dari berbagai sumber data, baik yang bersumber dari aplikasi, flat files, media sosial maupun berbagai perangkat IOT seperti sensor, presensi sidik jari, cctv, dsb. Untuk mendukung pengambilan keputusan, maka penggunaan five-tiers menjadi salah satu alternatif dalam membantu menyusun lapisan-lapisan pendukungnya. Dalam arsitektur usulan tersebut tercakup sistem Business Intelligence (BI) maupun machine learning berbasis kecerdasan buatan yang berfungsi untuk memodelkan trend data atau prediksi trend di masa depan berdasarkan kumpulan data dan informasi yang ada selama rentang waktu tertentu yang tersimpan di berbagai datamarts. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tiers.

### **a) Tier 1 - Sumber Data**

Pada tier pertama, seluruh sumber data dijadikan kandidat dari data yang akan dipergunakan untuk menjadi masukan bagi model data warehouse pada Tier ke 3. Sumber-sumber data pada Tier pertama didapatkan dari hasil pendataan yang dilakukan pada Arsitektur Aplikasi maupun Layanan, dimana sumber data dapat berasal dari Aplikasi yang sudah digunakan (baik eksternal maupun internal), dokumen eksternal yang terstruktur seperti file excel hasil pengolahan mandiri oleh unit kerja di organisasi perangkat daerah atau data yang dikelola oleh kesekretariatan, data tidak terstruktur yang ada di media sosial PAN-RB, maupun data dari perangkat IOT seperti data presensi sidik jari, cctv, dsb. Data dengan berbagai sumber ini nantinya perlu dipilah melalui proses penyaringan pada berbagai level Akses Data. Data yang memiliki sifat terbuka saja yang akan diteruskan ke Tier berikutnya.

### **b) Tier 2 - Integrasi dan Transisi**

Aplikasi integrasi dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/ informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk memindahkan data dari berbagai sumber baik eksternal maupun internal pada kecepatan yang berbeda untuk tujuan:

1. Memindahkan data dari sistem asal ke sistem hilir untuk mendukung proses bisnis yang terintegrasi. Hal ini memastikan data dengan akses terbuka dialirkan melalui proses yang baik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan hasil dan kecepatan penyelesaian tugas dan proses.
2. Memindahkan data ke Tier 3 - Arsitektur Data Warehouse, di mana data disimpan untuk tujuan lain. Dalam proses migrasi data diperlukan beberapa proses seperti ETL (Extract, Transform dan Load). Tujuan dari proses ETL adalah:
  - Membersihkan data dari berbagai kemungkinan kesalahan seperti adanya typo, data yang hilang, ketidakkonsistenan
  - Menyediakan kepercayaan terhadap sumber data
  - Mengubah data transaksi kedalam granularitas waktu yang didefinisikan di data warehouse.
3. Berbagai alternatif teknologi dapat digunakan seperti Arsitektur Berorientasi Service (SOA), Point to Point, ETL, ODS, ESB serta Data Hub.

### **c) Tier 3 - Data Warehousing**

Data Warehousing adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu tempat dengan 4 karakteristik yaitu berorientasi subyek, terintegrasi, mempunyai variasi waktu tertentu (granularitas waktu), serta tidak dapat dirubah. Data disimpan dalam bentuk dimensional modeling dengan beberapa tabel fakta dan dimensi. Penyusunan Data Warehouse pada Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

- Referensi Data, yaitu Data harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di Portal Satu Data.
- Metadata Baku, yaitu Data harus mempunyai informasi terstruktur yang berfungsi menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola kembali.
- Standar Data, yaitu standar yang mengatur metodologi yang meliputi definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
- Tabel Fakta dan Dimensi, yaitu berisi tabel fakta dan berbagai dimensi yang dimodelkan sesuai dengan orientasi subyek tertentu sesuai dengan kebutuhan. Tabel-tabel fakta dibentuk dari berbagai sumber data dari kesekretariatan, badan, dinas dan eksternal.

### **d) Tier 4 - Datamarts**

Datamarts adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan yang berorientasi subyek. Pada data mart, Business Intelligence (BI) banyak digunakan untuk melakukan analisis. Tidak seperti Tier-3 di mana data tidak aktif, pada tingkat ini adalah tempat data bergerak kembali. Data disatukan dalam kombinasi unik untuk mendukung pelaporan, dan analitik. Implementasi dari Datamart di Pemerintah Kota Bogor diusulkan dibangun dari berbagai subyek yang terkait dengan proses bisnis dari BKT-DAB sbb: subyek. Pada data mart, Business Intelligence (BI) banyak digunakan untuk melakukan analisis. Tidak seperti Tier-3 di mana data tidak aktif, pada tingkat ini adalah tempat data bergerak kembali. Data disatukan dalam kombinasi unik untuk mendukung pelaporan, dan analitik. Implementasi dari Datamart di Pemerintah Kota Bogor diusulkan dibangun dari berbagai subyek yang terkait dengan proses bisnis dari BKT-DAB sbb:

**1. Datamart Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.**

Datamart ini berisi data birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasannya, serta termasuk di dalamnya data pengaduan, serta penindakan disiplin aparatur.

**2. Datamart Kelembagaan dan Tata Laksana**

Datamart ini berisi data kelembagaan dan pelaksanaannya meliputi indeks SPBE, Tupoksi unit, dst.

**3. Datamart SDM Aparatur**

Datamart ini berisi data Aparatur SDM meliputi jumlah Aparatur per periode, standar kompetensi ASN dan evaluasi kinerjanya.

**4. Datamart Pelayanan Publik**

Datamart ini berisi data pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor meliputi jumlah pelayanan, serta keterhubungannya dengan data dari aplikasi terkait pelayanan publik.

**5. Datamart Aset, Keuangan dan Anggaran**

Datamart ini berisi data terkait aset, keuangan dan anggaran meliputi rencana, realisasi / serapan anggaran, serta aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor

**6. Datamart Kepegawaian**

Datamart ini berisi data terkait kepegawaian meliputi profil pegawai, perjanjian kinerja, kehadiran pegawai, dst.

**7. Datamart Kebijakan dan regulasi**

Datamart ini berisi data terkait kebijakan dan regulasi.

**e) Tier 5 - Presentasi**

Pada tier ini, data dan informasi yang ditarik dari data mart digabungkan dan diproses untuk divisualisasikan ataupun dibentuk menjadi pemodelan yang berguna untuk mendukung

pengambilan keputusan. Presentasi data di dalam tier kelima ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

### **1. Formula / Model Matematis**

Presentasi dalam bentuk formula dapat diimplementasikan pada data yang berhubungan dengan keuangan seperti dashboard yang menggambarkan rasio keuangan institusi (misal Operating Ratio, Likuiditas, dsb), proyeksi anggaran maupun serapan anggaran menggunakan regresi, serta proyeksi kebutuhan SDM dalam beberapa tahun kedepan. Model-model tersebut merupakan model yang diturunkan dari sebuah formula maupun model matematis dengan sumber data dari data mart-data mart yang diperlukan seperti Data mart Aset Keuangan dan Anggaran maupun Data mart Kepegawaian.

### **2. Dashboard**

Dashboard didefinisikan sebagai sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Data yang dibutuhkan untuk ditampilkan dalam dashboard berasal dari berbagai sumber data yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Penyajian informasi pada dashboard biasanya berhubungan dengan grafik, warna, peta, maupun visualisasi lainnya yang menarik. Untuk mendukung penyajian informasi dashboard yang cepat dengan tampilan yang baik, biasanya diperlukan Business Intelligence tools, seperti Tableau, Power BI, SAP Business Intelligence, Qlik View, dsb. Berbagai informasi seperti jumlah pengawakan SDM aktif, realisasi dan serapan anggaran, monitoring program maupun kebijakan Pemerintah Kota Bogor, tata laksana kelembagaan, serta jumlah aduan masyarakat dapat dengan mudah ditampilkan.

### **3. Laporan**

Laporan adalah salah satu bentuk informasi yang ditujukan untuk diunduh dan dibagikan ke pihak eksternal lain. Biasanya laporan dapat berupa file excel maupun pptx dari hasil dashboard. Selain itu laporan dalam bentuk hard copy yang dapat dicetak juga terkadang diperlukan.

#### **4. Model Machine Learning**

Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Berbagai metoda dalam Machine learning yang dapat diaplikasikan pada data-mart Pemerintah Kota Bogor yaitu:

- a. Model Regresi, digunakan untuk proyeksi kebutuhan pegawai, anggaran, serapan anggaran, dsb.
- b. Model Clustering, digunakan untuk pengelompokan SDM berdasarkan beberapa parameter / kriteria tertentu seperti tingkat kepatuhan/kedisiplinan, kinerja, inovasi, harta kekayaan, dsb. Selain itu pengelompokan dapat dilakukan untuk melihat tingkat kinerja dari beberapa program yang dikerjakan.
- c. Model Klasifikasi, digunakan dalam pemetaan response /sentimen kelompok-kelompok masyarakat terhadap suatu kebijakan / reformasi birokrasi yang menjadi program kemen terian

## B. Metadata Data dan Informasi

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpress SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 36. Metadata Data dan Informasi.

Tabel 4. 5. Atribut Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait ( <i>output</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait ( <i>input</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain

<b>No</b>	<b>Nama Atribut</b>	<b>Keterangan</b>
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Data yang diperoleh dari bagian Datin yaitu data umum yang ada di sekretariat dan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah saat ini belum memiliki metadata sebagaimana yang disyaratkan dalam Rancangan Perpress SPBE nasional. Oleh karena itu, perlu disusun meta data dari masing-masing data tersebut sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 6. Metadata Data dan Informasi

<b>ID</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Uraian Data</b>	<b>Tujuan Data</b>	<b>Sifat Data</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Validitas Data</b>	<b>Penanggung Jawab Data/ Wali Data</b>
BKT-DAD.01	Data Kependidikan	Data terkait ruang lingkup Pendidikan	Sebagai informasi dan dokumentasi terkait kependidikan	Terbuka	Data Statistik	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.02	Data Kependudukan	Data terkait kependudukan Kota Bogor	Informasi dan Dokumentasi terkait kependudukan Kota Bogor	Tertutup	Data Statistik	Lima Tahunan	DISDUKCAPIL Kota Bogor
BKT-DAD.03	Data Kesehatan	Data seputar kesehatan	Informasi dan Dokumenasi terkait aktifitas Kesehan di Kota Bogor	Terbuka	Data Statistik	Realtime	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.04	Data Perhubungan	Data terkait kegiatan perhubungan Kota Bogor	Informasi dan dokumentasi terkait kegiatan perhubungan di kota bogor	Terbatas	Data Statistik	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.05	Data Rencana Pembangunan Daerah	Data seputar rencana pembangunan Kota Bogor	Informasi dan dokumentasi rencana pembangunan lingkup Kota Bogor	Terbatas	Data Statistik	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
BKT-DAD.06	Data TIK	Data terkait teknologi informasi	Informasi dan dokumentasi Teknologi dan Informasi Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.07	Data Pelaksanaan SPBE	Data seputar pelaksanaan SPBE	informasi dan dokumentasi pelaksanaan SPBE Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.08	Data Penanggulangan Bencana	Data seputar kebencanaan	informasi dan dokumentasi terkait kejadian dan penanggulangan bencana Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.09	Data Bina Marga dan Pembangunan Daerah	Data terkait kegiatan Bina Marga dan Pembangunan Daerah	Informasi dan dokumentasi kegiatan Bina Marga dan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.10	Data Ketertiban	Data ketertiban Kota Bogor	Informasi dan Dokumentasi terkait pelaksanaan ketertiban di Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.11	Data Peraturan dan Pemerintahan	Data terkait peraturan dan kegiatan pemerintahan	Informasi dan dokumentasi terkait peraturan dan kegiatan	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			pemerintahan Kota Bogor				
BKT-DAD.12	Data Kesatuan Bangsa dan Politik	Data terkait kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi dan dokumentasi terkait data pokok pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bidang politik pemerintah Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.13	Data Sosial dan Masyarakat	Data terkait kegiatan sosial kemasyarakatan	informasi dan dokumentasi terkait kegiatan sosial kemasyarakatan Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.14	Data Pemukiman	Data terkait pemukiman	Informasi dan Dokumentasi terkait pemukiman di Kota Bogor	Tertutup	Data Lainnya	Lainnya	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.15	Data Informasi	Data Terkait Informasi Umum	Pemberian informasi publik	Terbuka	Data Statistik	Realtime	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.16	Data Layanan	Data terkait layanan	Informasi dan Dokumentasi terkait layanan di ruang	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	DISKOMINFO Kota Bogor

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			lingkup Pemerintah Kota Bogor				
BKT-DAD.17	Data Anggaran	Data terkait anggaran	Informasi dan dokumentasi anggaran Kota Bogor	Tertutup	Data Keuangan	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.18	Data Kegiatan	Data terkait kegiatan di ruang lingkup Pemerintah Kota Bogor	Informasi dan dokumentasi kegiatan di ruang lingkup Pemerintah Kota Bogor	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.19	Data Kinerja	Data terkait kinerja pegawai	Informasi dan Dokumentasi terkait Kinerja SDM Kota Bogor	Terbatas	Data Lainnya	Enam Bulanan	DISKOMINFO Kota Bogor
BKT-DAD.20	Data Reformasi Birokrasi	Data seputar reformasi birokrasi	Informasi dan dokumentasi data terkait reformasi birokrasi Kota Bogor	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	DISKOMINFO Kota Bogor

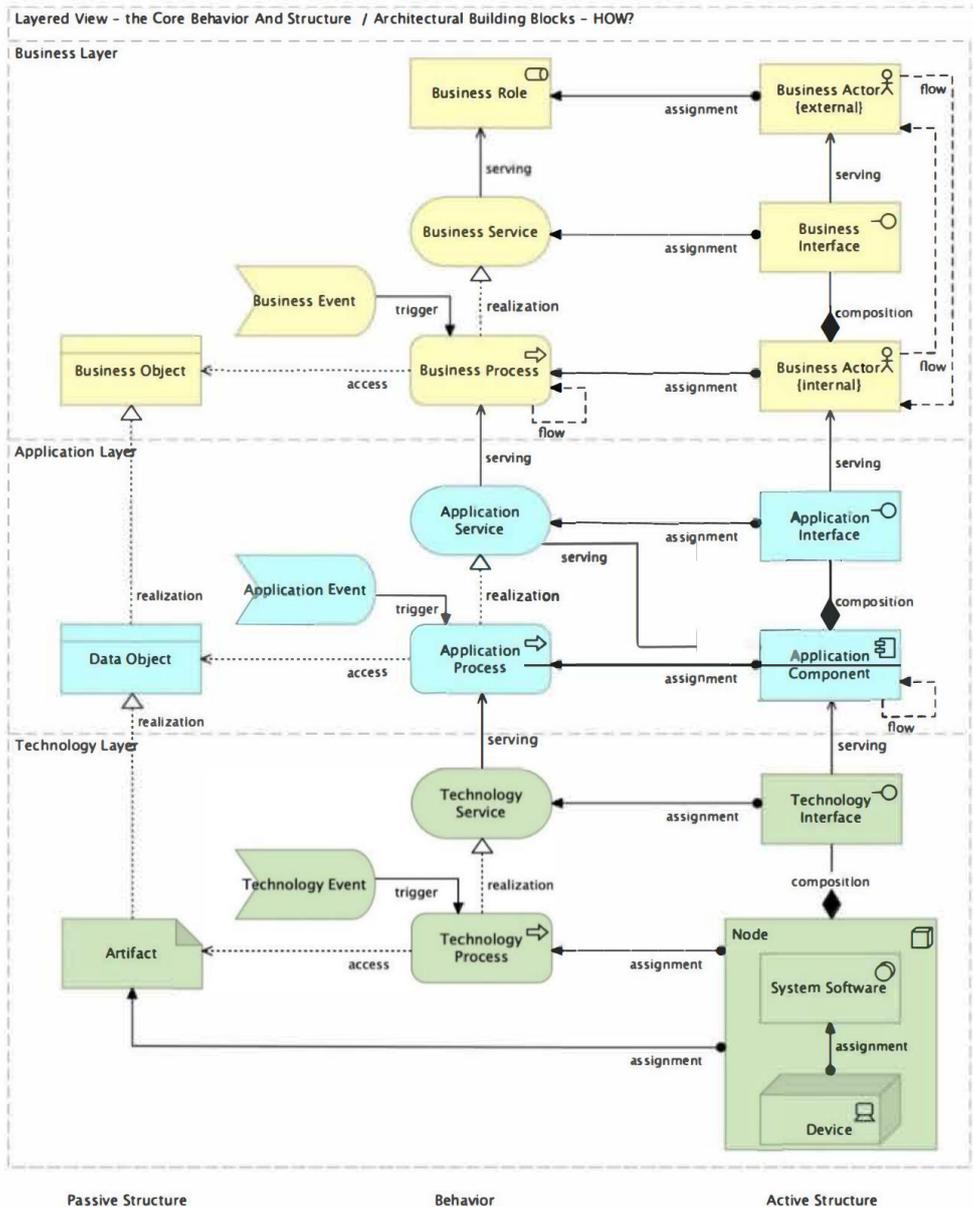
## **C. Roadmap Arsitektur Data dan Informasi**

Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan harapan pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bogor maka diperlukan pengelolaan data yang efektif. Dalam pengelolaan data yang efektif diperlukan adanya identifikasi kebutuhan data, proses pengelolaan data juga meliputi penetapan prosedur yang efektif untuk mengelola pustaka media, duplikasi ulang dan pemulihan data serta penghapusan media yang memadai. Pengelolaan data yang efektif akan membantu meningkatkan jaminan mutu data, data yang berketepatan waktu dan ketersediaan data bisnis. Roadmap arsitektur data dan informasi diusulkan berdasarkan analisis gap yang didasarkan atas kondisi eksisting arsitektur data dan informasi saat ini (as-is) dan arsitektur data dan informasi yang akan datang (to-be).

### **1. Analisis Gap dan Rekomendasi**

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis dan domain infrastruktur. Domain arsitektur proses bisnis merupakan sumber utama dari jenis data dan informasi yang dihasilkan sedangkan domain arsitektur infrastruktur berkaitan dengan media penyimpan data dan informasinya. Semua data disimpan dalam infrastruktur serta terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia (SDI), yang dapat diakses dan dibagi-pakaikan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Domain data dan informasi juga akan memiliki relasi langsung dengan domain aplikasi SPBE dan domain layanan SPBE sehingga menjadi layanan yang didasarkan data (Data-Driven Services).

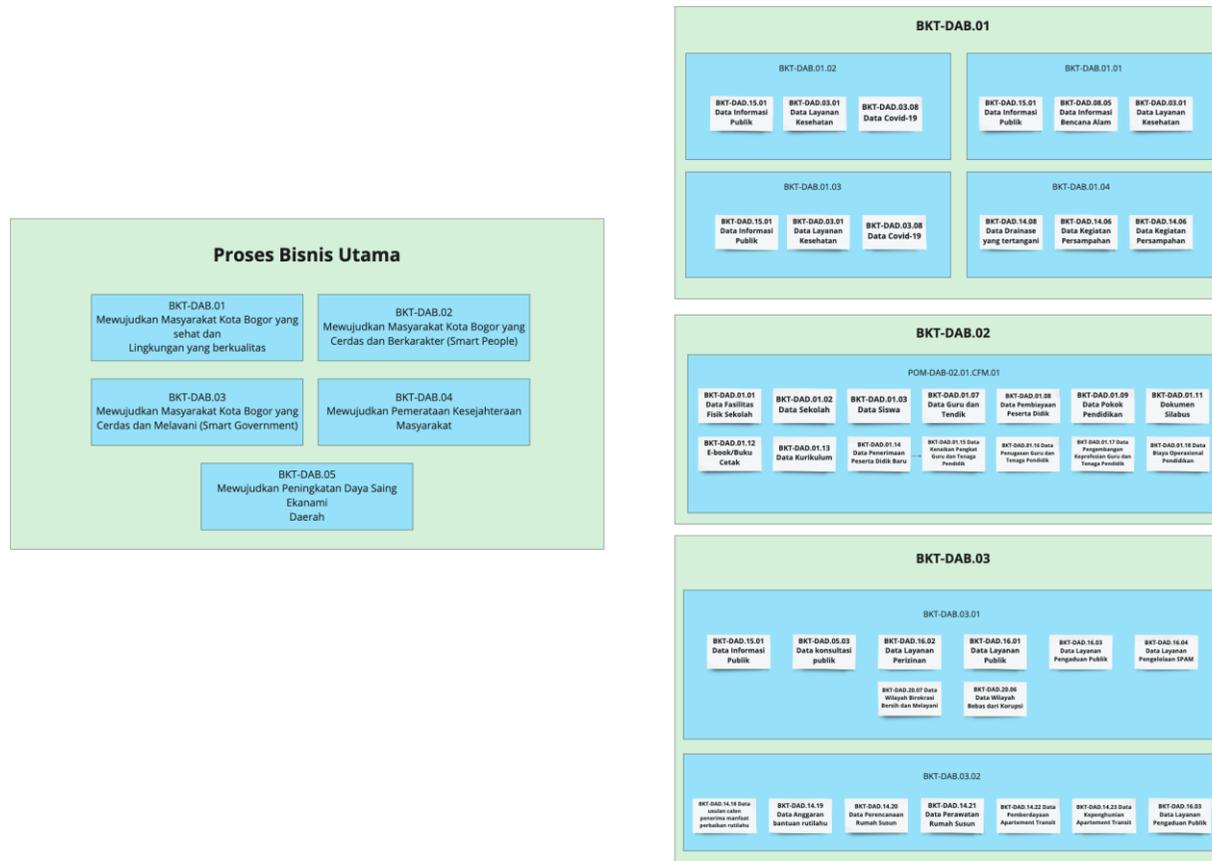
Sejalan dengan Pasal 40 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi. Oleh karena itu, domain data dan informasi juga akan berkaitan dengan domain keamanan SPBE. Untuk memahami keterkaitan antara domain data dan informasi dengan domain lainnya berdasarkan business layer, application layer, dan technology layer dapat digunakan ArchiMate.

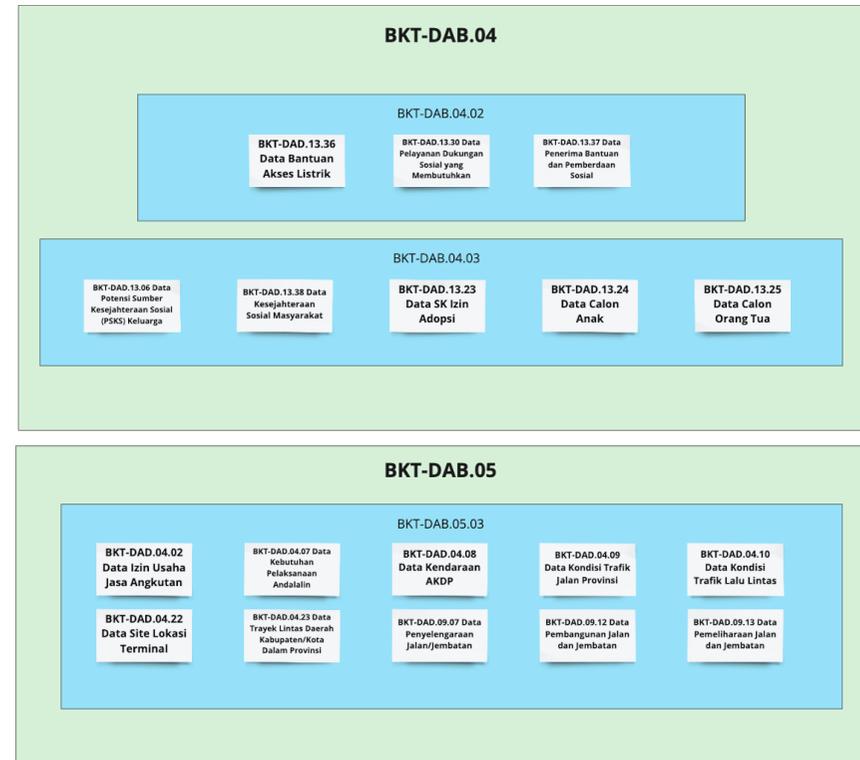


Gambar 4. 12. Meta Model Arsitektur Enterprise - Archimate

ArchiMate dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan domain data dan informasi dengan domain lainnya dalam arsitektur, karena ArchiMate menyediakan konsep yang mencakup semua aspek paling relevan dari pemodelan arsitektur enterprise secara keseluruhan melalui Meta-model ArchiMate. Ide di balik metamodel adalah untuk memperkenalkan elemen-elemen yang relevan dalam pemodelan arsitektur enterprise. Keterkaitan antara data dan informasi dengan domain lainnya dalam SPBE di Pemerintah Kota Bogor saat ini belum ada penggambarannya secara jelas. Oleh karena itu, meta model arsitektur enterprise pada dengan pendekatan archimate dapat dijadikan rujukan.

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa domain arsitektur data dan informasi berkaitan dengan domain proses bisnis. Oleh karena itu, data yang diperoleh sebelumnya dipetakan ke dalam proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Hal ini bertujuan untuk melihat pemetaan data khusus yang ada di organisasi perangkat daerah dan data umum yang ada di sekretariat berkenaan dengan 5 (lima) proses bisnis utama, 5 (lima) proses bisnis pendukung dan 6 (enam) proses bisnis manajerial sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

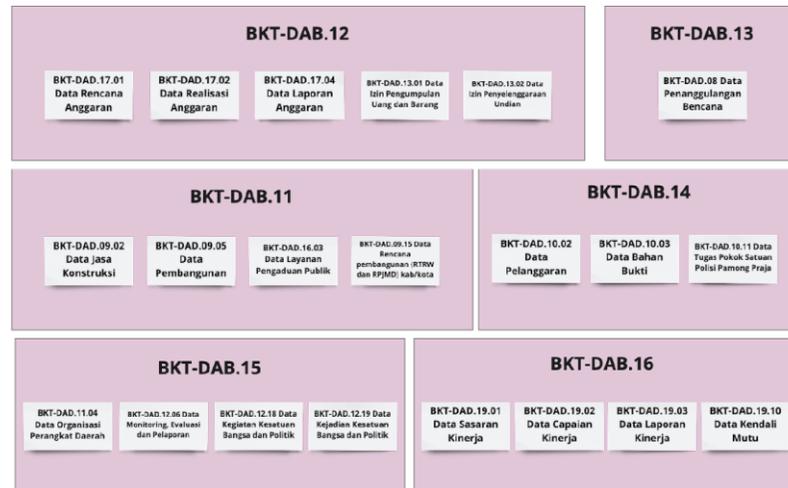




Gambar 4. 13. Pemetaan Data Eksisting dengan Proses Bisnis Utama



Gambar 4. 14. Pemetaan Data Eksisting dengan Proses Bisnis Pendukung



Gambar 4. 15. Pemetaan Data Eksisting dengan Proses Bisnis Manajerial

Dari hasil pemetaan tersebut dapat dilihat bahwa, saat ini data dan informasi yang dikelola di Pemerintah Kota Bogor lebih banyak dukungannya untuk proses bisnis utama BKT-DAB-02, hal ini tentunya tidak lepas dari salah satu fungsi dan tujuan dari setiap pemerintah daerah hingga pusat khususnya Pemerintah Kota Bogor dimana dapat mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter, dimana dalam pelaksanaan proses bisnis BKT-DAB-02 sudah didukung oleh penggunaan aplikasi yang digunakan dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Bogor.

Namun demikian, pengelolaan data dan informasi pada proses bisnis pendukung dan proses bisnis manajerial yaitu BKT-DAB.09, BKT-DAB.10 dan BKT-DAB.13 masih sangat kurang sehingga perlu penambahan maupun pengelolaan data pada proses bisnis tersebut sebagai berikut.

Tabel 4. 7. Usulan Data Berdasarkan Proses Bisnis

Kode Proses Bisnis	Usulan Data
BKT-DAB.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Administrasi Kepegawaian</li> <li>2. Data Peningkatan Kompetensi SDM</li> </ol>
BKT-DAB.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Bahan/Referensi Pembuatan Kebijakan (Peraturan Perundang - undangan, dll)</li> <li>2. Data Kerangka Regulasi</li> <li>3. Data Hasil Evaluasi Kebijakan/Data Persetujuan</li> </ol>
BKT-DAB.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Kerjasama</li> <li>2. Data Kunjungan Kerja</li> </ol>

Hasil diskusi bersama dengan TIM SPBE Pemerintah Kota Bogor menunjukan bahwa hal tersebut sudah menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan segera, sehingga diharapkan tahun yang akan datang akan muncul aplikasi/ sistem informasi yang mendukung proses bisnis tersebut. Sehingga pengelolaan data pada lingkup Pemerintah Kota Bogor dapat dilaksanakan secara optimal

Dalam konteks kaitan domain data dan informasi dengan domain aplikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bogor pada saat melakukan pengembangan aplikasi atau pembuatan aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Instansi Pusat dan daerah didorong untuk menetapkan dan mengembangkan aplikasi umum dan khusus sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing.
2. Instansi Pusat dan daerah didorong untuk menghentikan dan mencegah aplikasi sejenis yang dikembangkan dan dioperasikan oleh instansi vertikal.
3. Pengembangan aplikasi umum/khusus dilakukan harmonisasi antar aplikasi/layanan dan antar data melalui fasilitasi Kemkominfo.
4. Dalam pengembangan aplikasi umum dan khusus, Instansi Pusat didorong untuk menggunakan Platform Nasional yang disediakan oleh KL lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan menggunakan platform proprietary secara berbagi pakai yang disediakan dalam program Pusat Data Nasional.
5. Dalam konteks Program Satu Data Indonesia (SDI), pengembangan aplikasi/layanan harus menggunakan Referensi Data Nasional.
6. Pemerintah mengembangkan *big data analytic* dan Kecerdasan Buatan secara efektif dan efisien melalui skema berbagi pakai.

Keenam hal yang menjadi catatan dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi di Pemerintah Kota Bogor yang terkait dengan arsitektur data dan informasi saat ini belum diimplementasikan secara penuh. Selain itu, tantangan dan hambatan lainnya adalah pengelolaan data dan informasi secara nasional dalam penerapan Smart Government adalah masih belum sepenuhnya sesuai dengan manajemen data SPBE sesuai kerangka Satu Data Indonesia, sehingga masih bias dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta belum dapat diterapkan Big Data dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah. Data yang berkaitan langsung dengan proses bisnis utama perlu didukung dengan adanya sebuah aplikasi yang akan memudahkan pengelolaan data sesuai dengan proses bisnis perumusan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan tersebut. Aplikasi ini juga diharapkan menyediakan data berupa data bahan/referensi pembuatan kebijakan yang biasanya sudah disiapkan satu tahun sebelum sebuah kebijakan baru akan diusulkan atau dilakukan evaluasi. Aplikasi tersebut juga nantinya dapat memudahkan proses penelusuran masukan dan saran perbaikan dari pihak-pihak terkait serta dokumentasi dari A - Z yang berkaitan dengan perumusan atau evaluasi kebijakan.

Arsitektur data dan informasi to-be, sesuai juga memberikan dukungan data yang berhubungan dengan layanan yang terkait dengan kerangka regulasi dan penyusunan kebijakan, sehingga terdapat datamart yang berisikan data kebijakan dan regulasi yang diharapkan akan menghasilkan layanan optimal dalam perumusan kebijakan. Selain itu, untuk layanan pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika seperti pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak juga belum ditemukan dukungan data yang saat ini dikelola sehingga diperlukan aplikasi yang dapat menyimpan data tersebut.

Data yang spesifik dari masing-masing proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung yang saat ini masih fokus untuk mendukung layanan yang ada baik layanan administrasi pemerintahan ataupun layanan publik. Data tersebut tentu kedepannya diharapkan dapat dikelola dalam satu data yang terintegrasi dalam data warehouse melalui tahap-tahap yang seharusnya dilakukan. Hal ini sejalan dengan pemodelan arsitektur data five-tiers yang dapat digunakan untuk memodelkan lingkungan organisasi dengan cara yang logis dan dapat diterapkan dimana teknologi analitik data dapat dilakukan.

Model layanan yang dihasilkan dari pengelolaan data dengan menggunakan arsitektur data dan informasi to-be dengan pendekatan menggunakan arsitektur data five-tiers diharapkan akan membantu Pemerintah Kota Bogor dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan pola-pola yang dihasilkan dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin atau perangkat Business Intelligence (BI). Pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif untuk mengolahnya. Terlebih jika informasi yang dihasilkan data tersebut dibutuhkan untuk membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Oleh karena itu, penerapan prinsip big data sangat cocok untuk mengelola data yang sangat banyak dan beragam serta mengolahnya menjadi informasi dalam waktu yang singkat.

Usulan model data dengan pendekatan menggunakan arsitektur data five-tiers tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Arsitektur data warehouse secara fisik dikelola di atas satu atau lebih platform data, termasuk sistem manajemen basis data relasional tradisional

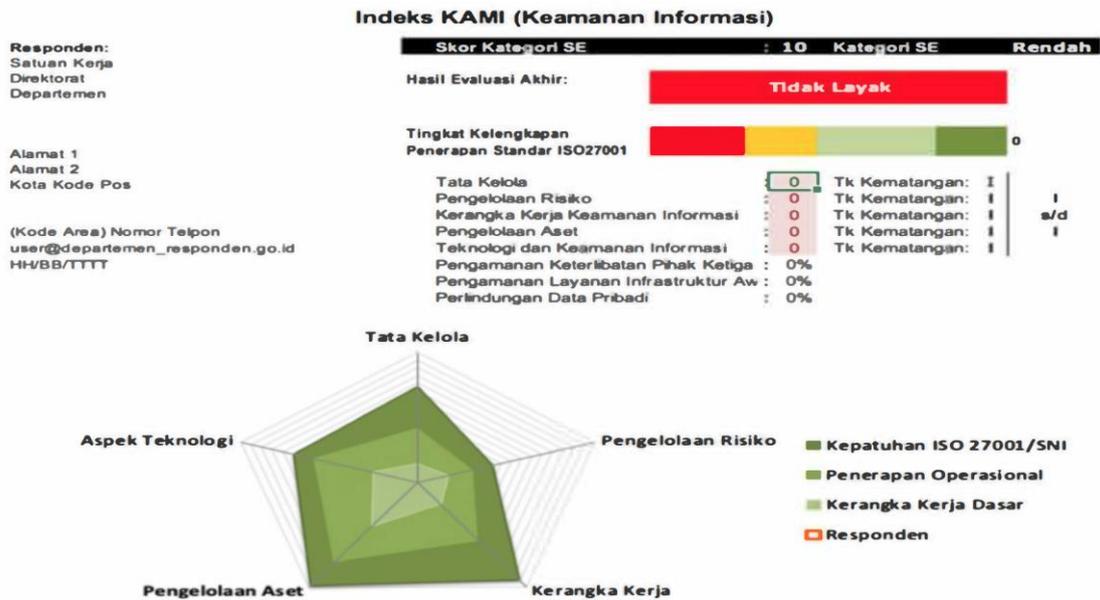
(RDBMS), DBMS yang lebih baru (NoSQL, dan grafik), sistem file (di mana Hadoop menjadi semakin umum), dan penyimpanan objek (biasanya berbasis cloud). Platform data itu penting, namun ada lebih banyak lagi kebutuhan pada infrastruktur data warehouse. Seperti kebutuhan atau tools untuk pelaporan, analitik, integrasi, kualitas, metadata, pengembangan, dan administrasi. Untuk kecepatan, skala, interoperabilitas, dan ketersediaan, semua komponen infrastruktur di atas sangat bergantung pada perangkat keras yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor saat ini-yaitu CPU, memori server, jaringan, penyimpanan, dan cloud.

Berdasarkan Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE, data dan informasi merupakan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE. Adapun standar keamanan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.

Berkaitan dengan keamanan data dan informasi, sistem keamanan dalam data warehouse dapat dilakukan dengan cara:

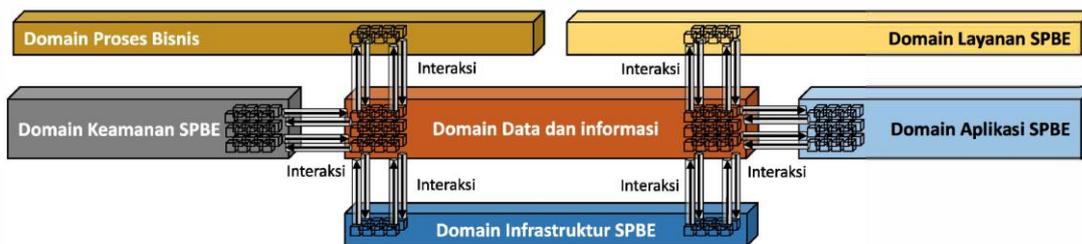
1. Penetapan prosedur dan kebijakan tentang keamanan data yang efektif.
2. Implementasi berbagai prosedur dan teknik keamanan logik untuk membatasi akses.  
Hal ini mencakup otentikasi user, kontrol akses, dan enkripsi.
3. Pembatasan terhadap akses fisik ke lingkungan data center.
4. Penetapan proses review kontrol internal yang efektif untuk keamanan dan privasi data.

Salah satu bentuk evaluasi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi adalah dengan menggunakan indeks KAMI. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO /IEC 27001.



Gambar 4. 16. Indeks Keamanan Informasi

Berdasarkan analisis GAP tersebut maka diperlukan sejumlah rekomendasi yang sejalan dengan kebutuhan arsitektur data dan informasi to-be. Rekomendasi ini dibuat juga memperhatikan keterkaitannya dengan domain arsitektur data dan informasi dengan domain proses bisnis, aplikasi, layanan, infrastruktur, dan keamanan.



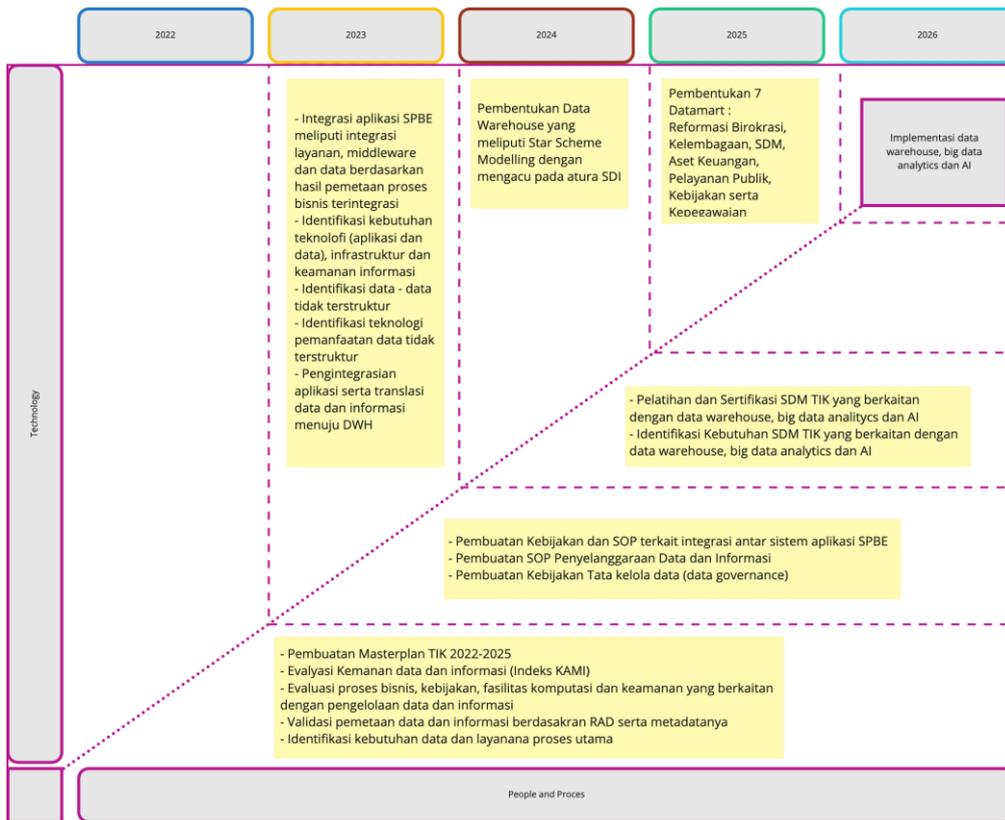
Gambar 4. 17. Relasi langsung pada Domain Data dan informasi

Sejumlah rekomendasi diusulkan dengan memperhatikan kondisi saat ini dari arsitektur data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan kondisi yang diharapkan dari arsitektur data dan informasi untuk mencapai sasaran dan tujuan SPBE.





Gambar 4. 19. Roadmap implementasi data warehouse, big data analytics dan AI Pemerintah Kota Bogor



Gambar 4. 20. Roadmap Arsitektur data dan informasi Pemerintah Kota Bogor

## BAB V ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

### A. Pendahuluan

Infrastuktur SPBE di Pemerintah Kota Bogor didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi Arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dimana dalam penerapannya, ketiga entitas metadata dilakukan dekomposisi dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada gambar 5.1.



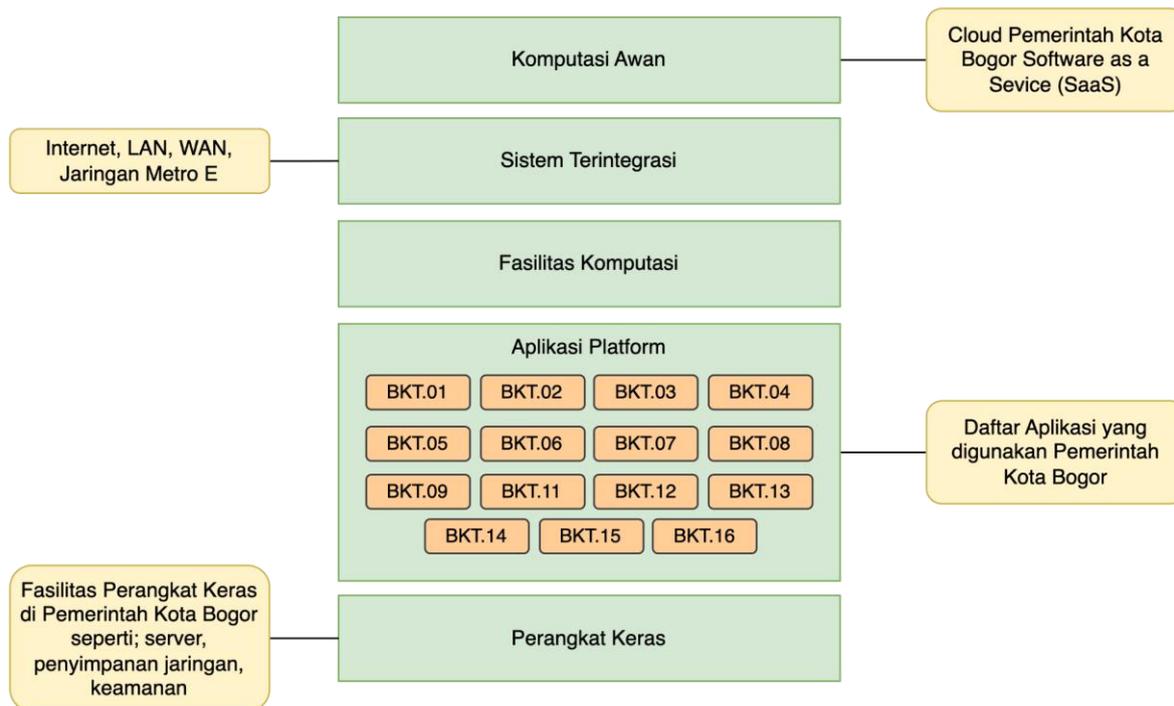
Gambar 5.1. Dekomposisi Entitas Metadata Arsitektur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur

SPBE mendukung arsitektur layanan seperti akses layanan mandiri, Layanan bergerak, Layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang saling terhubung dalam komputasi awan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Pemerintah Kota Bogor.

Kondisi infrastruktur di Pemerintah Kota Bogor memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang disediakan komputasi awan dimana penyimpanan pada layanan komputasi awan telah tersedia secara virtual. Pemerintah Kota Bogor telah menggunakan layanan komputasi awan tipe Software as a Service (SaaS) dengan status kepemilikan sendiri yang dikelola Diskominfo. Dalam sistem integrasi, Pemerintah Kota Bogor menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi. Jaringan ini dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center*) Noc pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Unit Kerja.

Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah berjalan dimana berbagai layanan dapat diakses secara daring melalui aplikasi yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait. Konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN, dan internet), terdapat bandwidth yang memadai untuk digunakan dalam mendukung kelancaran terhadap akses layanan yang ada dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang menerapkan Virtual Private Network (VPN) untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Fasilitas komputasi di Pemerintah Kota Bogor belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat layanan big data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Kondisi infrastruktur TI di Pemerintah Kota Bogor saat ini dipetakan pada komponen umum infrastruktur TI seperti dapat dilihat pada Gambar 88.



Gambar 5.2.. Pemetaan Komponen Umum Infrastruktur TI di Pemerintah Kota Bogor Berdasarkan seluruh aktivitas koleksi data dari pemetaan komponen umum yang telah dilakukan, informasi kondisi infrastruktur Pemerintah Kota Bogor saat ini digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Metadata arsitektur infrastruktur SPBE

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
1	Komputasi Awan	Cloud Pemerintah Kota Bogor (Software as a Service (SaaS))	Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan konsep komputasi awan secara maksimal dengan konsep Software as a Service (SaaS) yang dikelola secara mandiri oleh pihak Diskominfo.
2	Perangkat Lunak Platform	Perangkat lunak platform layanan aplikasi terdiri dari 93 aplikasi dan perangkat lunak pendukung (sistem operasi, sistem database,	Pemerintah Kota Bogor telah memiliki beberapa perangkat lunak platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
		sistem utilitas)	dan layanan yang dapat diakses dengan mayoritas menggunakan teknologi web, dan juga dapat diakses secara mobile.
3	Perangkat Keras Server	Server digunakan untuk menjalankan berbagai layanan aplikasi aplikasi e-office, aplikasi Inspektorat, dan aplikasi instansi terkait	Perangkat keras server di Pemerintah Kota Bogor telah menggunakan teknologi clustering yang diharapkan menghasilkan suatu sistem dengan tingkat reliabilitas, availability tinggi serta dikelola oleh internal untuk mendukung kinerja aplikasi yang berjalan di lingkungan institusi tersebut.
4	Perangkat Keras Media Penyimpanan	Perangkat keras yang digunakan untuk penyimpanan data di lingkungan internal.	Pemerintah Kota Bogor telah memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung operasional yang dijalankan.
5	Perangkat Keras Jaringan	Router Jaringan, distribusi lantai, <i>Switch Host, Bandwidth Management, Access Point, Switch Storage Server, Switch</i> distribusi	Pada perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di Pemerintah Kota Bogor dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll.
6	Perangkat Keras Keamanan	Perangkat untuk Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan TI, pengendalian lalu lintas jaringan, kontrol	Pada perangkat keras keamanan telah menggunakan beberapa teknologi untuk berbagai fungsi (firewall, keamanan,

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
		penghubung jaringan, Penyaringan keamanan, Proxy dan <i>controller</i> VPN.	VPN, pengendalian jaringan, kontrol penghubung jaringan).
7	Perangkat Keras <i>Peripheral</i>	<i>Backup power supply, Switching monitor</i>	Pemerintah Kota Bogor telah memiliki perangkat keras peripheral dalam mendukung kinerja perangkat lainnya terutama dalam penyediaan backup sumber daya listrik dan perangkat monitoring. Selain itu telah memiliki perangkat peripheral pendukung yang dapat digunakan dalam interaksi terhadap layanan aplikasi yang digunakan.
8	Penghubung Layanan Pemerintah	Jaringan konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN, dan internet)	Sistem penghubung layanan pemerintah di Pemerintah Kota Bogor dalam penerapannya telah berjalan dengan menggunakan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN, dan internet sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung.
9	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intranet DC, Senopati dengan DC Cyber, Senopati ke Bali.	Jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah berjalan dengan baik. Akses terhadap aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor saat ini sudah menerapkan Virtual Private Network (VPN). Berbagai aplikasi dapat diakses secara daring yang menjadi layanan kepada

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat Ini
			masyarakat dan instansi terkait karena hampir keseluruhan layanan aplikasi berjalan berbasis web.
10	Fasilitas Komputasi		Fasilitas komputasi di Pemerintah Kota Bogor belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi penerapan big data <i>analytics</i> , dan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>

## B. Kapabilitas Infrastruktur

Kapabilitas Infrastruktur di Pemerintah Kota Bogor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem. Kapabilitas infrastruktur SPBE dalam penerapannya dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau setiap level pemerintahan dan instansi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, dan penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan Cetak Biru (*BluePrint*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Kapabilitas infrastruktur SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang terlibat dalam sejumlah layanan utama yang berjalan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif berupa struktur pendukung (rincian perangkat keras, perangkat lunak) mengacu pada kualitas yang diharapkan. Pemetaan kapabilitas infrastruktur SPBE didasarkan pada identifikasi layanan berdasarkan proses bisnis di Pemerintah Kota Bogor yang didukung dengan kebutuhan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Pemetaan Infrastruktur Aplikasi, Layanan Utama dan Proses Bisnis pada Pemerintah Kota Bogor

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
BKT-DAB.01 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor yang sehat dan	BKT-DAB.01.01 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Layanan Data dan Informasi Elektronik	SATU DATA Kesehatan	Web Based
		BKT-DAL.01.25.02.17 Layanan Sistem informasi pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium Covid-19, update kesembuhan dan kematian kasus Covid-19	IKP (PROKES COVID	Web Based
	BKT-DAB.01.02 Meningkatkan Perilaku Bersih dan Sehat	BKT-DAL.01.25.02.05 Layanan Informasi Kesehatan Daerah	E-PROFIL	Web Based
		BKT-DAL.01.25.02.17 Pencatatan data Covid-19 Layanan Publikasi Data	PIKOBAR	Web Based
		BKT-DAL.01.25.02.12 Layanan Kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat	PSC-119	Web Based
	BKT-DAB.01.03 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman	BKT-DAD.14.08 Data Drainase yang tertangani,	Infrastruktur Permukiman	Web Based
		BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan		

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
	BKT-DAB.01.04 Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar dan kerusakan lingkungan	BKT-DAD.14.06 Data Kegiatan Persampahan	Greeny	Web Based
BKT-DAB.02 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)	BKT-DAB.02.01 Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	BKT-DAL.01.31.03.02 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.01 Layanan Informasi PPDB Online jenjang SMP	PPDB	Web Based
		BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP BKT-DAL.01.31.03.03 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.02 Layanan Informasi Perbaikan Data Peserta Didik jenjang SMP	DAPODIK	Web Based
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIMDIK	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	SIDAKEP	Web Based
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan BKT-DAL.01.31.01.01 Layanan Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB)	OPAC	Web Based
		BKT-DAL.01.31.04.10 Layanan Informasi Kurikulum Mulok jenjang Pendidikan Dasar	CANDIL	Web Based
		BKT-DAL.01.31.04.01 Layanan Informasi BOP Pendidikan Kesetaraan	BOPD	Web Based
BKT-DAB.03 Mewujudkan Masyarakat Pemerintah Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani (Smart Government)	BKT-DAB.03.01 Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Layanan e-Government	SAPA WARGA	Web Based
		BKT-DAL Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perizinan & Non Perizinan, dan Penanaman Modal	SIMPATIK JABAR	Web Based
		Layanan Data dan Informasi Elektronik	IPJ JDS	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.31.02.06 Layanan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	OSS	Web Based
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SiMona	Web Based
		BKT-DAL.01.40.04.17 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	LAPOR!	Web Based
		Layanan Pengaduan Ormas	DPMPPTSP	Web Based
	BKT-DAB.03.02 Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (Smart City)	BKT-DAL.01.20.01.02 Pendataan Aset Bangunan (sudah dibangun, butuh rehab dan intervensi pemerintah, Jumlah Bangunan di Bogor	Klinik Rumah	Web Based
		BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa	SIKEBAL	Web Based
		BKT-DAL.01.20.02.04 Layanan Aduan Penghuni Rusunawa	SIFAT (Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Transit)	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.20.02.03 Layanan Retribusi Rusunawa	SIAP JUARA	Web Based
BKT-DAB.04 Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	BKT-DAB.04.02 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Layanan Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH	SIMOJANG	Web Based
		Layanan pemberian bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga Fakir Miskin	DTKS	Web Based
	BKT-DAB.04.03 Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	Layanan pembinaan bagi seluruh anggota PSM	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Web Based
		Layanan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak	Aplikasi Sistem Informasi Pengangkatan Anak	Web Based
BKT-DAB.05 Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Ekanami	BKT-DAB.05.03 Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	BKT-DAL.01.17.01.01 Layanan data jalan dan jembatan	Temen Jabar	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	Aplikasi Terminal	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		Pengawasan lalu lintas jalan	SEMUT JABAR	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	SILAJA	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	SPION JABAR	Web Based
		Pengawasan lalu lintas jalan	Sistem Informasi Perlengkapan Jalan	Web Based
BKT-DAB.06 Pengelolaan Data dan Informasi		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Bogor	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bogor	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bogor	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bogor	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		BKT-DAL.01 Layanan Penyediaan Informasi Publik	Website resmi RSUD Pemerintah Kota Bogor	Web Based
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Aplikasi Barata	Web Based
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	PUSDATIN	Web Based
		Layanan Informasi Kajian Resiko Bencana	Peta Rawan Bencana	Web Based
		Layanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	e-Cegah SIAGA	Web Based
		Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	DMS (Disaster Management System)	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.20.03.01 Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman	Apartemen Transit	Web Based
		BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	SIMANTAN (Sistem Informasi Pertanahan)	Web Based
		BKT-DAL.01.20.02.02 Layanan Pengadaan Lahan	Open MAP	Web Based
		BKT-DAL.01.23.02.02 Parameter Kependudukan	SIDATUK	Web Based
		Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Aplikasi Stock Barang	Web Based
BKT-DAB.07 Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa		Layanan penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial Layanan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana alam dan sosial	ALBAS	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
BKT-DAB.08 Pengelolaan Saran dan Prasarana		BKT-DAL.01.31.02.04 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang PAUD BKT-DAL.01.31.03.06 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SD BKT-DAL.01.31.05.05 Layanan Usulan Sarana dan Prasarana jenjang SMP	Aplikasi Pengajuan/Perbaikan Fasilitas Sekolah	Web Based
BKT-DAB.09 Pengelolaan Pelaporan		Layanan Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada	SILANGGAR	Web Based
BKT-DAB.11 Perencanaan Pembangunan		BKT-DAL.01.17.01.03 Layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	SIPJAKI	Web Based
		BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Aplikasi Konsultasi Publik	Web Based
		BKT-DAL.01.17.01.02 Informasi Kesesuaian Tata Ruang	e-Musrenbang	Web Based
BKT-DAB.12 Pengelolaan Keuangan dan Aset		BKT-DAL.01.31.03.01 Layanan Informasi BOS SD BKT-DAL.01.31.03.11 Layanan Informasi BOS SMP	OMSPAN	Web Based

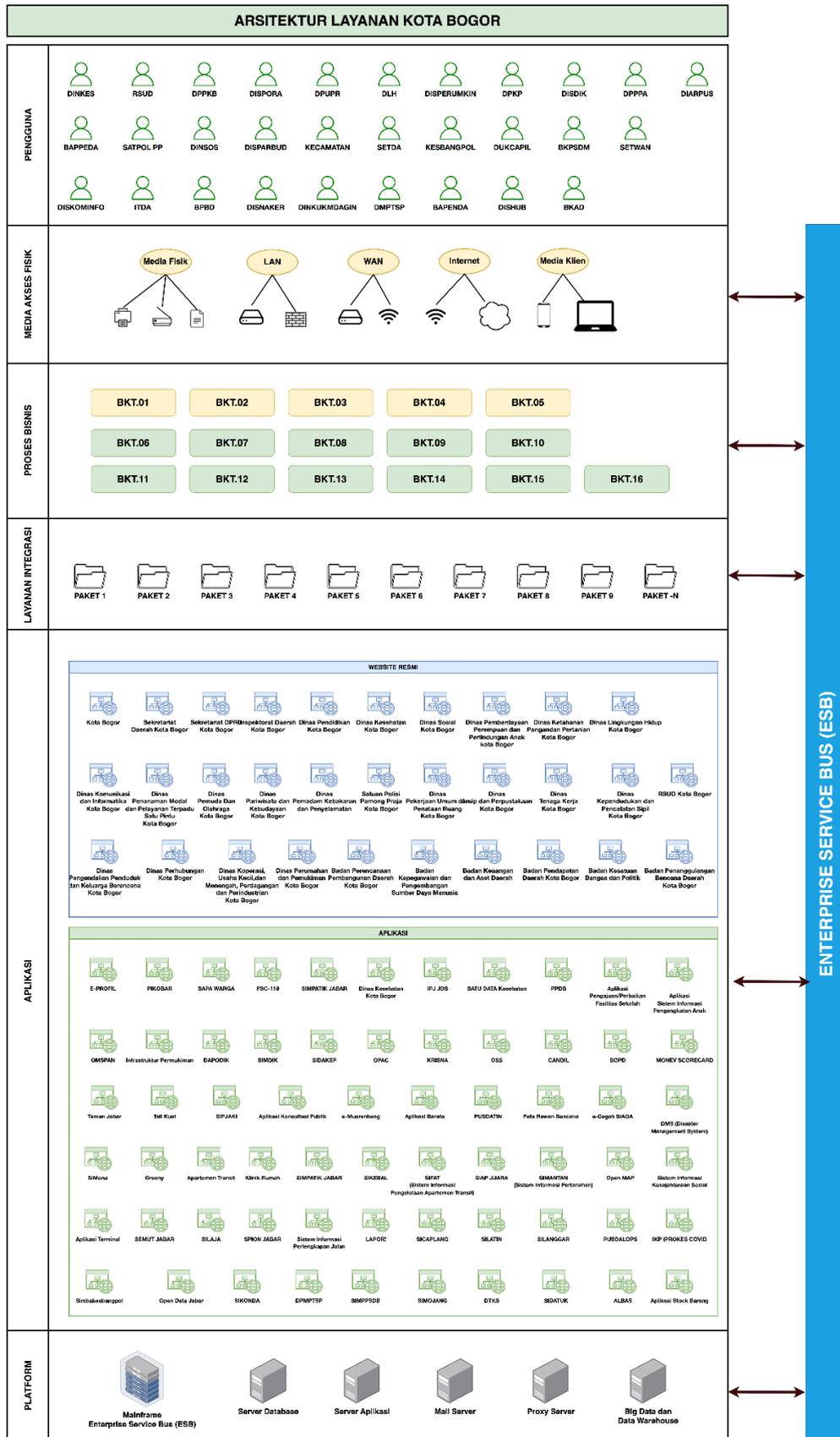
Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	KRISNA	Web Based
		Layanan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	SIMPPSDB	Web Based
BKT-DAB.13 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur		Layanan Bantu Trantibum dan Kebencanaan	PUSDALOPS	Web Based
BKT-DAB.14 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan		Layanan Informasi Penegakan Perda dan Perkada	SICAPLANG	Web Based
		Layanan pendataan linmas inti	SILATIN	Web Based
BKT-DAB.15 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana		Layanan Pendataan Ormas Pemerintah Kota Bogor, Aktivitas Ormas dan Penerbitan Surat Keterangan Ormas	Simbakesbangpol	Web Based
		Layanan Publikasi Data	Open Data Jabar	Web Based
		Layanan Pengaduan Ormas	SIKONDA	Web Based

Proses Utama	Sub Proses Utama	Domain Layanan	Aplikasi	Basis Aplikasi
BKT-DAB.16 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		BKT-DAL.01.31.01.02 Layanan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan	MONEV SCORECARD	Web Based
		BKT-DAL.01.17.01.04 Pelayanan Rekomendasi Utilitas	Tali Kuat	Web Based

### **C. Model Arsitektur Integrasi**

Model Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan penting dalam proses bisnis di Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana direkomendasikan untuk kebutuhan integrasi layanan layanan yang telah terdefinisi dan penggunaan sistem yang berbeda dengan harapan terdapat adanya proses kontrol. Pemodelan arsitektur ini memberikan pendekatan dan strategi untuk mengintegrasikan layanan (Sub kategori layanan), proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi secara menyeluruh. Pemodelan arsitektur integrasi ini diawali dengan mendeskripsikan konsep-konsep bisnis pada layanan untuk penetapan kebutuhan integrasi bagi setiap layanan untuk seluruh pengguna.

Selanjutnya, dari setiap komponen konseptual bisnis yang telah terdefinisi, diterjemahkan ke dalam komponen-komponen yang dibutuhkan, terutama kebutuhan platform fisik untuk setiap lapisan arsitektur. Mekanisme dan pengaturan layanan pada pemodelan ini mengacu pada aktivitas proses bisnis dimana pengguna menggunakan media akses tertentu untuk berinteraksi terhadap layanan tertentu. Terdapat beberapa lapisan yang ada pada arsitektur model integrasi ini, yaitu seperti tercantum pada Gambar 89:



Gambar 5.3. Model Arsitektur Integrasi Layanan Pemerintah Kota Bogor

1. Lapisan Pengguna: merupakan Otorisasi tingkat layanan pengguna yang akan berinteraksi dengan proses dan layanan Pemerintah Kota Bogor.
2. Lapisan Media akses: media yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan yang terdapat di Pemerintah Kota Bogor.
3. Lapisan Proses : Kumpulan Fungsi utama dan pendukung bisnis.
4. Lapisan Layanan: merupakan kumpulan kemampuan layanan yang disampaikan.
5. Lapisan Integrasi: merupakan lapisan integrasi layanan shared service
6. Lapisan Aplikasi: merupakan tempat aplikasi dukungan
7. Lapisan Platform: Infrastruktur teknologi

Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem yang berbeda dengan harapan memudahkan kontrol terhadap proses bisnis. Pada proses integrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja standar pada SOA (Service Oriented Architecture). Dengan memanfaatkan SOA diharapkan adanya solusi yang tepat untuk mendapatkan sebuah infrastruktur yang baik dengan kemampuan integrasi yang sudah terkelola, dengan memberikan kemudahan pertukaran informasi antar aplikasi, mengurangi pengaruh jika terjadi perubahan, dan adanya penekanan biaya untuk keperluan integrasi dan modifikasi aplikasi.

Setiap lapisan arsitektur mendeskripsikan hubungan dari mulai lapisan pengguna sampai dengan lapisan platform atau teknologi yang digunakan, berikut penjelasan dari strategi integrasi setiap lapisan arsitektur:

a. Lapisan Pengguna

Pada lapisan ini diidentifikasi siapa saja pengguna yang ada dan terlibat dalam mengakses layanan yang terdapat di Pemerintah Kota Bogor, kewenangan dan kemudahan pengguna diberikan untuk melakukan proses tertentu sesuai dengan kapasitas dan status dari pengguna tersebut terutama untuk mendapatkan informasi. Para pengguna diidentifikasi hak aksesnya untuk

berinteraksi dengan sistem sesuai otoritas akses terhadap layanan yang diterjemahkan kedalam peran dan hak-hak yang secara logis diterapkan di dalam otentikasi keamanan. Pengguna dengan melakukan satu kali sign on, akan mendapatkan informasi dan daftar proses sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

b. Lapisan Media Akses

Lapisan ini mencerminkan dimana para pengguna dapat menggunakan media akses yang berbeda untuk mendapatkan akses ke informasi atau proses yang mereka butuhkan dalam melakukan penggunaan akses layanan bisnis. Penetapan media untuk akses layanan sangat penting untuk dipertimbangkan. Berdasarkan proses bisnis yang ada, serta analisis kebutuhan informasi layanan terdapat berbagai macam media akses yang digunakan untuk menunjang operasional dengan menyesuaikan keinginan pengguna. Media akses yang dibutuhkan terdiri dari media fisik berupa perangkat peripheral, media jaringan LAN, WAN, internet.

c. Lapisan Proses Bisnis

Lapisan ini merupakan lapisan yang mengidentifikasi proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Bogor ke dalam values (sub fungsi) dan value streams berupa aliran proses bisnis utama, yang selanjutnya didukung oleh proses bisnis pendukung meliputi proses bisnis utama dan pendukung yang telah diuraikan pada arsitektur proses bisnis. Pengelompokan proses bisnis di Pemerintah Kota Bogor mendefinisikan keterkaitan antara tujuan yang sudah selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bogor yang diturunkan pada sub fungsi dalam tiga proses bisnis utama dan enam proses bisnis pendukung. Proses bisnis Pemerintah Kota Bogor tersebar di direktorat, biro, dan inspektorat. Direktorat berperan dalam melaksanakan proses bisnis utama (BKT-01, BKT-02, BKT-03, BKT-04 dan BKT-05), biro berperan dalam melaksanakan proses bisnis pendukung (BKT-06, BKT-07, BKT-08, BKT-09, BKT-10, BKT-11, BKT-12,

BKT-13, BKT-14, BKT-15 dan BKT-16)

d. Lapisan Layanan Bisnis

Lapisan ini menjelaskan layanan bisnis apa saja yang terdapat dalam proses bisnis yang telah ada. Layanan bisnis merupakan kumpulan layanan yang memiliki nilai untuk proses bisnis. Lapisan ini mengacu pada permasalahan interoperabilitas pada lingkup platform yang dipecahkan melalui pengembangan teknologi--teknologi dan standar untuk integrasi dengan platform teknologi yang berbeda. Perkembangan teknologi dan standar aplikasi memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Kumpulan kemampuan layanan di Pemerintah Kota Bogor dihasilkan dari kategori layanan yang telah didefinisikan sebelumnya pada arsitektur layanan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan keinginan pengguna.

e. Lapisan Integrasi Layanan

Lapisan integrasi layanan merupakan macam-macam layanan integrasi yang disediakan dalam mengakses suatu layanan bisnis yang merupakan bagian-bagian dari proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Bogor. Pendekatan integrasi layanan yang digunakan memanfaatkan aplikasi dukungan yang diintegrasikan ke dalam arsitektur layanan. Strategi integrasi memberikan arah tentang bagaimana aplikasi dukungan dapat mendukung arsitektur layanan, dan sistem ini memiliki nilai strategis tinggi untuk organisasi. Integrasi layanan yang direkomendasikan, dilakukan melalui pendekatan arsitektur berorientasi layanan untuk menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh pengguna melalui berbagai media akses, yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Strategi ini dipetakan dalam pemaketan layanan yang merupakan salah satu ciri dari pendekatan arsitektur berorientasi layanan. Kombinasi dari lapisan integrasi dan lapisan layanan bisnis menggunakan sebagai *Enterprise Service Bus (ESB)*. ESB merupakan infrastruktur penunjang yang terdistribusi, untuk melakukan integrasi dan mengatur layanan bisnis. Gambar x menggambarkan bagaimana ESB

mengintegrasikan semua lapisan dalam arsitektur layanan di Pemerintah Kota Bogor. Dalam mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dukungan yang disajikan dibuat dalam bentuk paket-paket layanan pada lapisan integrasi layanan, yang secara jelas digambarkan pada domain arsitektur layanan.

f. Lapisan Aplikasi

Lapisan ini merupakan penggambaran kembali mengenai aplikasi yang telah teridentifikasi dan digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini merupakan tempat semua artefak terkait dengan aplikasi dukungan yang terintegrasi atau perlu diintegrasikan dengan arsitektur layanan. Pada lapisan ini direkomendasikan menggunakan teknologi web services, karena karakteristik dan pola dari teknologi ini sinergi dengan kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru dapat terjadi interaksi.

g. Lapisan Platform

Lapisan ini merupakan platform yang diusulkan untuk digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini direpresentasikan pada kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis untuk penyediaan layanan TI, yang merupakan kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan untuk mendukung beroperasinya layanan yang digunakan organisasi. Dalam mendefinisikan kebutuhan teknologi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap prinsip dan platform teknologi yang akan digunakan. Prinsip platform teknologi, yang memiliki kebutuhan pemenuhan enterprise-wide. Proses dan layanan dimungkinkan dapat diakses oleh seluruh pemakai, dimana saja, kapan saja, dan melalui media akses yang berbeda-beda. Platform yang saat ini telah ada di Pemerintah Kota Bogor, perangkat lunak sistem operasi dan server (windows, linux, Zimbra, PHP apache server), perangkat database (MySQL, Ms. Access, MariaDB). Dalam pemilihan platform ESB dapat mempertimbangkan beberapa produk ESB, misalnya IBM App Connect, Microsoft Azure Service Bus, Oracle Enterprise Service Bus, atau yang open source Apache Camel, Apache Synapse.

Pemilihan platform tersebut harus dipertimbangkan kesesuaiannya, sebagai dukungan terhadap fungsi yang diperlukan, jaminan keberlangsungannya untuk kebutuhan bisnis di masa mendatang, serta kepatuhan terhadap kebutuhan standar implementasi, dan dukungan terhadap internal dan vendor.

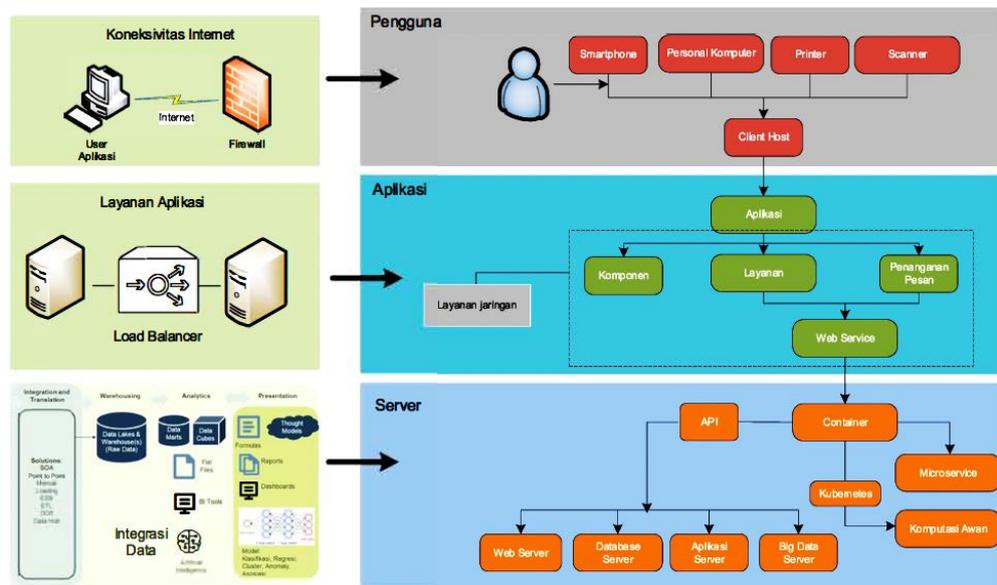
#### **D. Infrastruktur Target**

##### **a. Arsitektur Teknologi Layanan**

Arsitektur ini menjelaskan elemen utama infrastruktur teknologi layanan di Pemerintah Kota Bogor. Hal ini deskripsikan dalam tiga lapisan persegi panjang, yang menggambarkan elemen infrastruktur yang terdiri area pengguna, area layanan aplikasi, area server. Elemen ini digambarkan dalam diagram yang mengilustrasikan bagaimana infrastruktur fisik dipetakan ke kemampuan logis. Arsitektur infrastruktur teknologi layanan ini akan digunakan untuk merancang lingkungan target meliputi:

1. Area pengguna yang terdiri dari perangkat *peripheral* yang menjadi media akses pengguna. Dalam hal ini pengguna terhubung pada aplikasi dengan menggunakan jaringan internet, ditunjukkan dengan dengan panah ke area aplikasi.
2. Area layanan aplikasi terdiri dari komponen, layanan, penanganan pesan yang mengacu proses pada aplikasi. Pada area ini digunakan teknologi *web services*, untuk kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru. Pada prosesnya area ini membutuhkan *load balancer* untuk proses pendistribusian traffic layanan jaringan aplikasi ke beberapa server.
3. Area server meliputi terdiri dari *web server*, *database server*, aplikasi server, big data server. Pada area ini menjelaskan penerapan teknologi komputasi awan merupakan teknologi pengelolaan data dan informasi internet tanpa terlihatnya bentuk fisik infrastruktur dan platform yang digunakan. Kemudian, teknologi berbagi pakai layanan (*shared service*)

yang menggunakan arsitektur *microservice*, dimana *microservice* merupakan pendekatan pengembangan aplikasi dalam satuan/ unit terkecil, baik dapat berupa fungsi kompleks atau fungsi terkecil. Pada area ini dijelaskan juga terkait elemen lingkungan integrasi data yang ditampilkan terhubung ke beberapa penyimpanan untuk database relasional, OLAP database, dan big data database yang dijembatani oleh aplikasi dukungan dan *big data analytics*.



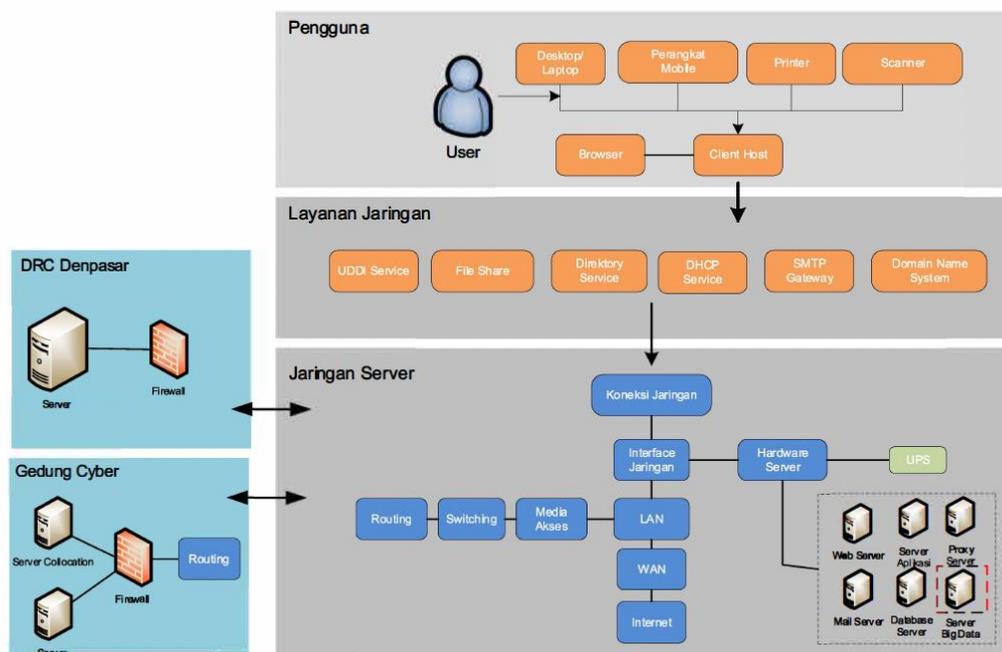
Gambar 5.4. Arsitektur Infrastruktur Teknologi Layanan Pemerintah Kota Bogor

#### b. Arsitektur Jaringan

Konseptual arsitektur jaringan Pemerintah Kota Bogor dibangun berdasarkan pada kebutuhan strategi distribusi data dan aplikasi serta hubungan sharing data diantara unit kerja organisasi dan institusi lain serta masyarakat dengan memperlihatkan lokasi bisnis. Kondisi dari arsitektur jaringan mencakup infrastruktur dasar diantaranya *Local Area Network (LAN)*, *Wide Area Network (WAN)*, dan Internet melingkupi konfigurasi jaringan antara Gedung Pemerintah Kota Bogor, Gedung Cyber dan Data Recovery Center (DRC) yang berada di Denpasar. Selain itu arsitektur infrastruktur jaringan juga mencakup teknologi dengan menerapkan konsep jaringan intra pemerintah dengan

proses pengelolaan berupa pusat kendali jaringan dengan mengadopsi virtualisasi server, fasilitas komputasi, virtualisasi jaringan, optimalisasi storage dengan teknologi VPN (Virtual Private Network).

Dalam perencanaan terkait penerapan data warehouse, *big data analytics*, dan AI diharapkan menambah perangkat server dan jalur komunikasi dengan mengacu pada penerapan konsep teknologi High Performance Computing Cluster (HPCC) dalam processing terhadap suatu data, seperti, Extract, Transform, dan Load. Konseptual arsitektur jaringan ini meliputi sistem penghubung layanan pemerintah, operasi komputasi, masukan, keluaran, perangkat penyimpanan dan fasilitas komunikasi. Konseptual arsitektur jaringan untuk fungsi bisnis utama di Pemerintah Kota Bogor.



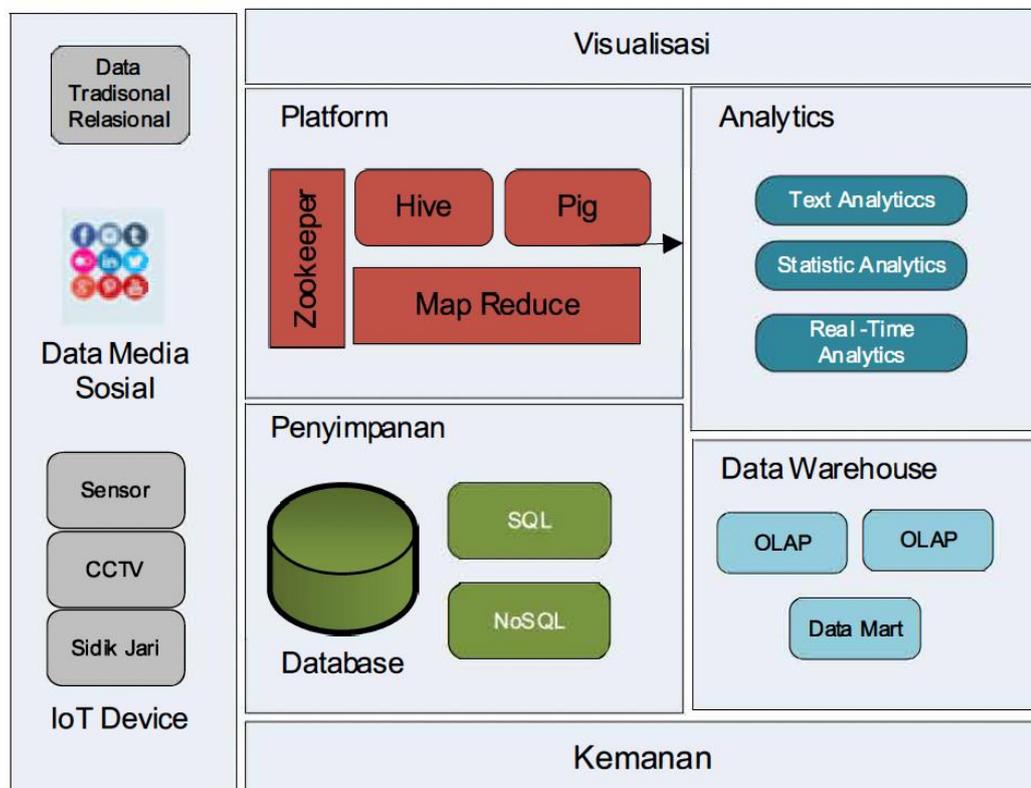
Gambar 5.5. Arsitektur Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Bogor

### c. Arsitektur Pusat Layanan Big Data

Arsitektur pusat layanan big data mengacu pada perencanaan arsitektur data yang terdiri dari five-tiers, dimana dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kecepatan dari proses *generate report* dengan dilandasi integrasi menggunakan SOA. Arsitektur pusat data dikelola lebih dari platform

data, basis data relasional tradisional (RDBMS), NoSQL, penyimpanan berbasis *cloud*. Kebutuhan untuk pelaporan, analitik, integrasi, kualitas, metadata, pengembangan, dan administrasi dipengaruhi ketersediaan infrastruktur sehingga diharapkan dapat memberikan optimalisasi terutama kecepatan, skala, interoperabilitas, dan ketersediaan.

Komponen infrastruktur pusat data bergantung pada perangkat keras yang dimiliki saat ini oleh Pemerintah Kota Bogor yaitu memori server, jaringan, penyimpanan, dan layanan *cloud*. Komponen yang diperlukan dari arsitektur yang harus menjadi bagian dari sistem pusat data menggunakan kerangka kerja *open source* atau berlisensi untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur dari berbagai komponen sistem tersebut. Arsitektur layanan big data terdiri dari lapisan-lapisan yang digambarkan pada Gambar 92 di bawah ini :



Gambar 5.6. Arsitektur layanan big data Pemerintah Kota Bogor

1. Lapisan Sumber Data

Lapisan ini mendefinisikan berbagai jenis sumber data baik data

internal maupun data dari eksternal Pemerintah Kota Bogor (data RDBMS, data media sosial, data IoT) yang perlu dianalisis. Kategori data ini didefinisikan sebagai big data dalam yang dicirikan oleh volume, ragam, kecepatan yang sangat besar. Aliran data pada arsitektur ini sangat kompleks sehingga perlu kemampuan untuk memvalidasi, membersihkan, mengubah, mengurangi, dan mengintegrasikan data.

## 2. Lapisan Keamanan

Lapisan ini dirancang untuk perlindungan data karena keamanan data ini menjadi perhatian utama. Mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE, data dan informasi merupakan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE dengan berlandaskan standar kriteria SNI ISO /IEC 27001. Data dari media sosial dan IoT merupakan penggunaan data yang sangat memerlukan proses perlindungan, baik untuk memenuhi persyaratan kepatuhan maupun untuk melindungi data individu.

## 3. Lapisan Penyimpanan

Lapisan ini dideskripsikan untuk menyimpan data dengan menggunakan penyimpanan serta pemrosesan data secara besar-besaran yang merupakan perubahan Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola data. Penyimpanan ini merupakan sistem penyimpanan file terdistribusi dengan jenis SQL dan NoSQL yang dirancang untuk menyimpan data yang sangat besar (terabyte atau petabyte) melalui perangkat dengan konsep cluster.

## 4. Lapisan *Data Warehouse*

Lapisan ini berisi catatan yang terdiri dari data dan informasi yang

berasal dari transaksi operasional maupun transaksi historis di Pemerintah Kota Bogor, yang ditempatkan dalam database yang dirancang untuk mengoptimalkan pengalihan data dan pelaporan (terutama OLAP). Dalam proses migrasi data pada lapisan ini diperlukan beberapa proses seperti ETL (Extract, Transform dan Load). Pada lapisan ini diterapkan konsep data mart untuk mendukung pembuatan laporan dan analisa data.

#### 5. Lapisan *Platform*

Lapisan ini menyediakan perangkat yang diperlukan untuk memproses dengan platform cluster Hadoop dengan konsep MapReduce serta bahasa query untuk mengakses database NoSQL dengan menggunakan sistem file penyimpanan HDFS terdistribusi (Pig, Hive, Spark, Sqoop, dll). Proses manipulasi dan pemrosesan data menggunakan kerangka pemrosesan paralel. Teknologi utama pada lapisan ini berkaitan dengan pergerakan data dalam lingkungan komputasi terdistribusi.

#### 6. Lapisan Visualisasi

Lapisannya ini berkaitan terkait analisis data untuk memahami lebih baik dan lebih cepat dalam memeriksa berbagai aspek data dalam mode visual yang memungkinkan pengguna dapat bekerja dengan komputasi bahasa yang mudah dipahami.

### **E. Analisis Gap Infrastruktur**

Proses pemetaan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan mengukur dan mengkategorikan kesenjangan kualitas yang mengacu pada ketersediaan infrastruktur saat ini sesuai metadata infrastruktur yang dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas infrastruktur. Analisis gap ini menjadi acuan untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pada proses ini dilakukan langkah perbandingan antara infrastruktur saat ini dan infrastruktur ke depan sesuai arsitektur target. Gambaran kondisi infrastruktur saat ini memiliki

tujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, sehingga diharapkan menjadi acuan untuk persiapan Pemerintah Kota Bogor dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur pada arsitektur target yang telah ditetapkan.

Analisis gap dibuat dalam bentuk tabel matriks, dengan ketentuan-ketentuan bahwa komponen infrastruktur saat ini (*as-is*) ditempatkan pada kolom pertama yang merupakan gambaran kondisi infrastruktur saat ini yang terdapat di Pemerintah Kota Bogor. Berikutnya komponen arsitektur kedepan (*to-be*) ditempatkan pada baris kedua yang menjelaskan kebutuhan komponen-komponen infrastruktur baru yang mendukung rencana target arsitektur yang telah ditetapkan.

Tabel 41 . Pemetaan Analisis Gap Infrastruktur Pemerintah Kota Bogor

No	Infrastruktur	As-is	To-be
1.	Komputasi Awan	Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan konsep komputasi awan secara maksimal dengan konsep <i>software as Service</i> (SaaS) yang dikelola oleh secara mandiri Pusdatin	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Infrastruktur komputasi awan diharapkan diimplementasikan secara <b>privat</b> dengan konsep pengembangan <b>virtualisasi server</b> yang dikelola internal oleh Pemerintah Kota Bogor</li> <li>● Implementasi komputasi awan ke depan mengadopsi pendekatan oportunistik untuk memenuhi <b>layanan aplikasi</b> baru dan yang sudah ada dengan mengacu pada kemudahan proses integrasi, kebutuhan anggaran, keamanan dan privasi.</li> <li>● Pada proses pengelolaan data yang ada di Pemerintah Kota Bogor disimpan secara <b>terpusat</b> pada satu server</li> </ul>

			berdasarkan layanan yang disediakan komputasi awan
2.	Perangkat Lunak Platform	Pemerintah Kota Bogor telah memiliki beberapa perangkat lunak platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses dengan menggunakan mayoritas menggunakan teknologi web, dan juga dapat diakses secara <i>mobile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlunya pengembangan perangkat lunak yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi Pemerintah Kota Bogor dengan mengacu pada kebutuhan pendukung pengaplikasiannya. Rencana pengembangan aplikasi yang direncanakan pada arsitektur aplikasi berlandaskan pada 6 kelompok aplikasi yang diintegrasikan dengan pendekatan arsitektur pengembangan aplikasi berbasis <b>microservices</b>.</li> <li>● Melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak yang <b>berlisensi</b> secara berkala.</li> </ul>
3	Perangkat Keras Server	Perangkat Keras Server di Pemerintah Kota Bogor telah menggunakan teknologi <i>clustering</i> yang diharapkan menghasilkan suatu sistem dengan tingkat reliabilitas, <i>availability</i> tinggi serta dikelola oleh internal untuk mendukung kinerja aplikasi yang berjalan di lingkungan institusi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlunya peningkatan perangkat <b>keras server</b> yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi Pemerintah Kota Bogor mengacu pada dukungan kebutuhan terutama perencanaan terkait implementasi arsitektur pusat data yang merencanakan pengembangan <b>big data Analytics</b>.</li> <li>● Penyediaan perangkat lunak <b>cluster Hadoop</b>, yang diperlukan untuk memproses pada sistem <i>big data</i> dengan konsep <b>MapReduce</b>, perangkat</li> </ul>

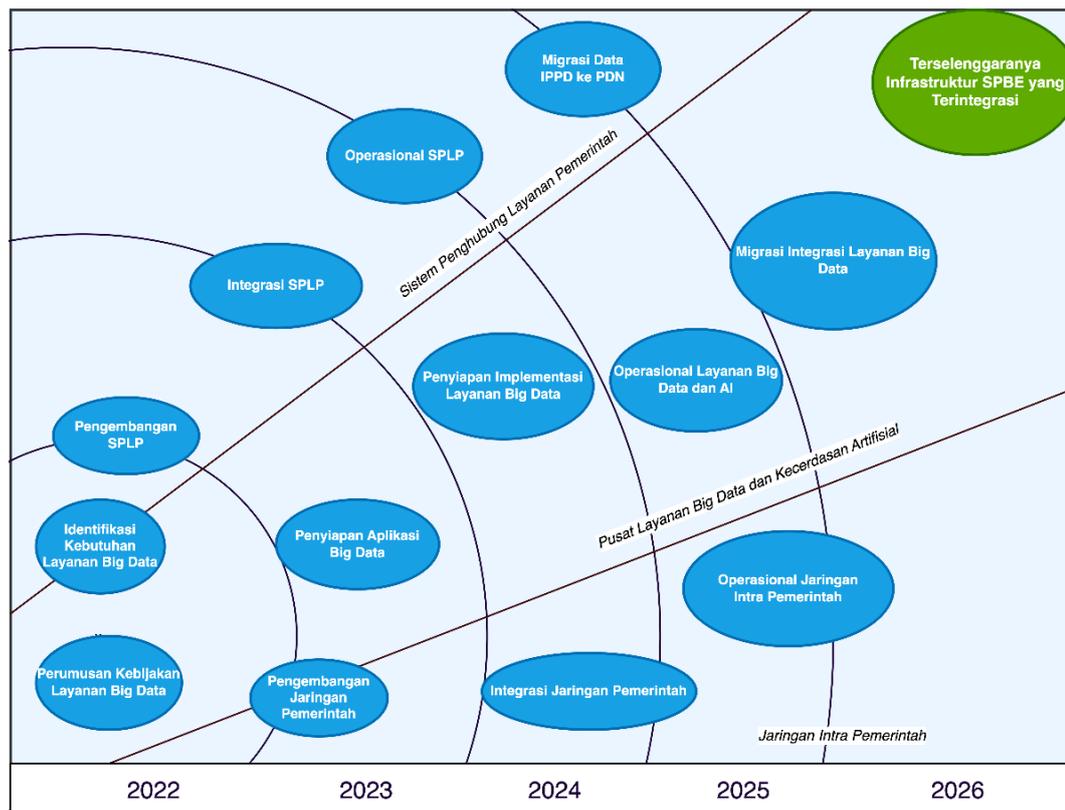
			lunak <b>transportasi data</b> seperti ( <i>Sqoop, Flume</i> ), <b>penyimpanan data</b> ( <i>Hbase</i> ), <b>komputasi</b> ( <i>Pig, Hive</i> )
4	Perangkat Keras Media Penyimpanan	Pemerintah Kota Bogor telah memiliki perangkat keras media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup besar untuk mendukung operasional yang dijalankan.	Kedepannya diperlukan peninjauan terkait kebutuhan perangkat keras <b>penyimpanan</b> yang cukup besar ( <b>terabyte atau petabyte</b> ) seiring dengan perencanaan terkait implementasi sistem <b>big data analytics, artificial intelligence</b> .
5	Perangkat Keras Jaringan	Pada perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di Pemerintah Kota Bogor dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll.	Peningkatan performansi dengan penambahan perangkat keras jaringan seiring dengan tujuan dan sasaran organisasi Pemerintah Kota Bogor yang mengacu pada perencana sistem <b>big data analytics, artificial intelligence</b> .
6	Perangkat Keras Keamanan	Pada perangkat keras keamanan telah menggunakan beberapa teknologi untuk berbagai fungsi ( <i>firewall, keamanan, VPN, pengendalian, jaringan, kontrol penghubung jaringan</i> ).	Melakukan revitalisasi sesuai dengan penerapan standar keamanan pada infrastruktur mengacu pada domain arsitektur keamanan. Pemerintah Kota Bogor telah mengacu pada standar keamanan yang mengacu pada <b>Sistem Penghubung Layanan</b> , yaitu adanya keamanan <b>interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service</b> , dan keamanan <b>migrasi data</b> . Jaringan Intra yaitu kontrol keamanan <b>gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel dan kontrol konfigurasi access point</b>

			<p><b>pada jaringan nirkabel.</b> Selanjutnya proses penerapan alat dan kebijakan keamanan <b>Container</b> untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam <b>Container</b> berjalan sebagaimana mestinya.</p>
7.	Perangkat Keras Periferal	<p>Pemerintah Kota Bogor telah memiliki perangkat keras <i>peripheral</i> dalam mendukung kinerja perangkat lainnya terutama dalam penyediaan <i>backup</i> sumber daya listrik dan perangkat <i>monitoring</i>. Selain itu telah memiliki perangkat <i>peripheral</i> pendukung yang dapat digunakan dalam interaksi terhadap layanan aplikasi yang digunakan.</p>	<p>Optimalisasi kebutuhan <b>perangkat <i>peripheral</i></b> sebagai kebutuhan pendukung dalam ketersediaan dalam interaksi terhadap <b>layanan aplikasi</b> yang digunakan oleh pengguna agar lebih maksimal.</p>
8	Perangkat Layanan Pemerintah	<p>Sistem penghubung layanan pemerintah di Pemerintah Kota Bogor dalam penerapannya telah berjalan dengan menggunakan jaringan konektivitas pada Pemerintah Kota Bogor (LAN, WAN dan internet sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung dengan dukungan <i>bandwidth</i> 300mb Internasional dan 1GB Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya penerapan <b><i>Single Sign On (SSO)</i></b> untuk memudahkan dalam <i>monitoring</i> terhadap akses yang diberikan.</li> <li>● Penggunaan teknologi <b><i>web services</i></b> untuk memudahkan proses pertukaran data.</li> <li>● Penerapan teknologi sistem penghubung layanan yang mengacu kerangka kerja standar pada <b><i>SOA (Service Oriented Architecture)</i></b> dengan menggunakan teknologi <b><i>Enterprise service BUS (ESB)</i></b>.</li> </ul>
9	Jaringan Intra Pemerintah	<p>Jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah berjalan dengan baik. Akses terhadap aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan manajemen jaringan <b>LAN, WAN, Internet</b></li> <li>● Peningkatan <b><i>bandwidth</i></b></li> </ul>

		<p>sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor saat ini sudah menerapkan <i>Virtual Private Network (VPN)</i>. Berbagai aplikasi dapat diakses secara daring yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait karena hampir keseluruhan layanan aplikasi berjalan berbasis web.</p>	<p><b>300Mb Internasional</b> dan <b><i>unlimited</i> untuk Nasional</b> dalam mendukung kelancaran terhadap akses layanan terutama dengan rencana implementasi <i>big data analytics</i>.</p>
10	Fasilitas Komputasi	<p>Fasilitas Komputasi di Pemerintah Kota Bogor belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi penerapan <i>big data analytics</i> dan <i>Artificial Intelligence (AI)</i></p>	<p>Peningkatan terkait kebutuhan fasilitas komputasi terutama dalam mendukung rencana implementasi <i>big data analytics</i> sehingga adanya pemrosesan data yang terpusat (<b>komputasi terpusat</b>) dimana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua penggunaan data (<b>colocation</b>)</p>

#### F. Peta Jalan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE merupakan kerangka kerja yang mendukung berjalannya suatu sistem atau organisasi. Secara konseptual infrastruktur terbagi pada sumber daya fisik dan virtual dan fasilitas komputasi yang mendukung pengolahan dan analisis data. Realisasi dari implementasi arsitektur infrastruktur direncanakan dengan peta jalan yang dapat mewakili kondisi kebutuhan infrastruktur SPBE di Pemerintah Kota Bogor pada jangka waktu tertentu. Peta jalan pengembangan infrastruktur di Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 5.7, dan rinciannya disajikan pada Tabel 5.3.



Gambar 5.7. Peta Jalan Arsitektur Infrastruktur Pemerintah Kota Bogor

Tabel 5.3. Rincian Peta Jalan Arsitektur Infrastruktur Pemerintah Kota Bogor

No	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembangunan Pusat Layanan Big Data dan Kecerdasan Artifisial					
	Identifikasi kebutuhan infrastruktur, teknologi untuk mendukung implementasi pusat layanan big data dan kecerdasan artifisial dalam mendukung satu data indonesia	✓				
	Perumusan kebijakan, dan kebutuhan lainnya yang relevan	✓				
	Penyiapan aplikasi dukungan pusat layanan big data dan kecerdasan artifisial		✓			

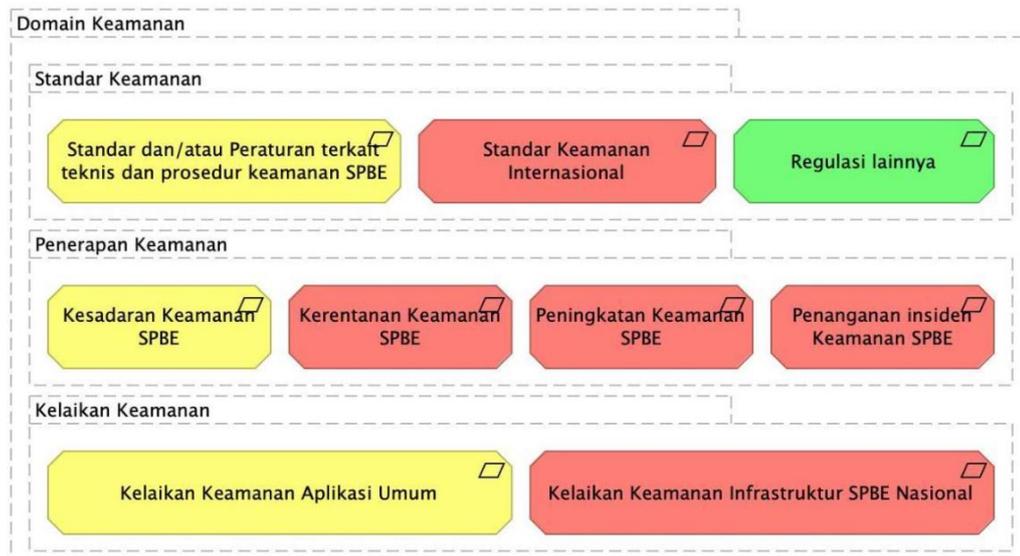
No	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
	Penyiapan implementasi pusat layanan big data dan kecerdasan artifisial dengan mengacu pada aturan satu data			✓		
	Operasional sistem pusat layanan big data dan kecerdasan artifisial				✓	
	Migrasi dan intergrasi pusat layanan big data dan kecerdasan artifisial				✓	✓
2	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					
	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
	Integrasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
	Operasional Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
	Migrasi data IPPD ke Pusat Data Nasional melalui SPLP	✓	✓	✓	✓	✓
3	Jaringan Intra Pemerintah					
	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
	Integrasi Jaringan Intra Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
	Operasional Jaringan Intra Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

## BAB VI ARSITEKTUR KEAMANAN

### A. Pemetaan Keamanan

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Kota Bogor terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur.

Hasil pemetaan metadata arsitektur keamanan terhadap kondisi eksisting dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan diuraikan secara detail pada Gambar 6.2.



Keterangan:

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : Belum didukung	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : Perlu Ditingkatkan	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : Sudah Didukung	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : Perlu Ditambahkan
---	--	---	--

Gambar 6.1 Kondisi Eksisting Arsitektur Keamanan SPBE Kota Bogor

Gambar 6.1 merupakan kondisi tingkat 1 (Domain Keamanan) di lingkungan Kota Bogor. Warna kuning menunjukkan dokumen serta kegiatan sudah ada namun

belum sepenuhnya diterapkan. Warna merah sama sekali belum ada dokumen atau belum ada kegiatan tentang domain arsitektur keamanan. Uraian detail dapat dilihat pada Gambar 6.2 dan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.



**Keterangan:**

- : Belum didukung
- : Perlu Ditambahkan
- : Perlu Ditingkatkan
- : Sudah Didukung

Gambar 6.2 Pemetaan Domain Keamanan SPBE di Lingkungan Kota Bogor

1. Standar dan atau Kebijakan Keamanan

Saat ini terdapat lima kebijakan keamanan yang didapatkan, dua standar dan acuan utama diantaranya Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dan dari Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Daftar kebijakan

atau regulasi keamanan yang ada di lingkungan Kota Bogor seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Kebijakan/ Regulasi Keamanan

No	Kebijakan
1	PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2021 SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
2	PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR
3	PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
4	PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 148 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Tabel 6.2 Standar Keamanan

No	Standar Keamanan
1	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE
2	Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit SPBE

## 2. Penerapan Keamanan

Terdapat dua kegiatan penerapan keamanan di lingkungan Kota Bogor yaitu pada tanggal 19 - 20 November 2020 dan 23 Agustus - 7 September 2021. Kegiatan pertama kegiatan edukasi kesadaran keamanan, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional menyelenggarakan Sosialisasi PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan

Evaluasi SPBE dan kegiatan dilakukan secara virtual. Kegiatan kedua interviu evaluasi SPBE, implementasi SPBE di 507 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dievaluasi oleh tim penilai eksternal yang beranggotakan 143 akademisi dari 25 perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Keputusan Menteri PANRB No. 962/2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Tahapan penilaian interviu diselenggarakan secara daring. Daftar kegiatan penerapan keamanan dapat dilihat pada Tabel, dan Gambar 6.3 menunjukkan indikator terkait audit infrastruktur dan aplikasi SPBE.

No	Program Kerja	Waktu	Jenis	Keterangan
1	Sosialisasi PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	19 – 20 November 2020	Edukasi	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional menyelenggarakan Sosialisasi PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara virtual.
2	Inteviu Evaluasi SPBE 2021	23 Agustus -7 September 2021	Penilaian Keamanan	Implementasi SPBE di 507 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dievaluasi oleh tim penilai eksternal yang beranggotakan 143 akademisi dari 25 perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 59 /2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Keputusan Menteri PANRB No. 962/2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Tahapan penilaian interviu diselenggarakan secara daring



Gambar 6.3. Indikator Audit SPBE

### 3. Uji Kelaikan Keamanan

Saat ini dokumen yang ditemukan untuk kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE ada pada dokumen rencana induk teknologi informasi Kota Bogor dan laporan evaluasi pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh BSSN. Dokumen ini menyatakan bahwa audit dan keamanan informasi telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkait keamanan aplikasi dan keamanan jaringan, seperti dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Audit dan Keamanan Aplikasi

Progran	2018	2019	2020	2021
Audit dan Keamanan Aplikasi	√	√	√	√

### 4. Pemetaan Area Keamanan Data dan Aplikasi

Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dilakukan pemetaan area keamanan seperti pada Gambar . Seperti pada proses data dan informasi yang belum jelas penerapan keamanan atau enkripsi datanya, apakah penerapannya hanya dalam database atau setiap transaksi data sudah terenkripsi menggunakan pendekatan tertentu.

Tingkat kedua pada domain keamanan adalah area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur. Adapun data keamanan yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel untuk arsitektur data dan informasi, serta arsitektur aplikasi dan layanan.

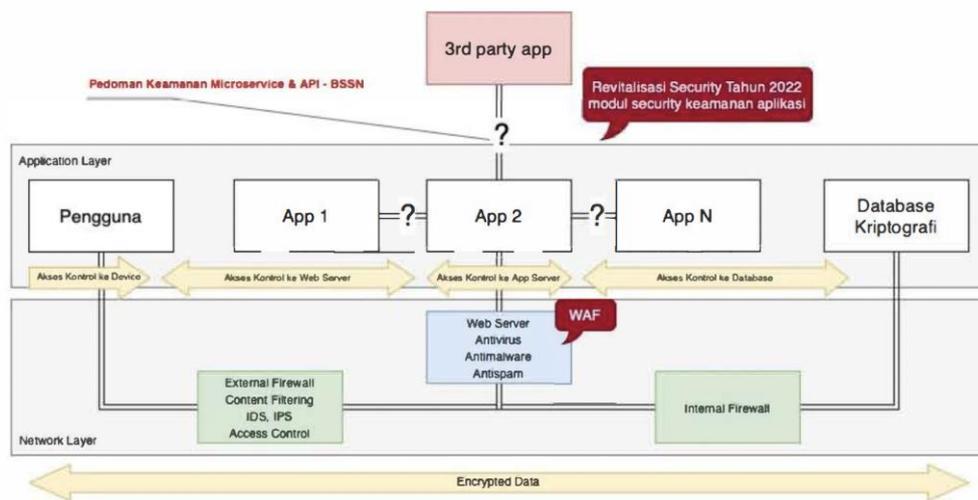
Tabel 6.4. Area Keamanan Data dan Informasi serta Aplikasi SPBE

No	Nama	Keterangan
1	Penyusunan Tata Kelola Database	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2	Identifikasi dan otentikasi	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3	Kriptografi	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4	Signature Management	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
5	Audit Trail Capture and Analysis	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
6	Certification and Accreditation	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
7	Federal Information Security Modernization Act (FISMA) Management and Reporting	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Tabel 6.5. Area Keamanan Infrastruktur

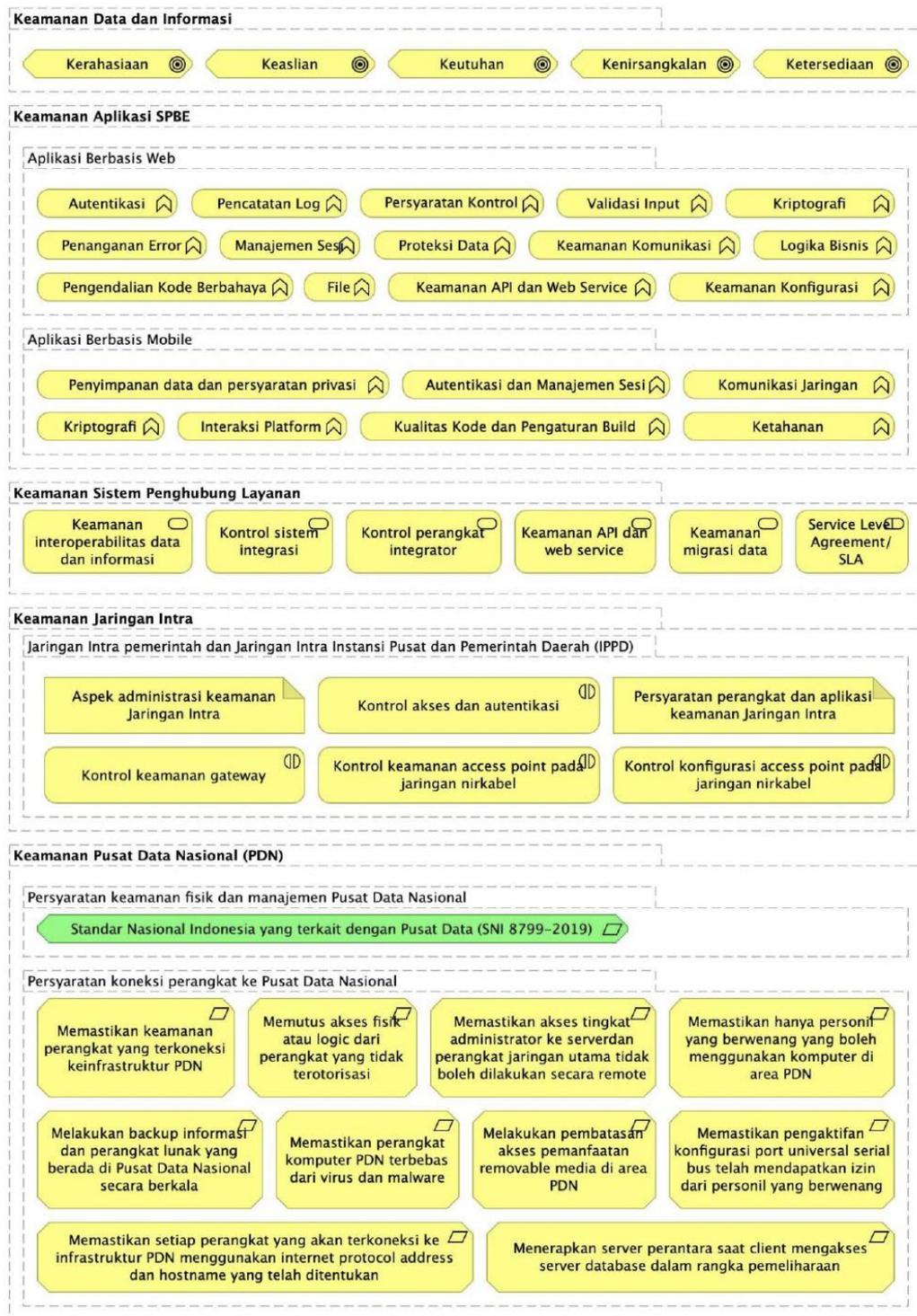
No	Nama	Keterangan
1	Firewall	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2	Proxy	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3	Content filtering	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4	Intrusion detection and prevention (IDS & JPS)	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

5	Identity and access management	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
6	Public key infrastructure	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
7	Antivirus & anti malware, antispam	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
8	Patch management	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
9	SSL	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
10	Keamanan Fisik dan Lingkungan	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
11	Pencatu Daya	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
12	Pendingin Ruangan	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
13	Pengkabelan	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
14	Perlindungan Kebakaran	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
15	Pengendali Data Center	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
16	Keamanan operasional dan komunikasi	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
17	Akses kontrol	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
18	Pelaporan dan pengelolaan insiden keamanan informasi	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
19	Business Continuity Framework	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
20	Kepatuhan lisensi dan perangkat lunak	Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

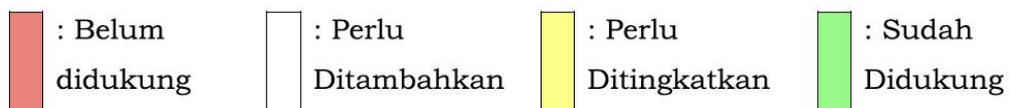


Gambar 6.4. Pemetaan Area Keamanan Data dan Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur

Gambar 6.4 merupakan hasil pemetaan kondisi eksisting di lingkungan Kota Bogor terhadap area keamanan. Tingkat 2 area keamanan selanjutnya merujuk ke Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dilihat pada Gambar 6.5.



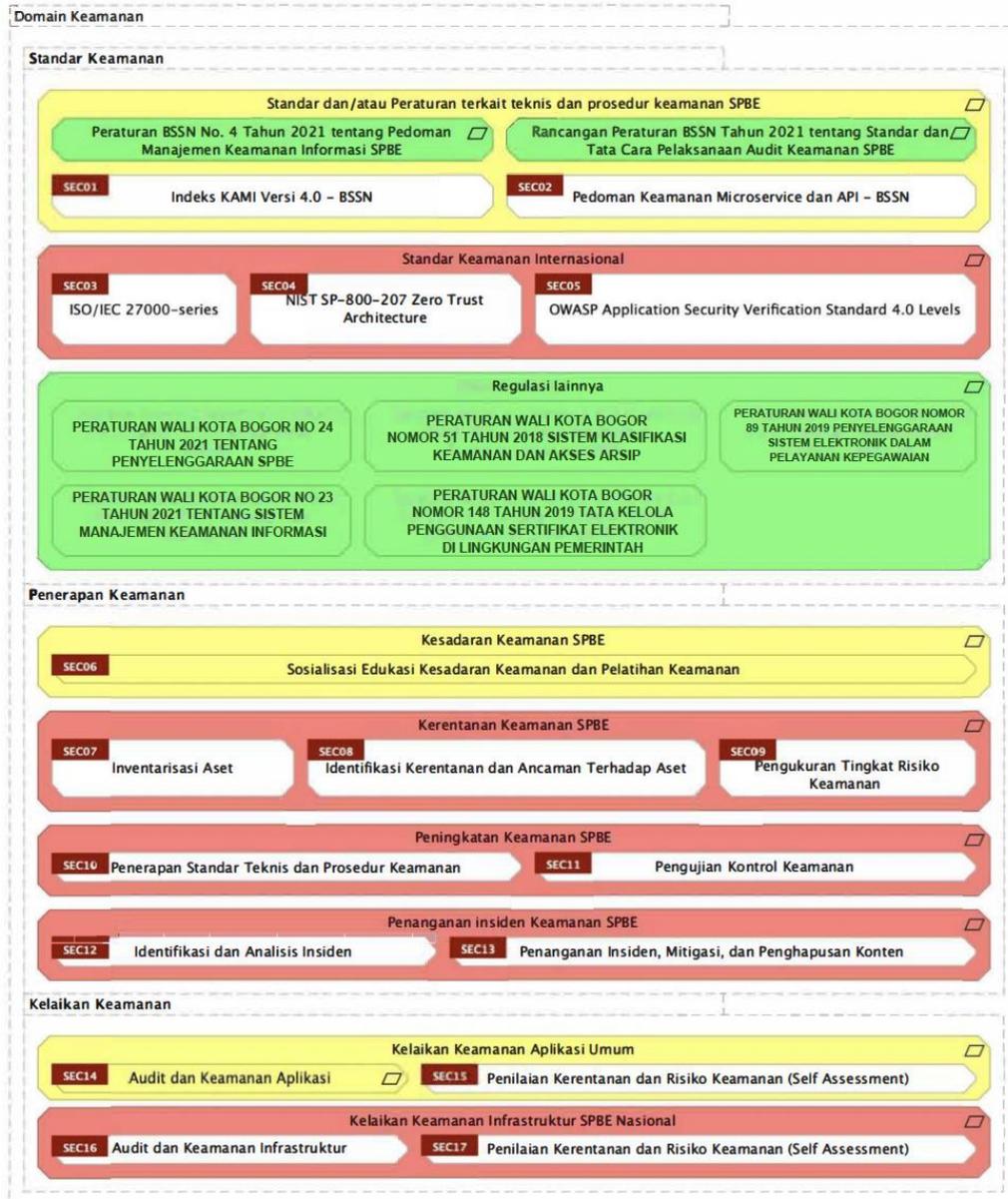
Keterangan:



Gambar 6.5. Pemetaan Area Keamanan berdasarkan Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

## B. Analisis Kesenjangan

### B.1 Domain Keamanan (Tingkat 1)



Keterangan:

: Belum didukung  
 : Perlu Ditambahkan  
 : Perlu Ditingkatkan  
 : Sudah Didukung

Gambar 6.7. Gap Analisis Terdapat 17 Kesenjangan pada Domain Keamanan Tingkat 1

Warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan domain keamanan sebagai struktur tingkat 1 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Kota Bogor terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa masih terdapat 17 kesenjangan, diantaranya adalah:

#### 1. Standar Keamanan

Standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui dan dipetakan sebagai acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

Sementara untuk standar keamanan internasional yang digunakan sebagai pendukung peningkatan penerapan keamanan SPBE belum ditemukan. Regulasi lainnya dari beberapa peraturan pemerintah terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui sejauh mana penerapannya di lingkungan Kota Bogor.

#### 2. Penerapan Keamanan

Informasi kegiatan penerapan keamanan hanya ditemukan dua kegiatan pada sosialisasi edukasi kesadaran keamanan dan kerentanan keamanan SPBE. Belum ditemukan bentuk kegiatan lain untuk meningkatkan keamanan serta penanganan insiden keamanan SPBE.

#### 3. Kelaikan Keamanan

##### a. Kelaikan Keamanan Aplikasi

Belum ditemukan penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional sehingga belum dapat dipastikan kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data dan layanan yang ada.

b. Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

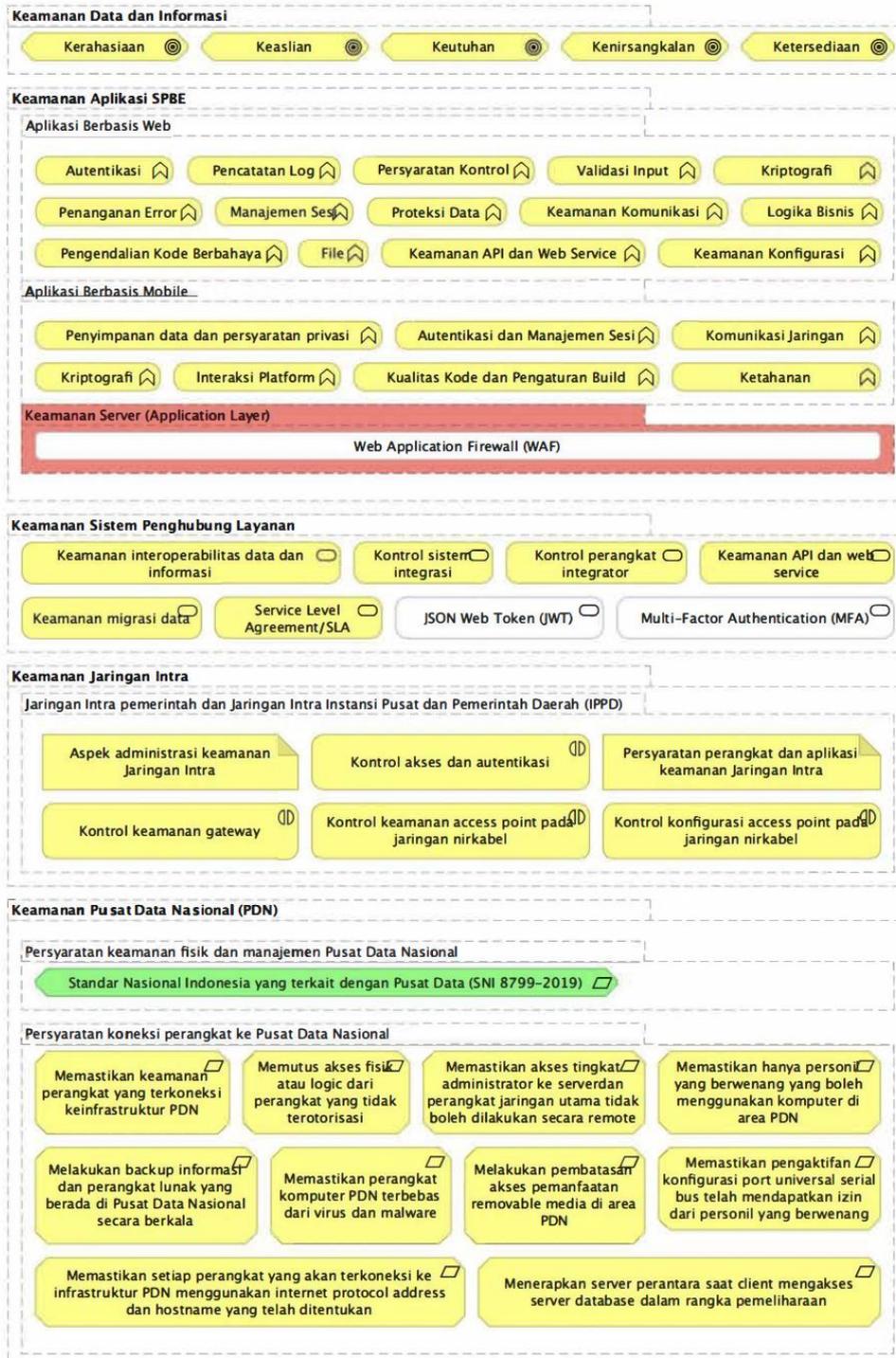
Begitupun dengan kelaikan keamanan infrastruktur tidak dilakukan penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD sehingga belum dapat dipastikan kelaikan keamanan infrastuktur SPBE Nasional.

Gambar 6.8 merupakan gambaran gap analisis area keamanan pada tingkat 2, warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan area keamanan sebagai struktur tingkat 2 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di Kota Bogor.

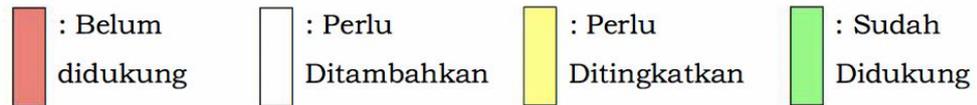
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka daftar pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas kedepan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Kota Bogor adalah:

1. Perlu adanya pemetaan standar keamanan pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)
2. Rujukan standar Internasional sebaiknya tetap harus ada walaupun sudah dirujuk pada standar keamanan atau peraturan yang ada
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang edukasi keamanan sebagai bentuk penerapan keamanan perlu dilakukan disetiap level baik di tingkat nasional maupun IPPD

## B.2 Area Keamanan (Tingkat 2)



Keterangan:



Gambar 6.8. Gap Analisis Area Keamanan Tingkat 2

4. Uji mandiri dan penilaian kerentanan perlu dilakukan di setiap IPPD dan diverifikasi tingkat nasional sehingga kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data dan layanan dapat dipastikan
5. Begitu juga untuk kelaikan keamanan infrastruktur SPBE perlu adanya self-assessment untuk menilai kerentanan dan dipastikan kelaikan keamanan infrastruktur SPBE Nasional.

### C. Kondisi yang diinginkan Arsitektur Keamanan SPBE

Kondisi yang diinginkan adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan tentang kondisi keamanan SPBE. Kondisi keamanan yang diinginkan di Kota Bogor didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa penjaminan keamanan dan operasional manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan budaya keamanan informasi. Targetnya adalah tercapainya penjaminan keamanan aplikasi SPBE, infrastruktur serta domain pendukung terkait baik di level nasional, dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional dapat tercapai dengan acuan manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi serta budaya keamanan informasi.

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam melakukan layanan organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan peta kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol

keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:

- a. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya,
- b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi,
- c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan,
- d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanis meverifikasi dan validasi, dan
- e. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK, melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE, maka Satuan Kerja di lingkungan Kota Bogor berkewajiban melaporkan setiap permasalahan keamanan SPBE ke Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK untuk diselesaikan. Jika ada permasalahan terkait keamanan maka penyelesaian permasalahan Keamanan

SPBE berdasarkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1. Domain Keamanan**

### **a. Standar Keamanan**

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi:

- 1) standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan; Beberapa diantaranya adalah Peraturan BSSN no. 4 tahun 2021 dan Indeks KAMI.
- 2) standar internasional terkait keamanan informasi; Diantaranya adalah ISO 27001.
- 3) regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap instansi harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

### **b. Penerapan Keamanan**

Edukasi kesadaran keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

Penilaian kerentanan keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE dengan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.

Peningkatan keamanan SPBE harus dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan.

Peningkatan keamanan wajib dilaksanakan melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.

Penanganan insiden keamanan yang wajib dilaksanakan adalah:

- 1) identifikasi sumber serangan;
- 2) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- 3) penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- 4) dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- 5) mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE;
- 6) penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/ atau terkait malware.

c. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi penggerak aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan

untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber/BSSN.

## **2. Area Keamanan**

- a. Data dan informasi, yaitu harus terpenuhinya aspek: kerahasiaan; keaslian; keutuhan; kenirsangkalan; ketersediaan untuk data dan informasi.
- b. Aplikasi SPBE, yaitu diterapkannya keamanan pada:
  - 1) Aplikasi berbasis web, yaitu dalam Aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan konfigurasi.
  - 2) Aplikasi berbasis mobile, yaitu pada aplikasi SPBE berbasis mobile harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build dan ketahanan.
  - 3) Keamanan Server (application layer), yaitu berfungsi sebagai keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari client benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, trojan atau ancaman lainnya.
- c. Sistem Penghubung Layanan, yaitu adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service, dan keamanan migrasi data.

- d. Jaringan Intra, yaitu terpenuhinya aspek-aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.
- e. Pusat Data Nasional,  
Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/ atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan pada Perpres Nomor 95 tahun 2018, maka Pusat Data nasional harus:
1. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
  2. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

Secara detail Pusat Data Nasional harus memenuhi:

- 1) Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sesuai Standar Nasional Indonesia terkait dengan Pusat Data.
- 2) persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional dengan mencakup prosedur:
  - memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;
  - memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;

- memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;
- memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
- melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
- memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;
- melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional;
- memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
- memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan;
- menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan.

Implementasi domain arsitektur keamanan SPBE akan mempengaruhi pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, utamanya terhadap pencegahan insiden keamanan. Di dalam Container terdapat Container Security yang merupakan proses penerapan alat dan kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam Container berjalan sebagaimana mestinya.



Tabel 6.6 Analisis Kesenjangan Keamanan Kota Bogor

No	Kondisi saat ini	Kondisi yang di inginkan	Penilaian Kesenjangan	Rencana Tindakan
1	Standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan belum lengkap	Penyesuaian dan penambahan standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan	Standar dan framework tentang keamanan perlu disusun pada level sector pusat maupun IPPD	Penyusunan framework dan standar keamanan di sektor pemerintah pada Instansi Pusat maupun pemerintah daerah
2	Pedoman identifikasi kerentanan dan penilaian risiko belum lengkap	Penyesuaian dan penambahan pedoman terkait identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan di instansi pusat maupun pemerintah daerah	Pedoman identifikasi kerentanan dan penilaian risiko perlu disusun pada sektor pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	Penyusunan dan Penerapan Pedoman identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Instansi Pusat dan pemerintah daerah
3	Pedoman instrument uji kelaikan secara mandiri pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Penyesuaian pedoman penyusunan instrumen uji kelaikan untuk instansi pusat dan pemerintah daerah	Pedoman instrumen uji kelaikan perlu disusun untuk sektor instansi pusat dan pemerintah daerah	Penyusunan dan penerapan instrumen uji kelaikan secara mandiri untuk instansi pusat dan pemerintah daerah
4	Layanan honeypot sudah tersedia	Layanan honeynet melalui pemasangan honeypot pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Layanan honeypot belum terpasang secara menyeluruh	Pemasangan honeypot pada instansi pusat dan pemerintah daerah
5	DMZ belum dikelola dengan baik	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional	Perlu pengelolaan DMZ pada infrastruktur nasional	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional

No	Kondisi saat ini	Kondisi yang di inginkan	Penilaian Kesenjangan	Rencana Tindakan
6	Belum terimplementasinya layanan security as a services (SecaaS) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Layanan SecaaS dapat diimplementasikan pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Perlu dilakukan penerapan SecaaS pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Penyediaan layanan security as a services (SecaaS) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE
7	Uji kelaikan dan hasil audit aplikasi belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan aplikasi umum wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan penerapan SecaaS pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Uji kelaikan keamanan aplikasi umum
8	Uji kelaikan dan hasil audit infrastruktur belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan infrastruktur wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikan aplikasi minimal self-assessment	Uji kelaikan keamanan infrastruktur
9	Uji kelaikan dan hasil audit system penghubung layanan belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan system penghubung layanan wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikan infrastruktur minimal self-assessment	Uji kelaikan keamanan system penghubung layanan
10	Uji kelaikan dan hasil audit Jaringan intra pemerintah belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan Jaringan intra pemerintah wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikan Jaringan intra pemerintah secara berkala	Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah
11	Belum dilakukan pentest pada aplikasi-aplikasi SPBE	Dilakukan pentest pada setiap aplikasi dan system yang digunakan	Perlu dilakukan pentest pada seluruh aplikasi yang digunakan	Pengujian aplikasi/ system dengan pentester atau audit khusus keamanan

No	Kondisi saat ini	Kondisi yang di inginkan	Penilaian Kesenjangan	Rencana Tindakan
12	Belum ada bagian khusus penanganan insiden siber	Harus adanya kelompok yang menangani insiden keamanan	Perlu dibentuk kelompok khusus penanganan insiden keamanan seperti CSIRT	Pembentukan CSIRT pada instansi pusat dan pemerintah daerah
13	Belum adanya pengamanan khusus pada lapisan aplikasi / server	Adanya pengamanan khusus pada application layer/ Web Application Firewall	Perlu diterapkan Web Application Firewall berdasarkan standar tertentu	Penerapan Web Application Firewall dengan standar OWASP
14	Sosialisasi keamanan SPBE masih minim	Sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi di IPPD	Pelatihan dan sosialisasi kesadaran keamanan informasi di IPPD
15	Belum adanya penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital	Setiap system mampu menggunakan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital	Perlu adanya penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital pada setiap aplikasi yang digunakan SPBE	Penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital pada setiap aplikasi di IPPD

#### D. Peta Jalan Arsitektur Keamanan

Realisasi dari kondisi yang diinginkan serta daftar pekerjaan solusi direncanakan melalui tahapan peta jalan yang dapat memandu Kota Bogor menjadi lebih stabil dan matang dalam hal ini pada domain arsitektur keamanan.



Gambar 101. Roadmap Arsitektur Keamanan

Sesuai Peta Rencana SPBE, program terkait tata keamanan SPBE pada Peta Jalan ini terdiri atas:

1. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2. Audit dan Uji Kelaikan
3. Penanganan Insiden
4. Kesadaran Keamanan Informasi
5. Optimalisasi Keamanan Siber dan Digital

Untuk mewujudkan program tersebut, terdapat butir program kerja lebih rinci yang telah dipetakan sesuai tahun target realisasi dan penanggung jawab yang pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Peta Jalan Asitektur Keamanan Kota Bogor

No	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Sistem Manajemen Keamanan Informasi</b>					
	Penyusunan framework dan standar keamanan di sektor pemerintah pada Instansi Pusat maupun pemerintah daerah	√				
	Penyusunan dan Penerapan Pedoman Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Instansi Pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Penyusunan dan penerapan instrumen uji kelaikan secara mandiri untuk instansi pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Pemasangan honeypot pada instansi pusat dan pemerintah daerah		√	√	√	√
	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional		√	√	√	√
	Penyediaan layanan security as a services (SecaaS) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE		√	√	√	√
2	<b>Audit dan Uji Kelaikan</b>					
	Uji kelaikan keamanan aplikasi umum	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan infrastruktur	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan system penghubung layanan	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah	√	√	√	√	√
	Pengujian aplikasi/ system dengan pentester atau audit khusus keamanan	√	√	√	√	√
3	<b>Penanganan Insiden</b>					
	Pembentukan CSIRT pada instansi pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Penerapan Web Application Firewall dengan standar OWASP		√	√	√	√
4	<b>Security Awareness / Penerapan Budaya Keamanan Informasi</b>					
	Pelatihan dan sosialisasi kesadaran keamanan informasi di IPPD	√	√	√	√	√
5	<b>Optimasi Keamanan Digital</b>					
	Penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital pada setiap aplikasi di IPPD	√	√	√	√	√



# **LAPORAN PENYUSUNAN ENTERPRISE ARSITEKTUR SPBE & PETA RENCANA KOTA BOGOR**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BOGOR**

**2022**